

Sunda

Sejarah, Budaya, dan Politik

Reiza D. Dienaputra

Sunda

Sejarah, Budaya, dan Politik

Reiza Dienaputra

SUNDA

Sejarah, Budaya, dan Politik

Reiza D. Dienaputra

Hak Cipta©Reiza D. Dienaputra

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia

oleh Sastra Unpad Press

Jl. Raya Bandung-Sumedang KM.21, JATINANGOR 45363 JAWA BARAT

Tlp/Faks: (022) 779 6482

Penyunting: Dani R. Hasanudin

Desain Sampul: Andry Wuri Dian Bramagita

Tata letak: Andry Wuri Dian Bramagita

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Cetakan pertama, Juli 2011

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Reiza D. Dienaputra

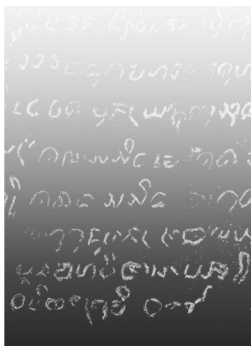
SUNDA: Sejarah, Budaya, dan Politik

Sastra Unpad Press, 2011

200 hlm; 14 × 21 cm.

ISBN : ...

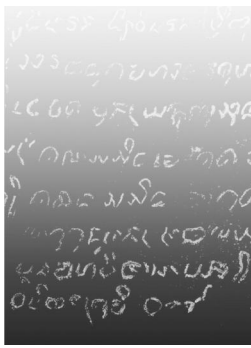
I. Judul II. Reiza D. Dienaputra



Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Prakata	ix
Bagian Satu: Sunda dan Sejarah	11
- Mengenal dan Memaknai Sejarah Sunda	13
- Mengenal Jawa Barat: Suatu Kilas Balik Sejarah	35
- Bandung 1906 - 1970: Studi Tentang Perkembangan Ekonomi Kota	49
- Makna Strategis Peristiwa Bojongsokosan 9 Desember 1945	67
- Revitalisasi Nilai-Nilai Kejuangan Peristiwa Bandung Lautan Api	81
- Memaknai Hijrah Siliwangi	95
Bagian Dua: Sunda dan Budaya	103
- Kebudayaan Sunda: Antara Mitos dan Realitas	105
- Bahasa Sunda dalam Arus Globalisasi: Tinjauan Historis Prospektif	115
- Profil Sejarah Kawasan Ekosistem Halimun: Sebuah Pengantar Diskusi	123
- Kebudayaan Daerah di Jawa Barat: Suatu Tinjauan Historis Prospektif	133

Bagian Tiga: Sunda dan Politik	151
- Pergumulan Kekuasaan Orang Sunda dalam Perspektif Demokrasi	153
- Tatar Sunda dalam Panggung Politik: Sebuah Ikhtisar Sejarah	163
- Transformasi Sistem Politik di Cianjur: Dari Tradisional ke Modern	173
Epilog	197



Kata Pengantar

Sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang sangat menarik. Dari sejarah, kita dapat mempelajari apa saja yang terjadi pada masa lampau sehingga kita dapat memperoleh pelajaran (*ibroh*), baik hal-hal yang bersifat buruk maupun yang bersifat baik. Orang bijak mengatakan, “kita harus belajar dari sejarah”, sedangkan George Santayana, filsuf besar dari Spanyol mengatakan, “Mereka yang tidak mengenal masa lalunya, dikutuk untuk mengulangnya”. Kalau Nicky Astria di dalam lagunya, *Panggung Sandiwara*, mengatakan bahwa “Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya selalu berulang ...”, dari sudut kesejarahan, makna penting yang diperoleh adalah bahwa berbagai pengulangan cerita tersebut karena hakekat atau ciri dasar manusia tidak pernah berubah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kejatuhan suatu rezim di suatu negara, bisa jadi merupakan pengulangan dari perilaku yang sama, yang dilakukan oleh raja-raja berabad-abad yang lampau. Artinya, walaupun setiap peristiwa sejarah selalu bersifat “unik”, namun latar belakang peristiwanya sendiri bisa jadi mengandung prinsip-prinsip dasar yang sama sehingga kalau peristiwa itu tidak ingin terjadi lagi (peristiwa jelek) atau ingin terjadi (peristiwa bagus), kita bisa melakukan upaya-upaya pengendalian untuk yang jelek dan upaya-upaya antisipasi dan pencapaian untuk hal yang bagus. Kalau hal tersebut bisa dilakukan, maka sinyalemen George Wilhelm Friedrich Hegel, seorang filsuf dari Jerman, yang mengemukakan, “Inilah yang diajarkan oleh sejarah dan pengalaman: bahwa manusia dan pemerintahan tidak pernah belajar apapun dari sejarah atau prinsip-prinsip yang didapat darinya”, atau menurut Winston Churchill negarawan dari Inggris Raya, “satu-satunya hal yang kita pelajari dari sejarah adalah bahwa kita tidak benar-benar belajar darinya”, tidak perlu terjadi. Dalam kaitan itu pula, menjadi sebuah ironi bila mengingat bahwa meskipun Presiden Soekarno di dalam pidato kenegaraannya yang terakhir pada tanggal 17 Agustus 1966, berkaitan dengan peringatan hari ulangtahun kemerdekaan Indonesia, mengatakan, “Djangan sekali-kali meninggalkan sedjarah! Never Leave History! Djangan Meninggalkan Sedjarahmu jang sudah!”, bisa jadi kejatuhannyapun sebenarnya karena Presiden Soekarno juga tidak “belajar” dari sejarah.

Walaupun sejarah begitu penting, namun apa yang saya rasakan ketika duduk di bangku sekolah dasar dan sekolah menengah, sejarah seringkali hanya terbatas pada menghafalan tahun demi tahun dan tokoh-tokoh di balik peristiwa pada tahun-tahun sejarah tersebut berlangsung. *Setting* sosial, ekonomi, politik yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi seringkali kurang dikemukakan.

Sebagai seseorang yang tidak berkecimpung di dalam dunia sejarah, suatu saat saya terhenyak dengan obrolan anak sekolah dasar (kalau dilihat badannya mungkin murid kelas lima atau kelas enam) di dalam bis di Paris, tentang ulangan sejarah di kelasnya hari itu. Menurut sang anak, pertanyaan ulangan tersebut diantaranya, “faktor-faktor sosial, ekonomi, politik apa yang menjadi pemicu meledaknya Revolusi Perancis?”. Kalaulah metode sejarah pada dasarnya menggunakan enam pertanyaan (5 W dan 1 H) yaitu *what* (apa), *when* (kapan), *where* (dimana), *who* (siapa), *why* (mengapa), dan *how* (bagaimana), pertanyaan tentang *why* dan *how* seringkali kurang tersentuh. Karena *why* dan *how* tersebut kurang tersentuh, kita seringkali tidak mendapat “pelajaran” apapun dari peristiwa sejarah tersebut. Belum lagi kalau sejarah tersebut hanya bersifat parsial. Kalaulah setelah 13 tahun era reformasi dilalui, kemudian dilakukan survei kepada generasi muda yang tidak pernah mengalami masa orde baru, dan mayoritas jawabannya Orde Baru lebih baik dari Orde Reformasi, bisa jadi ada yang “kurang lengkap” di dalam menyampaikan fakta sejarah kepada generasi muda tersebut. Sebaliknya dari itu, pada masa Orde Baru, kita berhadapan dengan “pembelengguan” sejarah. Winston Churchill, yang juga mantan jurnalis dan seorang penulis *memoar* yang berpengaruh, pernah pula berkata “Sejarah akan baik padaku, karena aku akan menulisnya.” Pengertiannya, sejarah seringkali ditulis oleh sang “pemenang” dan para pemenang, seringkali lebih mampu untuk meninggalkan jejak sejarah dan juga melakukan pemelesetan fakta sejarah. Dalam kasus Orba lebih baik daripada Orde Reformasi, tanpa harus menempatkan diri sebagai “pemenang”, apalagi sekarang ini merupakan era keterbukaan informasi, maka segala fakta sejarah bisa disampaikan secara lebih terbuka.

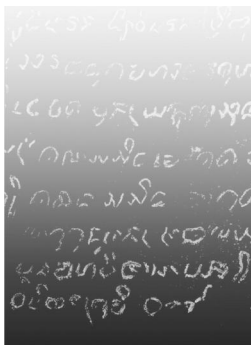
Masalah lain, catatan sejarah juga seringkali bersifat umum. Sehingga *background* dari berbagai peristiwa sejarah, sepertinya lolos dari perhatian. Untuk menutupi hal tersebut, alhamdulillah sekarang ini banyak “memoir”, biografi atau otobiografi yang ditulis. Berbagai peristiwa, dapat diketahui latarnya secara detail. Menarik untuk dikaji, bahwa diantara berbagai peristiwa, yang notabene pelaku sejarahnya masih hidup, ternyata tidak sinkron. Contohnya, kasus antara BJ Habibie dengan Prabowo pada saat awal reformasi. Pada tataran ini, istilah bahwa sejarah sangat tergantung (baca: kepentingan) kepada penulisnya bisa terjadi.

Dengan kerangka berfikir (pribadi), seperti di atas itulah, tadinya saya ingin “menimang” buku “Sunda: Sejarah, Budaya dan Politik” ini. Namun karena Sunda sendiri, memiliki cakupan yang sangat luas, baik dari rentang wilayah maupun rentang waktu, tentu saja akan sangat sulit untuk bisa ditulis secara komprehensif dalam halaman yang terbatas. Apalagi kalau ingin detail. Karena itu, saya menyadari untuk tidak bisa berharap mendapatkan fakta sejarah detail seperti halnya yang ditulis oleh Benda dengan bukunya “Bulan Sabit dan Matahari Terbit”. Melalui buku itu Benda menceritakan bahwa bulan sabit (baca: umat Islam), tidak akan bisa menjadi satelit dari matahari terbit (Jepang). Saya pun tidak bisa berharap seperti sedang “menikmati” perdebatan para anggota PPKI di dalam tesis Endang Saefudin Anshari (walaupun bukan tesis sejarah) yang berjudul “dari Piagam Jakarta ke Pembukaan Undang-undang Dasar 45”. Namun demikian, buku ini bukan berarti tidak memiliki makna. Sebagai suatu “bunga rampai”, kita diajak untuk berkelana memahami “mozaik” Sunda dengan cakrawala yang sangat luas. Karena rentang waktu dan wilayah yang luas buku ini bukan pula merupakan *puzzle*, di mana antara satu dan yang lainnya bertautan (atau bisa ditautkan). Selain sebagai pelengkap dari buku-buku yang sudah ada, buku ini bisa pula dianggap sebagai *lawang sigotaka* untuk pendetailan atau penulisan sejarah yang terkait dengannya. Selamat atas penerbitan bukunya. *Insyallah*, akan menjadi bagian dari ilmu yang diamalkan, yang pahalanya akan terus mengalir sampai akhirat kelak. Amien.

Bandung, Mei 2011

Rektor Universitas Padjadjaran

Prof. Dr. Ganjar Kurnia, D.E.A.



Prakata

Menulis apapun seputar Sunda adalah sebuah pekerjaan yang tidak akan pernah habis dan akan selalu menarik untuk ditulis. Terlebih karya-karya yang mengungkap tentang Sunda dapat dikatakan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, ruang yang demikian luas tentang Sunda masih banyak menyisakan petak-petak kosong untuk dikaji dan diungkap.

Pergumulan penulis dengan berbagai permasalahan seputar Sunda, yang kemudian dipresentasikan dalam berbagai forum, baik seminar, diskusi, *workshop*, sarasehan pembinaan, kursus maupun konferensi internasional, akan lebih terasa nilai manfaatnya bila dapat disajikan pada khalayak yang lebih luas dalam bentuk sebuah buku. Penyajian kembali berbagai tulisan seputar Sunda ke khalayak yang lebih luas diharapkan dapat memperkaya informasi seputar Sunda yang masih sangat terbatas tadi. Tentu tidak semua tulisan yang pernah dipresentasikan dapat disajikan kembali dalam buku ini. Hanya tigabelas tulisan saja yang dipilih untuk disajikan kembali. Ketigabelas tulisan tersebut dibuat sepanjang tahun 2003 hingga 2009. Selanjutnya, untuk memudahkan pemahaman, tulisan-tulisan tersebut diklasifikasikan dalam tiga bagian besar, yakni, Sunda dan Sejarah, Sunda dan Budaya, serta Sunda dan Politik.

Tulisan-tulisan yang diklasifikasikan dalam bagian Sunda dan Sejarah di antaranya mengungkap tentang permasalahan konseptual dan substansial seputar sejarah Sunda dan sejarah Jawa Barat serta peristiwa-peristiwa sejarah yang pernah terjadi di tatar Sunda, seperti peristiwa Bojongkokosan, Bandung Lautan Api, dan Hijrah Siliwangi. Dalam bagian kedua, tulisan-tulisan seputar Sunda dan Budaya, di antaranya mengungkap tentang permasalahan konseptual dan substansial seputar kebudayaan Sunda dan kebudayaan daerah, tentang bahasa Sunda, serta tentang kawasan budaya Halimun. Dalam kelompok ketiga, yakni Sunda dan Politik, di antaranya diungkap seputar pergumulan orang Sunda dan tatar Sunda dalam panggung politik serta peristiwa sejarah politik berupa transformasi politik di Cianjur.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya mengiringi penyajian kembali ketigabelas tulisan dalam buku ini, perlu penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Ganjar Kurnia, DEA, yang berkenan memberikan kata pengantar pada buku ini. Juga kepada Prof. Dr. Setiawan Sabana, MFA, dan Prof. Dr. Tjetjep Rohendi Rohidi, MA, dan Prof. Dr. Susanto Zuhdi, yang berkenan memberikan *endorsement* dalam penerbitan buku ini.

Pada akhirnya, sekecil apapun, semoga masih ada manfaat yang bisa diperoleh dari penerbitan buku yang sederhana ini.

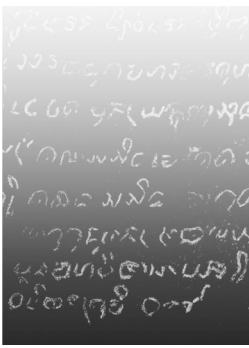
Bandung, 10 Juli 2011

Penulis,

Reiza D. Dienaputra



Bagian Satu: Sunda dan Sejarah



Mengenal dan Memaknai Sejarah Sunda*

Pengantar

Berbicara tentang sejarah berarti berbicara tentang perjalanan eksistensi manusia di atas panggung kehidupan. Dengan demikian, sejarah selalu berkaitan erat dengan manusia dan perannya semasa masih hidup. Tidak ada sejarah tanpa manusia dan tidak ada sejarah tanpa kehidupan. Karena sejarah berbicara tentang manusia dan kehidupannya maka secara otomatis sejarah selalu berbicara tentang peristiwa yang benar-benar pernah terjadi dan menempatkan manusia sebagai aktor sentralnya. Pemahaman ini dapat dikatakan menjadi pemahaman standar yang perlu dimiliki manakala berbicara tentang sejarah.

Keberadaan sejarah sebagai kisah tentang masa lampau manusia secara eksplisit memperlihatkan peran penting sejarah sebagai ilmu yang mampu memberi eksplanasi tentang peran manusia di atas panggung kehidupan. Selanjutnya, berpijak pada realitas bahwa manusia merupakan *zoon politicon* maka peran tersebut sudah pasti akan menyertakan keberadaan manusia-manusia lainnya yang hidup secara bersama-sama, baik itu dalam bentuk komunitas keluarga, kerabat, suku bangsa, hingga bangsa. Dalam pemahaman itulah, sejarah pada akhirnya tidak sekedar mampu memberi eksplanasi tentang peran manusia secara individual tetapi juga mampu memberi eksplanasi tentang peran manusia secara kolektif. Tegasnya sejarah tidak hanya mampu memberi eksplanasi tentang peran manusia tetapi juga mampu memberi eksplanasi tentang peran keluarga, kerabat, suku bangsa, hingga bangsa. Kesadaran tentang perjalanan hidup di kelampauan itulah yang pada akhirnya akan mampu memetakan identitas atau jatidiri manusia secara individual maupun manusia sebagai suatu komunitas, seperti, keluarga, kerabat, suku bangsa atau bangsa.

Pemahaman tentang identitas dan jatidiri bagi individu, terlebih sebuah komunitas jelas memiliki makna penting serta bernilai strategis. Hal itu tidak saja

* Makalah disampaikan sebagai materi presentasi dalam Seminar Pembangunan Berbasis Budaya Sunda, “Revitalisasi dan Aplikasi Nilai-nilai Budaya Sunda dalam Pembangunan Daerah”, Bandung, 25 Juni 2005.

bermakna sebagai media integrasi komunitas tetapi juga sebagai sarana untuk bisa memproyeksikan perjalanan komunitas ke arah yang lebih baik, baik hari ini maupun hari depan. Keberadaan identitas sebagai media integrasi komunitas bila dikelola dengan baik tidak saja akan melahirkan *sense of belonging* bagi komunitas tetapi juga bisa jadi *sense of pride* dan *sense of obligation*. Dalam konteks inilah, sekali lagi, sejarah memainkan peran yang sangat penting. Karena hanya sejarah lah yang mampu memetakan dengan relatif baik dan lengkap perjalanan sebuah komunitas di panggung kehidupan.

Permasalahan dalam menjejaki identitas dan jatidiri melalui penanaman kesadaran sejarah akan muncul manakala setidaknya terjadi dua kondisi. Pertama, keterbatasan atau bahkan ketiadaan “catatan” sejarah tentang perjalanan komunitas, khususnya dalam bentuk sumber tertulis. Kedua, terjadinya pemudaran atau bahkan hilangnya kesadaran sejarah di tengah komunitas. Bila dua kondisi tersebut terjadi bukanlah barang mudah untuk bisa membangun identitas bagi sebuah komunitas, walaupun ada bisa jadi kekuatan integratif komunitas tersebut tidak akan kokoh dan besar kemungkinan mudah digoyahkan.

Berpijak pada alur pikir seperti itu, jelaslah pengenalan tentang sejarah Sunda bagi komunitas yang bernama etnis Sunda tidak pelak lagi merupakan suatu *qonditio sine qua non* untuk bisa mengenal dengan baik identitas dan jati diri urang Sunda. Selanjutnya agar pengenalan tersebut dapat memberi nilai guna maka realitas perjalanan sejarah Sunda tersebut harus diberi makna sedemikian rupa sehingga dapat diekstrapolasikan untuk kepentingan masa kini dan masa depan. Lebih dari itu, melalui pengenalan dan pemaknaan sejarah Sunda tersebut diharapkan pula akan terbangun sebuah kesadaran tentang kekuatan dan kelemahan dirinya sepanjang perjalanan sejarahnya sehingga dapat digunakan sebagai cermin kehidupan. Dengan demikian, sejarah Sunda tidak sekedar dimaknai secara statis sebagai informasi atau rangkaian fakta tentang masa lalu urang Sunda tetapi juga perlu dimaknai secara dinamis sebagai media untuk memahami dan menata perjalanan hidup urang Sunda pada saat ini dan nanti.

Deskripsi Umum Sejarah Sunda

Secara umum dapat dikatakan sejarah Sunda atau sejarahnya urang Sunda¹ atau sejarah *tatar* Sunda² mencakup kurun waktu yang sangat panjang, yakni dari masa prasejarah hingga masa sejarah. Masa prasejarah dalam sejarah Sunda berakhir manakala ditemukan bukti-bukti tertulis berupa prasasti dari kerajaan

¹ Urang Sunda secara sederhana dapat diartikan sebagai orang yang mengaku dirinya dan diakui oleh orang lain sebagai orang Sunda. Dalam pengertian tersebut setidaknya tercakup dua kriteria besar yang dapat dijadikan pegangan untuk menyebut seseorang sebagai urang Sunda

Tarumanegara. Bukti-bukti peninggalan prasejarah di *tatar* Sunda, antara lain ditemukan di Cianjur (Gunung Padang, Pasir Pogor, Bukit Tongtu, Bukit Kasur, Gunung Putri, Lembah Duhur, Pasir Manggu, dan Pasir Gada), Sukabumi (Pangguyangan, Tugu Gede, Ciarca, Salak Datar, dan Batu Jolang), Bandung, Garut (Cimareme), Kuningan (Cipari, Cigadung, Cangkuang, Cibuntu, Hululingga, Darmaloka, Batu Tilu, Panyusupan, Cibubur, Balongkagungan, dan Nagog), dan Ciamis (Karangkamulyan).³

Era sejarah dalam sejarah Sunda yang dimulai sejak abad ke-5 atau sejak ditemukannya prasasti kerajaan Tarumanegara telah berlangsung hingga lebih dari 15 abad. Mengingat rentang waktu yang panjang tersebut tentu bukanlah merupakan hal yang mudah untuk bisa mengenal dengan baik sejarah Sunda. Terlebih lagi realitas memperlihatkan bahwa pada beberapa babakan, perjalanan sejarah Sunda hanya menyisakan sumber-sumber sejarah yang amat sangat terbatas atau bahkan tidak menyisakan sumber sama sekali. Namun demikian, untuk memudahkan pengenalan, secara umum sejarah Sunda dapat didekati dengan membaginya dalam dua periodisasi besar, yakni masa sebelum kemerdekaan dan masa sesudah kemerdekaan.

Masa sebelum kemerdekaan dalam sejarah Sunda meliputi masa Hindu-Budha, masa Islam, masa penetrasi Barat, dan masa penetrasi Jepang. Masa Hindu Budha antara lain ditandai oleh munculnya dua kerajaan besar, yakni kerajaan Tarumanegara

atau bukan urang Sunda. Kriteria pertama didasarkan atas keturunan atau hubungan darah. Dengan demikian, seseorang dikatakan urang Sunda apabila orang tuanya, baik dari pihak ayah maupun ibu, atau keduanya adalah orang Sunda, terlepas dimana ia berada atau dibesarkan. Kriteria kedua didasarkan atas sosial budaya. Seseorang dikatakan urang Sunda apabila ia dibesarkan dalam lingkungan sosial budaya Sunda dan dalam hidupnya menghayati serta mempergunakan norma-norma dan nilai budaya Sunda. Dalam kriteria kedua ini, yang dianggap penting adalah tempat tinggal, kehidupan sosial budaya, dan sikap orangnya. Edi S. Ekadjati, *Kebudayaan Sunda (Suatu Pendekatan Sejarah)*. (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hal.7-8; Suwarsih Warnaen, et.al., *Pandangan Hidup Orang Sunda*. (Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi) Depdikbud, 1987), hal. 1.

² Untuk menetapkan sebuah wilayah geografis yang bernama *tatar* Sunda bukanlah merupakan hal yang mudah, malahan bila hal tersebut dilakukan dengan tidak hati-hati bisa jadi akan menimbulkan kegoncangan yang cukup serius. Lantas, kalau memang Jawa Barat sudah sulit untuk direpresentasikan sebagai tanah Sunda, masih adakah wilayah yang bisa dinamakan sebagai *tatar* Sunda atau daerah manakah sebenarnya yang bisa dikatakan sebagai tanah Sunda. Dalam kaitan ini, Edi S. Ekadjati mengatakan bahwa tanah Sunda merujuk pada bekas wilayah Kerajaan Sunda Pajajaran, yang kemudian berdiri sendiri, yakni Sumedang Larang, Banten, Cirebon, dan Galuh. Sumedang Larang dan Galuh kemudian menjadi satu wilayah kesatuan dengan nama Priangan. Dalam perkembangan berikutnya, Priangan sering dikatakan sebagai pusat tanah Sunda. Edi S. Ekadjati, 1995a, op. cit., hal.7-8.

³ Nina H. Lubis, dkk. *Sejarah Tatar Sunda*. Jilid I. (Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, 2003), hal. 30-31.

(Abad V – VII)⁴ dan kerajaan Sunda (VII – XVI).⁵ Masa Islam antara lain ditandai oleh munculnya dua kesultanan besar, yakni kesultanan Cirebon dan kesultanan Banten. Masa penetrasi Barat di tatar Sunda ditandai oleh munculnya rezim penguasa Barat, mulai dari VOC, Inggris, hingga pemerintah kolonial Belanda. Masa penetrasi Jepang ditandai oleh berkuasanya pemerintah pendudukan Jepang di *tatar* Sunda.

Pasca kemerdekaan, perkembangan sejarah Sunda secara umum sering diurai dengan mengikuti pola perkembangan yang terjadi dipusat. Realitas perkembangan sejarah di tingkat nasional dengan demikian dianggap seiring sejalan dengan yang terjadi di tingkat lokal. Padahal, sejarah Sunda di era kemerdekaan bisa jadi punya keunikan tersendiri. Geliat kehidupan di tingkat nasional belum tentu menjadi geliat kehidupan di tingkat lokal. Demikian pula sebaliknya, geliat kehidupan di tingkat lokal belum tentu merupakan cerminan geliat kehidupan di tingkat nasional.

⁴ Setidaknya ada tujuh prasasti yang berhasil diketemukan berkaitan dengan keberadaan Kerajaan Tarumanegara. Pertama, Prasasti Tugu. Ditemukan di desa Tugu dekat Cilincing, Jaktim, kini tersimpan di Museum Nasional. Kedua, Prasasti Ciaruteun. Ditemukan dipinggir sungai Ciaruteun, Kampung Muara, Kabupaten Bogor, kini berada di lokasi yang tidak jauh dari tempat penemuan. Ketiga, Prasasti Kebon Kopi. Ditemukan tidak jauh dari tempat ditemukannya Prasasti Ciaruteun. Keempat, Prasasti Jambu (Pasir Koleangkak). Ditemukan di sebuah bukit yang bernama Koleangkak di daerah perkebunan Jambu, Desa Parakanmuncang, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Kelima, Prasasti Pasir Awi. Ditemukan di Kabupaten Bogor, tidak jauh dari lokasi penemuan prasasti lainnya. Keenam, Prasasti Pasirmuara. Ditemukan di Kabupaten Bogor, tidak jauh dari lokasi penemuan prasasti lainnya. Ketujuh, Prasasti Cidanghiang. Ditemukan di Kampung Lebak, di Pinggir Sungai Cidanghiang, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten.

⁵ Sebagaimana halnya kerajaan Tarumanegara, keberadaan kerajaan Sunda di Tatar Sunda dibuktikan oleh temuan beberapa prasasti, seperti, pertama, Prasasti Canggal. Ditemukan di halaman percandian Gunung Wukir, Magelang, berangka tahun 654 Saka/732 M, mencantumkan nama raja Sanjaya dan Silsilahnya). Kedua, Prasasti Rakryan Juru Pangambat. Ditemukan di Bogor, berangka tahun 854 Saka/932 M, mencantumkan raja Sunda. Ketiga, Prasasti Cibadak/ Sang Hyang Tapak. Ditemukan di Cibadak, Sukabumi, menyebut Sri Jayabhupati sebagai Raja Sunda serta larangan menangkap ikan di daerah tertentu yang disebut Sunda Sembawa serta kutukan bagi yang melanggarnya. Keempat, Prasasti-prasasti Kawali. Ditemukan di Situs Astana Gede, Kawali, Ciamis, berasal dari abad ke-14 M, salah satu prasastinya menyebut nama gelar Prabu Wastu. Kelima, Prasasti Batu Tulis. Ditemukan di Batutulis Bogor, berangka tahun 1455 Saka/1533 M, di dalamnya mencantumkan tiga orang raja Sunda, yakni Prabu Guru Dewataprana alias Sri Baduga Maharaja atau Sri Ratu Dewata, Rahiyang Dewa Niskala, dan Rahiyang Niskala Wastukencana. Ketiganya memiliki tali ikatan anak, ayah, dan kakek. Keenam, Prasasti-prasasti Kabantenan. Berasal dari abad ke-16, kelima buah prasastinya berisi penetapan wilayah-wilayah tertentu sebagai daerah yang dibebaskan dari pajak atas dasar kesucian atau kepentingan keagamaan. Di luar prasasti-prasasti di atas, berbeda dengan kerajaan Tarumanegara, keberadaan kerajaan Sunda juga dibuktikan oleh beberapa sumber tertulis lainnya, seperti, Naskah Carita Parahyangan (berasal dari Abad ke-16), Naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian (berangka tahun 1440 Saka/1518 M, berisi ajaran kesuksesan, yang di dalamnya memuat norma-norma kehidupan yang mengatur pola tingkah laku manusia pada masa kerajaan Sunda, khususnya pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja), Catatan Tomi Pires, dan Catatan Joao de Barros.

Terlepas dari pendekatan yang akan digunakan untuk mewadahi berbagai peristiwa yang pernah terjadi di tatar Sunda, sejarah Sunda di era kemerdekaan sarat dengan berbagai peristiwa besar, yang di antaranya memperlihatkan tampilan *urang* Sunda yang berani dan juga responsif dengan perkembangan yang terjadi. Peristiwa Bojongkokosan, Bandung Lautan Api, Kongres Pemuda Sunda, aksi mahasiswa dalam masa transisi pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, aksi mahasiswa di akhir kekuasaan Soeharto, aksi-aksi kerusuhan anti cina, dan Konferensi Internasional Budaya Sunda merupakan beberapa contoh peristiwa yang dapat diangkat ke permukaan. Dalam perkembangannya yang paling kontemporer, sebagai dampak dari otonomi daerah, sejarah Sunda juga diwarnai oleh munculnya upaya-upaya rekonstruksi sejarah daerah, baik kota maupun kabupaten. Bisa dipastikan hasil rekonstruksi sejarah Sunda di daerah-daerah tersebut akan turut memperkaya tampilan sejarah Sunda.

Tantangan Sejarah Sunda

Di depan telah dikatakan untuk bisa mengenali secara utuh sejarah Sunda bukanlah merupakan hal yang mudah. Hal itu khususnya akan terjadi pada sejarah Sunda dari masa prasejarah dan masa Hindu-Budha. Dari kedua masa tersebut sumber-sumber yang tersedia dapat dikatakan sangat terbatas. Oleh karenanya, tidak mengherankan misalnya bila upaya untuk melakukan rekonstruksi sejarah kerajaan Tarumanegara dan kerajaan Sunda secara relatif lengkap masih sulit untuk dilakukan. Hal yang sama juga sebenarnya terjadi dengan masa sesudahnya. Namun, keterbatasan sumber pribumi dari masa pasca Hindu-Budha seringkali “terselamatkan” oleh ketersediaan sumber-sumber kolonial, khususnya arsip-arsip berbahasa Belanda, baik dari masa VOC maupun pemerintah Hindia Belanda.

Keterbatasan sumber pribumi dalam sejarah Sunda besar kemungkinan berkorelasi dengan rendahnya budaya tulis pada masyarakat Sunda. Padahal, sejarah membuktikan bahwa *urang* Sunda termasuk etnis tertua yang pertama kali meleak huruf. Menjadi sebuah pertanyaan besar, kenapa hal ini bisa terjadi. Benarkah etnis Sunda miskin akan budaya tulis sebagaimana terlihat dari sedikitnya sumber-sumber pribumi yang mampu menjelaskan sejarah Sunda? Ataukah sebaliknya bahwa etnis Sunda tidaklah miskin akan budaya tulis. Adapun realitas sejarah yang hingga kini tampil ke permukaan belumlah dapat menggambarkan realitas sebenarnya karena sesungguhnya masih banyak sumber-sumber sejarah milik etnis Sunda, khususnya sumber benda dan tertulis, yang masih “terkubur” alias belum tergali oleh para sejarawan dan peminat sejarah pada umumnya. Kalaulah boleh memilih, mudah-mudahan kondisi kedua lah yang kini tengah terjadi sehingga menjadi tantangan bagi siapa saja, khususnya mereka yang mengaku *urang* Sunda untuk terus berupaya keras menggali sumber-sumber

sejarah milik *urang* Sunda sehingga dapat lebih memperjelas perjalanan sejarah *urang* Sunda, khususnya perjalanan sejarah *urang* Sunda di *tatar* Sunda.

Realitas keterbatasan sumber-sumber pribumi yang mampu menjelaskan sejarah Sunda dalam masa-masa awal perkembangannya tentu tidak terjadi pada masa-masa sesudah kemerdekaan. Untuk era pasca kemerdekaan walaupun sumber-sumber tertulis masih sangat terbatas masih dapat ditutupi oleh sumber lisan, benda, bahkan visual. Seiring dengan ketersediaan sumber yang relatif lengkap, kajian-kajian tentang sejarah Sunda pun kini cukup banyak dilakukan, meskipun sebagian besar lebih terfokus di perguruan-perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi yang memiliki jurusan Sejarah.

Kalaulah akan dikemukakan tantangan bagi penulisan sejarah Sunda di era kemerdekaan maka salah satunya adalah bagaimana membuat sejarah Sunda agar tidak terperangkap kaku dalam *frame* sejarah nasional. Dalam kaitan ini, bisa jadi banyak pendekatan yang dapat dilakukan, seperti sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sebagai contoh, salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan untuk memberi eksplanasi tentang sejarah Sunda di era kemerdekaan adalah pendekatan politik, yakni dengan memilah sejarah Sunda ke dalam masa pemerintahan para gubernur yang pernah dan sedang memerintah di *tatar* Sunda. Dengan kerangka berpikir seperti itu, sejarah Sunda dapat diurai bahasannya ke dalam masa Sutarjo Kartohadikusumo (19 Agustus 1945-Desember 1945), Masa Datuk Jamin (Desember 1945-Juni 1946), Masa Murjani (Juni 1946-Maret 1947), Masa M. Sewaka (1 April 1947-1948, 1950-1952), Masa Ukar Bratakusumah (Desember 1948-1950), Masa Sanusi Harjadinata (1952-1956), Masa R. Ipek Gandamana (1956-1960), Masa Mashudi (1960-1970), Masa Solihin G.P. (1970-1975), Masa Aang Kunaefi (1975-1985), Masa Yogie S. Memet (1985-1993), Masa R. Nuriana, dan Masa Danny Setiawan.

Pendekatan politik dalam mengenali sejarah Sunda bisa jadi akan terlihat kurang begitu “aspiratif”, terutama dalam menampung keinginan untuk menjadikan sejarah sebagai milik masyarakat dan bukan milik eksklusif orang-orang besar (*the great man*) sebagaimana tampilan sejarah pada umumnya. Akan tetapi, di sisi lain, pendekatan pemerintahan gubernur untuk sejarah Sunda memiliki beberapa keunggulan, seperti, pertama, “membebaskan” sejarah Sunda dari *frame* sejarah nasional yang umumnya selalu menjadikan masa Soekarno (Orde Lama) dan Soeharto (Orde Baru) sebagai titik tolak berpikir atau memilahnya ke dalam era Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, dan Demokrasi Pancasila. Kedua, dapat membantu memberi eksplanasi tentang geliat perkembangan *urang* Sunda di bawah para pemimpin yang juga *urang* Sunda. Eksplanasi ini menjadi semakin penting manakala di era otonomi daerah isu

tentang putera daerah kerap digulirkan, khususnya untuk membendung mereka yang dianggap bukan putera daerah. Anggapan bahwa putera daerah akan lebih baik dalam membangun geliat daerah dibanding yang bukan putera daerah menjadi salah satu model argumen pengembang isu putera daerah.

Permasalahan sekaligus tantangan sejarah Sunda dalam perkembangannya yang paling kontemporer adalah rendahnya kesadaran *urang* Sunda akan pentingnya sejarah Sunda. Sejarah Sunda sebagai milik *urang* Sunda tampak kurang mendapat perhatian untuk *dimumule* dengan baik. Sejarah Sunda sepertinya sudah dianggap tidak penting oleh sebagian besar *urang* Sunda. Belajar sejarah Sunda adalah belajar sesuatu yang membosankan dan sia-sia. Jadilah, sejarah Sunda teralienasikan dari pemiliknya. Realitas ahistoris *urang* Sunda terhadap sejarah Sunda ini sebenarnya bukanlah milik eksklusif *urang* Sunda tetapi juga sepertinya sudah menjadi milik nasional. Artinya, perilaku dan pola pikir ahistoris *urang* Sunda terhadap sejarah Sunda tercermin pula dalam perilaku dan pola pikir ahistorisnya bangsa Indonesia terhadap sejarah nasional. Akibatnya, tidak mengherankan bila *urang* Sunda saat ini tampak seperti kehilangan jati dirinya. Tidak jelas lagi siapa dirinya dan bagaimana bumi tempat dirinya berpijak.

Memaknai Sejarah Sunda

Setidaknya ada tiga guna sejarah. Pertama, untuk melestarikan identitas kelompok dan memperkuat daya tahan kelompok bagi kelangsungan hidup. Kedua, untuk mengambil pelajaran dan teladan dari peristiwa-peristiwa di masa lalu. Ketiga, sejarah dapat berfungsi sebagai sarana pemahaman mengenai makna hidup dan mati atau mengenai tempat manusia di atas muka bumi ini.⁶ Berpijak pada triguna tersebut maka terkandung pemahaman di dalamnya bahwa hendaknya setiap upaya untuk mengenali sejarah pada akhirnya harus mampu memberi *output* bagi lahirnya ketiga guna tersebut.

Dari rentetan perjalanan sejarah Sunda ada beberapa peristiwa yang bisa diangkat sebagai tonggak penting dalam perkembangan perjalanan sejarah *urang* Sunda. Beberapa di antara peristiwa penting tersebut adalah kelahiran Kerajaan Tarumanegara. Kelahiran kerajaan pertama di Jawa ini memiliki makna penting karena menjadi pertanda tentang tingginya peradaban *urang* Sunda. Keunggulan peradaban *urang* Sunda ini dibuktikan dengan adanya realitas yang tak terbantahkan bahwa *urang* Sunda merupakan salah satu etnis pertama di nusantara yang bersentuhan dengan tulisan. Tujuh prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara membuktikan

⁶ T. Ibrahim Alfian, Sejarah dan Permasalahan Masa Kini, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada pada tanggal 12 Agustus 1985, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1985), hal. 3-4.

semua itu. Dengan demikian dari realitas sejarah tersebut secara eksplisit terlihat bahwa etnis Sunda merupakan etnis generasi pertama yang melek huruf. Betapa bermaknanya kapasitas *urang* Sunda dalam bersentuhan dengan tulisan telah membawa bangsa ini ke dalam sebuah babakan peradaban baru yang disebut babakan sejarah. Tegasnya, bukti persentuhan *urang* Sunda dengan tulisan ini kemudian dijadikan titik tolak era sejarah dalam sejarah kebudayaan Indonesia.

Bila Tarumanegara mampu memberi eksplanasi tentang tingginya peradaban *urang* Sunda dalam budaya tulis maka kerajaan Sunda dengan segala keterbatasan sumber yang dimilikinya memperlihatkan fenomena tentang eksistensi sebuah kerajaan Hindu-Budha yang paling panjang usianya di Indonesia, yakni selama 909 tahun atau sejak 670 M hingga 1579 M. Selama lebih dari sembilan abad eksistensinya, kerajaan Sunda mampu mewariskan ideologi Sunda, yakni berupa nilai luhur kerohanian dan tipe ideal budaya yang dianut oleh *urang* Sunda. Ideologi Sunda produk kerajaan Sunda tersebut antara lain berwujud aksara, bahasa, etika, adat istiadat (hukum), lembaga kemasyarakatan dan sistem kepercayaan.⁷ Pedoman hidup yang digunakan *urang* Sunda semasa kerajaan Sunda tampak bukan sekedar wacana tetapi benar-benar dijadikan sebagai sebuah pegangan untuk berpikir dan bertindak. Hal ini setidaknya terlihat dalam proses peralihan kekuasaan di kerajaan Sunda. Dari 39 kali suksesi kepemimpinan di kerajaan Sunda, tiga suksesi di antaranya terjadi sebagai akibat adanya pelanggaran raja yang berkuasa terhadap kaidah moral yang berlaku.⁸ Satu di antaranya karena menikahi *estri larangan*, yakni wanita yang telah bertunangan atau telah menerima lamaran untuk diperistri.⁹

Setelah keruntuhan kerajaan Sunda, perjalanan sejarah Sunda selanjutnya secara eksplisit memberikan gambaran tentang terjadinya mondialisasi atau globalisasi di *tatar* Sunda. Dengan demikian, bagi *urang* Sunda globalisasi sebenarnya bukanlah merupakan barang baru tetapi lebih merupakan barang lama yang diberi kemasan baru. Ada dua kekuatan besar yang telah mengakibatkan *urang* Sunda mau tidak mau larut dalam mondialisasi, yakni Islam dan Barat. Di tengah mondialisasi tersebut, *urang* Sunda pun dihadapkan oleh datangnya pengaruh dari Jawa (Mataram).

Kehadiran Islam di *tatar* Sunda, yang benih-benihnya sudah muncul sejak sebelum abad ke-15 dan memperlihatkan bentuknya yang tegas pada abad ke-16

⁷ Edi S. Ekadjati, *Kebangkitan Kembali Orang Sunda: Kasus Paguyuban Pasundan 1913-1918*, (Bandung: Kiblat Buku Utama, 2004), hal. 22.

⁸ Berkaitan dengan suksesi kepemimpinan tersebut setidaknya ada lima model suksesi kepemimpinan yang terjadi. Pertama, dari raja kepada anak kandung laki-laki (25 kali). Kedua, dari raja kepada menantu (8 kali). Ketiga, dari raja kepada adik kandung (2 kali). Keempat, dari raja kepada saudara ipar (3 kali). Kelima, dari raja kepada keponakan (1 kali). Sementara

secara perlahan tapi pasti membawa pengaruh pada ideologi Sunda. Satu di antaranya yang paling fenomenal adalah tertanggalkannya sistem kepercayaan lama¹⁰ dan tampilnya Islam sebagai agama *urang* Sunda. Unikny, berbeda dengan Hindu-Budha, Islam di *tatar* Sunda melebarkan sayapnya dari kalangan bawah terlebih dahulu baru kelompok elit. Semasa Islam menyebrangi tembok-tembok kerajaan, Islam pun tidak dipandang sebagai ancaman.¹¹ Kondisi ini bisa jadi memperlihatkan sebuah realitas bahwa *urang* Sunda merupakan komunitas yang cukup rasional dalam menyikapi kehadiran ajaran baru atau juga bisa dimaknai bahwa Hindu-Budha yang saat itu menjadi “kepercayaan” kerajaan hanya mengakar di lapis penguasa saja dan belum menyentuh lapis bawah atau rakyat kebanyakan sehingga manakala Islam disebarkan secara intensif oleh para tokohnya, *urang* Sunda sangat terbuka menerimanya. Terlebih Islam mengembangkan prinsip-prinsip ajaran yang bersifat egaliter dan tidak membedakan manusia ke dalam kelas-kelas tertentu.

Di tengah derasny pengaruh Islam di *tatar* Sunda dalam waktu yang relatif bersamaan, datang pula pengaruh dari budaya Jawa. Budaya Jawa masuk ke *tatar* Sunda melalui dua cara. Pertama, melalui kegiatan perdagangan, pertanian, dan migrasi di daerah pesisir utara. Kedua, melalui prajurit dan priyayi Mataram semasa terjadinya

itu dari 38 kali rotasi kekuasaan yang diketahui faktor penyebabnya, di luar tiga kali suksesi yang diakibatkan oleh pelanggaran terhadap kaidah moral, sebagian besar atau sebanyak 26 kali diakibatkan oleh faktor usia. Di luar itu, masih terdapat tiga faktor penyebab terjadinya rotasi kekuasaan, yaitu, rotasi kekuasaan yang diakibatkan oleh adanya kudeta (5 kali), rotasi kekuasaan yang diakibatkan oleh pindahnya raja ke kerajaan lain (1 kali), serta rotasi kekuasaan yang diakibatkan oleh terbunuhnya raja yang tengah memerintah (3 kali). Untuk uraian yang lebih lengkap, lihat, Reiza D. Dienaputra, *Kerajaan Sunda Pajajaran: Studi tentang Suksesi Kepemimpinan di Kerajaan Sunda Pajajaran*, (Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, 1993), hal. 19-38.

⁹ Setelah terjadinya perang Bubat, wanita yang berasal dari lingkungan Kerajaan Majapahit juga dimasukkan dalam wanita larangan, sehingga tabu untuk dinikahi. Atja dan Saleh Danasasmita, *Sanghyang Siksakanda Ng Karesian: (Naskah Sunda Kuno Tahun 1518 M)*. (Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, 1981), hal. 54-55.

¹⁰ Sebelum dan selama era Hindu-Budha, sistem kepercayaan yang juga berkembang di *tatar* Sunda adalah animisme. Masuknya Islam, secara perlahan tapi pasti menggeser sistem kepercayaan yang dianut *urang* Sunda sebelumnya. Namun demikian, bagi *urang* Sunda yang tidak mau menerima Islam, menjelang masa-masa akhir keruntuhan Kerajaan Sunda memisahkan diri dari komunitas Sunda kebanyakan dan mengalienasikan diri ke wilayah pedalaman. Kini, komunitas tersebut dapat ditemukan di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Adapun agama dan kepercayaan yang dianut mereka adalah Sunda Wiwitan (Wiwitan= mula pertama, asal, pokok, jati) atau agama Sunda Asli. Dalam *Carita Parahyangan* dikenal dengan nama agama Jatisunda. Edi S. Ekadati, op. cit., hal. 54-55, 72-73.

¹¹ Berdasarkan folklor dan sejarah Sunda dikenal adanya beberapa orang tokoh penyebar Islam di *tatar* Sunda dari generasi paling awal. Hingga kini keberadaan para tokoh tersebut masih dihormati oleh *urang* Sunda. Mereka adalah Syekh Quro di Karawang, Syekh Datuk Kahpi, Syekh Nurjati, dan Sunan Gunung Jati di Cirebon, serta Hasanudin di Banten. Di luar itu

ekspansi Mataram di *tatar* Sunda. Kebudayaan Jawa yang dibawa prajurit dan priyayi Mataram merupakan kebudayaan Jawa pedalaman yang sarat dengan nilai-nilai feodal. Dampak dari infiltrasi budaya Jawa di *tatar* Sunda adalah kentatnya pengaruh budaya feodal Jawa di *tatar* Sunda, seperti misal sistem *unggah-ungguh basa* dalam bahasa Jawa keraton muncul dalam bahasa Sunda berupa *undak-unduk basa* yang mulanya berkembang di pendopo-pendopo kabupaten. Di luar sistem bahasa, pengaruh budaya Jawa antara lain tampak pula dalam sistem kemasyarakatan (tata krama) dan sistem mata pencaharian (dari berladang atau berhuma menjadi bersawah).¹²

Ketidakberdayaan *urang* Sunda dalam menghadapi infiltrasi budaya Jawa bisa jadi diakibatkan oleh dua kondisi. Pertama, tidak membuminya ideologi Sunda produk kerajaan Sunda di kalangan *urang* Sunda kebanyakan atau dengan kata lain ideologi Sunda tersebut besar kemungkinan hanya tersebar secara *apik* di kalangan elit kerajaan sehingga belum menjadi identitas kebanyakan *urang* Sunda. Kedua, kuatnya hegemoni Mataram dalam berbagai bidang di *tatar* Sunda. Terlepas dari apapun faktor ketidakberdayaan tersebut, yang jelas sejak masuknya pengaruh Jawa, sejarah Sunda memberikan eksplanasi tentang semakin beragamnya budaya asing yang mempengaruhi kehidupan *urang* Sunda. Lebih dari itu, sejak masuknya budaya Jawa dapat dikatakan sejak itu pula budaya kehidupan yang sarat dengan nilai-nilai feodal berkembang dengan subur di *tatar* Sunda.

Berbeda dengan saat berhadapan dengan pengaruh Islam dan Jawa, saat *tatar* Sunda berada dalam pengaruh kekuasaan Barat dan juga Jepang, terlihat tampilan yang relatif lain dengan era sebelumnya. *Urang* Sunda tidak sekedar menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi tetapi juga mengadakan perlawanan terutama manakala kesewenang-wenangan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan merebak secara tak terkendali. Adapun perlawanan berskala relatif besar dalam menghadapi kesewenang-wenangan kekuasaan asing terjadi pada awal abad ke-18 di bawah pimpinan Prawatasari. Perlawanan rakyat yang diakibatkan oleh diterapkannya sistem tanam paksa tarum oleh VOC ini berlangsung selama kurang lebih lima tahun (1703-1707), dan wilayah perlawanannya mencakup Sukabumi dan Cianjur.¹³

dikenal pula istilah Haji Purwa, yang memiliki makna sebagai orang yang menunaikan ibadah haji pertama kali. Ia adalah anggota keluarga keraton Kawali yang masuk Islam ketika sedang berniaga ke India dan kemudian menetap di Cirebon Girang. Edi S. Ekadjati, *Kebangkitan Kembali Orang Sunda: Kasus Paguyuban Pasundan 1913-1918*, (Bandung: Kiblat Buku Utama, 2004), hal. 23; J. Hageman Cz. "Geschiedenis der Soendalanden", TBG, XVI (Batavia, 1867); Saleh Danasasmita, et.al., *Rintisan Penelusuran Masa Silam Sejarah Jawa Barat. 4 Vols.* (Bandung: Proyek Penerbitan Sejarah Jawa Barat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, 1983/1984).

¹² Edi S. Ekadjati, 2004, op. cit., hal. 26.

¹³ Reiza D. Dienaputra, *Cianjur: Antara Priangan dan Buitenzorg (Sejarah Cikal Bakal Cianjur dan Perkembangannya Hingga 1942)*, (Bandung: Prolitera, 2004), hal. 23.

Di samping perjuangan yang bersifat fisik, perlawanan non fisik juga dilakukan *urang Sunda*. Salah satu representasi dari perlawanan yang bersifat non fisik adalah berupa pendirian organisasi Paguyuban Pasundan pada tanggal 20 Juli 1913.¹⁴ Adapun susunan pengurus Paguyuban Pasundan yang pertama kali terdiri dari D.K. Ardiwinata (*Adviseur*), Mas Dayat Hidayat (*President*), R Junjuran (*Sekretaris*), R Kusuma Sujana (*Penningmeester*), serta M Iskandar, Karta di Wiria, Sastrahudaya, dan Abubakar (*Komisaris*).

Pergerakan yang relatif monumental yang dilakukan Paguyuban Pasundan semasa pemerintah Hindia Belanda adalah berupa tuntutan Paguyuban Pasundan terhadap Pemerintah Kolonial berkaitan dengan pembentukan *Provincie West Java*. Organisasi yang berorientasi sosial budaya Sunda ini menuntut pemerintah kolonial agar *Provincie West Java* yang akan dibentuk pada dasawarsa ketiga abad ke-20 diberi nama *Propinsi Pasundan*. Tuntutan Paguyuban Pasundan ini kemudian disetujui oleh pemerintah kolonial sehingga dalam ketetapan tentang pembentukan propinsi ini sebagaimana tercantum dalam *Staatsblad* tahun 1925 No. 285 dan 378, antara lain tertulis, “... *West Java, in inheemsche talen aan te duiden als Pasoendan* ...” (... Jawa Barat, dalam bahasa orang pribumi (bahasa Sunda) menunjuk sebagai Pasundan ...).¹⁵

Perlawanan *urang Sunda* dalam merespon perkembangan yang tengah terjadi tidak terbatas dilakukan oleh kaum pria tetapi juga dilakukan oleh kaum wanita. Hal ini tersirat dari perjuangan para tokoh wanita di *tatar Sunda*, seperti Dewi Sartika, Siti Jenab, Emma Puradiredja, dan Neno Ratnawinadi (putri D.K. Ardiwinata). Dengan demikian, para wanita Sunda sejak lama telah memainkan peran penting dalam perjalanan sejarah etnis Sunda. Para wanita Sunda tampak tidak hanya sekedar bergerak di dapur tetapi juga telah jauh ke luar dari lingkungan tersebut. Bahkan, melalui organisasi yang bernama Pasundan Istri (PASI) para wanita Sunda juga mampu menampilkan dirinya sebagai kekuatan moral. Dalam kongres yang berlangsung di Bandung pada tanggal 18 hingga 19 April 1935, PASI mengangkat masalah *prostitutie* (pelacuran) sebagai salah satu agenda pembicaraan penting. Menurut PASI, pelacuran tidak sekedar harus dicegah tetapi yang lebih penting lagi, perlu dikeluarkan usulan agar diberikan hukuman yang berat kepada para pemilik tempat yang menyewakan tempatnya bagi praktek pelacuran serta para calo pelacuran.¹⁶

¹⁴ Edi S. Ekadjati, 2004, op. cit., , hal. 38.

¹⁵ Edi S. Ekadjati, Sunda, Nusantara, dan Indonesia: Suatu Tinjauan Sejarah. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran pada Hari Sabtu, 16 Desember 1995. Bandung: Universitas Padjadjaran, hal. 4.

¹⁶ Reiza D. Dienaputra, 2004, op. cit.,, hal. 145-146.

Terlepas dari segala perilaku menyimpangnya, monokultisasi di era penetrasi Barat telah membawa perubahan besar bagi kehidupan *urang* Sunda di *tatar* Sunda. Di bidang politik, sebagai implikasi dari monokultisasi terjadi perubahan pada sistem pemerintahan. Secara bertahap diperkenalkan wilayah-wilayah administratif pemerintahan baru, seperti *residency*, *district*, *afdeling*, *gemeente*, *stadsgemeente*, *gemeenteraad*, *regentschapsraad*, dan kemudian *provincie*. Seiring dengan itu diperkenalkan pula jabatan-jabatan baru, seperti residen, asisten residen, *hoofddistrict*, dan *burgermeester*. Di bidang ekonomi, perubahan terbesar adalah masuknya *tatar* Sunda dalam pasar global dengan berdirinya perkebunan-perkebunan besar milik swasta, seperti perkebunan kopi, teh, karet, dan kina. Kesemua komoditi tersebut tentunya mampu memberikan keuntungan besar bagi pemiliknya, termasuk bagi pemerintah kolonial. Bahkan, khusus kopi, keuntungan tersebut telah dirasakan Belanda sejak era VOC. Keuntungan VOC dari eksploitasi dan monopoli kopi di *tatar* Sunda telah menjadikannya sebagai organisasi dagang besar yang kaya raya.

Mengiringi kemunculan perkebunan-perkebunan besar swasta, terjadi pula perubahan revolusioner dalam sistem transportasi di *tatar* Sunda, dengan diperkenalkannya transportasi kereta api. Pembangunan jalan kereta api di *tatar* Sunda dilakukan secara bertahap atau dimulai setelah jalur Batavia-Buitenzorg mulai operasional pada tanggal 31 Januari 1873. Tahap pertama pembangunan jalan kereta api memasuki pedalaman *tatar* Sunda dimulai dari Buitenzorg menuju Cicurug. Lintasan Buitenzorg-Cicurug sepanjang 27 kilometer ini berhasil diselesaikan pada tanggal 5 Oktober 1881. Lintasan kereta api selanjutnya yang dibangun adalah lintasan Cicurug-Sukabumi. Lintasan sepanjang 30 kilometer ini berhasil diselesaikan pada tanggal 21 Maret 1882. Pembangunan jalan kereta api tahap ketiga dilakukan untuk menghubungkan Sukabumi dengan Cianjur. Pembangunan jalur jalan kereta api Sukabumi-Cianjur sepanjang 39 kilometer berhasil diselesaikan tanggal 10 Mei 1883. Tahap pembangunan jalan kereta api selanjutnya dilakukan untuk menghubungkan wilayah Cianjur dengan ibukota Karesidenan Priangan, Bandung. Jalur jalan kereta api Cianjur-Bandung sepanjang 59 kilometer, secara resmi mulai dioperasikan sejak tanggal 17 Mei 1884.¹⁷

Dengan selesainya seluruh jalur lintasan kereta api yang menghubungkan Buitenzorg-Cianjur serta Cianjur-Bandung, secara otomatis sejak tahun 1884 perjalanan dari satu daerah ke daerah lain di *tatar* Sunda waktunya bisa lebih dipersingkat. Sebagai contoh, untuk perjalanan Cianjur-Buitenzorg, yang semula

¹⁷ S.A. Reitsma, *De Wegen in de Preanger*, (Bandung: G. Kolff & Co., 1912), hal. 16-17; S.A. Reitsma, *Korte Geschiedenis der Nederlandsch-Indische Spoor en Tramwegen*, (Wetvreden: G. Kolff & Co., 1928), hal. 24 dan 37.

memerlukan waktu tempuh 8 jam dengan menggunakan kereta kuda, sejak dibangunnya jalan kereta api, hanya memerlukan waktu selama 2,5 jam. Untuk perjalanan Cianjur-Bandung, yang semula memerlukan waktu 5,5 jam dengan menggunakan kereta kuda, dengan adanya sarana kereta api bisa dipersingkat menjadi sekitar 2 jam.¹⁸

Keberadaan kereta api sebagai pembuka keterisolasian berbagai wilayah di tatar Sunda semakin terasa manakala di sepanjang lintasan jalan kereta api yang berada di wilayah tatar Sunda ini dibangun pula stasion dan halte pemberhentian. Pada jalur Buitenzorg-Cianjur, setidaknya ada 2 stasion dan 11 halte yang dibangun, yakni, stasion Sukabumi dan stasion Cianjur, serta halte Cicurug, Parung Kuda, Cibadak, Karang Tengah, Cisaat, Gandasoli, Cirengas, Lampegan, Cibeber, dan halte Cilaku. Pada jalur Cianjur-Bandung, paling tidak ada tiga halte yang dibangun, yakni, Maleber, Sela Jambe, dan Cipeuyeum.

Pengaruh keberadaan kereta api dalam kehidupan *urang* Sunda terus berlangsung hingga abad ke-20. Terlebih manakala pemerintah kolonial tetap melakukan berbagai pembangunan prasarana dan sarana transportasi kereta api. Sebagai misal, perjalanan kereta api dari Bandung menuju Batavia dan sebaliknya dibuat jalur baru melalui Purwakarta dan Cikampek. Jalur ini mulai dioperasikan sejak 1 November 1934. Melalui jalur baru ini, perjalanan Bandung-Batavia waktu tempuhnya dapat dipersingkat menjadi hanya 2 $\frac{3}{4}$ jam.¹⁹ Untuk menampung besarnya minat penumpang yang menggunakan transportasi kereta api jalur Batavia-Bandung ini, perusahaan kereta api negara (*Staats Spoorwegen*), yang memiliki motto 4S (*Staats Spoor Steeds Sneller*),²⁰ mengoperasikan sekaligus empat rangkaian kereta api dalam sehari. Pelayanan kereta api Batavia-Bandung ini kemudian dikenal dengan nama *vlugge vier* (empat cepat).

Untuk jarak pendek, dibangun pula jalur kereta api dari Bandung menuju daerah-daerah pedalaman (*hinterland*). Secara umum pembangunannya bisa dikatakan dibagi dalam dua tahapan. Tahap pertama, pembangunan jalur kereta api yang trayeknya didasarkan atas UU tanggal 4 Januari 1916.²¹ Dalam tahap pertama ini setidaknya berhasil dibangun tiga jalur lintasan kereta api, yakni jalur Rancaekek-Jatinangor, jalur Bandung-Soreang, dan jalur Soreang-Ciwidey. Jalur Rancaekek-Jatinangor selesai dibangun pada tanggal 23 Februari 1918. Jalur

¹⁸ Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1864, No. 54; Tourist Guide to Buitenzorg, the Preanger and Central Java, (Weltevreden: Official Tourist Bureau, 1913) hal. 27, 34, dan 42.

¹⁹ Haryoto Kunto, Wajah Bandoeng Tempo Doeloe, (Bandung: Granesia, 1984), hal. 101.

²⁰ Gottfried Roelcke dan Gary Crabb, All Around Bandung: Exploring the West Java Highlands, (Bandung: Bandung Society for Heritage Conservation, 1994), hal. 25.

²¹ Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1916, No. 65.

Bandung-Soreang selesai dibangun tanggal 13 Februari 1921. Jalur Soreang-Ciwidey selesai dibangun tanggal 17 Juni 1924.

Tahap kedua, pembangunan jalur kereta api yang trayeknya ditetapkan dalam UU tanggal 28 Februari 1920.²² Berbeda dengan tahap pertama, pembangunan jalur lintasan rel kereta api tahap kedua ini hanya membangun dua jalur lintasan kereta api baru, yakni jalur lintasan Bandung-Citeureup-Majalaya dan jalur lintasan Dayeuhkolot-Majalaya. Pembangunan jalur sepanjang 6 kilometer ini berhasil diselesaikan tanggal 6 Juni 1919. Jalur lintasan Bandung-Citeureup-Majalaya selesai dibangun tanggal 18 Maret 1921. Jalur lintasan Dayeuhkolot-Majalaya selesai dibangun tanggal 3 Maret 1922.

Masih berkaitan dengan upaya optimalisasi pemanfaatan transportasi kereta api, dibangun pula halte-halte di kota Bandung. Pembangunan halte-halte di sekitar kota Bandung ini pada intinya dilakukan untuk menampung calon-calon penumpang kereta api yang berasal dari Bandung Barat dan Bandung Timur, yang dari waktu ke waktu memperlihatkan lonjakan penumpang yang cukup tajam. Dengan kata lain, pembangunan halte-halte tersebut juga sekaligus untuk mengurangi beban stasion Bandung dalam menampung calon penumpang yang akan pergi dan tiba di kota Bandung.

Setidaknya ada tiga halte baru yang dibangun di kota Bandung dalam dasawarsa ketiga abad ke-20. Ketiga halte baru tersebut adalah halte Andir, halte Cikudapateuh, dan halte Kiara Condong. Halte Andir dan Kiara Condong selesai dibangun tahun 1923, sementara halte Cikudapateuh selesai dibangun tahun 1925. Sebenarnya, bangunan ketiga halte tersebut tidaklah sama sekali baru. Ketiga bangunan halte tersebut merupakan hasil peningkatan dari *stopplaats* yang telah ada sebelumnya.²³

Bisa dipastikan kehadiran sistem transportasi kereta api di *tatar* Sunda telah membawa perubahan besar dalam kehidupan *urang* Sunda. Meskipun pembangunan transportasi kereta api tersebut lebih ditujukan untuk memenuhi kepentingan para pengusaha dalam upaya mempermudah serta mempercepat pemasaran komoditas-komoditas perkebunannya tetapi kehadirannya sedikit banyaknya tetap mampu membawa perubahan pada kehidupan sehari-hari *urang* Sunda. Geliat sosial ekonomi dialami *urang* Sunda, khususnya disekitar stasion dan halte-halte yang menjadi tempat pemberangkatan dan penurunan penumpang. Gegar pengaruh keberadaan revolusi sistem transportasi di *tatar* Sunda pada abad 19 dan abad ke-20 terhadap kehidupan *urang* Sunda ini bisa jadi akan hampir menyerupai gegar pengaruh selesainya pembangunan jalan tol Cipularang pada tahun 2005 terhadap kehidupan *urang* Sunda

²² Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1920, No. 150.

²³ Verslag der Staatsspoor-en Tramwegen in Nederlandsch-Indie Jrg. 1925, hal. 46.

selanjutnya di *tatar* Sunda. Sebuah tantangan besar yang bisa jadi bila salah menjawabnya akan dapat memudahkan identitas Sunda di *tatarnya* sendiri.

Memasuki era kemerdekaan, etnis Sunda tampil menjadi salah satu etnis utama yang memainkan peranan dalam turut mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Eksistensi *urang* Sunda dalam mempertahankan kemerdekaan tidak hanya terlihat dalam medan perjuangan fisik tetapi juga terlihat dalam medan perjuangan diplomasi. Dalam perjuangan fisik, eksistensi *urang* Sunda setidaknya terlihat dalam dua peristiwa perlawanan yang terbilang berskala besar, yakni, perlawanan rakyat di daerah Bojongsukosari Sukabumi tanggal 9 Desember 1945 dan Perlawanan Rakyat Bandung pada tanggal 24 Maret 1946.

Di luar perlawanan yang bersifat fisik, dinamika perjalanan sejarah Sunda di era kemerdekaan juga diwarnai sikap kritis *urang* Sunda dalam menyikapi perkembangan yang terjadi. Jadilah di tengah geliatnya gerakan-gerakan kesundaan pada tahun 1950-an,²⁴ seperti Daya Sunda (fusi dari Pangauban Sunda di Bandung dan Daya Budaya Sunda), Badan Musawarah Sunda, dan Front Pemuda Sunda (gabungan dari beberapa organisasi kesundaan yang dibentuk para pemuda dan mahasiswa, seperti, Nonoman Sunda dan Mitra Sunda di Bandung, Putera Sunda di Bogor, dan Daya Nonoman Sunda di Jakarta), *urang* Sunda menyuarkan angin perlawanan melalui penggelaran Kongres Pemuda Sunda pada tanggal 4-7 November 1956. Salah satu hal menarik yang dihasilkan kongres adalah adanya proklamasi dari Seksi Kebudayaan yang menyatakan bahwa istilah Jawa Barat diganti dengan Sunda. Sebagai konsekuensinya istilah Jawa Tengah diganti dengan Jawa Barat dan nama pulau Jawa diganti dengan Nusa Selatan, sesuai contoh dari pemerintah sendiri yang mengganti istilah Sunda Kecil dengan Nusa

²⁴ Gerakan-gerakan kesundaan muncul tidak sekedar diakibatkan oleh adanya ketimpangan-ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah ataupun instabilitas politik dan keamanan tetapi secara khusus diakibatkan oleh adanya ketidakpuasan *urang* Sunda terhadap kebijaksanaan pemerintah RI di Yogyakarta berkaitan dengan ko dan non. Kelompok ko yaitu mereka yang dianggap bekerjasama dengan Belanda, seperti bekerja dengan Belanda pada masa berdirinya negara Pasundan. Kelompok non adalah mereka yang tidak bekerjasama dengan Belanda. Kelompok non ini, yang umumnya baru datang dari Yogya dan kebanyakan orang Jawa, kemudian menggeser begitu saja jabatan-jabatan yang sebelumnya dipegang *urang* Sunda. Ajip Rosidi. t.t. Beberapa Catatan Ajip Rosidi tentang Sejarah Tatar Sunda (4) Karya Dr. Nina H. Lubis dkk., hal. 18. Realitas keterpinggiran *urang* Sunda oleh orang-orang Jawa ini segera menimbulkan ketersinggungan *urang* Sunda, yang lebih merasa berhak atas semuanya karena berada di *tatarnya* sendiri. Terlebih manakala *urang* Sunda sendiri melihat fakta-fakta yang menyedihkan bahwa mereka-mereka yang menggantikan tersebut, di samping kemudian melakukan tindakan “bedol desa” dengan menarik sanak saudaranya dan menempatkannya pada jabatan-jabatan tertentu dengan cara kembali menggeser pejabat-pejabat Sunda tetapi juga para pengganti tersebut sebenarnya tidak memiliki kapabilitas dan kapasitas untuk posisi yang didukinya.

Tenggara.²⁵ Adapun alasan pemilihan istilah Sunda atau Tanah Sunda, bukan Jawa Barat atau Pasundan, karena istilah Jawa Barat merupakan terjemahan istilah West Java yang dipakai pemerintah kolonial sedangkan istilah Pasundan sering diidentikan dengan Priangan tanpa Banten dan Cirebon serta tercemar oleh kasus Partai Rakyat Pasundan pimpinan Musa Suriakartalegawa.²⁶

Perjuangan *urang* Sunda dalam panggung sejarah selanjutnya juga terlihat dalam masa-masa transisi peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Bahkan, beberapa di antaranya tampil menjadi tokoh penentu dalam transisi kekuasaan tersebut. Mereka tidak hanya berada dalam komunitas yang bernama mahasiswa tetapi juga dalam komunitas yang bernama militer. Realitas seperti 1966 dalam batas-batas tertentu kembali terlihat dalam masa transisi kekuasaan pada tahun 1998 meskipun secara kualitatif tampak terlihat adanya penurunan peran *urang* Sunda.

Penutup

Dari gambaran di atas terlihat bahwa sejarah Sunda sebenarnya masih menyisakan banyak “ruang kosong” yang perlu segera dikenali untuk kemudian dimaknai. “Ruang kosong” sejarah Sunda tidak hanya terdapat pada periode sebelum kemerdekaan tetapi juga dari periode sesudah kemerdekaan. Oleh karenanya perlu ada *political will* dari pemerintah daerah untuk bisa mengisi kekosongan tersebut. Apa yang telah tertampilkan dalam sejarah Sunda selama ini bisa jadi barulah berupa “peristiwa-peristiwa besar” yang melibatkan “orang-orang besar” dan dengan demikian belum mampu menampilkan secara utuh peristiwa-peristiwa yang terjadi pada lapis bawah, khususnya peristiwa-peristiwa yang “membumi” dengan *urang* Sunda kebanyakan atau mewakili pandangan berbagai lapisan *urang* Sunda.

Akibatnya, jadilah *urang* Sunda kehilangan roh kesejarahan (*historisitas*) dalam dirinya. Lepasnya *historisitas* dari *urang* Sunda membawa akibat lanjutan pada mudarnya rasa memiliki terhadap *sunan ambu* (ibu pertiwi) yang menjadi *lemah cai urang* Sunda. Oleh karenanya untuk menyikapi itu semua dan agar *urang* Sunda dapat kembali menemukan identitas dirinya maka penanaman nilai-nilai kesejarahan perlu dilakukan. Jadikanlah sejarah sebagai inspirasi *urang* Sunda dalam mengenal identitas dirinya. Belajarlah dari sejarah Sunda dan jadilah *urang* Sunda yang sadar akan kekuatan dan kelemahan dirinya. Bacalah dengan seksama “pelajaran” yang terkandung dalam sejarah Sunda dan jadilah *urang* Sunda yang memiliki kekuatan dalam mengenal dan memaknai masa lalu untuk kemudian

²⁵ Edi S. Ekadjati, 1995b, op. cit., hal. 19.

²⁶ Ajip Rosidi. 1988. Hurip Waras: Dua Panineungan. Bandung: Pustaka Karsa Sunda, hal. 20.

dijadikan pijakan dalam memahami masa kini dan mengekstrapolasikannya bagi kepentingan masa yang akan datang.

Untuk bisa membumikan sejarah Sunda maka sejarah Sunda harus diupayakan terlepas dari *frame* sejarah nasional. Biarkanlah sejarah Sunda memiliki rohnya sendiri sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Dalam kaitan itu semua, perlu pula ada pengayaan pendekatan dalam melakukan rekonstruksi sejarah Sunda. Sejarah Sunda bisa direkonstruksi melalui pendekatan multidimensional atau bisa pula direkonstruksi melalui pendekatan interdisipliner, dengan memberi penekanan pada salah satu pendekatan saja, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun politik.

Berdasarkan pengenalan atas ruang-ruang sejarah Sunda yang telah terisi terlihat bahwa banyak “pelajaran” yang bisa dipetik dari perjalanan sejarah *tatar* Sunda. Satu di antaranya tentang potensi besar *tatar* Sunda di bidang perkebunan. Komoditi-komoditi perkebunan “temuan” kolonial, seperti kopi, teh, kina, dan karet, terbukti telah mampu mengangkat *tatar* Sunda dalam percaturan perdagangan internasional. Bahkan, di abad ke-19, *tatar* Sunda dikenal menjadi salah satu sentra produsen kopi terbesar di Hindia Belanda. Melihat realitas sejarah tersebut, tidak berlebihan kiranya bila kini *urang* Sunda berupaya menggali kembali potensi-potensi yang dulu pernah dimilikinya. Penanganan yang lebih profesional tentunya diharapkan tidak hanya sekedar mampu mengembalikan potensi yang dulu pernah dimiliki tetapi bisa jadi akan mampu pula meningkatkan potensi-potensi yang ada, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Menjadikan potensi-potensi tersebut sebagai daerah tujuan wisata dapat kiranya menjadi salah satu alternatif pilihan pengembangan. Terlebih infrastruktur warisan kolonial, yakni berupa jalur kereta api, masih memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

Persentuhan *urang* Sunda dengan berbagai budaya asing sepanjang perjalanan sejarahnya, sesuai dengan *zeitgeist*, memperlihatkan dengan jelas tentang terjadinya mondialisasi di *tatar* Sunda. Dengan demikian, mondialisasi atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah globalisasi bukanlah merupakan pengalaman baru bagi *urang* Sunda. Banyak hal positif yang diperoleh *urang* Sunda selama era mondialisasi. Namun dibalik dampak positif, mondialisasi di *tatar* Sunda menggambarkan pula tentang rentannya budaya Sunda dalam menghadapi realitas yang terjadi. Hal ini misalnya terjadi dengan bahasa dan aksara Sunda. Penggunaan bahasa Sunda sebagai bahasa tulisan sempat tergeser sekian lama oleh bahasa Jawa dan baru bisa bangkit kembali sebagai bahasa tulisan menjelang akhir abad ke-19. Itupun berkat prakarsa K.F. Holle (1829-1896), orang Belanda yang memiliki perhatian besar terhadap perkembangan budaya Sunda. Nasib lebih tragis dialami aksara Sunda. Setelah sempat teralienasikan ke daerah pegunungan yang terpencil (Kabuyutan Gunung Larang Srimanganti di Lereng

Gunung Cikuray, Garut Selatan), aksara Sunda harus mengakhiri hidupnya pada abad ke-18. Selanjutnya, peranannya digantikan oleh aksara Cacarakan yang dipinjam dari aksara Jawa (aksara Carakan), aksara Pegon yang dipinjam dari aksara Arab, dan aksara latin yang dipinjam dari budaya Eropa.²⁷

Rentannya daya hidup budaya Sunda dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman, diakui atau tidak, juga terjadi saat *urang* Sunda dan *tatar* Sunda memasuki era globalisasi dewasa ini. Di era globalisasi dewasa ini, budaya Sunda tampak mengalami tantangan yang serius. Namun, untuk menjawab tantangan tersebut, budaya Sunda seperti kehilangan energi dan daya hidupnya. Realitas tersebut, sebagaimana realitas yang terjadi semasa mondialisasi di era penetrasi Barat bisa jadi diakibatkan karena tidak jelasnya postur dan profil tentang budaya Sunda serta secara otomatis belum membuminya budaya Sunda di kalangan *urang* Sunda kebanyakan. Jadinya, *urang* Sunda seperti teralienasikan dari budayanya sendiri. Keteralienasian ini bahkan sering pula diikuti oleh keengganan *urang* Sunda untuk mengakui dirinya sebagai bagian dari budaya Sunda atau merepresentasikan diri sebagai *urang* Sunda.

Berpijak pada realitas tersebut, tidak pelak lagi kini diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk bisa mengembalikan identitas *urang* Sunda dan *tatar* Sunda. Dengan asumsi bahwa pudarnya identitas *urang* Sunda lebih diakibatkan oleh ketidakjelasan tentang profil dan postur budaya Sunda itu sendiri maka sebagai langkah awal perlu upaya yang serius untuk memformulasikan tentang Budaya Sunda. Postur Budaya Sunda dimaksud tentu tidak hanya sekedar bahasa dan kesenian, tetapi juga mencakup sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem mata pencaharian hidup, sistem pengetahuan, sistem religi, serta sistem teknologi, peralatan, dan perlengkapan hidup. Selanjutnya, reformulasi budaya Sunda harus diikuti pula dengan langkah-langkah strategis untuk membumikannya di kalangan *urang* Sunda. Janganlah sampai formulasi budaya Sunda yang dihasilkan nanti hanya sebatas menjadi wacana di atas kertas atau hanya menjadi milik eksklusif golongan atau kelompok tertentu.

Reformulasi budaya Sunda akan semakin terasa urgensinya bila mengingat bahwa tantangan yang dihadapi oleh *urang* Sunda kini menjadi bertambah berat dengan semakin terbukanya tatar Sunda oleh prasarana transportasi, baik darat (tol Cipularang) maupun udara (penerbangan langsung dari Bandung ke berbagai kota di luar negeri). Melalui reformulasi dan pembumian budaya Sunda diharapkan *urang* Sunda akan kembali tersadarkan tentang jati dirinya sehingga memiliki *filter* yang kuat dalam menyikapi derasnya pengaruh yang dihadapinya. Bahkan,

²⁷ Edi S. Ekadjati, 2004, *op. cit.*, hal. 26.

lebih dari itu akan melahirkan *sense of belonging* dan *sense of pride* terhadap budaya Sunda serta tentang jati dirinya sebagai *urang* Sunda.

Bagi ranah politik, khususnya pemerintah propinsi, reformulasi budaya Sunda diharapkan pula akan mampu menampung kebutuhan akan jawaban (*response*) bagi sebuah tantangan (*challenge*) di depan berupa kecenderungan kembalinya pembagian wilayah administrasi pemerintahan warisan abad ke-19, sehubungan dengan kuatnya hembusan angin otonomi daerah. Pembagian tatar Sunda atas empat wilayah karesidenan sebagaimana diumumkan Raffles tanggal 10 Agustus 1915, yakni Banten, Buitenzorg (Bogor), Cirebon, dan Priangan,²⁸ sadar atau tidak sadar, sepertinya akan berulang kembali (setelah dimulai oleh Banten dan kini riak-riaknya sudah muncul di Cirebon dan Bogor), meskipun kemasannya bukan lagi karesidenan tetapi propinsi. Manakala realitas tersebut benar-benar muncul ke permukaan, tanpa antisipasi yang matang, bisa jadi banyak kemungkinan yang akan muncul tentang perkembangan *urang* Sunda, *tatar* Sunda, dan budaya Sunda. Akan semakin menguat atau justru akan semakin memudar. Dengan adanya reformulasi budaya Sunda diharapkan perkembangan yang tidak menggembirakan dapat dihindari.

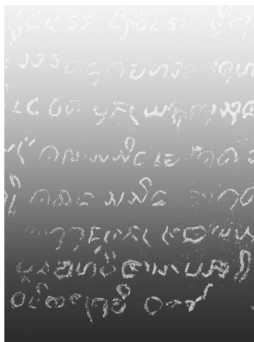
Di luar itu, reformulasi budaya Sunda diharapkan pula akan membuat *urang* Sunda menjadi semakin cerdas dan arief dalam menyikapi atau mengembangkan isu putra daerah. Pencerahan konsep isu putera daerah dalam era yang serba kompetitif tentunya sangat diperlukan agar *urang* Sunda tidak terkerdilkkan oleh tujuan sempit, “pokoknya *urang* Sunda”, “asal *urang* Sunda”, “yang penting *urang* Sunda”. Dengan demikian, kalaulah konsep putera daerah hendak dikembangkan sebagai wacana politik bagi kepemimpinan di *tatar* Sunda maka profil putera daerah tersebut setidaknya harus diformulasikan dengan memperhatikan dua parameter. Pertama, keturunan atau hubungan darah, serta sosial budaya. Kedua, dan yang lebih penting, *track record*-nya yang berkaitan dengan kapasitas kepemimpinan dan manajerial serta dalam memperjuangkan nasib *urang* Sunda dan budaya Sunda, baik di *tatar* Sunda maupun di luar *tatar* Sunda.

²⁸ L. Pronk, *De bestuursreorganisatie-Mullemeister op Java en Madoera en haar beteekenis voor het heden*, (Leiden: M. Dubbeldeman, 1929), hal. 4-5.; Otto van Rees, *Overzicht van de Geschiedenis der Preanger-Regentschappen*, (Batavia, 1880), hal. 129; R.A. Kern, *Geschiedenis der Preanger-Regentschappen; Kort Overzicht* (Bandung: De Vries & Fabricius, 1898), hal. 41-42.

DAFTAR SUMBER

- Alfian, T. Ibrahim. 1985. Sejarah dan Permasalahan Masa Kini, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada pada tanggal 12 Agustus 1985.
- Atja dan Saleh Danasasmita. 1981. Sanghyang Siksakanda Ng Karesian: (Naskah Sunda Kuno Tahun 1518 M). Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat.
- Danasasmita, Saleh, et.al. 1983/1984. Rintisan Penelusuran Masa Silam Sejarah Jawa Barat. 4 Vols. Bandung: Proyek Penerbitan Sejarah Jawa Barat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- Dienaputra, Reiza D. 1993. Kerajaan Sunda Pajajaran: Studi tentang Suksesi Kepemimpinan di Kerajaan Sunda Pajajaran. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.
- . 2004. Cianjur: Antara Priangan dan Buitenzorg (Sejarah Cikal Bakal Cianjur dan Perkembangannya Hingga 1942). Bandung: Prolitera.
- Ekadjati, Edi S. 1995a. Kebudayaan Sunda (Suatu Pendekatan Sejarah). Jakarta: Pustaka Jaya.
- . 1995b. Sunda, Nusantara, dan Indonesia: Suatu Tinjauan Sejarah. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran pada Hari Sabtu, 16 Desember 1995.
- . 2004. Kebangkitan Kembali Orang Sunda: Kasus Paguyuban Pasundan 1913-1918. Bandung: Kiblat Buku Utama.
- J. Hageman Cz. 1867. “Geschiedenis der Soendalanden”, TBG, XVI. Batavia.
- Kern, R.A. 1898. Geschiedenis der Preanger-Regentschappen; Kort Overzicht. Bandung: De Vries & Fabricius.
- Kunto, Haryoto. 1984. Wajah Bandoeng Tempo Doeloe. Bandung: Granesia.
- Lubis, Nina H., dkk. 2003. Sejarah Tatar Sunda. Jilid I dan II. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.
- L. Pronk. 1929. De bestuursreorganisatie-Mullemeister op Java en Madoera en haar beteekenis voor het heden. Leiden: M. Dubbeldeman.
- Otto van Rees, Otto van. 1880. Overzicht van de Geschiedenis der Preanger-Regentschappen. Batavia.
- Reitsma, S. A. 1912. De Wegen in de Preanger. Bandung: G. Kolff & Co.
- . 1928. Korte Geschiedenis der Nederlandsch-Indische Spoor en Tramwegen. Weltevreden: G. Kolff & Co.

- Roelcke, Gottfried dan Gary Crabb. 1994. All Around Bandung: Exploring the West Java Highlands. Bandung: Bandung Society for Heritage Conservation.
- Rosidi, Ajip. 1988. Hurip Waras: Dua Panineungan. Bandung: Pustaka Karsa Sunda.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1864, No. 54.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1916, No. 65.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1920, No. 150.
- Tourist Guide to Buitenzorg, the Preanger and Central Java. 1913. Weltevreden: Official Tourist Bureau.
- Verslag der Staatsspoor-en Tramwegen in Nederlandsch-Indie Jrg. 1925.
- Warnaen, Suwarsih et.al. 1987. Pandangan Hidup Orang Sunda. Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi) Depdikbud.



MENGENAL JAWA BARAT: SUATU KILAS BALIK SEJARAH*

Pengantar

Salah satu propinsi tertua di Indonesia adalah Jawa Barat. Dalam perjalanannya, begitu banyak dinamika perkembangan yang terjadi di propinsi yang mayoritas didiami etnis Sunda ini. Salah satu perkembangan yang relatif paling dinamis dan tampaknya akan terus mewarnai perkembangan propinsi Jawa Barat ke depan adalah berkaitan dengan perubahan wilayah administratif. Perubahan wilayah administratif yang terjadi di Jawa Barat, seiring dengan gairah otonomi daerah, tidak saja terjadi pada tataran pemerintahan di bawah propinsi tetapi juga pada tingkat propinsi itu sendiri.

Sepuh serta dinamisnya perjalanan Jawa Barat dalam panggung sejarah, secara implisit memperlihatkan keberadaannya sebagai wilayah yang potensial dalam berbagai segi. Sayangnya, perjalanan Sejarah Jawa Barat yang panjang tersebut tampaknya belum “membumi” dengan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Masih sedikit anggota masyarakat di Jawa Barat yang mengenali dengan baik perjalanan sejarah wilayah yang kini tengah ditinggalinya atau merupakan daerah asalnya. Padahal, pengenalan yang baik akan perjalanan sejarah Jawa Barat pada dasarnya akan menjadi *password* bagi timbulnya pemahaman yang baik akan berbagai potensi yang dimiliki Jawa Barat.

Sementara itu, perkembangan yang demikian dinamis dan kompleks telah menjadikan Jawa Barat sebagai propinsi yang demikian terbuka. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya kaum pendatang yang masuk dan tinggal di Jawa Barat. Keadaan demografis yang semakin hari semakin heterogen, pada akhirnya menjadikan Jawa Barat sebagai propinsi yang secara sosial budaya semakin hari semakin sulit untuk bisa tetap diidentikan secara kualitatif dengan etnis dan budaya Sunda. Jawa Barat kini telah menjadi hunian yang multi etnis dan secara otomatis

* Tulisan ini merupakan bahan ajar sekaligus materi presentasi dalam Kegiatan Pembekalan tentang Ruang Lingkup Permuseuman, Jarahnitra, dan Kepurbakalaan bagi Aparatur Disbudpar Propinsi Jawa Barat, yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Barat, Bandung, 4-5 Desember 2006.

multi budaya. Dalam kondisi demikian, menjadi sebuah pertanyaan besar, apakah Jawa Barat sebagai sebuah propinsi akan tetap eksis? Kalau tetap eksis, bagaimana pula kecenderungan perkembangan wilayah administratif propinsi Jawa Barat?

Lahirnya Propinsi Jawa Barat

Jawa Barat sebagai nama sebuah wilayah administratif tidak pelak lagi baru dikenal pada abad ke-20. Hal ini terjadi ketika Pemerintah Kolonial Belanda melalui *Bestuurs hervormingswet* atau Undang Undang Perubahan Pemerintahan yang dikeluarkan pada tahun 1922 (*Staatsblad* 1922/216) melakukan penataan administrasi pemerintahan di awal abad ke-20, dengan membentuk *gewest* (wilayah administratif) gaya baru yang disebut *provincie*. Secara hirarkis, wilayah administrasi setingkat *provincie* ini menempati posisi paling tinggi sesudah pemerintah pusat. *Provincie* terbagi lagi atas wilayah karesidenan (kemudian *afdeling*) serta daerah-daerah otonom *regentschap* (kabupaten) serta *stadsgemeente* (kotapraja).

Keberadaan Jawa Barat sebagai sebuah propinsi secara resmi dibentuk pada tanggal 1 Januari 1926 dan tertuang dalam *Staatsblad* tahun 1925 Nomor 378 tanggal 14 Agustus. Sebagai ibukota propinsi ditetapkan Batavia. Saat dibentuk tahun 1926, Jawa Barat terbagi atas 5 karesidenan, 18 kabupaten, dan 6 kotapraja, yakni,

- Karesidenan Banten, yang wilayahnya terdiri atas Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak.
- Karesidenan Batavia, yang wilayahnya meliputi Kabupaten Batavia, Kabupaten Meester Cornelis, Kabupaten Karawang, Kotapraja Batavia, dan Kotapraja Meester Cornelis.
- Karesidenan Buitenzorg, yang di dalamnya terdiri atas Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kotapraja Buitenzorg, dan Kotapraja Sukabumi.
- Karesidenan Priangan, yang terdiri atas Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kotapraja Bandung.
- Karesidenan Cirebon, yang wilayahnya meliputi Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kotapraja Cirebon.

Sebagai wilayah administratif yang menjadi tempat bermukimnya mayoritas etnis Sunda, sejak awal kelahirannya propinsi Jawa Barat tampak telah menjadi pusat perhatian *urang* Sunda. Hal ini terlihat dari munculnya tuntutan Paguyuban

Pasundan, organisasi pergerakan yang didirikan pada tanggal 20 Juli 1913,¹ terhadap Pemerintah Kolonial Belanda berkaitan dengan pembentukan *Provincie West Java*. Organisasi yang berorientasi sosial budaya Sunda ini menuntut pemerintah kolonial agar *Provincie West Java* yang akan dibentuk pada dasawarsa ketiga abad ke-20 diberi nama Propinsi Pasundan. Tuntutan Paguyuban Pasundan ini kemudian disetujui oleh pemerintah kolonial sehingga dalam ketetapan tentang pembentukan propinsi ini sebagaimana tercantum dalam *Staatsblad* tahun 1925 No. 285 dan 378, antara lain tertulis, “... West Java, in inheemsche talen aan te duiden als Pasoendan ...” (... Jawa Barat, dalam bahasa orang pribumi (bahasa Sunda) menunjuk sebagai Pasundan ...).² Realitas keejarahan yang menyertai kelahiran propinsi Jawa Barat ini secara eksplisit memperlihatkan bahwa keberadaan propinsi Jawa Barat sejak awal kelahirannya memang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan etnis Sunda beserta seluruh unsur kebudayaan yang dimilikinya. Dengan demikian, tidak berlebihan pula bila sejak pertama kali dibentuk propinsi Jawa Barat kemudian sering diidentikan dengan etnis Sunda dan dianggap sebagai pusat perkembangan kebudayaan Sunda.

Usia propinsi Jawa Barat produk pemerintah kolonial Belanda ini dapat dikatakan berakhir pada tahun 1942 setelah Jepang menghapus wilayah administrasi pemerintahan setingkat propinsi. Sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 27 Tahun 1942 yang mulai berlaku tanggal 8 Agustus 1942, pemerintah pendudukan Jepang hanya mengadopsi Syu (karesidenan) sebagai pemerintah daerah tertinggi di Jawa, termasuk di dalamnya Jawa Barat. Namun demikian, pimpinan Syu (*syucokan*) di era Jepang ini kedudukannya jauh lebih luas dibanding pimpinan karesidenan (*residen*) di era pemerintah kolonial Belanda. Sebagai pimpinan daerah tertinggi yang bersifat otonom, *syucokan* tidak hanya memegang kekuasaan eksekutif tetapi juga legislatif. Di era Jepang ini, wilayah Jawa Barat terbagi atas lima syu, yaitu Banten Syu, Jakarta Syu, Bogor Syu, Priangan Syu, dan Cirebon Syu.³

Kelahiran kembali Jawa Barat sebagai sebuah propinsi terjadi pada tanggal 19 Agustus 1945 dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Di samping Jawa Barat, terdapat 7 propinsi lain yang dibentuk dalam waktu bersamaan, yakni, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku,

¹ Edi S. Ekadjati, *Kebangkitan Kembali Orang Sunda: Kasus Paguyuban Pasundan 1913-1918*, (Bandung: Kiblat Buku Utama, 2004), hal. 38.

² Edi S. Ekadjati. 1995. *Sunda, Nusantara, dan Indonesia: Suatu Tinjauan Sejarah*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran pada Hari Sabtu, 16 Desember 1995. Bandung: Universitas Padjadjaran, hal. 4.

³ Edi S. Ekadjati, et.al., *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jawa Barat*, (Bandung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1980/1981), hal. 15.

dan Sunda Kecil. Propinsi Jawa Barat produk kemerdekaan ini dipimpin oleh Sutarjo Kartohadikusumo sebagai gubernur, dengan ibukota propinsi berkedudukan di Jakarta. Sebelum diangkat menjadi gubernur Jawa Barat, Sutarjo menjadi *Syucokan* (residen) Jakarta Syu (1943-1945). Seiring dengan dinamika perjuangan bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan, keberadaan Sutarjo sebagai gubernur Jawa Barat tidaklah berlangsung lama. Demikian pula dengan gubernur-gubernur Jawa Barat lainnya yang memerintah dalam masa revolusi fisik. Hal ini terlihat dari relatif banyaknya gubernur yang pernah memerintah Jawa Barat dalam kurun waktu 1945-1950, yakni Sutarjo Kartohadikusumo (19 Agustus 1945 – Desember 1945), Datuk Jamin (Desember 1945 – Juni 1946), Murjani (Juni 1946 – Maret 1947), M Sewaka (April 1947 – 1948), dan Ukar Bratakusumah (Desember 1948 – 1950).

Saat pertama kali dibentuk di era kemerdekaan, propinsi Jawa Barat terdiri atas 5 karesidenan, 18 kabupaten, dan 5 kotapraja, yakni,

- Karesidenan Banten, yang wilayahnya terdiri atas Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak.
- Karesidenan Jakarta, yang wilayahnya meliputi Kabupaten Jakarta, Kabupaten Jatinegara, Kabupaten Karawang, dan Kotapraja Jakarta.
- Karesidenan Bogor, yang di dalamnya terdiri atas Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kotapraja Bogor, dan Kotapraja Sukabumi.
- Karesidenan Priangan, yang terdiri atas Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kotapraja Bandung.
- Karesidenan Cirebon, yang wilayahnya meliputi Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kotapraja Cirebon.

Melihat pembagian wilayah Jawa Barat pada era kemerdekaan, secara implisit terlihat bahwa pembagian wilayah administratif tersebut secara umum relatif hampir sama dengan pembagian wilayah administratif propinsi Jawa Barat produk pemerintah kolonial Belanda. Sedikit perbedaan terdapat pada perubahan nama dua buah karesidenan (Karesidenan Batavia menjadi Karesidenan Jakarta dan Karesidenan Buitenzorg menjadi Karesidenan Bogor), perubahan nama dua buah kabupaten (Kabupaten Batavia menjadi Kabupaten Jakarta dan Kabupaten Meester Cornelis menjadi Kabupaten Jatinegara), penghapusan satu kotapraja (Meester Cornelis), dan penataan wilayah Karesidenan Jakarta (dari tiga kabupaten dan dua kotapraja menjadi tiga kabupaten dan satu kotapraja).

Deskripsi Umum Sejarah Jawa Barat

Dari uraian di atas, secara eksplisit terlihat bahwa bila Jawa Barat dimaknai sebagai sebuah wilayah administratif yang bernama propinsi pada dasarnya “hanya” ada dua pilihan untuk dapat ditetapkan sebagai hari kelahirannya. Pertama, Jawa Barat yang dibentuk di era kolonial, yakni tanggal 1 Januari 1926. Kedua, Jawa Barat yang dibentuk pada era kemerdekaan, yakni tanggal 19 Agustus 1945. Namun, bila Jawa Barat dimaknai sebagai sebuah wilayah geografis tentu memiliki akar sejarah yang lebih panjang lagi, yang untuk menetapkan hari kelahirannya masih memerlukan perdebatan panjang. Apapun pilihan yang akan diambil, untuk sementara ada baiknya bila Jawa Barat di sini dipahami sebagai sebuah wilayah propinsi sebagaimana adanya sekarang yang bila ditarik ke kelampauan, wilayah-wilayah yang kini dicakupnya sarat dengan berbagai potensi.

Selanjutnya, untuk memudahkan proses pengenalan terhadap Jawa Barat di masa lampau, secara umum dapat dikatakan bahwa sejarah Jawa Barat atau sejarah wilayah tempat bermukimnya *urang Sunda*⁴ atau sejarah wilayah tempat beradanya *tatar Sunda*⁵ mencakup kurun waktu yang sangat panjang, yakni dari masa prasejarah hingga masa sejarah. Masa prasejarah dalam sejarah Jawa Barat berakhir manakala ditemukan bukti-bukti tertulis berupa prasasti dari kerajaan Tarumanegara.

Era sejarah dalam Sejarah Jawa Barat yang dimulai sejak abad ke-5 atau sejak ditemukannya prasasti kerajaan Tarumanegara telah berlangsung hingga lebih dari 15 abad. Mengingat rentang waktu yang panjang tersebut tentu bukanlah merupakan hal yang mudah untuk bisa mengenal dengan baik Sejarah Jawa Barat. Terlebih lagi realitas memperlihatkan bahwa pada beberapa babakan,

⁴ Urang Sunda secara sederhana dapat diartikan sebagai orang yang mengaku dirinya dan diakui oleh orang lain sebagai orang Sunda. Dalam pengertian tersebut setidaknya tercakup dua kriteria besar yang dapat dijadikan pegangan untuk menyebut seseorang sebagai urang Sunda atau bukan urang Sunda. Kriteria pertama didasarkan atas keturunan atau hubungan darah. Dengan demikian, seseorang dikatakan urang Sunda apabila orang tuanya, baik dari pihak ayah maupun ibu, atau keduanya adalah orang Sunda, terlepas dimana ia berada atau dibesarkan. Kriteria kedua didasarkan atas sosial budaya. Seseorang dikatakan urang Sunda apabila ia dibesarkan dalam lingkungan sosial budaya Sunda dan dalam hidupnya menghayati serta mempergunakan norma-norma dan nilai budaya Sunda. Dalam kriteria kedua ini, yang dianggap penting adalah tempat tinggal, kehidupan sosial budaya, dan sikap orangnya. Edi S. Ekadjati, *Kebudayaan Sunda (Suatu Pendekatan Sejarah)*. (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hal.7-8; Suwarsih Warnaen, et.al., *Pandangan Hidup Orang Sunda*. (Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi) Depdikbud, 1987), hal. 1.

⁵ Untuk menetapkan sebuah wilayah geografis yang bernama tatar Sunda bukanlah merupakan hal yang mudah, malahan bila hal tersebut dilakukan dengan tidak hati-hati bisa jadi akan menimbulkan kegoncangan yang cukup serius. Lantas, kalau memang Jawa Barat sudah sulit untuk direpresentasikan sebagai tanah Sunda, masih adakah wilayah yang bisa dinamakan sebagai tatar Sunda atau daerah manakah sebenarnya yang bisa dikatakan sebagai tanah

perjalanan Sejarah Jawa Barat hanya menyisakan sumber-sumber sejarah yang amat sangat terbatas atau bahkan tidak menyisakan sumber sama sekali. Namun demikian, untuk memudahkan pengenalan, secara umum Sejarah Jawa Barat dapat didekati dengan membaginya dalam dua periodisasi besar, yakni masa sebelum kemerdekaan dan masa sesudah kemerdekaan.

Masa sebelum kemerdekaan dalam Sejarah Jawa Barat meliputi masa Hindu-Budha, masa Islam, masa penetrasi Barat, dan masa penetrasi Jepang. Masa Hindu Budha antara lain ditandai oleh munculnya dua kerajaan besar, yakni kerajaan Tarumanegara (Abad V – VII)⁶ dan kerajaan Sunda (VII – XVI).⁷ Masa Islam antara lain ditandai oleh munculnya dua kesultanan besar, yakni kesultanan Cirebon dan kesultanan Banten. Masa penetrasi Barat di Jawa Barat ditandai oleh munculnya rezim penguasa Barat, mulai dari VOC, Inggris, hingga pemerintah kolonial Belanda. Masa penetrasi Jepang ditandai oleh berkuasanya pemerintah pendudukan Jepang di Jawa Barat.

Pasca kemerdekaan, Sejarah Jawa Barat sarat dengan berbagai peristiwa besar. Peristiwa Bojongsokosan, Bandung Lautan Api, Kongres Pemuda Sunda, aksi mahasiswa dalam masa transisi pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, aksi mahasiswa di akhir kekuasaan Soeharto, aksi-aksi kerusuhan anti cina, dan Konferensi Internasional Budaya Sunda merupakan beberapa contoh peristiwa yang dapat diangkat ke permukaan.

Sunda. Dalam kaitan ini, Edi S. Ekadjati mengatakan bahwa tanah Sunda merujuk pada bekas wilayah Kerajaan Sunda Pajajaran, yang kemudian berdiri sendiri, yakni Sumedang Larang, Banten, Cirebon, dan Galuh. Sumedang Larang dan Galuh kemudian menjadi satu wilayah kesatuan dengan nama Priangan. Dalam perkembangan berikutnya, Priangan sering dikatakan sebagai pusat tanah Sunda. Edi S. Ekadjati, 1995a, op. cit., hal.7-8.

⁶ Setidaknya ada tujuh prasasti yang berhasil diketemukan berkaitan dengan keberadaan Kerajaan Tarumanegara. Pertama, Prasasti Tugu. Ditemukan di desa Tugu dekat Cilincing, Jaktim, kini tersimpan di Museum Nasional. Kedua, Prasasti Ciaruteun. Ditemukan dipinggir sungai Ciaruteun, Kampung Muara, Kabupaten Bogor, kini berada di lokasi yang tidak jauh dari tempat penemuan. Ketiga, Prasasti Kebon Kopi. Ditemukan tidak jauh dari tempat ditemukannya Prasasti Ciaruteun. Keempat, Prasasti Jambu (Pasir Koleangkak). Ditemukan di sebuah bukit yang bernama Koleangkak di daerah perkebunan Jambu, Desa Parakanmuncang, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Kelima, Prasasti Pasir Awi. Ditemukan di Kabupaten Bogor, tidak jauh dari lokasi penemuan prasasti lainnya. Keenam, Prasasti Pasirmuara. Ditemukan di Kabupaten Bogor, tidak jauh dari lokasi penemuan prasasti lainnya. Ketujuh, Prasasti Cidanghiang. Ditemukan di Kampung Lebak, di Pinggir Sungai Cidanghiang, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten.

⁷ Sebagaimana halnya kerajaan Tarumanegara, keberadaan kerajaan Sunda di Tatar Sunda dibuktikan oleh temuan beberapa prasasti, seperti, pertama, Prasasti Canggal. Ditemukan di halaman permandian Gunung Wukir, Magelang, berangka tahun 654 Saka/732 M, mencantumkan nama raja Sanjaya dan Silsilahnya). Kedua, Prasasti Rakryan Juru Pangambat. Ditemukan di Bogor, berangka tahun 854 Saka/932 M, mencantumkan raja Sunda. Ketiga, Prasasti Cibadak/Sang Hyang Tapak. Ditemukan di Cibadak, Sukabumi, menyebut Sri Jayabhupati

Potensi Jawa Barat

Salah satu kekayaan sejarah Jawa Barat adalah kekayaan demografis. Hal ini setidaknya tampak pada pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 1930 atau kurang lebih lima tahun sesudah propinsi Jawa Barat terbentuk, penduduk Jawa Barat tercatat berjumlah 9.044.535 orang. Memasuki kemerdekaan atau kurang lebih 16 tahun sesudah propinsi Jawa Barat produk bangsa Indonesia terbentuk, jumlah penduduk propinsi Jawa Barat tercatat sebanyak 15.175.981 orang. Pertumbuhan selanjutnya penduduk propinsi Jawa Barat memperlihatkan perkembangan yang terus meningkat, yakni dari 18.587.530 orang pada tahun 1971 menjadi 23.434.003 pada tahun 1980, 29.414.375 orang pada tahun 1990, 35.723.473 orang pada tahun 2000, dan 39.140.812 orang pada tahun 2004.⁸ Jumlah penduduk yang demikian besar jelas merupakan salah satu warisan sejarah potensial yang kini dimiliki propinsi Jawa Barat.

Dinamika perkembangan demografis tampak sama dan sebangun dengan dinamika perkembangan di berbagai sektor pembangunan, baik sosial budaya, agama, maupun ekonomi. Di bidang sosial budaya, khususnya pendidikan, dengan segala kekurangan yang ada didalamnya, Jawa Barat terlihat mengalami perkembangan yang sangat pesat. Keberadaan Jawa Barat sebagai pusat pendidikan di era kolonial, yang ditandai oleh relatif banyaknya tempat-tempat pendidikan, khususnya bagi penduduk Eropa, seperti HIS, *Volkschool*, MULO, HBS, AMS, hingga pendidikan tinggi semacam THS, tampak tetap bertahan hingga era kemerdekaan. Hal ini ditandai dengan berdirinya berbagai prasarana dan sarana pendidikan yang baru, mulai pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta. Kesemua pusat-pusat pendidikan

sebagai Raja Sunda serta larangan menangkap ikan di daerah tertentu yang disebut Sunda Sembawa serta kutukan bagi yang melanggarnya. Keempat, Prasasti-prasasti Kawali. Ditemukan di Situs Astana Gede, Kawali, Ciamis, berasal dari abad ke-14 M, salah satu prasastinya menyebut nama gelar Prabu Wastu. Kelima, Prasasti Batu Tulis. Ditemukan di Batutulis Bogor, berangka tahun 1455 Saka/1533 M, di dalamnya mencantumkan tiga orang raja Sunda, yakni Prabu Guru Dewataprana alias Sri Baduga Maharaja atau Sri Ratu Dewata, Rahiyang Dewa Niskala, dan Rahiyang Niskala Wastukencana. Ketiganya memiliki tali ikatan anak, ayah, dan kakek. Keenam, Prasasti-prasasti Kabantenan. Berasal dari abad ke-16, kelima buah prasastinya berisi penetapan wilayah-wilayah tertentu sebagai daerah yang dibebaskan dari pajak atas dasar kesucian atau kepentingan keagamaan. Di luar prasasti-prasasti di atas, berbeda dengan kerajaan Tarumanegara, keberadaan kerajaan Sunda juga dibuktikan oleh beberapa sumber tertulis lainnya, seperti, Naskah Carita Parahyangan (berasal dari Abad ke-16), Naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian (berangka tahun 1440 Saka/1518 M, berisi ajaran kesucilaan, yang di dalamnya memuat norma-norma kehidupan yang mengatur pola tingkah laku manusia pada masa kerajaan Sunda, khususnya pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja), Catatan Tomi Pires, dan Catatan Joao de Barros.

⁸ Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat, *Seri Kependudukan Jawa Barat Tahun 1920 – 2004*, hal.1-2.

tersebut, baik sekolah dasar, sekolah menengah umum, sekolah menengah kejuruan, maupun perguruan tinggi tentunya berbeda dengan era kolonial diabdikan sebanyak-banyaknya bagi kepentingan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki propinsi Jawa Barat.

Keberadaan Jawa Barat sebagai pusat kegiatan keagamaan pada dasarnya telah dikenal sejak era kolonial. Hal ini terlihat dari banyaknya *geestelijke scholen* (pesantren) yang dimiliki berbagai kabupaten yang di kemudian hari menjadi wilayah propinsi Jawa Barat. Sebagai contoh, pada tahun 1856, di Cianjur setidaknya telah ada 27 *geestelijke school*, Kabupaten Bandung 57 *geestelijke school*, Kabupaten Sumedang 84 *geestelijke school*, Kabupaten Sukapura 3 *geestelijke school*, Kabupaten Limbangan 53 *geestelijke school*. Adapun Jumlah murid yang bersekolah di *geestelijke scholen* yang ada di Kabupaten Cianjur, Bandung, Sumedang, Sukapura, dan Kabupaten Limbangan, masing-masing berjumlah 1090 orang, 1292 orang, 2017 orang, 35 orang, dan 688 orang.⁹ Kurang lebih 17 tahun kemudian atau tepatnya tahun 1873, jumlah *geestelijke scholen* di kabupaten-kabupaten tersebut mengalami peningkatan yang relatif tajam, masing-masing menjadi 174 *geestelijke scholen* di Cianjur, 79 di Sukapura, 162 di Bandung, 122 di Sumedang, dan 68 *geestelijke scholen* di Limbangan.¹⁰

Realitas kehidupan masyarakat Jawa Barat yang sangat religius di era kolonial tampaknya terus bertahan hingga era kemerdekaan. Oleh karenanya, tidak mengherankan bila pembangunan bidang agama di Jawa Barat pada era kemerdekaan terbilang sangat dinamis. Hal ini ditandai oleh banyak dibangunnya tempat-tempat peribadatan untuk berbagai umat beragama, seperti masjid, langgar, mushola, gereja, pura, dan vihara di berbagai kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat. Hingga tahun 1998, di propinsi Jawa Barat setidaknya telah berdiri sebanyak 43.348 masjid, 17.281 langgar, 88.537 mushola, 802 gereja protestan, 114 gereja katolik, 28 pura, dan 99 vihara.¹¹ Di luar itu, Jawa Barat juga kaya dengan berbagai bangunan pesantren, baik lama maupun baru. Keberadaan pesantren di Jawa Barat ini jelas berperan besar dalam turut dan tetap menciptakan masyarakat Jawa Barat sebagai masyarakat yang religius.

Di bidang ekonomi, potensi Jawa Barat tampak di bidang perkebunan. Hal ini terlihat dari keberadaan Jawa Barat sebagai sentra produksi unggulan berbagai komoditas perkebunan di era kolonial, seperti, kopi, teh, karet, kina, dan tebu.¹²

⁹ ANRI, Koleksi Arsip Priangan, Politiek Verslag 1856, Bundel 1/2.

¹⁰ ANRI, Koleksi Arsip Priangan, Politiek Verslag 1873, Bundel No. 1/19.

¹¹ Biro Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat, Jawa Barat Dalam Angka: *Jawa Barat In Figures*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999), hal. 139 dan 145.

¹² Reiza D. Dienaputra. Cianjur: Antara Priangan dan Buitenzorg: Sejarah Cikal Bakal Cianjur dan Perkembangannya Hingga 1942. (Bandung: Prolitera, 2004).

Keberadaan komoditas perkebunan tersebut di Jawa Barat telah menjadikan Jawa Barat sebagai bagian dari jaringan perdagangan internasional. Oleh karena itu, meskipun sektor perkebunan cukup mendapat perhatian pemerintah tetapi optimalisasi potensi perkebunan tampaknya masih terus perlu dilakukan, baik dalam upaya membangun kembali berbagai komoditas unggulan perkebunan yang dulu telah terbukti mampu menjadikan Jawa Barat sebagai sentra produksi yang dibutuhkan pasar dunia maupun dalam upaya mengemas “situs-situs” perkebunan menjadi objek budaya atau “museum hidup” yang memiliki nilai jual.

Melekat erat dengan potensi di bidang perkebunan ini adalah potensi di bidang transportasi kereta api. Pembangunan jalan kereta api di wilayah Jawa Barat dilakukan secara bertahap atau dimulai setelah jalur Batavia-Buitenzorg mulai operasional pada tanggal 31 Januari 1873. Tahap pertama pembangunan jalan kereta api memasuki pedalaman Jawa Barat dimulai dari Buitenzorg menuju Cicurug. Lintasan Buitenzorg-Cicurug sepanjang 27 kilometer ini berhasil diselesaikan pada tanggal 5 Oktober 1881. Lintasan kereta api selanjutnya yang dibangun adalah lintasan Cicurug-Sukabumi. Lintasan sepanjang 30 kilometer ini berhasil diselesaikan pada tanggal 21 Maret 1882. Pembangunan jalan kereta api tahap ketiga dilakukan untuk menghubungkan Sukabumi dengan Cianjur. Pembangunan jalur jalan kereta api Sukabumi-Cianjur sepanjang 39 kilometer berhasil diselesaikan tanggal 10 Mei 1883. Tahap pembangunan jalan kereta api selanjutnya dilakukan untuk menghubungkan wilayah Cianjur dengan ibukota Karesidenan Priangan, Bandung. Jalur jalan kereta api Cianjur-Bandung sepanjang 59 kilometer, secara resmi mulai dioperasikan sejak tanggal 17 Mei 1884.¹³

Dengan selesainya seluruh jalur lintasan kereta api yang menghubungkan Buitenzorg-Cianjur serta Cianjur-Bandung, secara otomatis sejak tahun 1884 perjalanan dari satu daerah ke daerah lain di Jawa Barat waktunya bisa lebih dipersingkat. Sebagai contoh, untuk perjalanan Cianjur-Buitenzorg, yang semula memerlukan waktu tempuh 8 jam dengan menggunakan kereta kuda, sejak dibangunnya jalan kereta api, hanya memerlukan waktu selama 2,5 jam. Untuk perjalanan Cianjur-Bandung, yang semula memerlukan waktu 5,5 jam dengan menggunakan kereta kuda, dengan adanya sarana kereta api bisa dipersingkat menjadi sekitar 2 jam.¹⁴

Memasuki abad ke-20, pemerintah kolonial tetap melakukan berbagai

¹³ S.A. Reitsma, *De Wegen in de Preanger*, (Bandung: G. Kolff & Co., 1912), hal. 16-17; S.A. Reitsma, *Korte Geschiedenis der Nederlandsch-Indische Spoor en Tramwegen*, (Weltevreden: G. Kolff & Co., 1928), hal. 24 dan 37.

¹⁴ *Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1864*, No. 54; *Tourist Guide to Buitenzorg, the Preanger and Central Java*, (Weltevreden: Official Tourist Bureau, 1913) hal. 27, 34, dan 42.

pembangunan prasarana dan sarana transportasi kereta api. Sebagai misal, perjalanan kereta api dari Bandung menuju Batavia dan sebaliknya dibuat jalur baru melalui Purwakarta dan Cikampek. Jalur ini mulai dioperasikan sejak 1 November 1934. Melalui jalur baru ini, perjalanan Bandung-Batavia waktu tempuhnya dapat dipersingkat menjadi hanya 2 $\frac{3}{4}$ jam.¹⁵ Untuk menampung besarnya minat penumpang yang menggunakan transportasi kereta api jalur Batavia-Bandung ini, perusahaan kereta api negara (*Staats Spoorwegen*), yang memiliki motto 4S (*Staats Spoor Steeds Sneller*),¹⁶ mengoperasikan sekaligus empat rangkaian kereta api dalam sehari. Pelayanan kereta api Batavia-Bandung ini kemudian dikenal dengan nama *vlugge vier* (empat cepat).

Untuk jarak pendek, dibangun pula jalur kereta api dari Bandung menuju daerah-daerah pedalaman (*hinterland*). Secara umum pembangunannya bisa dikatakan dibagi dalam dua tahapan. Tahap pertama, pembangunan jalur kereta api yang trayeknya didasarkan atas UU tanggal 4 Januari 1916.¹⁷ Dalam tahap pertama ini setidaknya berhasil dibangun tiga jalur lintasan kereta api, yakni jalur Rancaekek-Jatinangor, jalur Bandung-Soreang, dan jalur Soreang-Ciwidey. Jalur Rancaekek-Jatinangor selesai dibangun pada tanggal 23 Februari 1918. Jalur Bandung-Soreang selesai dibangun tanggal 13 Februari 1921. Jalur Soreang-Ciwidey selesai dibangun tanggal 17 Juni 1924.

Tahap kedua, pembangunan jalur kereta api yang trayeknya ditetapkan dalam UU tanggal 28 Februari 1920.¹⁸ Berbeda dengan tahap pertama, pembangunan jalur lintasan rel kereta api tahap kedua ini hanya membangun dua jalur lintasan kereta api baru, yakni jalur lintasan Bandung-Citeureup-Majalaya dan jalur lintasan Dayeuhkolot-Majalaya. Pembangunan jalur sepanjang 6 kilometer ini berhasil diselesaikan tanggal 6 Juni 1919. Jalur lintasan Bandung-Citeureup-Majalaya selesai dibangun tanggal 18 Maret 1921. Jalur lintasan Dayeuhkolot-Majalaya selesai dibangun tanggal 3 Maret 1922.

Bisa dipastikan kehadiran sistem transportasi kereta api di Jawa Barat telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Jawa Barat. Meskipun pembangunan transportasi kereta api tersebut lebih ditujukan untuk memenuhi kepentingan para pengusaha dalam upaya mempermudah serta mempercepat pemasaran komoditas-komoditas perkebunannya tetapi kehadirannya sedikit banyaknya tetap mampu membawa perubahan pada kehidupan sehari-hari

¹⁵ Haryoto Kunto, *Wajah Bandoeng Tempo Doeloe*, (Bandung: Granesia, 1984), hal. 101.

¹⁶ Gottfried Roelcke dan Gary Crabb, *All Around Bandung: Exploring the West Java Highlands*, (Bandung: Bandung Society for Heritage Conservation, 1994), hal. 25.

¹⁷ *Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1916*, No. 65.

¹⁸ *Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1920*, No. 150.

masyarakat Jawa Barat. Geliat sosial ekonomi dialami masyarakat Jawa Barat, khususnya di sekitar stasiun dan halte-halte yang menjadi tempat pemberangkatan dan penurunan penumpang. Gejar pengaruh keberadaan revolusi sistem transportasi di Jawa Barat pada abad 19 dan abad ke-20 terhadap kehidupan masyarakat ini bisa jadi akan hampir menyerupai gejar pengaruh selesainya pembangunan jalan tol Cipularang pada tahun 2005 terhadap kehidupan masyarakat di Jawa Barat.

Tantangan Ke Depan

Di usianya yang semakin matang, provinsi Jawa Barat kini dihadapkan pula dengan berbagai tantangan yang semakin berat, yang tidak saja berasal dari luar tetapi juga berasal dari dalam. Globalisasi yang semakin intens yang secara kualitatif berbeda dengan era sebelumnya, suka atau tidak suka, telah menempatkan Jawa Barat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari percaturan dunia. Jawa Barat sebagaimana di era sebelum kemerdekaan, dengan segala potensi yang dimilikinya tidak pelak lagi kini menjadi ajang rebutan pengaruh para pemilik modal besar, baik pemilik modal dalam negeri maupun modal asing. Rebutan pengaruh tersebut secara perlahan tapi pasti akan berdampak sangat luas terhadap berbagai pranata yang ada dan dimiliki Jawa Barat. Oleh karenanya, untuk meminimalisir pengaruh negatif globalisasi serta memaksimalkan pengaruh positif globalisasi bagi pembangunan Jawa Barat yang lebih berkualitas diperlukan adanya strategi penyikapan yang cerdas dari pemerintah dan masyarakat Jawa Barat. Tanpa adanya strategi penyikapan yang cerdas bisa jadi Jawa Barat beserta segala potensi yang dimilikinya hanya akan menjadi penonton globalisasi atau bahkan mainan para pemilik modal.

Dari dalam, tantangan terbesar berkait erat dengan daya tahan penduduknya dalam menghadapi pengaruh mondialisasi, khususnya dalam mempertahankan identitas dan jati dirinya sebagai orang Indonesia, atau lebih khusus lagi sebagai warga Jawa Barat. Derasnya pengaruh budaya asing di Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir terbukti telah turut berpengaruh terhadap jati diri masyarakat Jawa Barat serta eksistensi unsur-unsur kebudayaan yang dimiliki kebudayaan daerah di Jawa Barat. Untuk menjawab itu semua, jelas diperlukan adanya strategi kebudayaan yang tepat sehingga masyarakat tetap sadar dengan jati dirinya dan kebudayaan daerah yang ada di Jawa Barat dapat tetap eksis di tatar Jawa Barat. Terlebih meskipun Jawa Barat kini semakin heterogen oleh berbagai etnis dan kebudayaan non Sunda tetapi realitas sejarah telah membuktikan bahwa Jawa Barat adalah buminya etnis Sunda dan kebudayaan Sunda. Janganlah karena ketiadaan atau lemahnya strategi kebudayaan, etnis Sunda dan kebudayaan Sunda harus kehilangan bumi tempatnya berpijak.

Tantangan lain yang tidak kalah penting ke depan adalah membuat Jawa Barat tetap eksis sebagai sebuah wilayah administratif. Belajar dari lepasnya Banten¹⁹ sebagai bagian wilayah administratif propinsi Jawa Barat hal ini setidaknya memperlihatkan sebuah realitas tersembunyi tentang adanya ketidakpuasan masyarakat di wilayah Banten atas kinerja pemerintah propinsi Jawa Barat dalam memajukan wilayah tersebut. Dengan terbentuknya propinsi Banten, yang kaya akan PAD, masyarakat Banten berharap bahwa roda pembangunan akan berkembang lebih cepat, bahkan mendahului saudara tuanya, propinsi Jawa Barat.

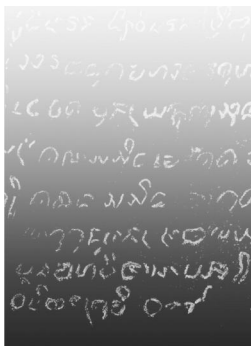
Dalam kaitan itulah, kenyataan terlepasnya Banten ini bila tidak disikapi dengan cermat bisa jadi akan membuka kemungkinan munculnya Banten Banten baru. Benih-benih ke arah upaya pemisahan diri tersebut tanpa bisa dipungkiri kini tampak mulai muncul di sebagian wilayah propinsi Jawa Barat. Salah dalam menyikapi geliat untuk memisahkan diri, bukan hal yang mustahil akan melahirkan propinsi baru lagi di Jawa Barat. Perlu dicermati dengan seksama bahwa kecenderungan munculnya lagi propinsi baru di Jawa Barat tampaknya, langsung atau tidak langsung, seperti terinspirasi oleh format pembagian wilayah di era kolonial. Dalam hal ini, wilayah-wilayah yang bergolak adalah wilayah-wilayah yang semasa pemerintah kolonial Belanda merupakan wilayah karesidenan. Banten yang sejak tahun 2000 menjadi propinsi pada dasarnya merupakan bekas wilayah Karesidenan Banten. Di Jawa Barat, kini masih ada tiga wilayah yang dulu merupakan sebuah karesidenan, yakni, Bogor, Priangan, dan Cirebon. Akankah ketiga wilayah tersebut mengikuti jejak Banten untuk menjadi sebuah propinsi, waktu jualah yang akan menentukannya. Namun, bila hal itu benar-benar terjadi, bisa jadi Jawa Barat sebagai sebuah wilayah administratif hanya tinggal kenangan. Jawa Barat kelak hanya akan dikenal sebagai sebuah wilayah geografis yang terletak di bagian Barat pulau Jawa.

¹⁹ Banten lepas dari Jawa Barat sejak 4 Oktober 2000, sebagaimana diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR dan tampil menjadi propinsi tersendiri berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2000 tertanggal 17 Oktober 2000. Lahirnya propinsi Banten secara otomatis membuat propinsi Jawa Barat harus rela melepas beberapa wilayah administratif di bawahnya, yakni, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon. Lepasnya Banten beserta 4 kabupaten dan 2 kota yang ada di dalamnya tentu tidak sekedar menjadikan propinsi Jawa Barat berkurang wilayah administratifnya tetapi juga membuat propinsi Jawa Barat harus kehilangan PAD dalam jumlah yang tidak sedikit.

DAFTAR SUMBER

- Alfian, T. Ibrahim. 1985. Sejarah dan Permasalahan Masa Kini, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada pada tanggal 12 Agustus 1985.
- ANRI, Koleksi Arsip Priangan, Politiek Verslag 1856, Bundel 1/2.
- ANRI, Koleksi Arsip Priangan, Politiek Verslag 1873, Bundel No. 1/19.
- Atja dan Saleh Danasasmita. 1981. Sanghyang Siksakanda Ng Karesian: (Naskah Sunda Kuno Tahun 1518 M). Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat. 2004. Seri Kependudukan Jawa Barat Tahun 1920 – 2004.
- Biro Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat. 1999. Jawa Barat Dalam Angka: Jawa Barat In Figures. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Biro Pusat Statistik. 2003. Jawa Barat Dalam Angka 2003. Bandung: Kantor Statistik Propinsi Jawa Barat.
- Danasasmita, Saleh, et.al. 1983/1984. Rintisan Penelusuran Masa Silam Sejarah Jawa Barat. 4 Vols. Bandung: Proyek Penerbitan Sejarah Jawa Barat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- Dienaputra, Reiza D. 1993. Kerajaan Sunda Pajajaran: Studi tentang Sukses Kepemimpinan di Kerajaan Sunda Pajajaran. Bandung: Lemlit UNPAD
- . 2004. Cianjur: Antara Priangan dan Buitenzorg (Sejarah Cikal Bakal Cianjur dan Perkembangannya Hingga 1942). Bandung: Prolitera.
- Ekadjati, Edi S., et.al. 1980/1981. Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jawa Barat. Bandung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- . 1995a. Kebudayaan Sunda (Suatu Pendekatan Sejarah). Jakarta: Pustaka Jaya.
- . 1995b. Sunda, Nusantara, dan Indonesia: Suatu Tinjauan Sejarah. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran pada Hari Sabtu, 16 Desember 1995.
- . 2004. Kebangkitan Kembali Orang Sunda: Kasus Paguyuban Pasundan 1913-1918. Bandung: Kiblat Buku Utama.
- J. Hageman Cz. 1867. “Geschiedenis der Soendalanden”, TBC, XVI. Batavia.

- Kern, R.A. 1898. Geschiedenis der Preanger-Regentschappen; Kort Overzigt. Bandung: De Vries & Fabricius.
- Kunto, Haryoto. 1984. Wajah Bandoeng Tempo Doeloe. Bandung: Granesia.
- Lubis, Nina H., dkk. 2003. Sejarah Tatar Sunda. Jilid I dan II. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.
- L. Pronk. 1929. De bestuursreorganisatie-Mullemeister op Java en Madoera en haar beteekenis voor het heden. Leiden: M. Dubbeldeman.
- Nitimihardja, Andung A., “Perkembangan Industri di Tatar Sunda”, Makalah disampaikan dalam Seminar “Penelusuran Jejak Ki Sunda dari Masa ke Masa”, yang diselenggarakan oleh Balai Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenjaraan, dan Nilai Tradisional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Barat, Bogor, 11-13 Agustus 2005.
- Otto van Rees, Otto van. 1880. Overzigt van de Geschiedenis der Preanger-Regentschappen. Batavia.
- Rawls, John. 1971. A Theory of Justice. Cambridge, Massachussets: Harvard University Press.
- Reitsma, S. A. 1912. De Wegen in de Preanger. Bandung: G. Kolff & Co.
- . 1928. Korte Geschiedenis der Nederlandsch-Indische Spoor en Tramwegen. Weltevreden: G. Kolff & Co.
- Roelcke, Gottfried dan Gary Crabb. 1994. All Around Bandung: Exploring the West Java Highlands. Bandung: Bandung Society for Heritage Conservation.
- Rosidi, Ajip. 1988. Hurip Waras: Dua Panineungan. Bandung: Pustaka Karsa Sunda.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1864, No. 54.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1916, No. 65.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1920, No. 150.
- Verslag der Staatsspoor-en Tramwegen in Nederlandsch-Indie Jrg. 1925.
- Warnaen, Suwarsih et.al. 1987. Pandangan Hidup Orang Sunda. Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi) Depdikbud.



BANDUNG 1906 – 1970: Studi Tentang Perkembangan Ekonomi Kota Bandung*

Pengantar

Bandung yang saat ini menyandang predikat ibukota propinsi Jawa Barat merupakan salah satu kota penting yang ada di Indonesia. Kota yang di awal abad ke-20 nyaris menjadi *hoofdstad* Hindia Belanda menggantikan Batavia ini memiliki akar sejarah panjang. Rentang perjalanan Bandung sebagai sebuah kota dapat dikatakan dimulai pada tanggal 25 September 1810. Pada tanggal tersebut, Bupati ke-6 Bandung, R.A. Wiranatakusumah II (1794-1829), tampil sebagai inisiator pembentukan kota Bandung. Inisiatif Wiranatakusumah II ini secara tidak langsung mendapat akselerasi dari pemerintah kolonial Belanda, melalui *besluit* yang dikeluarkan Gubernur Jenderal H.W. Daendels.

Pada masa-masa awal pembentukannya tidak banyak perkembangan signifikan yang dialami kota Bandung. Barulah setelah Bandung ditetapkan sebagai ibukota Karesidenan Priangan pada tahun 1864 menggantikan kedudukan Cianjur, secara perlahan tapi pasti terjadi perubahan-perubahan yang cukup berarti pada tampilan kota Bandung. Keberadaan kota Bandung sebagai pusat politik pemerintahan Karesidenan Priangan ini kemudian diikuti pula oleh keberadaannya sebagai sentra produksi industri perkebunan besar di Priangan, seperti kopi, teh, kina, dan karet. Untuk itu semua, pembangunan kota Bandung hingga akhir abad ke-19 tampak difokuskan untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan kota Bandung, baik sebagai pusat kegiatan politik maupun pusat kegiatan ekonomi.

Memasuki abad ke-20, sebuah perubahan mendasar kembali dialami kota Bandung. Berdasarkan ordonansi tanggal 21 Februari 1906, Bandung memperoleh status wilayah administratif baru sebagai sebuah *gemeente*.¹ Peresmian, sekaligus penetapan Bandung sebagai sebuah *gemeente* dilakukan oleh Gubernur Jenderal

* Makalah disampaikan untuk dipresentasikan dalam Konferensi Internasional I Sejarah Kota, Surabaya, 23 – 25 Agustus 2004.

¹ Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1906, No. 121

J.B. Van Heutzs pada tanggal 1 April 1906.² Saat *Gemeente* Bandung didirikan, wilayahnya meliputi dua buah kecamatan (*onderdistrict*), yaitu Kecamatan Bandung Kulon (Barat) dan Bandung Wetan (Timur). Kecamatan Bandung Kulon memiliki 8 desa: Andir, Citepus, Pasar, Cicendo, Suniaraja, Karanganyar, Astana Anyar, dan Regol. Kecamatan Bandung Timur memiliki 6 desa, yaitu Balubur, Kejaksan, Lengkong, Kosambi, Cikawao, dan Gumuruh.

Sejak status *gemeente* disandang kota Bandung tidak pelak lagi Bandung semakin memainkan peranan penting dalam percaturan politik dan ekonomi pemerintah kolonial Belanda. Bandung pun tampil sebagai primadona tempat peristirahatan orang-orang Barat, khususnya Belanda. Berbagai prasarana dan sarana penunjang bagi sebuah kota modern kemudian banyak dibangun di Kota Bandung. Realitas yang tidak jauh berbeda tetap berlangsung saat Bandung memasuki alam kemerdekaan. Bahkan status Bandung sebagai kota pusat pemerintahan mengalami peningkatan saat kota ini ditetapkan sebagai ibukota propinsi Jawa Barat, menggantikan kedudukan Jakarta. Keberadaan Bandung sebagai pusat pemerintahan di Jawa Barat pada akhirnya membawa akselerasi pada perkembangan ekonomi kota Bandung hingga tahun 1970.

Geliat Pembangunan Kota

Bila perubahan-perubahan yang terjadi sepanjang abad ke-19 lebih didorong oleh karena keberadaan Bandung sebagai ibukota Karesidenan Priangan, maka memasuki abad ke-20, berbagai perubahan yang dialami kota Bandung lebih dikarenakan oleh keberadaan Bandung sebagai sebuah *gemeente* dan kemudian *stadsgemeente*. Tegasnya, berbagai perubahan yang dialami kota Bandung selama empat dasawarsa pertama abad ke-20, lebih dikarenakan adanya desakan kebutuhan penduduk kota Bandung sendiri.

Perubahan fisik paling awal yang terjadi di kota Bandung pada awal abad ke-20 lebih diarahkan pada upaya pengadaan prasarana dan sarana fisik yang dapat digunakan oleh pemerintahan *gemeente*. Namun demikian, karena satu dan lain hal, keinginan untuk segera memiliki sebuah kantor pemerintahan *gemeente* yang representatif ini tidak dapat langsung direalisasikan. Untuk itu, pada masa awal pembentukan *gemeente* Bandung, sebagai kantor *gemeente* dipilih bagian atas dari gedung yang pernah menjadi toko buku Sumur Bandung di Jalan Asia Afrika. Beberapa waktu kemudian baru pindah ke “Gedong Papak” (kantor pemerintah kota Bandung sekarang), yakni sebuah bangunan yang berdiri di atas tanah yang sempat dijadikan gudang kopi milik Andries de Wilde.³ “Gedong Papak” ini karena

² Verslag van den Toestand der Gemeente Bandoeng, 1919, hal. 1.

³ Haryoto Kunto, Wajah Bandoeng Tempo Doeloe, (Bandung: Granesia, 1984), hal. 41.

letaknya yang strategis kemudian ditetapkan sebagai kantor tetap pemerintah *gemeente* Bandung. Penataan terhadap “Gedong Papak” sebagai kantor pemerintah *gemeente* Bandung bisa dikatakan dilakukan secara bertahap sebelum benar-benar dapat menjadi gedung pemerintahan yang representatif.

Setelah pemerintah *gemeente* memperoleh gedung yang benar-benar representatif, penataan kota Bandung secara keseluruhan kemudian mendapat perhatian yang benar-benar serius dari pemerintah *gemeente*. Rencana dan keinginan pemerintah *gemeente* untuk menjadikan kota Bandung sebagai kota modern seakan mendapat dorongan yang lebih kuat ketika dalam dasawarsa kedua abad ke-20 atau semasa Gubernur Jenderal J.P. Graaf van Limburg Stirum (1916-1921) timbul ide dan gagasan untuk memindahkan ibukota Hindia Belanda dari Batavia (Jakarta) ke kota Bandung.⁴ Dalam perkembangannya kemudian, agar pembangunan fisik di kota Bandung dapat tertata dengan baik serta selaras dengan rencana menjadikan kota Bandung sebagai ibukota Hindia Belanda, pemerintah *gemeente* Bandung bersama-sama dengan pemerintah pusat membentuk sebuah tim perencanaan gabungan, yang terdiri dari militer (zeni), Departemen Pekerjaan Umum, dan Dinas Teknik Kotapraja.⁵

Mengingat tugas tim perencanaan gabungan lebih difokuskan pada upaya menjadikan kota Bandung sebagai ibukota Hindia Belanda, maka agar rencana pengembangan kota Bandung yang sebelumnya telah dipersiapkan pemerintah *gemeente* tidak terbengkalai serta dapat tetap berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, pemerintah *gemeente* Bandung pada awal dasawarsa ketiga abad ke-20 atau tepatnya pada tahun 1921, membentuk sebuah komisi pembangunan kota Bandung. Tugas komisi yang diberi nama Komisi Rencana Perluasan Wilayah *Gemeente* Bandung ini, antara lain adalah membenahi wajah kota, termasuk di

⁴ Setidaknya ada tiga alasan yang melatarbelakangi rencana perpindahan ibukota ini. Pertama, alasan kondisi kesehatan kota Batavia sebagai kota pantai, sebagaimana diungkapkan oleh H.F Tillema, dalam studinya tentang kesehatan di kota-kota pesisir Utara Jawa pada tahun 1916. S.A. Reitsma dan W.H. Hoogland. Gids van Bandoeng en Omstreken. (Bandoeng: N.V. Mij Vorkink, 1921), hal. 98. Kedua, alasan pertahanan. Ketiga, alasan ekonomi.

⁵ Tim ini dipimpin oleh V.L. Slors, seorang pensiunan militer dari kesatuan zeni. Anggota tim antara lain terdiri dari, G. Hendriks, E.H. de Roo, dan J. Gerber. Sejalan dengan latar belakang pembentukannya, tim perencanaan gabungan ini memiliki tugas-tugas, antara lain:

1. Memindahkan semua departemen dan instansi pemerintah pusat dari Batavia ke Bandung.
2. Memilih lokasi yang tepat di kota Bandung untuk dijadikan lokasi bangunan instansi-instansi pemerintah pusat.
3. Mengadakan koordinasi dan kerjasama antara segenap instansi dan jawatan pemerintah yang terkait untuk melancarkan dan mensukseskan rencana perpindahan ibukota Hindia Belanda tersebut. Haryoto Kunto, Balai Agung di Kota Bandung, (Bandung: Granesia, 1996), hal. 93-94.

dalamnya menata dan menghijaukan kota dengan taman-taman kota agar Bandung benar-benar layak untuk menjadi ibukota Hindia Belanda. Melalui komisi inilah pada akhirnya lahir sebuah rencana pembangunan kota Bandung yang benar-benar terpadu. Rencana pengembangan kota Bandung produk Thomas Karsten ini kemudian dikenal dengan nama *Plan Karsten*.

Meskipun pada akhirnya rencana menjadikan Bandung sebagai ibukota Hindia Belanda tidak menjadi kenyataan. Sedikit banyaknya Bandung tetap dapat merasakan adanya manfaat dari rencana menjadikan kota Bandung sebagai ibukota Hindia Belanda tersebut. Berkat adanya rencana tersebut, pembangunan fisik di kota Bandung sepanjang dasawarsa ketiga abad ke-20 bisa dikatakan relatif pesat. Berbagai bangunan yang cukup megah yang semula dipersiapkan sebagai gedung perkantoran bagi instansi-instansi pemerintah pusat didirikan di Bandung. Satu di antara gedung tersebut adalah gedung yang semula direncanakan sebagai gedung kantor pemerintah pusat (kini dikenal dengan nama Gedung Sate), yang pembangunannya berhasil diselesaikan pada bulan September 1924. Di sekitar Gedung Sate ini semula direncanakan akan dibangun sebuah kompleks perkantoran untuk instansi-instansi pemerintah pusat, seperti kantor *Department van Verkeer en Waterstaat* (Departemen Perhubungan dan Pengairan), *Department van Justitie* (Departemen Kehakiman), *Department van Financien* (Departemen Keuangan), *Department van Binnenlandsch Bestuur* (Departemen Dalam Negeri), *Hoge Raad* (Makhamah Agung), dan kantor *Volksraad* (Dewan Rakyat).⁶

Bersamaan dengan pembangunan berbagai prasarana dan sarana fisik pemerintahan, dilakukan pula upaya-upaya optimalisasi pemanfaatan jasa transportasi kereta api. Optimalisasi pemanfaatan jasa kereta api ini lebih diarahkan pada upaya untuk menghubungkan Bandung dengan kota-kota Besar di Jawa yang ada di sebelah Timur Bandung. Upaya optimalisasi ini antara lain dilakukan dengan mengoptimalkan hubungan kereta api antara Bandung dengan Batavia serta membangun halte-halte di sekitar kota Bandung dan juga membangun jalur jalan kereta api baru untuk jarak pendek.

Melalui upaya-upaya optimalisasi, perjalanan kereta api dari Bandung menuju Batavia dan sebaliknya melalui jalur jalan kereta api baru lewat Purwakarta dan Cikampek, sejak 1 November 1934 dapat ditempuh dalam 2 $\frac{3}{4}$ jam.⁷ Untuk menampung besarnya minat penumpang yang menggunakan transportasi kereta api jalur Batavia-Bandung ini, perusahaan kereta api negara (*Staats Spoorwegen*),

⁶ Haryoto Kunto, *Semerbak Bunga di Bandung Raya*, (Bandung: Granesia, 1986) hal. 93-97; Haryoto Kunto, op. cit., 1996, hal. 94-97.

⁷ Haryoto Kunto, op. cit., 1984, hal. 101.

yang memiliki motto 4S (*Staats Spoor Steeds Sneller*),⁸ mengoperasikan sekaligus empat rangkaian kereta api dalam sehari. Pelayanan kereta api Batavia-Bandung ini kemudian dikenal dengan nama *vlugge vier* (empat cepat).

Untuk jarak pendek, pembangunan lintasan kereta api baru pada dasarnya dilakukan untuk menghubungkan Bandung dengan daerah-daerah di sekitarnya, khususnya daerah-daerah yang memiliki potensi di bidang perkebunan. Pembangunan jalur kereta api dari Bandung menuju daerah-daerah pedalaman (*hinterland*) ini secara umum bisa dikatakan dibagi dalam dua tahapan. Tahap pertama, pembangunan jalur kereta api yang trayeknya didasarkan atas UU tanggal 4 Januari 1916.⁹ Dalam tahap pertama ini setidaknya berhasil dibangun tiga jalur lintasan kereta api, yakni jalur Rancaekek-Jatinangor, jalur Bandung-Soreang, dan jalur Soreang-Ciwidey. Jalur Rancaekek-Jatinangor selesai dibangun pada tanggal 23 Februari 1918. Jalur Bandung-Soreang selesai dibangun tanggal 13 Februari 1921. Jalur Soreang-Ciwidey selesai dibangun tanggal 17 Juni 1924.

Tahap kedua, pembangunan jalur kereta api yang trayeknya ditetapkan dalam UU tanggal 28 Februari 1920.¹⁰ Berbeda dengan tahap pertama, pembangunan jalur lintasan rel kereta api tahap kedua ini hanya membangun dua jalur lintasan kereta api baru, yakni jalur lintasan Bandung-Citeureup-Majalaya dan jalur lintasan Dayeuhkolot-Majalaya. Pembangunan jalur sepanjang 6 kilometer ini berhasil diselesaikan tanggal 6 Juni 1919. Jalur lintasan Bandung-Citeureup-Majalaya selesai dibangun tanggal 18 Maret 1921. Jalur lintasan Dayeuhkolot-Majalaya selesai dibangun tanggal 3 Maret 1922.

Masih berkaitan dengan upaya optimalisasi pemanfaatan transportasi kereta api, dibangun pula halte-halte di kota Bandung. Pembangunan halte-halte di sekitar kota Bandung ini pada intinya dilakukan untuk menampung calon-calon penumpang kereta api yang berasal dari Bandung Barat dan Bandung Timur, yang dari waktu ke waktu memperlihatkan lonjakan penumpang yang cukup tajam. Dengan kata lain, pembangunan halte-halte tersebut juga sekaligus untuk mengurangi beban stasiun Bandung dalam menampung calon penumpang yang akan pergi dan tiba di kota Bandung.

Setidaknya ada tiga halte baru yang dibangun di kota Bandung dalam dasawarsa ketiga abad ke-20. Ketiga halte baru tersebut adalah halte Andir, halte Cikudapateuh, dan halte Kiara Condong. Halte Andir dan Kiara Condong selesai

⁸ Gottfried Roelcke dan Gary Crabb, *All Around Bandung: Exploring the West Java Highlands*, (Bandung: Bandung Society for Heritage Conservation, 1994), hal. 25.

⁹ *Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1916*, No. 65.

¹⁰ *Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1920*, No. 150.

dibangun tahun 1923, sementara halte Cikudapateuh selesai dibangun tahun 1925. Sebenarnya, bangunan ketiga halte tersebut tidaklah sama sekali baru. Ketiga bangunan halte tersebut merupakan hasil peningkatan dari *stopplaats* yang telah ada sebelumnya.¹¹

Di luar optimalisasi jalur kereta api, optimalisasi lain bagi perhubungan darat dilakukan dengan meningkatkan serta memperbaiki kualitas jalan-jalan yang ada di kota Bandung. Upaya perbaikan jalan raya ini dilakukan secara intensif sejak tahun 1909. Pada awalnya diperbaiki lima buah jalan, yaitu Merdekalioweg (kini Jalan Wastukencana), Kerklaan (kini Jalan Jawa), Parklaan (kini Jalan Merdeka), Lembangweg (kini Jalan Cihampelas dan Setiabudi), serta Dagoweg (kini Jalan Ir. H. Juanda). Perbaikan jalan dilakukan dengan cara memperkeras jalan-jalan tersebut dengan pasir dan kerikil. Setelah perbaikan dan peningkatan kualitas kelima jalan tersebut, beberapa waktu kemudian juga dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan-jalan lainnya yang ada di kota Bandung, termasuk di dalamnya pelebaran jalan, seperti, *Grote Postweg*, *Gardujatiweg*, *Pasar Baru Weg*, dan *Tamblongweg*.¹²

Di samping upaya optimalisasi sarana transportasi kereta api dan peningkatan kualitas jalan raya, upaya lain yang dilakukan pemerintah kolonial untuk membuka kota Bandung adalah melalui jembatan udara. Usaha membuka Bandung melalui jalur udara ini ditempuh dengan membangun lapangan udara Andir. Setelah dipandang layak, pada tanggal 1 November 1928 diadakan ujicoba penerbagan perdana dengan menggunakan pesawat terbang milik perusahaan penerbangan KNILM. Penerbangan ujicoba yang menempuh rute Bandung-Batavia ini berlangsung dengan sukses. Setelah ujicoba penerbangan ini, tidak berapa lama kemudian atau tepatnya sejak tahun 1930, Bandung secara resmi telah dapat dihubungkan melalui jalur udara. Rute penerbangan yang dapat ditempuh dari Bandung sejak tahun 1930 adalah rute penerbangan menuju Semarang, Surabaya, Palembang, dan Singapura.¹³

Keberhasilan Bandung membuka jalur udara jelas memiliki makna yang sangat penting dalam menjadikan Bandung sebagai salah satu kota di Indonesia yang mudah untuk didatangi. Dengan adanya jalur udara ini, jarak tempuh dari kota Bandung ke kota-kota lain yang telah memiliki jalur udara menjadi lebih pendek lagi. Lebih dari itu, melalui jalur udara ini, hubungan antara kota Bandung dengan daerah-daerah lain di luar Jawa, khususnya Sumatera, bisa dilaksanakan secara lebih intensif.

¹¹ Verslag der Staatsspoor-en Tramwegen in Nederlandsch-Indie Jrg. 1925, hal. 46.

¹² Edi S. Ekadjati, dkk., *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Barat*, (Bandung: Depdikbud, 1978/1979), hal. 30.

¹³ Haryoto Kunto, op. cit., 1984, hal. 259-260.

Untuk memberi arti yang lebih penting bagi upaya menjadikan Bandung sebagai daerah terbuka, Bandung sejak abad ke-20 juga dilengkapi dengan sarana komunikasi radio. Sarana komunikasi radio yang cukup berarti yang dibangun di kota Bandung adalah radio telepon. Pembangunan studio pemancar bagi radio telepon ini dilakukan di lereng Gunung Malabar. Setelah melalui persiapan yang memakan waktu selama kurang lebih lima tahun, sarana radio telepon ini sejak tanggal 5 Mei 1923, telah dapat digunakan untuk melakukan hubungan internasional, yakni dari Hindia Belanda ke Belanda. Dengan terbukanya sarana komunikasi radio telepon ini maka hubungan antara dua wilayah yang dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh tersebut dapat berlangsung jauh lebih cepat.

Menyusul keberhasilan membangun sarana radio telekomunikasi, dipersiapkan pula sarana komunikasi berupa radio. Langkah awal ke arah penyediaan sarana komunikasi radio di kota Bandung dimulai tanggal 15 April 1926 dengan didirikannya *Bandoengsche Radio Vereeniging* (BRV), yang diketuai oleh J.G. Prins. Setelah melalui berbagai persiapan yang cukup matang, BRV melakukan ujicoba siaran untuk pertama kalinya pada tanggal 8 Agustus 1926. Setelah keberhasilan siaran percobaan ini, secara resmi BRV mulai mengudara. Siaran ujicoba dan siaran-siaran selanjutnya BRV dilakukan di studio BRV yang terletak di ruang atas percetakan Vorkink (dulu sempat menjadi TB Sumur Bandung).¹⁴

Siaran BRV yang tadinya hanya ditujukan untuk pemirsa di daerah Bandung dan sekitarnya, ternyata dapat pula ditangkap di Medan, Pare-pare, Samarinda, dan Pontianak. Bahkan pancarannya dapat pula ditangkap di luar negeri. Beberapa negara yang dapat menerima pancaran BRV antara lain adalah Afrika Selatan dan Selandia Baru.

BRV yang sebenarnya dapat dijadikan sebagai media komunikasi Bandung dengan dunia luar secara berkesinambungan, tidaklah berusia lama. Berhubung satu dan lain hal, khususnya yang berkaitan dengan masalah pendanaan, BRV tidak dapat melanjutkan siarannya secara mandiri. Untuk itu, sejak tahun 1929, pengelolaan BRV diambil alih oleh *Nederlandsch Indische Radio Omroep Maatschappij* (NIROM).

Gencarnya pembangunan fisik di kota Bandung pada akhirnya tidak hanya mengakibatkan semakin menariknya kota Bandung bagi kaum pendatang tetapi juga mengakibatkan tuntutan akan kebutuhan lahan kota terus bertambah. Kondisi ini kemudian mendorong pemerintah *gemeente* Bandung untuk berupaya menambah luas wilayah kota agar senantiasa sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan warga kota Bandung. Pada saat *gemeente* Bandung berdiri, luas

¹⁴ Ibid., hal. 197-200.

kota Bandung baru mencapai 1922 ha. Dari jumlah tersebut, sebanyak 240 ha atau 12 persen digunakan secara langsung untuk berbagai bangunan, baik bangunan pemerintahan, swasta maupun tempat tinggal warga. Sepuluh tahun kemudian, luas wilayah kota Bandung meningkat menjadi 2150 ha. Dari jumlah tersebut, 380 ha atau 18 persen digunakan untuk bangunan. Langkah perluasan kota Bandung yang dilakukan pada tahun 1916 bukanlah upaya perluasan yang terakhir. Pada tahun 1926 atau saat status kota Bandung berubah menjadi *stadsgemeente*, wilayah kota Bandung kembali diperluas hingga luas keseluruhan mencapai 2853 ha. Dari luas ini, sebanyak 1050 ha atau sebesar 37 persen digunakan untuk berbagai bangunan. Memasuki akhir pemerintah Hindia Belanda, luas wilayah kota Bandung telah mencapai 3305 ha, 1600 ha diantaranya atau sebanyak 48,41 persen digunakan untuk bangunan-bangunan. Dari data-data tersebut terlihat bahwa seiring dengan perluasan wilayah kota Bandung terjadi juga peningkatan yang cukup pesat dalam penggunaan lahan di kota Bandung, khususnya penggunaan lahan untuk bangunan-bangunan.

Selanjutnya, memasuki tahun-tahun pertama kemerdekaan, pembangunan berbagai prasarana dan sarana di kota Bandung dapat dikatakan berhenti sama sekali, untuk tidak mengatakan mengalami kemunduran. Situasi politik yang belum stabil serta maraknya upaya-upaya untuk menegakan kemerdekaan dapat dikedepankan sebagai faktor penyebab dari semua realitas tersebut. Pecahnya peristiwa Bandung Lautan Api pada tanggal 24 Maret 1946 telah menghancurkan cukup banyak gedung-gedung pemerintah, termasuk rumah-rumah penduduk, khususnya yang berada di wilayah Bandung Selatan, seperti Cicadas, Tegallega, Ciroyom, Kopo, dan Cikudapateuh.¹⁵

Barulah memasuki dasawarsa keenam dan ketujuh abad ke-20, terasa kembali adanya geliat pembangunan di kota Bandung. Fokus penataan pada tahap awal lebih diarahkan pada pembangunan beberapa prasarana dan sarana umum yang sempat rusak akibat revolusi fisik. Akselerasi pembangunan prasarana dan sarana di kota Bandung menjadi semakin terasa saat Bandung kemudian ditetapkan sebagai tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA) pada bulan April 1955. Untuk menyambut peristiwa berskala internasional tersebut, dilakukan berbagai penataan terhadap gedung-gedung pemerintah, khususnya Gedung Merdeka yang akan dijadikan tempat konferensi, hotel-hotel yang akan dijadikan tempat penginapan peserta, jalan-jalan, serta stasiun kereta api. Di luar itu, pada tahun 1958 dibangun pula Taman Olah Raga Karang Setra, yang peresmiannya dilakukan Presiden Soekarno, serta Bank Tabungan Pos Cabang Bandung.

¹⁵ Aan Abdurachman, dkk. 2000. *Saya Pilih Mengungsi: Pengorbanan Rakyat Bandung untuk Kedaulatan*. (Bandung: Pustaka Madani, hal. 93 – 98).

Keberhasilan Bandung menyelenggarakan KAA pada perkembangannya kemudian menjadikan Bandung sebagai langganan tuan rumah pertemuan-pertemuan besar, baik berskala nasional maupun internasional. Setelah menjadi tuan rumah KAA, Bandung selanjutnya juga menjadi tuan rumah beberapa peristiwa besar lainnya, seperti, Konferensi Mahasiswa Asia Afrika tahun 1956, Konferensi I Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia pada bulan Januari 1957, Konferensi Universitas se-Indonesia pada tahun 1958, dan Konferensi Dinas Kepolisian Negara pada tahun 1958.¹⁶

Geliat Kehidupan Penduduk

Status *gemeente* bagi kota Bandung sedikit banyaknya memperlihatkan adanya sosok modern sebuah kota, yang di dalamnya menjanjikan berbagai fasilitas menarik bagi penduduk. Daya tarik kota Bandung sebagai sebuah *gemeente* ini pada akhirnya berpengaruh besar terhadap peningkatan konsentrasi penduduk yang tinggal dan menetap di kota Bandung. Akibatnya, Bandung yang pada pertengahan abad ke-19 hingga beberapa waktu setelah menyandang status sebagai ibukota karesidenan Priangan masih menyandang sebutan sebagai daerah yang jarang penduduk (*sparsely populated region*) berubah menjadi daerah yang padat penduduk (*densely populated region*) memasuki abad ke-20.

Sebagaimana terlihat di dalam tabel, pada saat Bandung menyandang status sebagai sebuah *gemeente* untuk pertama kalinya, jumlah penduduk baru tercatat sebanyak 47.391 jiwa. Perubahan penduduk yang cukup berarti pertama kali dialami Bandung pada tahun 1920. Dari 47.391 jiwa penduduk pada tahun 1906, kurang lebih empatbelas tahun kemudian jumlahnya meningkat sehingga secara keseluruhan berjumlah 102.227 jiwa. Dalam perubahan penduduk pada tahun 1920 ini bila kemudian diperhatikan dengan cermat, tampak bahwa peningkatan penduduk terbesar terjadi pada penduduk golongan Eropa. Bahkan, peningkatan penduduk Eropa ini bisa dikatakan sangat fantastis yakni hampir lima kali lipat. Bandingkan dengan peningkatan penduduk pribumi dan Cina yang hanya sekitar dua kali lipat. Kondisi ini sedikit banyaknya mengindikasikan bahwa perubahan status kota Bandung menjadi sebuah *gemeente* telah memberi dorongan yang lebih besar bagi penduduk Eropa untuk datang dan menetap di kota Bandung. Kenyataan ini sekaligus pula semakin menegaskan bahwa perubahan status kota Bandung menjadi sebuah *gemeente* pada dasarnya benar-benar ditujukan untuk kepentingan orang-orang Eropa.

¹⁶ Arsip Nasional RI Wilayah Jawa Barat. Data Informasi Arsip Foto Jawa Barat 1956; Arsip Nasional RI Wilayah Jawa Barat. Data Informasi Arsip Foto Jawa Barat 1957; Arsip Nasional RI Wilayah Jawa Barat. Data Informasi Arsip Foto Jawa Barat 1958.

Selanjutnya memasuki alam kemerdekaan, terlihat pula adanya peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan dibanding masa sebelumnya. Pada tahun 1961, jumlah penduduk kota Bandung tercatat sebanyak 973.000 jiwa. Jumlah ini jelas merupakan sebuah peningkatan jumlah penduduk yang signifikan bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 1940. Peningkatan jumlah penduduk hingga lebih dari empat kali lipat dalam kurun waktu 21 tahun benar-benar telah menjadikan Bandung sebagai kota yang cukup padat. Urbanisasi besar-besaran penduduk yang berasal dari daerah konflik DI/TII dapat dikedepankan sebagai salah satu pemicu peningkatan jumlah penduduk kota Bandung yang cukup signifikan.

Berbeda dengan peningkatan jumlah penduduk yang terjadi pada tahun 1920, peningkatan penduduk Eropa sesudah tahun 1920, bisa dikatakan tidak ada yang setinggi peningkatan penduduk tahun 1920. Demikian pula halnya penduduk pribumi dan Cina. Fenomena perubahan lainnya yang cukup menarik berkaitan dengan penduduk kota Bandung adalah fenomena perubahan pada perbandingan jumlah penduduk Cina dan Eropa. Bila pada tahun pertama Bandung menjadi *gemeente* jumlah penduduk Cina lebih banyak daripada penduduk Eropa, maka memasuki akhir kekuasaan Hindia Belanda, jumlah penduduk Eropa berada di

Tabel Jumlah Penduduk Kota Bandung 1906-1970

Tahun	Pribumi	Eropa	Cina	Total
1906	41.393	2.199	3.799	47.391
1920	82.263	10.658	9.306	102.227
1930	129.871	19.327	16.690	165.888
1935	142.009	22.178	19.242	183.429
1940	171.457	27.726	25.534	224.717
1961				973.000
1965				1.058.000
1970				1.176.000

Sumber: Mooi Bandoeng, October 1940, No. 10, hal. 8; Kantor Sensus dan Statistik Jawa Barat, Statistik Jawa Barat 1971.

atas jumlah penduduk Cina. Menjadi menarik untuk diamati lebih lanjut, mengapa penduduk Eropa begitu antusias untuk tinggal dan menetap di kota Bandung setelah Bandung menyandang status sebagai sebuah *gemeente*.

Perkembangan penduduk kota Bandung yang demikian pesat, dalam perkembangan selanjutnya meningkatkan pula kebutuhan atas tempat tinggal. Untuk itu, pemerintah *gemeente* Bandung berupaya keras untuk dapat memenuhi kebutuhan akan pemukiman ini, khususnya pemukiman untuk penduduk Eropa. Sejalan dengan kebijakan pembentukan *gemeente* Bandung yang cenderung diskriminatif, penataan pemukiman di kota Bandung pun jelas-jelas diatur secara diskriminatif pula. Pemerintah *gemeente* Bandung dengan terang-terangan mengadakan pemisahan antara pemukiman untuk orang Eropa, orang Cina dan Timur Asing lainnya, dan pemukiman untuk orang-orang pribumi.

Pemukiman untuk orang Eropa terdiri dari rumah-rumah besar dan modern. Komplek pemukiman Eropa pertama yang dibangun di Bandung terletak di daerah Andir atau di sekitar lapangan terbang Andir. Karena letaknya yang berdekatan dengan lapangan terbang ini pulalah yang menjadikan pemukiman Eropa di seputar Andir ini dikenal dengan nama *Fokkerhuis*. Menyusul pembangunan pemukiman modern di daerah Andir, pemerintah *gemeente* bersama-sama dengan pihak swasta kemudian membangun pemukiman-pemukiman modern di daerah lainnya, seperti di sekitar Kosambi, khususnya di sekitar halte Cikudapateuh, dan di sekitar Jalan Riau, khususnya sekitar Oranje Plein, Merdeka Weg sampai Grote Post Weg. Berbeda dengan bangunan-bangunan perumahan yang dibangun di Andir dan Kosambi, bangunan-bangunan yang didirikan di sekitar Oranje Plein, bisa dikatakan jauh lebih mewah. Bangunan di sekitar Oranje Plein ini juga merupakan bangunan bertingkat.

Di luar pemukiman-pemukiman yang telah disebutkan di atas, masih ada daerah pemukiman lainnya yang jauh lebih baik yang juga masih diperuntukan bagi orang-orang Eropa. Daerah pemukiman tersebut juga masih terletak di sepanjang Jalan Riau, tetapi tidak lagi berada dekat Oranje Plein. Pemukiman untuk orang Eropa kali ini terletak di sekitar Gedung Sate dan Insulinde Park (kini Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani). Berbeda dengan wilayah pemukiman sebelumnya, wilayah pemukiman di sekitar Insulinde Park ini juga direncanakan sebagai Pusat Kegiatan Masyarakat Eropa di Kota Bandung. Kematangan dan kecermatan dalam menata pemukiman di sekitar Insulinde Park, yang dibangun sejak tahun 1918 oleh sekelompok teknisi di bawah pimpinan Direktur Dinas Bangunan *Gemeente* Bandung V. L. Slors, pada akhirnya telah menjadikan wilayah pemukiman di sekitar Insulinde Park ini sebagai prototipe *Indische Koloniaal*

Stad.¹⁷ Dalam kaitannya dengan rencana perpindahan ibukota Hindia Belanda, selama kurang lebih tujuh tahun atau sejak tahun 1918 hingga tahun 1925 telah berhasil dibangun sebanyak 400 hingga 750 bangunan rumah modern yang direncanakan sebagai tempat tinggal para pegawai pemerintah pusat.¹⁸

Tingginya populasi penduduk Eropa di kota Bandung pada akhirnya diikuti pula oleh kentalnya kemunculan gaya hidup Eropa di kota yang pada awal abad ke-20 kemudian dikenal sebagai *Parijs van Java* ini. Representasi dari gaya hidup Eropa ini tidak hanya tampak dari berdirinya rumah-rumah modern berukuran besar bergaya Eropa tetapi juga dari berbagai sarana penunjang kehidupan lainnya. Sentra dari sebagian besar denyut kehidupan gaya Eropa di Bandung pada dasarnya berada di sekitar Jalan Braga. Di sepanjang jalan yang mempromosikan diri sebagai *de meest winklestraat van Indie* inilah, sebagian besar penduduk Eropa mewarnai kehidupannya. Pakaian-pakaian model mutakhir dari Perancis tersedia di *Au Bon Marche*, kendaraan roda empat sejenis Mercedes Benz tersedia di Fuchs en Rens, sementara bila dahaga dan lapar menyergap sehabis berbelanja mereka dapat menikmati berbagai hidangan lezat di *Maison Bogerijen* (sekarang, restoran Braga Permai), seperti *Champignons Grilles* dan *Escalopes de Veau a la Suisse*. Di malam hari, khususnya pada malam panjang menjelang libur kerja, penduduk Eropa biasa menghabiskan waktunya di *Societeit Concordia* (sekarang, gedung Merdeka), yang terletak di persimpangan Jalan Braga dan *Grote Postweg* (sekarang, jalan Asia Afrika).¹⁹

Sarana hiburan lain yang sering didatangi orang-orang Eropa untuk memanjakan gaya hidupnya adalah gedung-gedung bioskop serta *feestterrein*. Untuk bioskop, hingga akhir kekuasaan Hindia Belanda setidaknya ada tiga buah gedung bioskop yang sering dikunjungi orang Eropa, yakni Elita, Oriental, dan Apollo. Sementara itu untuk *feestterrein*, antara lain *feestterrein* yang terdapat di sekitar daerah Kebonjati (Orion), Suniaraja (Empires), dan Cikakak (Orange). Sesuai fungsinya, di *feestterrein* ini antara lain sering dipertunjukkan hiburan-hiburan, seperti, sandiwara, ketuk tilu, pencak silat, dan opera. Tempat-tempat rekreasi lainnya, antara lain, bursa tahunan (*jaarbeurs*), taman-taman kota, seperti Mollukenpark, Ijzermanpark, Orenje Plein, dan Citarum Plein, serta Bandoengsch Zoologisch Park (kini, kebun binatang Bandung) pada tahun 1930.²⁰

¹⁷ Haryoto Kunto, op. cit., 1984, hal. 64-66.

¹⁸ Haryoto Kunto, op. cit., 1996, hal. 103.

¹⁹ Gottfried Roelcke dan Gary Crabb, op. cit., hal. 26-27.

²⁰ Melly Irawati Julita. *Kebun Binatang Bandung (1930: 2000): Studi tentang Pembentukan, Perkembangan, dan Pengaruhnya terhadap Pariwisata*. Skripsi. (Bandung: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, 2001)

Bila pemukiman untuk orang Eropa umumnya berupa bangunan-bangunan besar dan modern, maka tidak demikian halnya dengan bangunan-bangunan untuk Timur Asing dan terlebih lagi pribumi dari golongan rakyat kebanyakan. Untuk pemukiman penduduk Timur Asing, khususnya Cina, pemerintah *gemeente* Bandung menempatkannya di sekitar pusat-pusat perdagangan. Salah satu daerah pusat perdagangan yang disediakan pemerintah *gemeente* Bandung untuk bangunan pemukiman penduduk Timur Asing adalah di sekitar wilayah Pasar Baru. Oleh karenanya, tidak mengherankan bila kemudian di daerah sekitar Pasar Baru ini banyak dijumpai daerah-daerah Pecinan atau tempat-tempat pemukiman orang Cina.

Bangunan-bangunan perumahan untuk orang-orang pribumi yang dibangun Belanda pada umumnya didirikan di atas petak-petak tanah yang relatif kecil serta terbuat dari bilik bambu. Satu di antara wilayah pemukiman yang dibangun Belanda untuk orang-orang pribumi dari kalangan rakyat kebanyakan terdapat di sekitar Karapitan. Sementara untuk orang-orang pribumi dari golongan menengah dibuatkan pemukiman di sekitar Cihapit.²¹ Di luar pemukiman yang dibuat Belanda, orang-orang pribumi pada umumnya membangun pemukimannya berdasarkan kelompok etnis atau daerah asal. Oleh karenanya tidak mengherankan bila di Kota Bandung dikenal wilayah-wilayah pemukiman pribumi, seperti, Kampung Jawa, Babakan Surabaya, Babakan Tarogong, Babakan Ciamis, dan Babakan Bogor.²² Walaupun bentuk-bentuk bangunan milik pribumi relatif kecil, tetapi kondisi bangunan dan keadaan lingkungannya selalu diupayakan tetap bersih dan sehat. Dalam kaitan inilah, tidak bisa dilepaskan peran besar yang telah dimainkan oleh Bupati Bandung R.A.A. Martanegara (1893-1918) dalam menciptakan keharmonisan penataan pada bangunan dan lingkungan perumahan penduduk pribumi. Berkat kejeliannya jugalah atap bangunan-bangunan pada pemukiman penduduk pribumi dapat diganti dengan genteng. Perubahan atap bangunan dari ilalang ke genteng dilakukan Martanegara dengan terlebih dahulu melakukan proses alih teknologi pembuatan genteng dari luar kota Bandung kepada penduduk kota Bandung.²³

Bila upaya pemenuhan kebutuhan pemukiman penduduk pada era kolonial tampak lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemukiman penduduk Eropa, maka tidak demikian halnya di era kemerdekaan. Pemenuhan kebutuhan pemukiman pada era kemerdekaan ini benar-benar ditujukan untuk kepentingan pemukiman orang-orang pribumi. Namun demikian, karena keterbatasan

²¹ Haryoto Kunto, op. cit., 1984, hal. 65.

²² Ibid., hal. 164-167.

²³ Ibid., hal. 157.

anggaran, pemenuhan kebutuhan pemukiman sejak kemerdekaan hingga tahun 1970 dapat dikatakan belum dapat dilakukan secara optimal. Dalam hal pemenuhan kebutuhan akan pemukiman ini, pemerintah kota Bandung pun tampak tetap berpegangan pada pola perencanaan yang telah dikembangkan pemerintah kota sebelum kemerdekaan. Bedanya, bila sebelumnya daerah Utara kota Bandung dikhususkan bagi orang-orang Eropa, kini menjadi zona pemukiman orang-orang dari golongan menengah ke atas.

Kebutuhan akan pemukiman di kota Bandung pada dasawarsa keenam dan ketujuh menjadi semakin terasa signifikansinya akibat terjadinya ketidakstabilan politik. Perjuangan di era revolusi fisik yang salah satunya terepresentasikan dalam bentuk peristiwa Bandung Lautan Api telah mengakibatkan tingginya kebutuhan akan perumahan dari para penduduk yang kembali dari daerah-daerah pengungsian setelah terjadinya aksi pembakaran gedung-gedung pemerintah dan rumah-rumah rakyat secara besar-besaran. Sementara itu, aksi pengacauan oleh DI/TII di berbagai wilayah Jawa Barat telah mengakibatkan tingginya arus urbanisasi dari daerah-daerah konflik ke kota Bandung. Ketidakmampuan pemerintah kota untuk mengatasi realitas tersebut mendorong sebagian penduduk untuk membangun tempat-tempat pemukiman sangat sederhana berupa gubuk-gubuk di pingir jalan atau dibawah jembatan.²⁴

Dalam kaitannya dengan mata pencaharian, memasuki abad ke-20 penduduk kota Bandung tidak lagi semata-mata mengandalkan sumber kehidupannya dari sektor perkebunan dan pertanian, tetapi seiring dengan perkembangan kota Bandung sebagai kota modern, banyak pilihan sumber kehidupan yang dapat dimasuki penduduk kota Bandung. Terjadinya peningkatan pada jumlah pengguna jasa kereta api, secara otomatis semakin membuka peluang kerja di sektor pelayanan jasa transportasi di dalam kota maupun jasa pelayanan di tempat-tempat penginapan. Sementara itu, peningkatan prasarana dan sarana perdagangan yang dialami kota Bandung sepanjang empat dasawarsa pertama abad ke-20 juga telah memberi peluang yang cukup luas bagi penduduk kota Bandung untuk terjun secara langsung di sektor tersebut.

Perkembangan yang cukup berarti di sektor perekonomian, yang ditandai oleh semakin banyaknya sumber kehidupan bagi penduduk pribumi tidak lantas membuat bagian terbesar penduduk kota Bandung meninggalkan pekerjaan di sektor-sektor perkebunan dan pertanian. Dengan kata lain, meskipun semakin banyak penduduk kota Bandung yang alih profesi tetapi tidak sedikit pula penduduk Bandung yang tetap setia dengan pekerjaan lamanya di sektor perkebunan dan

²⁴ Edi S. Ekadjati, et.al. *Sejarah Kota Bandung 1945-1979*. (Jakarta: Depdikbud, 1984), hal. 81 dan 106.

pertanian. Sebagaimana yang menjadi kebiasaan sebelumnya, di antara penduduk Bandung yang setia dengan pekerjaannya di sektor perkebunan dan pertanian, sebagian di antaranya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan sambil memelihara ternak, seperti sapi, kuda, kambing, dan kerbau. Di luar mereka yang bekerja di bidang pertanian, perkebunan, dan transportasi, ada juga anggota masyarakat yang bekerja sebagai tukang dan pengrajin. Para pengrajin ini di antaranya terdiri dari pelukis, pembuat sepatu, tukang kayu, tukang celup dan tukang batu. Di luar itu tentunya tetap masih ada juga yang bekerja sebagai penjahit, tukang cukur, dan tukang daging atau tukang jagal.

Memasuki era Jepang, perkembangan ekonomi di kota Bandung bisa dikatakan mengalami perubahan yang berbanding terbalik dengan situasi sebelumnya. Kontrol ketat yang dilakukan pemerintah pendudukan Jepang di bidang perekonomian, baik terhadap prasarana dan sarana perekonomian milik Belanda, Timur Asing, maupun pribumi, telah menjadikan situasi perekonomian di kota Bandung menjadi jauh dari normal. Ekonomi perang yang dikembangkan oleh pemerintah pendudukan Jepang telah menyebabkan terhentinya berbagai pembangunan prasarana dan sarana perekonomian serta terkonsentrasikannya produk-produk perekonomian hanya untuk kepentingan perputaran mesin perang Jepang. Dampak dari semua itu, berbagai permasalahan di bidang ekonomi banyak bermunculan, seperti kesulitan memperoleh bahan pokok kebutuhan sehari-hari ataupun pengangguran akibat ditutupnya berbagai kantor dan perusahaan milik swasta. Dalam situasi seperti ini, salah satu jenis usaha pribumi yang kemudian berkembang relatif cukup subur adalah jual beli barang bekas (*loak*). Pasar *loak* baru pun kemudian bermunculan di daerah Cicadas dan Banceuy, menyusul pasar *loak* lama yang telah ada sebelumnya, seperti pasar *loak* Cibeunying dan Suniaraja.

Di era kemerdekaan, keberadaan Bandung sebagai pusat kegiatan perekonomian di tatar Priangan pada dasarnya tetap bertahan. Namun demikian, instabilitas politik yang terjadi pada era demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, sedikit banyaknya berpengaruh pula terhadap denyut kehidupan perekonomian di Kota Bandung. Pada kurun waktu ini, geliat kehidupan ekonomi di Kota Bandung diwarnai oleh terjadinya nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Kota Bandung, seperti NHM, NHB Escompto, dan NV *De Eerste Nederlandsche Indische Shareholding* (DENIS). NV DENIS yang bergerak di bidang perbankan kemudian berubah menjadi PT Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat serta dikukuhkan lewat Akte Notaris Noezar No. 152 tanggal 19 November 1960. Di luar itu, kehidupan perekonomian di Kota Bandung juga dipengaruhi oleh terjadinya tindakan *saneering* yang diumumkan pemerintah pada tanggal 25 Agustus 1959. Tindakan pemerintah yang juga dikenal dengan “Kebirian Djuanda” ini di antaranya mengakibatkan berkurangnya nilai rupiah hingga tinggal 10 % saja dari nilai nominal.

Dalam kondisi seperti itu, kehidupan perekonomian di Kota Bandung dapat dikatakan kurang memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan. Tidak banyak prasarana dan sarana ekonomi baru yang dapat dikembangkan. Sebaliknya, situasi perekonomian yang kurang kondusif ini justru melahirkan aksi-aksi kekerasan bernuansa SARA sebagai akibat terjadinya kesenjangan ekonomi yang cukup tajam, khususnya antara pribumi dan masyarakat etnis Cina. Salah satu aksi kekerasan yang relatif berskala besar pada akhirnya pecah pada tanggal 10 Mei 1963 berupa Kerusuhan Anti Cina.

Geliat perekonomian di Kota Bandung mulai memperlihatkan perkembangan ke arah yang lebih baik memasuki tahun-tahun terakhir dasawarsa ketujuh abad ke-20. Stabilitas politik yang tercipta relatif lebih baik dibanding masa sebelumnya telah menggairahkan kembali kehidupan perekonomian di Kota Bandung. Era ini diwarnai oleh tumbuhnya berbagai jenis usaha rumah tangga, industri kecil, serta berbagai prasarana dan sarana pendukung perekonomian. Tempat-tempat hiburan, seperti bioskop, menjadi salah satu sarana hiburan yang paling diminati masyarakat. Kondisi ini langsung atau tidak langsung telah turut pula memacu kehidupan perekonomian di Kota Bandung.

Dalam bidang pendidikan. Berbeda dengan abad sebelumnya, memasuki abad ke-20, dunia pendidikan di kota Bandung diwarnai pula oleh semakin beragam dan semakin lengkapnya institusi-institusi pendidikan produk pemerintah kolonial. Dalam abad ke-20 ini, Bandung tidak saja memiliki institusi-institusi pendidikan setingkat Froberschool (Taman Kanak-kanak), HIS (sekolah dasar), tetapi juga memiliki institusi-institusi pendidikan tingkat pertama, menengah dan tinggi. Besarnya minat dan perhatian penduduk kota Bandung terhadap sektor pendidikan, sedikit banyaknya dapat dilihat dari banyaknya jumlah institusi pendidikan yang dibangun di kota Bandung. Hingga sebelum tahun 1925, di Bandung sedikitnya telah ada 178 sekolah dari berbagai jenis dan tingkatan.²⁵ Adapun beberapa di antara institusi pendidikan dasar dan menengah yang ada di kota Bandung saat itu, antara lain, Gouvernements Hogere Burgerschool (afdelingen A dan B) yang terletak di Bilitonstraat, Gouvernements Lyceum di Jaarbeursterrein, Christelijk Lyceum di Dagoweg 81, R.K. 3-jarige Hogere Burgerschool voor meisjes "Saint Angela" di Merdikaweg, Gouvernements Muloschool di Javastraat/Sumatrastraat dan Helmersweg, R.K. Muloschool di Heetjansweg 8, dan Gouvernements 1e Europese Lagere School A di Tjiliwoengstraat.²⁶ Khusus untuk pribumi antara lain terdapat sekolah dasar kelas satu dan kelas dua (Eerste en Tweede Klasse Inlandsche School), sekolah guru (Kweekschool), dan sekolah pamongpraja (Hoofdenschool). Di luar

²⁵ Haryoto Kunto, op. cit., 1984, hal. 186-188.

²⁶ Mooi Bandoeng, Februari 1940, No. 2, hal. 36.

itu, di kota Bandung juga terdapat institusi pendidikan tinggi yang cukup prestisius, yakni, Technische Hoogeschool (THS), yang didirikan tanggal 3 Juli 1920.

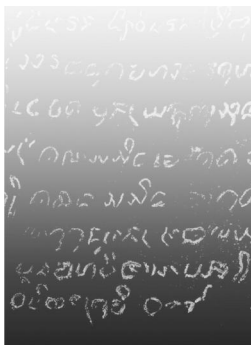
Di era kemerdekaan, kebutuhan akan pendidikan secara perlahan tapi pasti terasa mengalami peningkatan yang sangat tajam. Meningkatnya kesadaran penduduk untuk menimba pendidikan mendorong terjadinya peningkatan berbagai institusi pendidikan yang ada di kota Bandung, mulai pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Memasuki akhir dasawarsa keenam abad ke-20 atau tepatnya pada tanggal 11 September 1957, untuk pertama kalinya di Kota Bandung didirikan sebuah perguruan tinggi negeri, Universitas Padjadjaran. Dua tahun kemudian, “berdiri” Institut Teknologi Bandung (ITB) yang merupakan pengabungan dari dua buah fakultas yang semula merupakan bagian dari Universitas Indonesia, yakni, Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Pasti dan Pengetahuan Alam, serta Akademi Seni Rupa.²⁷ Pembukaan ITB pada tanggal 4 Maret 1959 dilakukan langsung oleh Presiden Soekarno, dengan disaksikan Presiden Republik Demokrasi Vietnam Ho Chi Minh, yang kedatangannya ke Bandung dilakukan dalam rangka penerimaan gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Padjadjaran yang pelaksanaan pemberiannya bersamaan dengan tanggal pembukaan ITB.²⁸

²⁷ Nina Herlina Lubis, dkk. *Sejarah Tatar Sunda*. Jilid 2 (Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, 2003), hal. 340.

²⁸ Arsip Nasional RI Wilayah Jawa Barat. *Data Informasi Arsip Foto Jawa Barat 1959*.

DAFTAR SUMBER

- Abdurachman, Aan dkk. 2000. Saya Pilih Mengungsi: Pengorbanan Rakyat Bandung untuk Kedaulatan. Bandung: Pustaka Madani.
- Arsip Nasional RI Wilayah Jawa Barat. Data Informasi Arsip Foto Jawa Barat 1956.
- Arsip Nasional RI Wilayah Jawa Barat. Data Informasi Arsip Foto Jawa Barat 1957.
- Arsip Nasional RI Wilayah Jawa Barat. Data Informasi Arsip Foto Jawa Barat 1958.
- Arsip Nasional RI Wilayah Jawa Barat. Data Informasi Arsip Foto Jawa Barat 1959.
- Ekadjati, Edi S., dkk. 1978/1979. Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Barat. Jakarta: Depdikbud.
- , dkk. 1984. Sejarah Kota Bandung 1945-1979. Jakarta: Depdikbud.
- Julita, Melly Irawati. 2001. Kebun Binatang Bandung (1930: 2000): Studi tentang Pembentukan, Perkembangan, dan Pengaruhnya terhadap Pariwisata. Skripsi. Bandung: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran.
- Kunto, Haryoto. 1984. Wajah Bandoeng Tempo Doeloe. Bandung: Granesia, 1984.
- . 1986. Semerbak Bunga di Bandung Raya, Bandung: Granesia.
- . 1996. Balai Agung di Kota Bandung, Bandung: Granesia.
- Lubis, Nina Herlina, dkk. 2003. Sejarah Tatar Sunda. Jilid 2. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.
- Mooi Bandoeng, Februari 1940, No. 2.
- Mooi Bandoeng, October 1940, No. 10.
- Kantor Sensus dan Statistik Jawa Barat, Statistik Jawa Barat 1971.
- Reitsma, S.A. dan W.H. Hoogland. 1921. Gids van Bandoeng en Omstreken. Bandoeng: N.V. Mij Vorkink.
- Roelcke, Gottfried dan Gary Crabb. 1994. All Around Bandung: Exploring the West Java Highlands. Bandung: Bandung Society for Heritage Conservation.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1906, No. 121
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1916, No. 65.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1920, No. 150.
- Verslag van den Toestand der Gemeente Bandoeng, 1919.
- Verslag der Staatsspoor-en Tramwegen in Nederlandsch-Indie Jrg. 1925.



Makna Strategis Peristiwa Bojongsokosan 9 Desember 1945*

Pengantar

Masa revolusi fisik yang berlangsung dalam kurun waktu tahun 1945 hingga tahun 1949 merupakan sebuah masa dalam perjalanan sejarah Indonesia yang sarat dengan warna-warni perjuangan untuk mempertahankan dan menegaskan kemerdekaan. Kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 ternyata tidaklah serta merta segera mengubah situasi dari bangsa terjajah menjadi bangsa merdeka. Masih diperlukan perjuangan panjang untuk menjadikan pernyataan kemerdekaan Indonesia bisa diterima oleh komunitas internasional, khususnya komunitas asing yang sebelumnya sempat merasakan secara langsung indahnya menguasai bumi Indonesia. Di sisi lain, beratnya beban penderitaan yang telah lama ditanggung bangsa yang besar ini semasa berada di bawah penjajahan asing telah memberikan kekuatan dahsyat untuk dapat terus memperjuangkan tetap tegaknya kemerdekaan yang telah diraih. Segala daya dilakukan oleh rakyat agar terbebas dari belenggu kolonialisme. Tidak hanya harta benda, nyawapun siap dikorbankan untuk mencapai cita-cita itu. Pada akhirnya, sejarah pun mencatat berbagai peristiwa perlawanan yang gagah berani yang dilakukan rakyat Indonesia untuk menggapai cita-cita tersebut. Satu di antara peristiwa besar dalam sejarah Indonesia yang terukir manis sebagai peristiwa heroik yang melibatkan tentara dan rakyat Indonesia adalah peristiwa yang terjadi di Bojongsokosan, Sukabumi, pada tanggal 9 Desember 1945.

Dalam perspektif ilmu sejarah, Peristiwa Bojongsokosan terkategoriikan sebagai sejarah dalam arti objektif. Peristiwa tersebut adalah sebuah peristiwa yang benar-benar pernah terjadi dalam kancah perjuangan rakyat Indonesia dan dengan demikian bukanlah peristiwa rekaan atau hasil rekayasa.¹ Kalaulah

* Makalah disampaikan sebagai bahan presentasi dalam Workshop Peristiwa Pertempuran Bojongsokosan yang diadakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Barat, Sukabumi, 18 – 19 Mei 2004.

¹ Seiring dengan pengertian sejarah ini, Jan M. Romein membagi pengertian sejarah ke dalam dua aspek, yaitu sejarah sebagai peristiwa yang telah terjadi dengan sesungguhnya (*geschiedenis als werkelijkheid*) dan sejarah sebagai ilmu pengetahuan (*geschiedenis als*

dilakukan rekonstruksi maka sebagaimana halnya rekonstruksi atas peristiwa sejarah pada umumnya maka rekonstruksi atas Peristiwa Bojongsokosan tersebut setidaknya mengandung tiga kegunaan penting. Pertama, untuk melestarikan identitas kelompok dan memperkuat daya tahan kelompok bagi kelangsungan hidup. Kedua, untuk mengambil pelajaran dan teladan dari peristiwa-peristiwa di masa lalu. Hal yang baik diupayakan untuk dapat diaplikasikan terus dalam kehidupan sehari-hari, hal yang buruk diupayakan untuk dihindari agar tidak terulang kembali. Tegasnya, dalam guna kedua ini, seluruh totalitas pengalaman manusia di masa lampau manfaatnya dipetik seoptimal mungkin untuk dijadikan bekal dalam menghadapi masa depan atau hari esok yang lebih baik. Ketiga, sejarah dapat berfungsi sebagai sarana pemahaman mengenai makna hidup dan mati atau mengenai tempat manusia di atas muka bumi ini.²

Untuk mencapai triguna tersebut, jelaslah bahwa penggalan atas Peristiwa Bojongsokosan harus dilakukan seobjektif mungkin dengan meminimalkan semaksimal mungkin terjadinya bias-bias subjektif, baik dari pelaku peristiwa maupun sang rekonstruktor. Selanjutnya, agar nilai pelajaran dan keteladanan yang terkandung dalam peristiwa tersebut dapat terwariskan dengan baik, jelas perlu pula ada upaya lain untuk menjadikan peristiwa tersebut mudah dikenang dan dipahami dalam ingatan setiap orang. Representasi dari upaya ini bisa dalam bentuk pendeklarasian peristiwa tersebut sebagai hari istimewa yang akan selalu diperingati setiap tahun. Bentuk hari istimewa yang akan diidentifikasi kepada peristiwa tersebut tentunya sangat terpulang pada bagaimana bobot dan kelayakan peristiwa tersebut untuk dijadikan hari istimewa serta sasaran yang akan dijadikan subjek pewarisan nilai pelajaran dan keteladanan. Dalam kaitan inilah, bias-bias subjektif akan sulit dihindarkan untuk tidak bermain di dalamnya.

Situasi Nasional Pasca Kemerdekaan

Setelah melalui perjalanan panjang yang penuh liku, pada akhirnya tepat pada pukul 10.00 tanggal 17 Agustus 1945, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56, Soekarno-Hatta, atas nama Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pernyataan kemerdekaan yang memang telah ditunggu-tunggu rakyat Indonesia ini kontan saja mendapat sambutan hangat dari seluruh lapisan masyarakat. Apa yang selama ini mereka cita-citakan untuk menjadi bangsa

wetenschap). Sejarah sebagai ilmu pengetahuan terbagi pula dalam dua bagian besar, yakni praktis (teknis) dan teoretis (bersifat filsafat sejarah). Jan M Romein, *Apparaat voor de Studie der Geschiedenis*, (Groningen: J.B. Wolters, 1949), hal. 11.

² T. Ibrahim Alfian, *Sejarah dan Permasalahan Masa Kini*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada pada tanggal 12 Agustus 1985, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1985), hal. 3-4.

merdeka tercapai sudah. Pernyataan kemerdekaan yang dilakukan di tengah situasi yang serba darurat ini segera saja dihadapkan pada tantangan-tantangan yang sangat berat, baik sebagai akibat kegamangan Jepang dalam menerima tugas Sekutu untuk menjaga *status quo* di Indonesia maupun sikap ambivalen Sekutu antara menerima kemerdekaan Indonesia dan keinginan untuk mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia sebagaimana tertuang dalam kesepakatan 24 Agustus 1945 (*Civil Affairs Agreement*). Di luar itu, pemerintah baru di bawah pimpinan Soekarno Hatta pun dihadapkan pula pada eforia rakyat akan kemerdekaan yang dalam beberapa hal kemudian sering menimbulkan pertentangan pendapat dalam menerapkan strategi perjuangan menghadapi Jepang, Sekutu serta kekuatan lain yang memboncenginya. Soekarno yang melihat kekuatan bersenjata bukan merupakan alternatif pilihan terbaik untuk menegakkan kemerdekaan Indonesia, terutama dalam menghadapi Sekutu, cenderung memilih menempuh strategi diplomasi dalam menghadapi Sekutu. Pilihan strategi Soekarno tersebut bertentangan dengan keinginan rakyat yang lebih cenderung memilih bertempur melawan kekuatan Sekutu. Akibatnya, prestise dan popularitas Soekarno merosot dengan cepat.³

Kegamangan sikap Jepang dalam menghadapi perkembangan yang terjadi setidaknya terepresentasikan dalam bentuk “dukungan” terhadap penggelaran kemerdekaan Indonesia di satu sisi serta keengganan untuk menyerahkan kekuasaan kepada Bangsa Indonesia. Akibat kegamangan Jepang ini kemudian timbullah berbagai konflik bersenjata antara para pejuang Indonesia dengan tentara Jepang di berbagai daerah di Indonesia. Inti dari semua konflik tersebut pada umumnya diakibatkan oleh keinginan rakyat Indonesia untuk dapat memperoleh senjata yang berada di tangan Jepang. Senjata-senjata ini diperlukan rakyat Indonesia untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya upaya-upaya yang akan merusak kemerdekaan Indonesia.

Ambivalensi sikap Sekutu pada awalnya tidaklah tampak secara jelas. Kedatangan Sekutu yang ditujukan untuk membebaskan para tahanan perang Belanda yang ditawan Jepang pada mulanya tidaklah terlalu menimbulkan kekhawatiran rakyat dan pemerintah Indonesia.⁴ Bahkan, pemerintah Indonesia tampak memperlihatkan

³ Ulf Sundhaussen, *The Road To Power: Indonesian Military Politics 1945-1967*, Terjemahan oleh Hasan Basari, (Jakarta: LP3ES, 1986), hal. 7.

⁴ Kedatangan Sekutu di Indonesia pada dasarnya diawali oleh Mayor Greenhalgh yang melakukan manuver terjun payung di lapangan udara Kemayoran pada tanggal 14 September 1945. Kurang lebih dua minggu kemudian atau tanggal 29 September 1945 diikuti oleh mendaratnya kapal penjelajah Cumberland di pelabuhan Tanjung Priok, yang membawa Panglima Skadron Penjelajah V Inggris Laksamana Muda W.R. Patterson. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid VI, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal.

sikap-sikap akomodatif untuk membantu tugas-tugas Sekutu tersebut ketika pimpinan *Allied Forces Netherlands East Indies* (AFNEI) Letnan Jenderal Sir Philip Christison mengakui Republik Indonesia secara de facto pada tanggal 1 Oktober 1945. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, hubungan yang cukup baik ini berubah total menjadi memburuk, ketika fakta-fakta di lapangan memperlihatkan adanya upaya-upaya yang cukup sistematis dari Sekutu untuk mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia melalui tangan *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA). Akibat sikapnya yang ambivalen ini, timbullah reaksi perlawanan terhadap Sekutu di beberapa daerah di Indonesia. Musuh rakyat Indonesia pun kemudian bergeser secara cepat, dari Jepang kepada Sekutu.

Menghadapi situasi yang sangat tidak menguntungkan tersebut pada awalnya pemerintah Indonesia tampak memperlihatkan sikap yang ragu-ragu. Tuntutan rakyat untuk segera membentuk tentara reguler atau tentara kebangsaan tampak disikapi setengah hati oleh pemerintah sebagai akibat kekhawatiran pemerintah akan munculnya sikap keras dari tentara Jepang dan kemudian Sekutu. Oleh karenanya pemerintah hanya berani mendeklarasikan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) pada tanggal 23 Agustus 1945.⁵ Namun demikian, ketika situasi memperlihatkan perkembangan yang semakin membahayakan sementara kekuatan bangsa tampak tidak terkoordinasikan dengan baik, pemerintah pun kemudian mendeklarasikan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) melalui

121-122. Dalam perkembangan selanjutnya, jumlah kekuatan tentara Sekutu yang menduduki kota-kota besar di Indonesia, setidaknya hingga akhir tahun 1945, terdiri dari tiga divisi tentara Inggris, dua divisi tentara Australia, dan beberapa batalyon tentara Belanda. Nugroho Notosusanto (Ed.), *Pejuang dan Prajurit: Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hal. 42.

⁵ Meskipun kelahiran BKR ini belum memenuhi tuntutan rakyat tetapi keberadaannya disambut hangat oleh rakyat di berbagai daerah, dengan cara mendirikan BKR-BKR daerah. Sementara bagi yang tidak bisa menerima keberadaan BKR, kemudian mendirikan badan-badan perjuangan. Hal tersebut di antaranya dilakukan oleh Sukarni, Adam Malik, dan Chaerul Saleh dengan membentuk Komite van Aksi yang bermarkas di Asrama Menteng 31 Jakarta. Di dalam Komite ini bergabung antara lain, Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Rakyat Indonesia (Bara) dan Barisan Buruh Indonesia. Sebagaimana di Jakarta, di daerah juga terjadi pembentukan badan-badan perjuangan. Di Bandung misalnya berdiri Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia (P3I) yang kemudian menjadi Pemuda Republik Indonesia (PRI). Badan-badan perjuangan yang dibentuk di luar BKR pada tanggal 10 November 1945 mengadakan Kongres Pemuda Indonesia di Yogyakarta. Kongres yang dipimpin Chaerul Saleh ini melahirkan Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia. Terdapat perbedaan titik berat perjuangan antara anggota BKR dengan anggota badan-badan perjuangan. Anggota BKR menganggap diri sebagai pejuang bersenjata yang juga aktif dalam bidang politik, sedangkan anggota badan-badan perjuangan menganggap diri sebagai pejuang di bidang politik yang juga aktif dalam pertahanan negara secara fisik. Nugroho Notosusanto (Ed.), *Op. Cit.*, hal. 36-39.

sebuah maklumat yang dikeluarkan pada tanggal 5 Oktober 1945.⁶ Pembentukan TKR sebagai perubahan dari BKR tidaklah lantas menyatukan seluruh badan-badan perjuangan yang ada saat itu. Upaya untuk mengajak badan-badan perjuangan agar berada dalam satu wadah perjuangan yang bernama TKR tampak masih memerlukan proses yang cukup panjang.⁷ Namun demikian, situasi perjuangan yang dihadapi pada musuh yang sama, menyebabkan hubungan antara TKR dengan badan-badan perjuangan, setidaknya di Jawa Barat, relatif berada dalam hubungan yang harmonis. Sebagai kekuatan utama perjuangan, mereka selalu saling membahu dalam menghadapi kekuatan musuh.

Bila hubungan antara TKR dan badan-badan perjuangan berada dalam hubungan yang relatif harmonis maka tidak demikian halnya hubungan antara TKR dan badan-badan perjuangan dengan pemerintah. Sikap ragu-ragu yang terus menerus diperlihatkan pemerintah dalam menghadapi kearoganan Sekutu melalui perjuangan bersenjata dalam batas-batas tertentu telah menghilangkan kepercayaan alat-alat perjuangan terhadap kewibawaan pemerintah. Di sisi lain, ada alasan rasional pula yang menyebabkan pemerintah tampak terkesan ragu untuk menghadapi Jepang dan Sekutu dengan kekuatan bersenjata. Perbedaan

⁶ Oerip Soemohardjo, seorang pensiunan mayor KNIL, yang mendapat tugas dari pemerintah untuk mengorganisasikan tentara nasional dan kemudian diangkat menjadi Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal, semula merencanakan kekuatan TKR hanya terdiri dari empat divisi saja, tiga di Jawa dan satu di Sumatera. Namun demikian, melihat sambutan yang begitu antusias dari para pejuang, untuk secara sukarela menjadi anggota TKR mengakibatkan terjadinya pembengkakan jumlah divisi menjadi 16 divisi, 10 divisi di Jawa (3 di Jawa Barat, 4 di Jawa Tengah, dan 3 di Jawa Timur) dan 6 divisi di luar Jawa. Untuk menegatkan organisasi, 10 divisi di Jawa kemudian dibagi menjadi 3 komandemen yang masing-masing dipimpin seorang mayor jenderal. Namun, pembentukan komandemen ini tidak begitu lancar karena sebagian divisi tidak mau mengakui panglima komandemennya. Bahkan, di Jawa Timur panglima komandemennya ditangkap oleh polisi militernya sendiri. Hanya di Jawa Barat, komandemen dapat berfungsi dengan baik di bawah pimpinan Didi Kartasasmita, dengan Abdul Harris Nasution sebagai kepala stafnya. Selanjutnya karena Supriyadi yang diangkat menjadi pemimpin tertinggi TKR tidak pernah tampil menduduki posnya, pada tanggal 12 November 1945, Markas Tertinggi TKR (MT TKR), mengadakan rapat pimpinan di Yogyakarta yang diikuti panglima-panglima divisi dan komandan-komandan resimen dari pulau Jawa. Melalui proses pemilihan, Panglima Divisi V Banyumas Kolonel Soedirman, yang baru berusia 33 tahun, terpilih sebagai Panglima Tertinggi TKR sedangkan Oerip Soemohardjo terpilih sebagai kepala staf TKR. Setelah melalui proses pertimbangan yang cukup panjang, pemerintah pada tanggal 18 Desember 1945 mengesahkan hasil pemilihan tersebut sekaligus melantik Kolonel Soedirman sebagai Panglima Tertinggi TKR dengan pangkat jenderal, sementara Oerip Soemohardjo sebagai kepala staf dengan pangkat tetap, letnan jenderal. Hasil pemilihan ini tampaknya sangat mengecewakan Oerip sehingga ia memilih mengundurkan diri dari kedudukan sebagai kepala staf. Ibid., hal. 40-43; Ulf Sundhaussen, op. cit., hal. 14-16. Dengan demikian, selama kurang lebih dua bulan pada dasarnya terjadi kekosongan pimpinan TKR.

⁷ Indria Samego, et al, *Desakan Kuat Reformasi atas Konsep Dwifungsi ABRI: "...Bila ABRI Menghendaki"*, (Bandung: Mizan, 1998), hal. 75 -77.

kualitas dan kuantitas senjata yang sangat jauh yang dimiliki kedua kekuatan menyebabkan pemerintah memilih perlawanan bersenjata sebagai pilihan terakhir. Pemerintah tampaknya tidak ingin karena persenjataan yang tidak seimbang ini akan banyak korban jiwa jatuh di pihak Indonesia.

Dilema bagi pemerintah untuk menggelar strategi lain di luar perjuangan bersenjata muncul tatkala kenyataan di lapangan memperlihatkan adanya keengganan pihak Sekutu untuk berunding dengan Soekarno-Hatta. Sekutu memandang Soekarno-Hatta hanyalah boneka atau kolaborator Jepang dan kemerdekaan Indonesia pun lebih merupakan hadiah dari Jepang. Melihat realita tersebut, demi kepentingan nasional yang lebih besar serta lancarnya perjuangan diplomasi, sebuah keputusan berani ditempuh Soekarno-Hatta dengan mengubah sistem pemerintahan dari presidential ke parlementer, yang sebenarnya nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Sutan Sjahrir pun kemudian tampil sebagai perdana menteri sejak tanggal 14 November 1945. Naiknya Sjahrir sebagai perdana menteri tidak serta merta membuat Sekutu berpaling muka dan mau melaksanakan perundingan dengan pemerintah Indonesia. Proses panjang tampaknya masih harus ditempuh untuk membuat Sekutu benar-benar mau masuk ke meja perundingan.

Peristiwa Bojongsokosan

Di tengah situasi nasional yang serba kompleks tersebut, Sekutu dengan AFNEI-nya, tampaknya tetap konsisten dengan tugas-tugasnya sebagaimana perintah Gabungan Kepala Staf Serikat yang diberikan kepada *South East Asia Command (SEAC)* yang dipimpin Laksamana Lord Louis Mountbatten, yakni,

1. Menerima penyerahan dari tangan Jepang
2. Membebaskan para tawanan perang dan interniran Serikat
3. Melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan
4. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil
5. Menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut mereka di depan pengadilan Serikat.⁸

Berbagai manuver terus dilakukan Sekutu untuk memperlihatkan kedigdayaannya sebagai pemenang Perang Dunia II kepada bangsa Indonesia. Pengiriman pasukan pun seakan dilakukan tiada henti ke berbagai wilayah Indonesia dari pusat-pusat pendaratannya. Ketidakpedulian Sekutu atas perubahan sikap bangsa Indonesia dalam memandang kedatangan Sekutu serta

⁸ Independent, 29 Desember 1945, dalam Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Op. cit., hal. 122.

kearoganan sikap Sekutu telah melahirkan berbagai perlawanan dari bangsa Indonesia. Akibatnya, di beberapa daerah, baik di Jawa maupun luar Jawa, terjadilah peristiwa-peristiwa pertempuran melawan Sekutu, dari mulai yang berskala kecil hingga yang berskala besar. Korbanpun berjatuhan dari kedua belah pihak tanpa dapat dihindarkan.

Dari sekian banyak peristiwa pertempuran yang dialami Sekutu tercatat pula sebuah peristiwa pertempuran yang terjadi di Kampung Bojongkokosan, Desa Kompa, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. *Zeitgeist* saat itu yang telah menjadikan Sekutu sebagai musuh baru bangsa Indonesia menjadikan rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Sukabumi, bersikap sangat kritis dalam menyikapi setiap pergerakan tentara Sekutu. Keberadaan Sukabumi sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam menjadikan rakyat Sukabumi semakin sadar bahwa cepat atau lambat, daerah Sukabumi akan menjadi daerah yang akan disentuh oleh mesin-mesin perang Sekutu. Terlebih lagi, keberadaan Sukabumi yang sangat strategis yang berada di jalur jalan yang menghubungkan Jakarta dan Bandung bisa dipastikan akan menjadi alternatif pergerakan tentara Sekutu dari Jakarta ke wilayah-wilayah lain di Jawa Barat, khususnya ke Kota Bandung. Sikap waspadapun tampak terlihat dari anggota-anggota TKR⁹ dan

⁹ Resimen III TKR di Sukabumi pada awalnya berada di bawah pimpinan Letnan Kolonel A. Basyuni yang kemudian diganti oleh Letnan Kolonel Edi Sukardi. Kekuatan TKR Sukabumi terdiri dari empat batalyon, yakni Batalyon I, dengan komandannya Mayor Yahya Bahram Rangkuti; Batalyon II dengan komandannya Mayor Heri Sukardi; Batalyon III, dengan komandannya Kapten Anwar; dan Batalyon IV, dengan komandannya Mayor Abdurachman. Edie Soekardi, "Peranan TNI dalam Peristiwa Pertempuran Convoy (Bojongkokosan) Sukabumi 9 Desember 1945", Makalah disampaikan dalam Temu Tokoh Sejarah Jawa Barat "Peristiwa Pertempuran Convoy (Bojongkokosan) di Sukabumi 9 Desember 1945", (Bandung: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, 2003), hal. 3-4; Moh. Iskandar, "Palagan Bojongkokosan 9 Desember 1945", Makalah disampaikan dalam Temu Tokoh Sejarah Jawa Barat "Peristiwa Pertempuran Convoy (Bojongkokosan) di Sukabumi 9 Desember 1945", (Bandung: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, 2003), hal. 3-4; Panitya Pembangunan Monumen Perjuangan 45 Kabupaten Sukabumi, Sejarah Peristiwa Bojongkokosan, (Sukabumi: Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Sukabumi, 1986), hal. 19-20; Tentang kekuatan resimen Sukabumi, sumber lain ada yang menyebut terdiri dari lima batalyon. Di samping keempat batalyon di atas, terdapat batalyon V, dengan komandannya Mayor R.A. Kosasih. Agnes Sekar Supenni, Sekitar Pertempuran Bojongkokosan 9 Desember 1945, (Bandung: Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, 1984), hal. 35. Secara struktural, TKR Sukabumi termasuk ke dalam Divisi III, Komandemen I Jawa Barat. Wilayah komando Divisi III meliputi seluruh daerah Priangan, termasuk Cianjur dan Sukabumi, dengan kedudukan markas berada di wilayah Bandung Selatan, tepatnya di daerah Ciparay. Komandan Divisi III dipegang oleh Kolonel A.H. Nasution sementara Panglima Komandemen I Jawa Barat dipegang oleh Mayor Jenderal Didi Kartasasmita, dengan markas berkedudukan di Purwakarta. A.H. Nasution, Sedjarah Perdjangan Nasional Dibidang Bersendjata, (Djakarta: Mega Book Store, 1966), hal. 30-36; Parikesit, "Sekilas Lintas tentang MBT", Vidya Yudha (1982, No. 42), hal. 45.

badan-badan perjuangan¹⁰ yang ada di Sukabumi. Setidaknya ada dua tugas yang diberikan Komandan Resimen III kepada batalyon-batalyon yang ada di Sukabumi:

1. Menerima intruksi dan melaksanakan tugas dari resimen untuk menghadapi musuh dari luar yang seterusnya dilanjutkan ke kompi-kompi
2. Mengambil tindakan yang disesuaikan dengan keadaan apabila dalam keadaan darurat, yang kemudian dilaporkan kepada komandan resimen.¹¹

Dugaan rakyat Sukabumi tentang kemungkinan Sekutu menyentuh Sukabumi atau menjadikan wilayah Sukabumi sebagai daerah perlintasan bagi tentaranya yang akan dikirim ke daerah lain di Jawa Barat, khususnya Bandung, menjadi kenyataan tatkala diperoleh informasi adanya pergerakan tentara Sekutu melalui Sukabumi. Informasi ini segera dijawab oleh para pejuang dengan berbagai persiapan untuk menghadapi pergerakan tentara Sekutu. Strategi yang kemudian dipilih untuk menghadapi kedatangan mesin-mesin perang Sekutu adalah berupa penghadangan pergerakan tentara Sekutu. Wilayah yang kemudian dijadikan sebagai tempat penghadangan selanjutnya adalah Kampung Bojongkokosan. Alasan pemilihan Bojongkokosan sebagai tempat penghadangan karena wilayah ini merupakan daerah berbukit-bukit yang terletak memanjang di antara kedua tepi jalan raya sepanjang kurang lebih 400 meter. Bukit tersebut di sebelah Timurnya berakhir di sebuah belokan yang di atasnya terletak sebuah saluran air (yang disebut Talang Luhur) melintasi jalan raya, yang tingginya mencapai kurang lebih 30 meter. Medan penghadangan yang berbukit terjal serta ditumbuhi alang-alang liar yang tingginya hingga 2 meter serta pepohonan yang rimbun dipandang sangat menguntungkan untuk menghambat laju pergerakan tentara Sekutu.¹²

¹⁰ Badan-badan perjuangan di Sukabumi yang ada di Sukabumi yang setidaknya hingga menjelang peristiwa Bojongkokosan masih berada di luar TKR, antara lain, Angkatan Pemuda Indonesia (Pesindo) di bawah pimpinan S. Waluyo; Hizbullah di bawah pimpinan Samsudin dan Suryana; Sabillilah di bawah pimpinan Sasmita Atmadja dan A. Basarah; Barisan Banteng Republik Indonesia di bawah pimpinan Suradiredja dan Lunadi; Pemuda Proletar dibawah pimpinan Sambik; Laskar Merah di bawah pimpinan Mulyana dan Karim; Pejuang Rakyat Desa di bawah pimpinan Dadang Sukatma; Laskar Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), di bawah pimpinan F. Kalaseran; Laskar Rakyat di bawah pimpinan A. Kosim; dan Laswi di bawah pimpinan Alfiah Kosim. Agnes Sekar Supeni, op. cit., hal.36-37; Panitia Pembangunan Monumen Perjuangan 45 Kabupaten Sukabumi, op. cit., hal. 20. Sumber lain menyebutkan nama yang berbeda untuk beberapa pimpinan badan perjuangan, seperti, Hizbullah dengan pemimpinnya Samsudin dan wakilnya ajengan Damanhuri; Fi Sabillilah di bawah pimpinan Dakhlan serta pimpinan batalyon Dodi Abdullah dan Acep Basyarah. Dodi Abdullah, "Peranan Pesantren Sukabumi dalam Peristiwa Pertempuran Convoy (Bojongkokosan) Sukabumi 9 Desember 1945", Makalah disampaikan dalam Temu Tokoh Sejarah Jawa Barat "Peristiwa Pertempuran Convoy (Bojongkokosan) di Sukabumi 9 Desember 1945", (Bandung: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, 2003).

¹¹ Wawancara dengan Edi Sukardi (dalam Moh. Iskandar, op. cit., hal.. 4).

¹² Ibid., hal. 37-38; Moh. Iskandar, op. cit., hal. 5.

Ketika pada awal bulan Desember, tepatnya hari Minggu tanggal 9 Desember, sekitar pukul 12.00 diperoleh berita dari Pos Cigombong tentang telah Bergeraknya konvoi Sekutu berkekuatan satu batalyon ke arah Sukabumi, maka berbagai persiapan yang sebelumnya telah direncanakan segera digelar di Bojongkokosan. Kekuatan mesin perang Sekutu yang akan melalui Sukabumi tersebut terdiri dari empat buah tank, tiga panser wagon, 120 truk yang memuat pasukan Gurkha, serta tiga pesawat udara yang bertugas melakukan pengawalan konvoi dari udara. Adapun para pejuang yang berada langsung di daerah penghadangan Bojongkokosan pada dasarnya terdiri dari gabungan anggota TKR dan badan-badan perjuangan. Dari TKR, pasukan penghadangan berasal dari Kompi III Batalyon I di bawah pimpinan Kapten Murad Idrus, dengan kekuatan sebanyak kurang lebih 165 orang. Kompi III ini terbagi lagi dalam empat seksi, yang masing-masing dipimpin Letnan Muda Muchtar, dengan kedudukan di Bojongkokosan tebing sebelah Utara; Letnan Muda Desi Kusnadi, dengan kedudukan Bojongkokosan tebing sebelah Selatan; Letnan Muda Kosasih Harsono, dengan kedudukan di Parungkuda; dan Letnan Muda Sukria Bustomi, dengan kedudukan di Parungkuda. Pasukan pejuang dari badan-badan perjuangan berasal dari Barisan Banteng yang dipimpin oleh Toha, Hizbullah di bawah pimpinan Akbar, dan Baret Putih di bawah pimpinan Karta Mihardja. Kekuatan senjata yang dimiliki para pejuang antara lain terdiri dari senapan edystone/Hamburg, senapan Boumen/Double Loop, pistol Parabellum, granat tangan, “kremling” yakni sejenis granat pembakar buatan sendiri, serta beberapa senjata tajam, seperti golok, tombak, dan bambu runcing.¹³

Meskipun perbandingan peta kekuatan pasukan pejuang penghadangan dan pasukan Sekutu yang akan dihadapi, baik secara kuantitas maupun kualitas, sangat jauh berbeda, bahkan dapat dikatakan amat sangat tidak berimbang, hal itu sama sekali tidak menyurutkan tekad dan semangat para pejuang untuk terus melanjutkan tekadnya menghadang pergerakan tentara Sekutu. Oleh karenanya, tatkala mesin perang Sekutu benar-benar melewati wilayah Bojongkokosan sekitar pukul 15.00, pertempuran pun pecah. Dalam pertempuran yang berlangsung selama hampir tiga jam serta diwarnai hujan lebat tersebut, walaupun banyak jatuh korban di pihak pejuang, namun pasukan pejuang pun berhasil memberikan pukulan yang sangat berarti terhadap mesin-mesin perang Sekutu. Hingga berakhirnya pertempuran, setidaknya 50 tentara Sekutu menjadi korban, termasuk pimpinan tentara Gurkha Rawell Singh, rusaknya dua panser wagon dan dua tank, serta

¹³ Panitia Pembangunan Monumen Perjuangan 45 Kabupaten Sukabumi, op. cit., hal. 23-29. Sumber lain ada yang menyebut secara terperinci jumlah senjata yang dimiliki para pejuang, yakni, 8 pucuk senapan Edystone, 6 pucuk senapan Boumen, 6 pucuk pistol, 210 granat tangan ditambah granat buatan sendiri. Dinas Sejarah Kabupaten DT II Sukabumi, Kisah Singkat Peristiwa Pertempuran di Bojongkokosan, (Sukabumi, 1977), hal. 2; Agnes Sekar Supenni, op. cit., hal. 39.

hancurnya beberapa truk.¹⁴ Sementara itu di pihak pejuang sendiri, setidaknya tercatat 28 orang gugur dan sejumlah pejuang luka-luka, terutama mereka yang berkedudukan di tebing bagian bawah pinggir jalan. Termasuk ke dalam para pejuang yang gugur adalah komandan regu I seksi II Saban dan Aceng.¹⁵

Arti Strategis Peristiwa

Peristiwa penghadangan tentara Sekutu oleh para pejuang Sukabumi di Bojongkokosan meskipun tidak berhasil menghentikan secara total laju pergerakan tentara Sekutu, jelas terlihat sangat istimewa. Betapa tidak, dengan senjata dan pengalaman yang serba terbatas para pejuang tanpa rasa takut berani menghadapi tentara Sekutu yang baru saja keluar sebagai pemenang Perang Dunia II. Keinginan kuat untuk menjadi bangsa merdeka serta tekad besar untuk menegakkan kemerdekaan telah memberi motivasi dan semangat yang sangat besar kepada para pejuang untuk menghadapi Sekutu. Sekecil apapun peranan yang diberikan, para pejuang tampaknya yakin bahwa hal tersebut tetap akan mampu memberi pukulan tersendiri bagi tentara Sekutu.

Melihat perkembangan yang terjadi sesudah peristiwa penghadangan di Bojongkokosan berlangsung terlihat bahwa peristiwa tersebut, langsung atau tidak langsung, telah memberikan makna tersendiri bagi perjuangan bangsa Indonesia secara keseluruhan, khususnya perjuangan rakyat Jawa Barat dalam menghadapi aksi-aksi penggelaran tentara Sekutu. Menyusul aksi penghadangan di Bojongkokosan timbullah aksi-aksi perlawanan lain di daerah-daerah yang dilalui tentara Sekutu, bahkan hingga detik-detik terakhir menjelang masuknya tentara Sekutu di kota Sukabumi. Pertempuran yang terjadi pasca penghadangan di Bojongkokosan setidaknya terjadi di daerah Ungkrak, Selokopi, Cikukulu, Situawi, Ciseureuh, Degung, Ngaweng, Cimahpar, Cipelang hingga Gekbrong. Dari berbagai aksi penghadangan selepas Bojongkokosan hingga memasuki kota ini, setidaknya tercatat 25 orang pejuang gugur. Setelah perjalanan yang sangat berat dan banyak menimbulkan kerugian, mesin-mesin perang sekutu pun pada akhirnya dapat tiba di Sukabumi di atas jam 21.00, dan terpaksa bermalam di Sukabumi sebelum melanjutkan perjalanan ke Kota Bandung.¹⁶

Meskipun setibanya Sekutu di Kota Sukabumi telah tercapai kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata, tetapi dalam perkembangannya aksi-aksi perlawanan terhadap pergerakan tentara Sekutu pasca penghadangan di

¹⁴ Dinas Sejarah Kabupaten DT II Sukabumi, op. cit., hal. 2; Agnes Sekar Supenni, op. cit., hal. 50.

¹⁵ Moh. Iskandar, op. cit., hal. 5-7. Panitia Pembangunan Monumen Perjuangan 45 Kabupaten Sukabumi, op. cit., hal. 33.

¹⁶ Ibid., hal. 8

Bojongkokosan terus berlangsung hingga keesokan harinya. Munculnya aksi-aksi penghadangan lanjutan ini pada dasarnya diakibatkan pula oleh ulah tentara Sekutu sendiri yang melanggar kesepakatan yang telah dibuat, yakni dengan melakukan pengeboman ke Kota Cibadak. Aksi-aksi perlawanan di wilayah Sukabumi yang lebih berupa gangguan atas pergerakan tentara Sekutu setidaknya terjadi di daerah Gekbrong, Pasekon dan di belokan Cimahpar dan Gentong (daerah Sukaraja). Intensnya pertempuran antara para pejuang di wilayah Sukabumi dengan Sekutu pada akhirnya semakin mempertebal rasa senasib seperjuangan, baik di antara TKR dan badan-badan perjuangan maupun antara TKR dan badan-badan perjuangan dengan rakyat Sukabumi pada umumnya. Kondisi tersebut pada akhirnya semakin meningkatkan kekohesifan di antara semua elemen masyarakat yang ada di Sukabumi.

Lebih dari itu, aksi penghadangan terhadap tentara Sekutu yang dilakukan para pejuang Sukabumi di wilayah Bojongkokosan tidak saja mengundang perlawanan bergelombang dari para pejuang di seluruh wilayah Sukabumi tetapi juga tampaknya menjadi model perlawanan di luar wilayah Sukabumi, khususnya di daerah-daerah yang menjadi bagian wilayah kekuasaan Divisi III Komandemen I TKR. Pemilihan daerah berbukit untuk menjadi tempat penghadangan juga kemudian dijadikan alternatif utama dalam setiap aksi penghadangan. Hal itu tampak jelas misalnya dalam aksi penghadangan yang dilakukan TKR dan badan-badan perjuangan di wilayah Cipatat dan Padalarang, tepatnya di sekitar Gunung Masigit, yaitu daerah perbatasan antara Desa Ciburuy Padalarang dengan Desa Citatah Cipatat, pada tanggal 17 Desember 1945. Dalam pertempuran yang berlangsung kurang lebih satu minggu setelah peristiwa Bojongkokosan ini, setidaknya sekitar 100 orang tentara Sekutu mengalami luka-luka dan tewas. Sementara dari para pejuang, di samping yang menderita luka-luka, tercatat pula 12 orang meninggal, masing-masing 7 orang anggota TKR dan 5 orang anggota badan-badan perjuangan.¹⁷

Di samping memiliki makna strategis secara militer, peristiwa Bojongkokosan juga memiliki makna strategis pada tataran diplomasi. Secara nasional, bersama-sama dengan pertempuran lainnya di seluruh Indonesia yang berlangsung sepanjang tahun 1945, khususnya yang berlangsung sepanjang dua bulan terakhir di tahun 1945, langsung atau tidak langsung, peristiwa Bojongkokosan juga telah menjadi alat penekan yang cukup ampuh terhadap Sekutu agar mau segera duduk di meja perundingan. Sekutu yang pada awalnya tidak mau duduk untuk berunding, setelah melihat kerasnya sikap penolakan rakyat Indonesia dalam

¹⁷ Suhendar, Pertempuran Gunung Masigit, 17 Desember 1945: Perjuangan Masyarakat Cipatat dan Padalarang dalam Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, (Bandung: Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, 1987).

menghadapi kedatangan mesin-mesin perangnya serta banyaknya korban jiwa dan materil dalam pertempuran-pertempuran yang dihadapinya di berbagai wilayah tanah air, pada akhirnya mau membuka perundingan dengan pemerintah Indonesia pada tanggal 10 Februari 1946.¹⁸ Masuknya Sekutu dalam meja perundingan jelas merupakan suatu kemenangan besar bagi bangsa Indonesia karena hal itu secara implisit telah memperlihatkan adanya pengakuan Sekutu secara *de jure* terhadap kemerdekaan Indonesia. Pengakuan *de jure* secara implisit ini sekaligus pula merupakan peningkatan dari pengakuan secara *de facto* yang telah diberikan Sekutu pada tanggal 1 Oktober 1945. Atas dasar realita tersebut, tentu tidaklah berlebihan bila kemudian dikatakan, “Berkat Bojongkokosan Sekutu pun mau duduk di meja perundingan”. Satu kondisi yang sejak awal telah dicitakan oleh Soekarno dan Hatta.

Penutup

Peristiwa Bojongkokosan jelas bukan peristiwa pertempuran satu-satunya melawan Sekutu yang terjadi di Jawa Barat yang melibatkan TKR dan badan-badan perjuangan. Namun demikian, peristiwa Bojongkokosan merupakan aksi penghadangan “pembuka” melawan mesin-mesin perang Sekutu yang relatif berskala besar yang kemudian, langsung atau tidak langsung, mempengaruhi lahirnya peristiwa-peristiwa pertempuran lain sesudahnya, baik di Sukabumi maupun di luar wilayah Sukabumi.

Melihat realita bahwa peristiwa Bojongkokosan belum banyak dikenal sebagai peristiwa sejarah besar yang terjadi di Jawa Barat maka sudah pada tempatnya apabila peristiwa tersebut mendapat penghormatan untuk dijadikan sebagai peristiwa bersejarah resmi yang dapat diperingati secara rutin setiap tahun. Pendeklarasian peristiwa sebagai Hari Juang Siliwangi dapat kiranya dijadikan alternatif pilihan sebagai bentuk penghargaan atas peristiwa tersebut. Hal itu juga terasa sangat pada tempatnya bila mengingat bahwa wilayah tempat berlangsungnya pertempuran merupakan wilayah kekuasaan Divisi III Siliwangi serta mayoritas yang terlibat di dalamnya adalah para pejuang yang berasal dari TKR dan badan-badan perjuangan yang menjadi cikal bakal kekuatan Divisi III Siliwangi. Di luar itu dapat pula kiranya peristiwa tersebut dijadikan pula sebagai

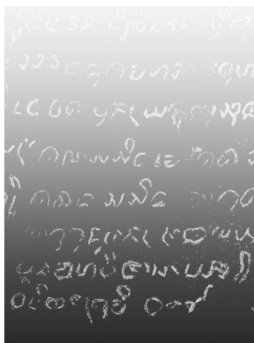
¹⁸ Dalam perundingan antara RI-Sekutu yang digelar untuk pertama kalinya ini, Inggris mengirimkan Sir Archibald Clark Kerr sebagai duta istimewanya, sementara Belanda diwakili oleh Wakil Gubernur Jenderal H.J. van Mook. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, op. cit., hal. 124.

Hari Perjuangan Rakyat Sukabumi atau Hari Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Mana di antara semua alternatif tersebut yang akan dipilih, yang lebih penting dari semuanya adalah bagaimana agar peristiwa Bojongkokosan ini dapat memberi pelajaran dan keteladanan bagi generasi selanjutnya. Pelajaran tentang sebuah strategi bertempur dalam kondisi kualitas persenjataan yang berbeda. Keteladanan akan kegigihan perjuangan untuk menegakkan kemerdekaan, keteladanan untuk menjaga harga diri dan martabat bangsa dari kesewenang-wenangan kekuasaan asing. Suatu keteladanan yang nyaris semakin mahal nilainya saat ini, khususnya ditengah perkembangan situasi nasional yang memang tengah mengalami krisis keteladanan yang cukup serius. Semoga!

DAFTAR SUMBER

- Abdullah, Dodi. 2003. "Peranan Pesantren Sukabumi dalam Peristiwa Pertempuran Convoy (Bojongkokosan) Sukabumi 9 Desember 1945", Makalah disampaikan dalam Temu Tokoh Sejarah Jawa Barat "Peristiwa Pertempuran Convoy (Bojongkokosan) di Sukabumi 9 Desember 1945". Bandung: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah Jawa Barat.
- Alfian, T. Ibrahim. 1985. "Sejarah dan Permasalahan Masa Kini", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada pada tanggal 12 Agustus 1985. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Dinas Sejarah Kabupaten DT II Sukabumi. 1977. Kisah Singkat Peristiwa Pertempuran di Bojongkokosan. Sukabumi.
- Iskandar, Moh. 2003. "Palagan Bojongkokosan 9 Desember 1945", Makalah disampaikan dalam Temu Tokoh Sejarah Jawa Barat "Peristiwa Pertempuran Convoy (Bojongkokosan) di Sukabumi 9 Desember 1945". Bandung: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah Jawa Barat.
- Panitya Pembangunan Monumen Perjuangan 45 Kabupaten Sukabumi 1986. Sejarah Peristiwa Bojongkokosan. Sukabumi: Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Sukabumi.
- Nasution, A.H. 1966. Sedjarah Perdjjuangan Nasional Dibidang Bersendjata. Djakarta: Mega Book Store.

- Notosusanto, Nugroho (Ed.). 1985. Pejuang dan Prajurit: Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI. Jakarta: Sinar Harapan.
- Parikesit. 1982. "Sekilas Lintas tentang MBT", Vidya Yudha, No. 42.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1984. Sejarah Nasional Indonesia. Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka.
- Romein, Jan M. 1949. Apparaat voor de Studie der Geschiedenis. Groningen: J.B. Wolters.
- Samego, Indria et al. 1998. Desakan Kuat Reformasi atas Konsep Dwifungsi ABRI: "...Bila ABRI Menghendaki". Bandung: Mizan.
- Soekardi, Edie. 2003. "Peranan TNI dalam Peristiwa Pertempuran Convoy (Bojongkokosan) Sukabumi 9 Desember 1945", Makalah disampaikan dalam Temu Tokoh Sejarah Jawa Barat "Peristiwa Pertempuran Convoy (Bojongkokosan) di Sukabumi 9 Desember 1945". Bandung: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah Jawa Barat.
- Suhendar. 1987. Pertempuran Gunung Masigit, 17 Desember 1945: Perjuangan Masyarakat Cipatat dan Padalarang dalam Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bandung: Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran.
- Sundhaussen, Ulf. 1986. The Road To Power: Indonesian Military Politics 1945-1967. Terjemahan oleh Hasan Basari. Jakarta: LP3ES.
- Supenni, Agnes Sekar. 1984. Sekitar Pertempuran Bojongkokosan 9 Desember 1945, Skripsi. Bandung: Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran.



Revitalisasi Nilai-Nilai Perjuangan Peristiwa Bandung Lautan Api*

Pengantar

Indonesia adalah negeri yang sarat dengan perjuangan melawan berbagai bentuk penindasan, khususnya penindasan yang ditimbulkan oleh penjajahan asing. Perjuangan tersebut mulai dari yang berskala kecil hingga besar, berskala lokal hingga nasional, bahkan internasional. Perjuangan tersebut tidak hanya berada pada tataran politik diplomasi tetapi juga berada pada tataran fisik bersenjata. Realitas perjuangan melawan kekuasaan asing dapat dikatakan hampir ditemukan di sebagian besar wilayah Indonesia, khususnya Jawa. Bila kemudian ditarik sebuah benang merah, meskipun berlangsung di tempat dan waktu yang berbeda, perjuangan-perjuangan yang dilakukan rakyat Indonesia tersebut pada dasarnya seringkali berada dalam suatu rangkaian peristiwa yang saling menunjang satu dengan lainnya.

Perjuangan demi perjuangan rakyat Indonesia yang tak kenal lelah pada akhirnya menghantarkan Indonesia menjadi sebuah negeri yang merdeka. Dengan demikian, kemerdekaan yang diraih pada tanggal 17 Agustus 1945 jelaslah bukan merupakan hadiah Jepang, Belanda, ataupun kekuatan asing lain tetapi buah perjuangan bangsa Indonesia yang penuh dengan pengorbanan jiwa, harta, darah dan airmata. Kemerdekaan itupun ternyata bukanlah akhir dari semua perjuangan melawan arogansi kekuatan asing. Belanda yang tahu betul potensi ekonomi dan politik Indonesia, dengan berbagai cara, berupaya mencengkeramkan kembali kukunya di Indonesia. Jadilah, tahun-tahun pertama kemerdekaan Indonesia pun sarat dengan perjuangan bersenjata melawan kesewenang-wenangan kekuatan asing. Jadilah tahun-tahun pertama kemerdekaan kembali penuh dengan pengorbanan jiwa, harta, darah dan airmata bangsa Indonesia.

Kini, hasil perjuangan para kusumah bangsa tersebut telah dirasakan oleh bangsa Indonesia. Udara kemerdekaan yang dulu menjadi barang mahal telah

* Makalah Sebagai materi presentasi dalam Seminar “Revitalisasi Nilai-Nilai Juang Bandung Lautan Api 2005” yang diadakan oleh Balai Pengelolaan Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat, Bandung, 23-24 Maret 2005.

menjadi milik segenap bangsa Indonesia. Rumah besar Indonesia yang dulu sarat dengan pagar-pagar diskriminasi, kini telah terbuka lebar bagi seluruh rakyat Indonesia. Para kusumah bangsa telah memberikan apa yang terbaik yang bisa mereka lakukan untuk bangsa yang besar ini. Untuk mengambil *ibrah* dari segala apa yang telah dilakukan para kusumah bangsa tersebut tentunya cukup banyak cara yang dapat dilakukan. Satu di antaranya adalah dengan mengaktualkan peristiwa-peristiwa bersejarah yang telah menjadi monumen perjuangan para kusumah bangsa. Dalam kerangka pemikiran itulah, upaya untuk selalu mengaktualkan peristiwa yang terjadi di Bandung pada tanggal 24 Maret 1946, yang kini dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api (BLA), merupakan sebuah langkah yang tepat dan memiliki makna strategis. Namun demikian, dibalik semua upaya aktualisasi peristiwa BLA tersebut, realitas memperlihatkan bahwa meskipun peringatan secara rutin dilakukan setiap tahun tetapi kesadaran tentang makna penting peristiwa BLA bukannya membaik tetapi justru semakin memudar. Semakin hari bukannya semakin banyak orang yang mengenal peristiwa BLA tetapi sebaliknya justru semakin banyak orang yang tidak mengetahui atau secara sengaja melupakan peristiwa tersebut. Kalau sudah demikian, menjadi sebuah pertanyaan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi? Padahal melalui peringatan peristiwa BLA terkandung harapan agar jejak-jejak di kelampauan tersebut mampu memberi kesadaran tentang identitas diri dan bangsa serta kesadaran untuk menjadikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai kekuatan kolektif dalam mengisi kemerdekaan.

Makna Peristiwa BLA

Pernyataan kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak lantas menghentikan arogansi kekuasaan asing di Indonesia. Jepang yang baru saja bertekuk lutut di tangan Sekutu tampak memperlihatkan sikap yang ragu-ragu, untuk tidak mengatakan cenderung merapat kepada keinginan Sekutu. Akibatnya, timbul berbagai reaksi ketidakpuasan rakyat atas sikap Jepang tersebut. Konflik bersenjata dengan Jepang pun pada akhirnya tanpa dapat dihindari pecah dimana-mana. Di sisi lain, kemenangan Sekutu atas Jepang semakin mengusik kembali mental-mental penindas yang ada dalam diri orang-orang Belanda. Hal ini tampak dari berbagai upaya yang dilakukan Belanda untuk bisa kembali berkuasa di Indonesia. Keinginan kuat Belanda untuk bisa kembali ke Indonesia seakan tinggal menunggu waktu saja manakala Inggris sebagai bagian utama dari kekuatan Sekutu sebelumnya telah terikat oleh Belanda lewat kesepakatan yang dibuat pada tanggal 24 Agustus 1945 (*Civil Affairs Agreement*).

Realitas pasca kemerdekaan yang sarat dengan berbagai kepentingan Sekutu dan Belanda tersebut pada akhirnya tanpa dapat dihindari melahirkan berbagai

konflik bersenjata. Konflik bersenjata antara Sekutu dengan rakyat Indonesia ini berlangsung di berbagai tempat di wilayah Indonesia, termasuk Jawa Barat pada umumnya dan Bandung pada khususnya. Dalam situasi tersebut, setiap pergerakan pasukan Sekutu yang mengancam kedaulatan Indonesia sebagai negara merdeka apalagi memperlihatkan pemihakan terhadap Belanda dengan baju NICA-nya (*Netherlands Indies Civil Administration*) selalu menghadapi perlawanan dari rakyat Indonesia. Perbedaan kualitas persenjataan antara dua kekuatan yang saling berhadapan bukanlah alasan untuk tidak melakukan perlawanan.

Sebagaimana kota-kota besar lainnya di Jawa, Bandung pun menjadi target penguasaan Sekutu. Oleh karenanya, berbagai cara ditempuh oleh Sekutu untuk dapat menguasai kota Bandung. Sebagai langkah awal Sekutu berupaya membersihkan Bandung Utara dari orang-orang pribumi dan pasukan bersenjata, baik TKR (TRI) maupun laskar-laskar perjuangan. Untuk itu, setelah menghadapi serangan besar-besaran dari para pejuang di kota Bandung pada tanggal 24 November 1945, kurang lebih tiga hari kemudian atau tepatnya tanggal 27 November 1945, Sekutu mengeluarkan sebuah ultimatum agar rakyat dan semua pasukan bersenjata keluar dari wilayah Bandung Utara, paling lambat pukul 12 siang tanggal 29 November 1945.¹ Segera setelah batas akhir ultimatum terlewati, serangan-serangan brutal pun dilakukan Sekutu untuk bisa menguasai Kota Bandung, namun serangan ini tidak hanya berlangsung di wilayah Bandung Utara tetapi juga Bandung Selatan. Beberapa peristiwa pertempuran pun pada akhirnya pecah di kota Bandung seperti pertempuran di daerah Lengkong pada tanggal 2 dan 6 Desember 1945, pertempuran di daerah Cicadas pada tanggal 14 Desember 1945, dan pertempuran di daerah Sukajadi pada tanggal 17 Februari 1946.

Setelah membagi dua Bandung menjadi Utara dan Selatan, dengan batas jalan kereta api yang melintang dari Timur ke Barat, target selanjutnya Sekutu adalah membersihkan Bandung Selatan dari pasukan TRI dan laskar-laskar perjuangan. Sebagaimana halnya upaya pertama, upaya kedua ini juga dilakukan dengan mengeluarkan sebuah ultimatum pada tanggal 17 Maret 1946. Adapun batas akhir ultimatum adalah tanggal 24 Maret 1946 jam 24.00.² Secara substansial, ultimatum kedua berbeda dengan ultimatum pertama. Ultimatum pertama yang berupa perintah pengosongan wilayah Bandung Utara ditujukan secara umum, baik kepada rakyat maupun pasukan bersenjata. Ultimatum kedua, yang berisi perintah meninggalkan wilayah Bandung Selatan dalam radius 11 kilometer dari pusat kota, secara khusus ditujukan kepada TRI dan laskar-laskar perjuangan. Sebagaimana halnya ultimatum pertama, ultimatum kedua pun pada awalnya disambut dengan

¹ Djen Amar, *Bandung Lautan Api*, (Bandung: Penerbit Dwiwarna, 1963), hal. 104-106.

² A.H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas*, Jilid I, (Jakarta: Masagung, 1990), hal. 166.

berbagai aksi perlawanan di beberapa bagian kota Bandung. Adapun peristiwa pertempuran yang relatif besar pasca dikeluarkannya ultimatum kedua adalah pertempuran di daerah *Fokkerweg* pada tanggal 19 Maret 1946.

Di luar serangan bersenjata, Sekutu pun mengembangkan pendekatan teror terhadap penduduk, termasuk politik adu domba, dengan memanfaatkan loyalis-loyalis Belanda, baik yang ada di kalangan pribumi maupun Timur Asing. Khusus para loyalis yang berasal dari penduduk Cina mereka digabungkan dan dipersenjatai dalam organisasi yang bernama *Po An Tui*. Tujuan teror dan adu domba tidak lain untuk menimbulkan ketidaknyamanan serta sikap saling curiga di antara berbagai elemen penduduk.

Tekanan kuat yang diberikan Sekutu kepada pemerintah RI segera berdampak pula pada perlawanan para pejuang di kota Bandung. Pada akhirnya, para pejuang harus mau mengikuti strategi yang dikembangkan pemerintah pusat, yang lebih mengedepankan perjuangan diplomasi. Oleh karenanya, ultimatum kedua ini relatif disikapi dengan lebih cermat oleh para pejuang di kota Bandung. Melalui serangkaian pertemuan dan manuver politik pada akhirnya diambil jalan untuk memenuhi ultimatum Sekutu dengan catatan tidak menyerahkan Bandung Selatan dalam keadaan utuh tetapi membumi-hanguskannya terlebih dahulu. Sementara itu, meskipun yang diminta keluar dari wilayah Bandung Selatan oleh Sekutu hanya para pejuang bersenjata tetapi pada akhirnya rakyat pun dengan sukarela turut mengikuti pengungsian, demikian pula dengan elemen-elemen pemerintahan kota Bandung. Proses pengungsian dan pembumi-hangusan wilayah Bandung Selatan ini dimulai beberapa jam menjelang batas waktu ultimatum kedua berakhir.

Dari uraian singkat di atas terlihat bahwa peristiwa 24 Maret 1946 bukanlah merupakan peristiwa yang berdiri sendiri tetapi merupakan suatu rangkaian dengan berbagai peristiwa perjuangan lainnya yang terjadi di seluruh kota Bandung. Tegasnya, peristiwa 24 Maret 1946 merupakan salah satu aksi perlawanan dari sekian banyak aksi perlawanan yang terjadi di kota Bandung. Aksi pembumi-hangusan yang dilakukan pejuang dan rakyat Bandung pada tanggal 24 Maret 1946 bila ditelaah lebih lanjut di dalamnya jelas menyisakan berbagai nilai yang dapat dijadikan bahan pelajaran bagi masa kini dan masa yang akan datang. Nilai-nilai yang baik dari peristiwa BLA dapat dijadikan sebagai penguat daya hidup³ yang perlu dilestarikan dan diteladani sementara nilai-nilai yang kurang

³ Daya hidup adalah daya yang harus dimiliki oleh setiap kebudayaan. Fungsi kebudayaan adalah menjaga dan mengembangkan tujuh kemampuan daya hidup, yakni daya-daya yang tidak dimiliki benda mati, yang meliputi kemampuan bernafas, kemampuan mencerna, kemampuan berkoordinasi dan berorganisasi, kemampuan beradaptasi, kemampuan mobilitas, kemampuan tumbuh dan berkembang, dan kemampuan regenerasi. W.S. Rendra, "Renungan Dasar Tentang Kebudayaan", Makalah disampaikan dalam Kongres Kebudayaan, Jakarta 29 Oktober – 3 November 1991, hal. 1-5.

baik perlu dibuang jauh-jauh agar tidak menjadi sebuah daya mati.

Nilai pelajaran pertama dari peristiwa BLA adalah kesadaran yang tinggi akan identitas diri sebagai bangsa yang merdeka. Hal ini tampak terepresentasikan dalam bentuk perlawanan terhadap setiap bentuk upaya yang mengarah pada perampasan kembali kemerdekaan yang telah diraih. Begitu bermaknanya identitas sebagai bangsa yang merdeka maka manakala timbul arogansi dari kekuatan asing yang memandang bangsa Indonesia sebagai pihak yang inferior serta manakala muncul keengganan pihak asing mengakui kemerdekaan Indonesia timbul keinginan kuat untuk melawannya demi tumbuhnya pengakuan kedaulatan dan kesejajaran sebagai bangsa yang merdeka. Kesadaran akan identitas sebagai bangsa merdeka juga terepresentasikan dalam bentuk penghormatan terhadap suprastruktur politik yang ada di pusat kekuasaan nasional.

Nilai pelajaran lain dari peristiwa BLA adalah kerelaan berkorban dari segenap elemen masyarakat demi tercapainya tujuan bersama, yakni mempertahankan Bandung sebagai wilayah berdaulat di bawah kendali pemerintah RI. Kerelaan berkorban tidak hanya terepresentasikan dalam bentuk kesiapan untuk mengorbankan nyawa sekalipun tetapi juga kerelaan berkorban dari berbagai lapisan rakyat untuk menghancurkan bangunan-bangunan yang menjadi miliknya agar tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak Sekutu.

Di luar kedua nilai pelajaran diatas, nilai pelajaran lainnya adalah kemanunggalan tentara dengan rakyat. Hal ini terlihat dari tumbuhnya kebersamaan dari rakyat untuk bersama-sama dengan tentara keluar dari kota Bandung. Kemanunggalan tentara dengan rakyat ini tentunya tidak mungkin timbul bila di antara keduanya tidak memiliki perasaan saling membutuhkan serta sikap saling percaya, saling menjaga, dan saling melindungi. Rakyat mau mengungsi dengan tentara karena mereka mempercayai tentara sebagai pelindung rakyat sekaligus penegak kebenaran dan keadilan. Tentara sebagai salah satu aset bangsa di awal kemerdekaan mampu menjaga tampilannya dengan baik sehingga melahirkan rasa percaya yang demikian besar dari rakyatnya.

Secara jujur harus diakui di samping nilai-nilai pelajaran yang dapat menjadi penguat daya hidup, peristiwa BLA juga mewariskan nilai-nilai pelajaran yang kurang baik, untuk tidak mengatakan nilai-nilai negatif. Nilai-nilai tersebut antara lain meliputi perilaku anasionalis dari sebagian elemen masyarakat, baik pribumi maupun Timur Asing, khususnya Cina. Perilaku anasionalis komunitas Cina ini bahkan terlembagakan dalam organisasi *Po An Tui*. Sementara perilaku anasionalis pribumi dan Timur Asing lainnya lebih tampil secara tersembunyi dan berperan sebagai kolaborator-kolaborator Sekutu.

Nilai pelajaran lainya yang juga lebih merupakan sebuah daya mati adalah kurangnya kapasitas dan lemahnya koordinasi untuk menjalankan secara optimal aksi pembumihangusan. Hal ini tampak dari terjadinya berbagai kekurangan-berhasilan manakala berlangsung aksi-aksi pembumihangusan sehingga tidak sedikit gedung atau bangunan yang gagal dibumihanguskan. Padahal, bangunan-bangunan tersebut merupakan bangunan vital.

Strategi Pembudayaan

Strategi secara sederhana dapat dipahami sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Pembudayaan yang berasal dari akar kata budaya dimaknai sebagai proses, perbuatan, cara memajukan budaya atau proses dari segala sosial budaya menjadi suatu adat atau pranata yang mantap.⁴ Dengan demikian, strategi pembudayaan dapat dipahami sebagai sebuah rencana yang sistematis dan terstruktur untuk menjadikan sebuah nilai budaya menjadi sebuah kebiasaan atau pranata yang “membumi” di tengah masyarakat. Dalam kaitannya dengan peristiwa BLA maka strategi pembudayaan memiliki makna sebagai sebuah rencana strategis untuk menjadikan nilai-nilai pelajaran yang terkandung dalam peristiwa BLA sebagai nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman dan tolok ukur dalam bertindak dan berperilaku, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

Strategi pembudayaan nilai-nilai pelajaran yang terkandung dalam peristiwa BLA setidaknya dapat disusun dalam langkah-langkah sebagai berikut, pertama, identifikasi peristiwa. Kedua, optimalisasi peran media massa. Ketiga, pengayaan metode penyampaian. Keempat, keteladanan perilaku.

Identifikasi peristiwa merupakan suatu proses untuk mengenal dengan baik peristiwa BLA. Di dalamnya terkandung pula pemahaman untuk tidak menempatkan peristiwa BLA sebagai peristiwa yang berdiri sendiri tetapi sebagai bagian dari rangkaian peristiwa yang telah terjadi sebelum dan sesudahnya. Dengan demikian, peristiwa BLA perlu ditempatkan sebagai bagian dari perjuangan semesta rakyat Bandung dalam melawan kesewenang-wenangan Sekutu. Identifikasi peristiwa sebagai tahapan pertama dari kegiatan pembudayaan bisa dilakukan dengan cara menyediakan berbagai jenis sumber informasi yang berkait erat dengan peristiwa BLA serta peristiwa-peristiwa perlawanan lainnya yang terjadi di kota Bandung. Sumber-sumber informasi tersebut dapat berupa sumber-sumber tertulis, sumber lisan, sumber benda maupun sumber visual. Sumber-sumber tertulis dapat berupa buku, majalah, koran, dan sebagainya. Sumber lisan dapat berupa hasil rekaman atau wawancara langsung dengan para aktor sejarah BLA. Sumber benda dapat

⁴ Lukman Ali. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan – Balai Pustaka, hal. 149 dan 964.

berupa benda-benda yang memiliki keterkaitan erat, baik langsung maupun tidak langsung, dengan perjuangan para aktor sejarah yang terlibat dalam peristiwa BLA. Sumber visual dapat berupa film-film dokumenter tentang berbagai hal yang berkait erat dengan peristiwa BLA.

Media massa, baik cetak maupun elektronik, tidak bisa dipungkiri merupakan saluran komunikasi paling ampuh untuk dapat mentransformasikan nilai-nilai pelajaran peristiwa BLA. Dengan semakin “membuminya” media cetak maupun media elektronik, kini dapat dikatakan hampir sebagian besar masyarakat, kaya maupun miskin, tua maupun muda, pernah bersentuhan akrab dengan media massa, baik secara keseluruhan maupun sebagian kecil saja. Bagaimana tingginya peran media massa dalam mempopulerkan serta memasyarakatkan pesan dan membangun citra seseorang, dapat dilihat ketatnya “perang” tampilan berbagai gambar visual dan cetak di media massa, termasuk di dalamnya “perang” yang berkaitan dengan pemilihan presiden yang baru lalu. Untuk itu, kini sudah pada tempatnya apabila pembudayaan nilai-nilai peristiwa BLA pun dilakukan secara intensif melalui media massa. Pemutaran film-film dokumenter seputar perjuangan semesta rakyat Bandung maupun pesan-pesan singkat yang menjadi *trademark* peristiwa BLA dapat kiranya dijadikan salah satu alternatif unggulan yang dapat ditempuh bagi pembudayaan nilai-nilai perjuangan peristiwa BLA.

Mengingat besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menggunakan saluran komunikasi berupa media massa ini maka pilihan kerjasama dapat menjadi alternatif terbaik. Dengan landasan berpikir bahwa pembudayaan nilai-nilai perjuangan merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa maka diharapkan ada kearifan dari para pemilik media massa untuk dapat memberikan ruang yang proporsional bagi upaya pembudayaan ini. Dalam relasi inilah, meminjam istilah Jakob Oetama, media massa dapat menampilkan dirinya sebagai lembaga masyarakat yang turut menyebarkan dan membudayakan nilai serta kebajikan budaya warga negara.⁵ Selanjutnya, agar keberadaan dan peran media massa ini dapat benar-benar teroptimalkan dalam upaya pembudayaan maka para komunikator hendaklah mampu memperhatikan dengan cermat dan cerdas unsur-unsur pokok yang akan menentukan keberhasilan proses komunikasi, yaitu, pengirim, *encoding* (penerjemahan informasi menjadi serangkaian simbol untuk komunikasi), *message* (pesan), *channel* (saluran komunikasi), *receive* (penerima), *decoding* (pemaknaan atau interpretasi komunikasi), *noise* (gangguan komunikasi), dan umpan balik.⁶

⁵ Jakob Oetama, “Industri Media sebagai Pengembangan Kebudayaan”, Makalah disampaikan dalam Kongres Kebudayaan, Jakarta, 29 Oktober – 3 November 1991, hal. 18.

⁶ Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 376.

Seringkali sebuah pesan tidak dapat tersampaikan karena ketidak tepatan metode yang digunakan. Dengan demikian, kalaulah pembudayaan akan ditempuh dengan tidak menggunakan media massa dan dalam lingkup yang lebih terbatas maka hendaklah dilakukan pengayaan metode penyampaian pesan. Bila metode ceramah yang menjadi pilihan maka hendaklah berlangsung secara dialogis dan tidak monologis. Sejalan dengan pengertiannya sebagai aliran makna (dialog berasal dari kata *dia* dan *logos*), maka dalam ceramah yang berformat dialog masing-masing pihak, baik komunikator maupun komunikan, harus memiliki keleluasaan untuk mengungkapkan perasaannya, mengeksplorasi asumsi-asumsinya, tidak memaksakan keyakinannya kepada orang lain dan menahan prasangka-prasangka. Tegasnya, dalam ceramah berformat dialog semua pihak menciptakan pengertian dan makna sehingga menyebabkan kesepakatan bersama, saling menerima, dan saling pengertian. Hasil akhir dari sebuah dialog adalah perubahan terbaik bagi kedua belah pihak.

Di luar ceramah yang bersifat dialogis, metode lain yang dapat digunakan dalam pembudayaan nilai-nilai pelajaran peristiwa BLA adalah kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan dilakukan dengan cara mendatangi tempat-tempat bersejarah yang ada kaitannya dengan peristiwa BLA dan peristiwa-peristiwa perjuangan lainnya yang mendahului peristiwa BLA, seperti situs-situs tempat pertempuran dan benda-benda peninggalan para pahlawan. Agar kunjungan lapangan dapat berlangsung secara optimal hendaklah kunjungan lapangan ini dilakukan secara matang, terencana rapih dan benar-benar bersifat faktual. Metode selanjutnya yang juga dapat digunakan adalah dengan melakukan temu aktor sejarah atau keluarga aktor sejarah yang terlibat dalam peristiwa BLA atau peristiwa perjuangan semesta yang terjadi sebelumnya. Dalam kaitan ini, peristiwa BLA tampaknya perlu memiliki simbol perjuangan yang dapat diidentikan dengan peristiwa tersebut. Simbol tersebut tentunya harus mampu menjadi perekat bersama serta menimbulkan rasa bangga. Tidak dibuat-buat, tidak harus selalu “orang besar” dan dimunculkan sesuai dengan kapasitasnya dalam peristiwa BLA.

Temu aktor sejarah atau keluarga aktor sejarah, dapat dilakukan dengan dua cara, mendatangi tempat kediaman sang aktor atau sebaliknya mendatangkan sang aktor atau keluarganya ke satu tempat untuk kemudian dilakukan ramah tamah serta dialog. Di luar itu semua, metode penyampaian dapat dilakukan dengan melalui perantaraan kesenian, khususnya seni musik. Melalui musik (baca, lagu) seringkali pesan dapat tersampaikan lebih alami, lebih menyentuh, dan mengalir seperti air. Simaklah dengan seksama lagu-lagu seperti Halo Halo Bandung, Hari Kemerdekaan, Pantang Mundur, Kebyar Kebyar, Bung Hatta, dan Jenderal Sudirman, untuk menyebut sebagian di antaranya.

Pada akhirnya, semua upaya yang dilakukan di atas tidak akan mencapai hasil yang optimal bila tidak diimbangi oleh adanya keteladanan perilaku. Keberadaan perilaku yang bisa diteladani memiliki peran strategis karena akan menjadi cermin langsung rakyat dalam bertindak dan berperilaku. Sehebat apapun pembudayaan dilakukan, apabila tidak diimbangi oleh adanya keteladanan perilaku yang nyata-nyata bisa mereka lihat sehari-hari bisa jadi semuanya tidak akan mendatangkan hasil yang optimal. Dengan demikian, pembudayaan nilai-nilai pelajaran peristiwa BLA ini, haruslah melibatkan seluruh komponen bangsa, terlebih mereka-mereka yang kini menjadi tokoh atau ditokohkan oleh masyarakat.

Implementasi Revitalisasi

Berbicara tentang implementasi nilai-nilai pelajaran peristiwa BLA secara implisit berarti berbicara tentang guna sejarah. Dalam kaitan tersebut, Kuntowijoyo mengemukakan bahwa sejarah itu berguna secara intrinsik dan ekstrinsik. Secara intrinsik, setidaknya ada empat guna sejarah; sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, sejarah sebagai pernyataan pendapat, dan sejarah sebagai profesi. Secara ekstrinsik sejarah di antaranya memiliki fungsi pendidikan, yang meliputi pendidikan moral, pendidikan penalaran, pendidikan politik, pendidikan kebijakan, pendidikan perubahan, pendidikan masa depan, dan pendidikan keindahan.⁷ Dari sekian guna tersebut, setidaknya ada lima guna sejarah yang perlu dikedepankan, yakni guna sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, guna sejarah sebagai pendidikan moral, guna sejarah sebagai pendidikan penalaran, sejarah sebagai pendidikan politik, dan sejarah sebagai pendidikan masa depan. Di sisi lain, dalam tampilan yang lebih sederhana, T. Ibrahim Alfian mengemukakan adanya tiga guna sejarah. Pertama, untuk melestarikan identitas kelompok dan memperkuat daya tahan kelompok bagi kelangsungan hidup. Kedua, untuk mengambil pelajaran dan teladan dari peristiwa-peristiwa di masa lalu. Ketiga, sejarah dapat berfungsi sebagai sarana pemahaman mengenai makna hidup dan mati atau mengenai tempat manusia di atas muka bumi ini.⁸

Dalam kerangka berpikir itulah, perlu dilakukan upaya-upaya untuk merevitalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa BLA. Revitalisasi⁹ nilai ini tampak menjadi semakin penting manakala Bandung sebagai kota perjuangan saat ini tengah dihadapkan pada berbagai perubahan yang sangat cepat, baik pada tataran fisik maupun nonfisik. Perubahan tersebut secara kasat mata dalam batas-batas tertentu

⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), hal. 19-35.

⁸ T. Ibrahim Alfian, *Sejarah dan Permasalahan Masa Kini*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada pada tanggal 12 Agustus 1985, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1985), hal. 3-4.

⁹ Revitalisasi diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan memvitalkan (menjadikan vital). Lukman Ali, *op. cit.*, hal. 839.

telah mengontaminasi dan mencerabut jatidiri Bandung beserta masyarakat pemiliknya. Kesadaran tentang identitas diri sebagai bangsa yang merdeka yang demikian melekat pada saat peristiwa BLA pecah tampaknya harus kembali dibangun dan diberdayakan. Kesadaran sebagai bangsa merdeka tidak hanya akan melahirkan *sense of pride* dan *sense of belonging* terhadap entitas kebangsaan yang bernama Indonesia tetapi juga terhadap *lemah cai* tatar Bandung beserta segala isi yang terkandung di dalamnya. Revitalisasi identitas sebagai bangsa merdeka ini dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman yang baik tentang perjalanan sejarah bangsa Indonesia pada umumnya dan masyarakat Bandung pada khususnya, terutama manakala berada dalam alam penjajahan. Pemberian gambaran yang utuh dan apa adanya tentang realitas kehidupan rakyat semasa penjajahan dan semasa perjuangan mempertahankan kemerdekaan kiranya dapat menggugah kesadaran tentang betapa bermaknanya arti sebuah kemerdekaan serta betapa pentingnya identitas sebagai bangsa merdeka itu terus dipertahankan.

Globalisasi yang terus mendesak kuat ke berbagai lokalitas semakin menyiratkan pentingnya merevitalisasi kesadaran sebagai bangsa merdeka. Melalui revitalisasi kesadaran sebagai bangsa merdeka diharapkan akan kembali menumbuhkan sikap patriotisme dan nasionalisme dalam berbagai bidang. Salah satu tampilan nasionalisme adalah perilaku untuk tetap memelihara, mencintai, dan memberdayakan segala apa yang menjadi milik, kekayaan, dan kreasi bangsa. Dengan cara itu, sehebat apapun pengaruh dan intervensi kekuatan asing terhadap Indonesia umumnya dan Bandung pada khususnya tidak akan membawa pengaruh berarti karena di dalamnya telah dihuni oleh orang-orang yang memiliki pagar kokoh dalam menjaga identitas diri sebagai bangsa merdeka. Revitalisasi kesadaran sebagai bangsa merdeka ini pun, baik untuk kini dan nanti, akan menjadi senjata ampuh dalam tetap menjaga patriotisme dan nasionalisme.

Agar revitalisasi identitas sebagai bangsa merdeka dapat mencapai hasil optimal maka penting untuk diperhatikan kemasan yang akan ditampilkan untuk mengidentifikasi peristiwa BLA. Secara umum kemasan tersebut haruslah kemasan yang enak dipandang, memiliki nilai estetis, praktis, serta sarat dengan informasi. Untuk konsumsi umum, bila kemasan akan ditampilkan dalam bentuk cetak, tampilan substansial seperti buku-buku teks pada umumnya tampaknya perlu dihindari. Dengan kata lain, substansi kemasan untuk konsumsi umum haruslah diupayakan tidak seperti buku teks pada umumnya yang belum apa-apa terkesan “berat” untuk dibaca tetapi harus dalam bentuk yang simpel, menggunakan bahasa populer, serta tidak menggunakan model uraian panjang.

Kemasan menarik tentunya diperlukan pula untuk konsumsi dunia pendidikan, terutama pendidikan pada jenjang SD dan SLTP. Pada jenjang pendidikan ini,

pendidikan sejarah di antaranya memiliki tujuan untuk mengembangkan wawasan kebangsaan dari berbagai peristiwa sejarah, menghargai kepahlawanan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta mengembangkan kreativitas. Dengan tujuan tersebut, maka substansi kemasam peristiwa BLA untuk jenjang pendidikan tersebut haruslah sarat dengan transformasi nilai-nilai keteladanan, termasuk nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme. Sementara untuk konsumsi SMU, sejalan dengan tujuannya, yakni mengembangkan kemampuan berpikir sejarah, mengembangkan kemampuan mengkaji sumber-sumber sejarah, mengembangkan kemampuan menulis ceritera sejarah, dan menerapkan cara berpikir sejarah dalam menganalisis peristiwa di sekitarnya,¹⁰ maka substansi kemasam dapat ditampilkan lebih komprehensif dan analitis.

Berkait erat dengan realitas kehidupan kontemporer yang sarat dengan perilaku hedonis tampak semakin menipis pula kesadaran masyarakat untuk mau berkorban, baik tenaga, harta, maupun nyawa bagi kepentingan orang banyak. Oleh karenanya, revitalisasi nilai-nilai tentang kerelaan berkorban yang dulu dimiliki masyarakat Bandung pun perlu dilakukan. Berpijak pada pemikiran bahwa biasanya kerelaan berkorban berkorelasi dengan adanya rasa senasib sepenanggungan sebagai suatu komunitas maka upaya membangun kembali kerelaan berkorban ini juga harus ditempuh melalui pendekatan sosial kemasyarakatan, misalnya dengan menumbuhkan kembali kebiasaan-kebiasaan untuk bergotong royong. Dalam batas-batas tertentu, semangat gotong royong tampak masih dimiliki oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan Bandung pada khususnya. Namun hal ini perlu terus dilakukan pembinaan agar menjadi semakin kuat sehingga akan tetap menjadi kekayaan masyarakat. Melalui revitalisasi, dalam konteks kini dan esok, perilaku kerelaan berkorban ini akan dapat tertampilkan dalam bentuk tingginya kesadaran untuk memberikan segala yang terbaik untuk membangun kota Bandung dan menmberdayakan berbagai potensi masyarakat yang ada di dalamnya. Kerelaan berkorban akan membuat masyarakat Bandung tetap berada dalam atmosfir *silih asih, silih asah, dan silih asuh*.

Mengingat realitas “keberhasilan” peristiwa BLA tidak bisa dilepaskan dari adanya kepercayaan rakyat terhadap tentara dan demikian pula sebaliknya maka menjadi hal penting pula untuk terus berupaya menempatkan kemanunggalan tentara dan rakyat sebagai milik bersama masyarakat Bandung pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Tentara dan aparat keamanan pada umumnya

¹⁰ Said Hamid Hasan, “Strategi Pembelajaran Sejarah pada Era Otonomi Daerah sebagai Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi”, dalam Helius Sjamsuddin dan Andi Suwirta (Ed.), *Historia Magistra Vitae: Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Hj. Rochiati Wiriaatmadja, M.A.*, (Bandung: Historia Utama Press, 2003), hal. 290-291.

haruslah senantiasa berupaya untuk menampilkan dirinya sebagai pelindung dan pembela masyarakat. Slogan dari, oleh, dan untuk rakyat, harus benar-benar mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak menempatkan diri sebagai pemegang senjata yang ringan tangan dalam menggunakan “pentungan” terhadap rakyatnya. Harmonisasi hubungan antara tentara dengan rakyat dengan demikian perlu terus dipelihara karena sampai kapanpun akan menjadi kekuatan strategis terutama manakala berhadapan dengan konsep perang semesta. Hubungan yang demikian erat antara rakyat dan tentara selama perjuangan BLA tentunya jangan sampai hanya dijadikan sebagai kenangan manis tetapi justru harus dijadikan sebagai pemacu agar hal tersebut menjadi sebuah kesadaran kolektif untuk turut mempertahankannya bersama-sama.

Untuk menumbuhkembangkan kembali hubungan yang harmonis antara tentara dan rakyat tentu perlu itikad baik dari kedua belah pihak. Penggelaran kegiatan-kegiatan yang mampu melahirkan partisipasi aktif dan hubungan emosional kedua belah pihak secara optimal dapat kiranya dijadikan alternatif. Bentuk-bentuk kegiatan semacam ABRI Masuk Desa (AMD) perlu kiranya dihidupkan kembali dengan kemasan baru bahkan diperkaya dengan ABRI Masuk Kota (AMK). Beruntunglah masyarakat Bandung karena relatif memiliki akar sejarah hubungan yang sangat baik dengan tentara sehingga relatif tidak memiliki kendala psikologis dalam membangun dan memberdayakan hubungan yang harmonis. Namun demikian, untuk sampai pada format hubungan yang demikian kental seperti semasa peristiwa BLA tentunya perlu kerja keras bersama.

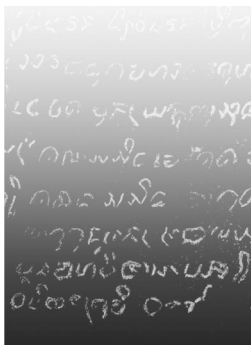
Di luar itu, untuk meminimalkan bias-bias yang kurang baik sebagaimana tampak dari peristiwa BLA maka perlu pula dilakukan langkah-langkah penataan untuk meminimalkannya atau bahkan agar tidak terjadi kembali. Meskipun perang selalu memunculkan petualang-petualang politik tetapi kelahirannya dapat ditekan seminimal mungkin. Berangkat dari realitas tentang minimnya dukungan masyarakat Cina sewaktu berlangsungnya peristiwa BLA maka jelas perlu dilakukan pembinaan-pembinaan yang sistematis terhadap masyarakat Cina, khususnya yang ada di kota Bandung. Mendekatkan mereka dengan budaya Sunda pada khususnya dan budaya Indonesia pada umumnya serta meminimalkan terjadinya perilaku diskriminatif terhadap etnis Cina merupakan sebuah alternatif yang dapat dipilih untuk membangun kesadaran dan kecintaan komunitas Cina terhadap bumi tempat dimana mereka berpijak. Realitas memperlihatkan bahwa pembinaan dan pelibatan masyarakat Cina dalam berbagai hal, terutama kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, terasa sangat minim. Akibatnya, kesenjangan hubungan antara masyarakat Cina dan pribumi di kota Bandung bukannya berkurang tetapi justru semakin menajam. Hal ini, sekali lagi kalau tidak secepatnya diatasi bisa jadi

komunitas Cina, seluruh atau sebagian, akan terus “menjadi musuh dalam selimut” lagi manakala Bandung dihadapkan dengan berbagai ancaman dari luar, dengan segala bentuk dan tampilannya. Komunitas Cina kembali akan memosisikan dirinya sebagai pihak yang tidak merasa berkepentingan dengan perjuangan masyarakat Bandung pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

DAFTAR SUMBER

- Akhudiat. 1991. “Generasi Muda dan Cipta Budaya”, Makalah disampaikan dalam Kongres Kebudayaan, Jakarta, 29 Oktober – 3 November 1991.
- Alfian, T. Ibrahim. 1985. “Sejarah dan Permasalahan Masa Kini”. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada pada tanggal 12 Agustus 1985.
- Ali, Lukman. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta: Departemen pendidikan dan Kebudayaan – Balai Pustaka.
- Amar, Djen. 1963. Bandung Lautan Api. Bandung: Penerbit Dwiwarna.
- Dienaputra, Reiza D. 2003. “Gatot Mangkoepradja: Antara Kincir Angin dan Matahari Tebit”. Makalah disampaikan sebagai materi presentasi dalam Seminar Pengajuan Gatot Mangkoepradja sebagai Calon Pahlawan Nasional. yang diadakan MSI Cabang Jawa Barat, Bandung, 2 Juni 2003.
- Dienaputra, Reiza D. 2004. Pedoman Pemilihan dan Pendampingan Pemuda Pelopor Jawa Barat. Bandung: Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat.
- DuBrin, Andrew J. 1978. Human Relations: A Job Oriented Approach. Reston, Va: Reston Publishing Co.
- Hardjana, Andre. 1991. “Daya Cipta Budaya dan Media Massa”. Makalah disampaikan dalam Kongres Kebudayaan, Jakarta, 29 Oktober – 3 November 1991.
- Hasan, Said Hamid. 2003. “Strategi Pembelajaran Sejarah pada Era Otonomi Daerah sebagai Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi”, dalam Heliussjamsuddin dan Andi Suwarta (Ed.) , Historia Magistra Vitae: Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Hj. Rochiati Wiriaatmadja, M.A. Bandung: Historia Utama Press.
- Kartodirdjo, Sartono. 1994. Pembangunan Bangsa. Yogyakarta: Aditya Media.

- Kuntowijoyo. 1995. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Nasution, A.H. 1966. Sedjarah Perdjuaan Nasional Dibidang Bersendjata. Djakarta: Mega Book Store.
- . 1990. Memenuhi Panggilan Tugas. Jilid I. Jakarta: Masagung.
- Notosusanto, Nugroho (Ed.). 1985. Pejuang dan Prajurit: Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI. Jakarta: Sinar Harapan.
- Oetama, Jakob. 1991. “Industri Media sebagai Pengembangan Kebudayaan”, Makalah disampaikan dalam Kongres Kebudayaan, Jakarta, 29 Oktober – 3 November 1991.
- Rawls. John. 1971. A Theory of Justice. Cambridge, Massachussets: Harvard University Press
- Rendra, W.S. “Renungan Dasar Tentang Kebudayaan”, Makalah disampaikan dalam Kongres Kebudayaan, Jakarta 29 Oktober – 3 November 1991.
- Rivai, Veithzal. 2004. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Romein, Jan M. 1949. Apparaat voor de Studie der Geschiedenis. Groningen: J.B. Wolters.



Memaknai Hijrah Siliwangi*

Pengantar

Kemerdekaan yang diraih pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari semua perjuangan bangsa Indonesia, tetapi pada dasarnya merupakan awal dari sebuah era baru perjuangan yang jauh lebih kompleks. Perjuangan mana tidak hanya sekedar berhadapan dengan kekuatan-kekuatan asing tetapi juga berhadapan dengan kekuatan-kekuatan internal, sebagai implikasi politik dari proses lahirnya sebuah negara baru. Di luar itu, berbagai gejolak yang terjadi di tingkat pusat secara cepat juga berimplikasi pada wilayah-wilayah yang menjadi bagian dari Republik Indonesia.

Kompleksitas peristiwa yang menyertai kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia pada satu sisi jelas memperkaya fakta-fakta bahwa kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia bukanlah merupakan hadiah kolonial, khususnya Jepang, tetapi merupakan buah dari sebuah perjuangan maha panjang yang telah menyita banyak energi bangsa Indonesia. Di luar itu, kompleksitas peristiwa tersebut juga memperlihatkan sebuah fakta tentang dinamika sosial politik dari sebuah revolusi kemerdekaan.

Dari sekian banyak peristiwa yang mewarnai masa-masa awal kemerdekaan satu di antaranya adalah peristiwa yang dikenal dengan Hijrah Tentara Nasional Indonesia atau Hijrah Pasukan Siliwangi. Peristiwa besar di bidang kemiliteran tersebut sedikit banyaknya telah turut menentukan hidup matinya republik yang baru dilahirkan. Implikasi Hijrah tentara Siliwangi tidak hanya berada pada tataran militer tetapi juga berimplikasi pada tataran yang lebih luas. Tidak hanya membawa implikasi pada wilayah yang dijadikan daerah tujuan hijrah tetapi juga berimplikasi pada wilayah yang ditinggalkan.

* Makalah disampaikan sebagai materi pengantar diskusi dalam Sarasehan tentang Hijrah Siliwangi, yang diselenggarakan Dinas Pembinaan Mental Markas Besar Angkatan Darat, Bandung, Kamis, 6 September 2007.

Situasi Nasional dan Jawa Barat Pasca Kemerdekaan

Perjuangan panjang yang berbuah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 disambut sukacita oleh bangsa Indonesia. Berita proklamasi tersebar dengan cepat ke berbagai wilayah Indonesia. Setiap orang yang mengetahui berita kemerdekaan tanpa diminta berupaya mengabarkan lebih lanjut kepada orang lain. Salam dan pekik merdeka bergema menjadi salam nasional. Terbebaslah sudah bangsa Indonesia dari belenggu rantai-rantai penjajahan. Eforia kemerdekaan menggema ke berbagai penjuru wilayah tanah air.

Segera setelah kemerdekaan dikumandangkan berbagai upaya dilakukan untuk membangun fondasi negara baru. Sebuah negara kebangsaan yang telah diimajinasikan sejak tanggal 28 Oktober 1928. Untuk itu, secara bertahap berbagai supra dan infrastruktur politik dibangun. Bangunan besar dan paling fundamental berhasil didirikan pada tanggal 18 Agustus 1945 atau seharu sesudah proklamasi disuarakan. Sejak itu, secara yuridis formal lahirlah sebuah negara kebangsaan baru yang bernama Indonesia.

Gerak cepat bangsa Indonesia dalam membangun fondasi sebuah negara baru tentu saja mengagetkan banyak pihak, khususnya kekuatan-kekuatan asing yang berkepentingan dengan potensi Indonesia. Pro kontra pun bermunculan dalam menyikapi perkembangan cepat yang terjadi di bumi nusantara.

Pembentukan berbagai institusi baru untuk memperkokoh bangunan Indonesia tidaklah ditempuh tanpa perhitungan. Sikap hati-hati tampak begitu mewarnai setiap pengambilan keputusan, terutama manakala hendak membangun sebuah institusi yang bernama tentara nasional. Betapapun, Indonesia harus memikirkan kemungkinan-kemungkinan reaksi yang tidak diinginkan akibat pembentukan tentara nasional yang terlalu cepat. Oleh karenanya, bangunan institusi yang bernama tentara nasional tidak segera dibentuk pada tanggal 18 Agustus 1945 tetapi baru dibentuk kurang lebih seminggu kemudian. Itupun dengan memakai baju yang dipandang tidak akan menimbulkan gejolak dari kekuatan asing, yakni Badan Keamanan Rakyat (BKR).¹ Barulah beberapa saat kemudian atau setelah situasi internal dipandang lebih kondusif, bangunan tersebut diperjelas sosoknya

¹ Meskipun kelahiran BKR ini belum memenuhi tuntutan rakyat tetapi keberadaannya disambut hangat oleh rakyat di berbagai daerah, dengan cara mendirikan BKR-BKR daerah. Sementara bagi yang tidak bisa menerima keberadaan BKR, kemudian mendirikan badan-badan perjuangan. Hal tersebut di antaranya dilakukan oleh Sukarni, Adam Malik, dan Chaerul Saleh dengan membentuk Komite van Aksi yang bermarkas di Asrama Menteng 31 Jakarta. Di dalam Komite ini bergabung antara lain, Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Rakyat Indonesia (Bara) dan Barisan Buruh Indonesia. Sebagaimana di Jakarta, di daerah juga terjadi pembentukan badan-badan perjuangan. Di Bandung misalnya berdiri Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia (P3I) yang kemudian menjadi Pemuda Republik Indonesia (PRI). Badan-

menjadi Tentara Keamanan Rakyat (5 Oktober 1945),² Tentara Keselamatan Rakyat (1 Januari 1946), Tentara Republik Indonesia (24 Januari 1946), dan terakhir Tentara Nasional Indonesia (3 Juni 1947). Perubahan organisasi BKR menjadi organisasi ketentaraan tentu tidak terlepas dari desakan kuat arus bawah yang menginginkan segera dibentuknya tentara nasional.

Dalam proses pembentukan tentara nasional seperti itulah, di Jawa Barat pada tanggal 20 Mei 1946 kemudian lahir sebuah divisi baru yang bernama Divisi Siliwangi, dengan panglimanya yang pertama, Kolonel A.H. Nasution. Divisi Siliwangi ini pada dasarnya merupakan integrasi dari tiga buah divisi yang telah ada sebelumnya, yakni, Divisi I, yang meliputi Banten dan Bogor, dipimpin oleh Kolonel Kjai Sjam'un; Divisi II, yang meliputi daerah Jakarta dan Cirebon, dipimpin oleh Kolonel Sadikin; dan Divisi III, meliputi daerah Priangan, dipimpin oleh Kolonel Arudji Kartawinata (kemudian Kolonel A.H. Nasution).

Hari-hari menuju terbentuknya Divisi Siliwangi dan sesudahnya di Jawa Barat, sebagaimana wilayah lainnya di tanah air diwarnai pula oleh berbagai upaya infiltrasi dan intervensi kekuatan asing. Bayi Indonesia yang masih teramat muda serta situasi politik nasional yang belum menentu mengakibatkan infiltrasi asing

² Oerip Soemohardjo, seorang pensiunan mayor KNIL, yang mendapat tugas dari pemerintah untuk mengorganisasikan tentara nasional dan kemudian diangkat menjadi Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal, semula merencanakan kekuatan TKR hanya terdiri dari empat divisi saja, tiga di Jawa dan satu di Sumatera. Namun demikian, melihat sambutan yang begitu antusias dari para pejuang, untuk secara sukarela menjadi anggota TKR mengakibatkan terjadinya pembengkakan jumlah divisi menjadi 16 divisi, 10 divisi di Jawa (3 di Jawa Barat, 4 di Jawa Tengah, dan 3 di Jawa Timur) dan 6 divisi di luar Jawa. Untuk menegatkan organisasi, 10 divisi di Jawa kemudian dibagi menjadi 3 komandemen yang masing-masing dipimpin seorang mayor jenderal. Namun, pembentukan komandemen ini tidak begitu lancar karena sebagian divisi tidak mau mengakui panglima komandemennya. Bahkan, di Jawa Timur panglima komandemennya ditangkap oleh polisi militernya sendiri. Hanya di Jawa Barat, komandemen dapat berfungsi dengan baik di bawah pimpinan Didi Kartasasmita, dengan Abdul Harris Nasution sebagai kepala stafnya. Selanjutnya karena Supriyadi yang diangkat menjadi pemimpin tertinggi TKR tidak pernah tampil menduduki posnya, pada tanggal 12 November 1945, Markas Tertinggi TKR (MT TKR), mengadakan rapat pimpinan di Yogyakarta yang diikuti panglima-panglima divisi dan komandan-komandan resimen dari pulau Jawa. Melalui proses pemilihan, Panglima Divisi V Banyumas Kolonel Soedirman, yang baru berusia 33 tahun, terpilih sebagai Panglima Tertinggi TKR sedangkan Oerip Soemohardjo terpilih sebagai kepala staf TKR. Setelah melalui proses pertimbangan yang cukup panjang, pemerintah pada tanggal 18 Desember 1945 mengesahkan hasil pemilihan tersebut sekaligus melantik Kolonel Soedirman sebagai Panglima Tertinggi TKR dengan pangkat jenderal, sementara Oerip Soemohardjo sebagai kepala staf dengan pangkat tetap, letnan jenderal. Hasil pemilihan ini tampaknya sangat mengecewakan Oerip sehingga ia memilih mengundurkan diri dari kedudukan sebagai kepala staf. Ibid., hal. 40-43; Ulf Sundhaussen, *The Road To Power: Indonesian Military Politics 1945-1967*, Terjemahan oleh Hasan Basari, (Jakarta: LP3ES, 1986), hal. 14-16. Dengan demikian, selama kurang lebih dua bulan pada dasarnya terjadi kekosongan pimpinan TKR.

tersebut berhasil menggiring sebagian kekuatan politik di Jawa Barat untuk masuk ke dalam skenario besarnya, memecah Indonesia dan bahkan menggagalkan kelahiran Republik Indonesia.

Arus besar pertama yang hendak merongrong kemerdekaan Indonesia berpuncak tanggal 4 Mei 1947, saat R.A.A.M. Suriakertalegawa, bertempat di Alun-alun Bandung, memproklamirkan berdirinya Negara Pasundan, yang antara lain dihadiri Dr. H.J. van Mook. Negara boneka produk Suriakertalegawa ini dapat dikatakan mati sebelum sempat berkembang.

Kurang lebih satu tahun kemudian, upaya untuk mendirikan negara baru di Jawa Barat kembali berlangsung. Setelah melalui tiga kali konferensi daerah, pada awal Maret 1948 lahirlah Negara Pasundan, sebagai pengembangan lebih lanjut dari Negara Jawa Barat yang ditetapkan tanggal 26 Februari 1946, dengan wali negara R.A.A.M Wiranatakusuma.

Dari deskripsi tersebut, Jawa Barat di masa-masa awal kemerdekaan pada dasarnya diwarnai oleh tampilnya dua gerakan besar, yakni, pertama, gerakan-gerakan yang bertujuan memperkuat Republik Indonesia, yang di antaranya terepresentasikan dalam pembentukan dan penguatan institusi yang bernama Divisi Siliwangi. Kedua, gerakan-gerakan yang bertujuan melemahkan bahkan menegasikan keberadaan Republik Indonesia, yang di antaranya termanifestasikan dalam pembentukan Negara Pasundan.

Upaya Belanda Menguasai Kembali Indonesia

Bisa jadi, sejak awal, kemerdekaan Indonesia merupakan sesuatu yang sangat tidak diinginkan oleh rezim kolonial Belanda. Oleh karenanya, tidak mengherankan bila sejak awal pula berbagai upaya telah dilakukan Belanda untuk bisa menancapkan kembali kukunya di Indonesia, sekaligus menegasikan secara optimal realitas bahwa Indonesia telah menjadi bangsa yang merdeka.

Dalam kaitan itu, upaya awal yang dilakukan Belanda adalah dengan membonceng dan mengoptimalkan kemenangan yang diraih Sekutu dalam Perang Dunia II. Salah satu kekuatan besar Sekutu (baca, Inggris) didekati untuk memuluskan niatnya tersebut, dan mengerangkainya dalam sebuah perjanjian yang disepakati tanggal 24 Agustus 1945 di Chequers, berupa *Civil Affairs Agreement*, yang intinya menyatakan bahwa Inggris akan membantu Belanda untuk mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Dengan penggelaran kesepakatan tersebut, tidak lebih dari satu minggu setelah kemerdekaan, Belanda telah berhasil memformalkan akal busuknya untuk kembali ke Indonesia.

Untuk merealisasikan niatnya, Belanda pada dasarnya menempuh melalui dua skenario besar, yakni, skenario militer dan skenario diplomasi. Skenario

diplomasi ditempuh manakala kedudukan-kedudukan militernya belum dipandang kuat untuk bisa menyerang Indonesia. Skenario militer ditempuh manakala kedudukan militernya dipandang telah cukup representatif untuk menganeksasi berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, diplomasi yang dijalankan Belanda hanyalah merupakan upaya manipulasi dari rencana besar gerakan militernya.

Dengan skenario besar seperti ini, tidaklah mengherankan bila Belanda tampak tidak pernah serius dengan hasil-hasil perundingan yang telah disepakatinya dengan Indonesia. Selalu saja ada upaya untuk menafsirkan secara sepihak substansi kesepakatan bagi kepentingan pergerakan kekuatan militernya. Itulah yang terjadi dengan Belanda, baik sebelum maupun sesudah Perjanjian Linggarjati ditandatangani.

Akibat tingkah laku Belanda yang tidak pernah konsisten ini, reaksi internasional pun segera muncul manakala mesin-mesin perang Belanda melakukan pergerakan besar-besaran pada bulan Juli 1947 ke dalam wilayah Republik Indonesia. Pergerakan pasukan yang nyata-nyata melanggar kesepakatan Linggarjati ini tidak hanya ditentang keras negara-negara Asia, seperti, India, Suriah, dan Myanmar, tetapi juga Amerika dan Australia. Pada akhirnya, Dewan Keamanan PBB pun mengeluarkan resolusi yang intinya agar Indonesia dan Belanda segera menghentikan permusuhan.

Dinamika Perjuangan Bangsa Indonesia

Sejak masa-masa awal kemerdekaan dikumandangkan, berbagai tantangan langsung dihadapi bangsa Indonesia. Tantangan mana tidak hanya berasal dari luar tetapi juga tantangan yang berasal dari dalam. Tantangan terbesar dari luar tidak lain berupaya upaya sistematis Belanda untuk bisa kembali berkuasa di bumi Indonesia. Sementara tantangan dari dalam berupa tuntutan-tuntutan bagi percepatan pembentukan berbagai infra dan suprastruktur politik serta manuver-manuver politik dari kekuatan-kekuatan pro Belanda.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, khususnya tantangan dari luar, pada dasarnya bangsa Indonesia menghadapinya dengan dua pola besar strategi perjuangan, yakni perjuangan yang bersifat fisik dan perjuangan yang bersifat diplomasi. Namun di antara kedua strategi perjuangan tersebut, relevan dengan realitas'kekuatan bersenjata yang dimiliki, bangsa Indonesia tampak lebih mengedepankan perjuangan yang bersifat diplomasi.

Perjuangan diplomasi tampak jelas dilakukan manakala bangsa Indonesia memandang penting perlunya pengakuan kedaulatan dari Belanda. Dengan demikian, inti perjuangan diplomasi Indonesia, di samping berupaya meredam seoptimal mungkin berputarnya mesin-mesin perang Belanda ke dalam wilayah

Indonesia, juga berupaya seoptimal mungkin menggiring Belanda untuk mengakui kedaulatan Indonesia.

Itulah yang terjadi dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan-tantangan di awal kemerdekaan. Penggelaran diplomasi dilakukan Indonesia sejak masa-masa awal kedatangan Sekutu. Demikian pula halnya dengan perjuangan yang bersifat fisik. Pergeseran yang cepat dari kedua strategi perjuangan tersebut menyebabkan perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan tampak begitu dinamis. Adapun perjuangan berskala besar di bidang diplomasi dan juga bersenjata di antaranya adalah Perundingan Linggajati dan perjuangan menghadapi Agresi Militer I Belanda.

Pola perjuangan sebagaimana yang terjadi di pusat pada dasarnya terjadi pula di Jawa Barat. Masuknya Jawa Barat dalam dua skenario besar perjuangan menjadi sesuatu yang semakin sulit dihindari manakala area implementasi kedua skenario besar perjuangan tersebut, sebagian besar di antaranya terjadi di wilayah Jawa Barat, baik Perundingan Linggajati maupun perjuangan melawan Agresi Militer I Belanda.

Hijrah Siliwangi dan Dampak Yang Ditimbulkan

Silih bergantinya strategi perjuangan yang digelar bangsa Indonesia dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan tidak hanya berhenti sampai Perundingan Linggajati dan Agresi Militer I Belanda tetapi terus berlangsung juga pada masa-masa sesudahnya. Tindakan sepihak Belanda menganeksasi wilayah Indonesia pasca tercapainya Persetujuan Linggajati yang mengundang reaksi keras dunia internasional pada akhirnya memaksa Belanda masuk kembali ke meja perundingan.

Perundingan besar kedua yang berlangsung antara Indonesia dan Belanda, meskipun dengan menggunakan mediator yang bernama Komisi Tiga Negara (KTN), berlangsung dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan posisi Indonesia. Pergerakan mesin-mesin perang Belanda lewat agresinya menyebabkan Indonesia harus kehilangan berbagai wilayahnya yang strategis, baik di Jawa maupun Sumatera. Dengan kondisi demikian, posisi tawar Indonesia saat memasuki meja perundingan dapat dikatakan berada pada posisi yang sangat lemah.

Posisi tawar yang tidak seimbang ini pada akhirnya menyebabkan Indonesia harus rela menerima hasil Perundingan Renville yang secara substansial sangat merugikan. Indonesia tidak saja harus kehilangan sebagian besar wilayah kekuasaannya tetapi juga harus mau memindahkan tentaranya dari daerah-daerah “Belanda” ke daerah Republik. Suatu pekerjaan besar yang sebenarnya tidak

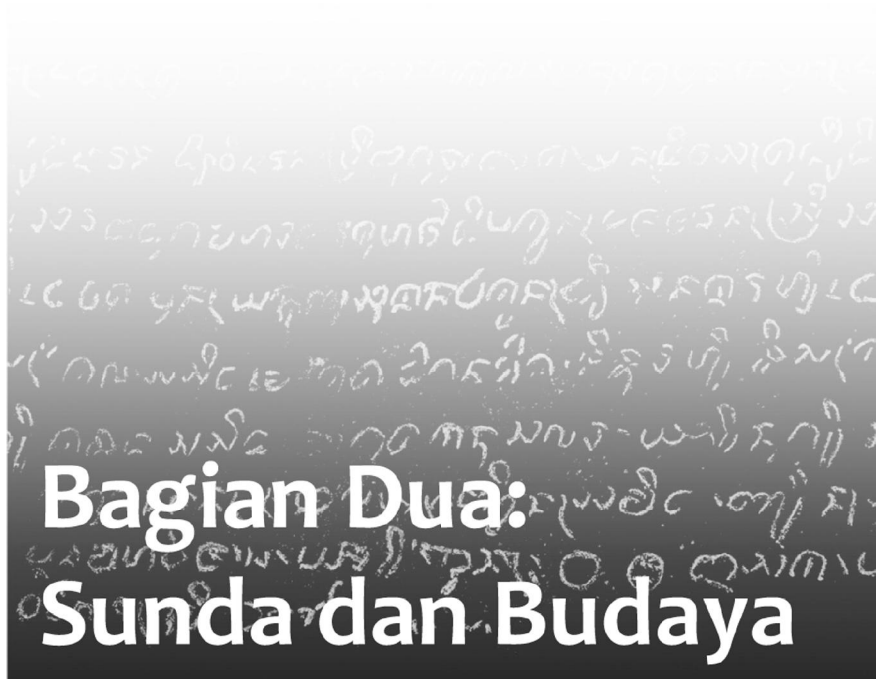
mudah untuk dilaksanakan.

Meskipun keputusan hijrah TNI bukan merupakan keputusan yang populer di kalangan anggota TNI, tetapi sebagai alat negara, suka atau tidak suka, TNI harus mau mematuhi keputusan tersebut. Dengan keputusan tersebut, TNI harus memindahkan para anggotanya yang berjumlah lebih dari 30.000 ke wilayah Jawa Tengah. Bagian terbesar dari pasukan TNI yang harus di hijrahkan ini adalah pasukan Divisi Siliwangi. Pemindahan pasukan tersebut tidak hanya menempuh jalan darat tetapi juga jalan laut. Sementara sebagian kecil pasukan TNI pun ada yang dipindahkan ke wilayah Banten. Perjalanan yang sangat melelahkan dari pasukan Siliwangi ke Jawa Tengah ini, sesuai dengan substansi perjanjian berlangsung dari tanggal 6 sampai 22 Februari 1948.

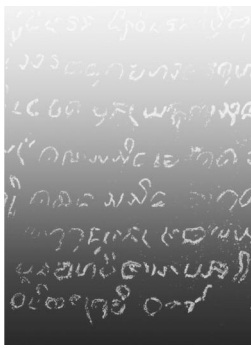
Bisa diduga hijrahnya Siliwangi ke Jawa Tengah membawa dampak-dampak tertentu, tidak saja bagi daerah yang menjadi tempat tujuan hijrah tetapi juga bagi daerah yang ditinggalkan dan terlebih lagi bagi strategi perjuangan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Secara politik militer, hijrahnya pasukan siliwangi dari daerah Jawa Barat ke Jawa Tengah menyebabkan TNI harus kehilangan kantong-kantong gerilya yang telah dibangun susah payah, khususnya untuk menghadapi Agresi Militer I Belanda. Hijrahnya Siliwangi juga menyebabkan Jawa Barat harus kehilangan tentara nasional dan selanjutnya secara tidak langsung memuluskan lahirnya Tentara Islam Indonesia (TII). Secara ekonomi, hijrahnya Siliwangi juga mengakibatkan republik harus kehilangan wilayah-wilayahnya yang sangat potensial secara ekonomi. Di luar itu semua, hijrahnya Siliwangi juga telah mengakibatkan semakin luasnya kelompok federalis membangun manuver politiknya untuk mendirikan Negara Pasundan. Negara Pasundan model baru pada akhirnya dapat terbentuk saat Jawa Barat kehilangan kekuatan tentara nasionalnya.

DAFTAR SUMBER

- Indonesia, Semdam VI Siliwangi. 1968. Siliwangi Dari Masa Ke Masa. Dakarta: Fakta Mahjuma.
- Indonesia, Pussemad. 1982. Sekitar TNI Hijrah. Bandung.
- Kahin, George McTurnan. 1952. Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.
- Kartodirdjo, Sartono. 1990. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme. Jilid 2. Jakarta: Gramedia.
- Nasution, A.H. 1955. Tjataan-Tjataan Sekitar Politik Militer Indonesia. Djakarta: Pembimbing.
- . 1956. Tentara Nasional Indonesia. Volume I. Djakarta: Jajasan Pustaka Militer.
- . 1966. Sedjarah Perjuangan Nasional Dibidang Bersendjata. Djakarta: Mega Book Store.
- . 1971. Tentara Nasional Indonesia. Volume III. Djakarta: Seruling Masa.
- . 1973. Sekitar Perang Kemerdekaan. Cetakan I. Bandung: Angkasa.
- . 1980. Pokok-pokok Gerilya. Bandung: Angkasa.
- Notosusanto, Nugroho (Ed.). 1985. Pejuang dan Prajurit: Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI. Jakarta: Sinar Harapan.
- Notosusanto, Nugroho. 1983. “Soedirman: Panglima Yang Menepati Janjinya” dalam Taufik Abdullah dkk. (red), Manusia dalam Kemelut Sejarah. Jakarta: LP3ES, hal. 47-62.
- Notosusanto, Nugroho dan Marwati Djoened Poesponegoro. Sejarah Nasional Indonesia. Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sundhaussen, Ulf. 1986. The Road To Power: Indonesian Military Politics 1945-1967. Terjemahan oleh Hasan Basari. Jakarta: LP3ES.
- Surjadi, Didi. 1967. “Tindjauan Sedjarah Sekitar Lahirnja Divisi Siliwangi Pada Tanggal 20 Mei 1946”. Skripsi. Bandung: Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran.



Bagian Dua: Sunda dan Budaya



Kebudayaan Sunda: Antara Mitos dan Realitas*

Manakala berbicara tentang Kebudayaan Sunda, pada tahapan awal saja sudah banyak permasalahan yang akan muncul. Oleh karenanya sebelum sampai pada pembahasan tentang substansi Kebudayaan Sunda, pembicaraan sudah akan menjadi hangat ketika timbul pertanyaan tentang makna Sunda dalam Kebudayaan Sunda. Sunda dalam Kebudayaan Sunda apakah dipahami sebagai sebuah etnisitas atau sebagai wilayah geografis. Manakala Sunda dipahami sebagai sebuah wilayah geografis maka untuk menetapkan mana yang dimaksud wilayah atau tanah Sunda bukanlah merupakan hal yang mudah. Jawa Barat sebagai tempat bermukimnya *urang* Sunda tidaklah lantas dapat dikatakan sebagai wilayah Sunda. Era otonomi daerah yang kini bergerak kencang semakin memperlihatkan sulitnya wilayah Jawa Barat untuk dapat dikatakan sebagai tanah Sunda.¹ Oleh karenanya sekali lagi, untuk menetapkan sebuah wilayah geografis yang bernama wilayah Sunda bukanlah merupakan hal yang mudah, malahan bila hal tersebut dilakukan dengan tidak hati-hati bisa jadi akan menimbulkan kegoncangan yang cukup serius. Lantas, kalau memang Jawa Barat sudah sulit untuk direpresentasikan sebagai tanah Sunda, masih adakah wilayah yang bisa dinamakan sebagai tanah Sunda atau daerah manakah sebenarnya yang bisa dikatakan sebagai tanah Sunda. Dalam kaitan ini, Edi S. Ekadjati mengatakan bahwa tanah Sunda merujuk pada bekas wilayah Kerajaan Sunda Pajajaran, yang kemudian berdiri sendiri, yakni Sumedang Larang, Banten, Cirebon, dan Galuh. Sumedang Larang dan Galuh kemudian menjadi satu wilayah kesatuan dengan nama Priangan. Dalam perkembangan berikutnya, Priangan sering dikatakan sebagai pusat tanah Sunda.²

Selanjutnya, apabila Sunda dipahami sebagai sebuah etnisitas, maka permasalahannya tidaklah serumit mendefinisikan wilayah atau tanah Sunda.

* Makalah disampaikan sebagai materi presentasi dalam Seminar Nasional, dengan tema, “Menggugat Budaya Sunda: Perspektif Perifer”, yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Mahasiswa Bogor Daerah Istimewa Yogyakarta (PAMOR RAYA), bertempat di Balai Utari Mandala Bhakti Wanitatama, Yogyakarta, 20 Oktober 2003.

¹ Berdirinya Propinsi Banten pada tanggal 4 Oktober 2000 menjadi pertanda lebih jelas bahwa Jawa Barat memang tidak bisa diidentikan sebagai wilayah atau tanah Sunda.

² Edi S. Ekadjati. 1995. *Kebudayaan Sunda (Suatu Pendekatan Sejarah)*. Jakarta: Pustaka Jaya, hal.7-8.

Dalam kaitan ini, *urang* Sunda secara sederhana dapat diartikan sebagai orang yang mengaku dirinya dan diakui oleh orang lain sebagai orang Sunda.³ Dalam pengertian tersebut setidaknya tercakup dua kriteria besar yang dapat dijadikan pegangan untuk menyebut seseorang sebagai *urang* Sunda atau bukan *urang* Sunda. Kriteria pertama didasarkan atas keturunan atau hubungan darah. Dengan demikian, seseorang dikatakan *urang* Sunda apabila orang tuanya, baik dari pihak ayah maupun ibu, atau keduanya adalah orang Sunda, terlepas dimana ia berada atau dibesarkan. Kriteria kedua didasarkan atas sosial budaya. Seseorang dikatakan *urang* Sunda apabila ia dibesarkan dalam lingkungan sosial budaya Sunda dan dalam hidupnya menghayati serta mempergunakan norma-norma dan nilai budaya Sunda. Dalam kriteria kedua ini, yang dianggap penting adalah tempat tinggal, kehidupan sosial budaya, dan sikap orangnya.⁴ Permasalahan tentang *urang* Sunda ini barulah muncul manakala akan menetapkan kriteria yang akan digunakan untuk menentukan *urang* Sunda. Dalam kaitan ini, memang sering timbul perdebatan yang terpolarisasi dalam dua kutub besar; kutub yang menggunakan kedua kriteria sebagai dasar untuk menetapkan *urang* Sunda dan kutub yang hanya menentukan salah satu kriteria sebagai dasar untuk menentukan *urang* Sunda. Perdebatan akan semakin meruncing manakala memasuki wilayah politik, terutama berkaitan dengan perebutan kursi kekuasaan. Bila Sunda dalam kekuasaan Sunda dipahami sebagai sebuah etnisitas semata, maka Kebudayaan Sunda adalah merupakan hasil karya, karsa, dan cipta *urang* Sunda.

Daya Hidup dan Mutu Hidup

Budayawan W.S. Rendra sewaktu berlangsungnya Kongres Kebudayaan IV di Jakarta, 29 Oktober – 3 November 1991, mengemukakan bahwa setidaknya ada tujuh daya hidup yang harus dimiliki oleh sebuah kebudayaan. Pertama, kemampuan bernafas. Kedua, kemampuan mencerna. Ketiga, kemampuan berkoordinasi dan berorganisasi. Keempat, kemampuan beradaptasi. Kelima, kemampuan mobilitas. Keenam, kemampuan tumbuh dan berkembang. Ketujuh, kemampuan regenerasi. Kemampuan bernafas dalam kebudayaan dimaknai sebagai kemampuan untuk mengolah hawa menjadi prana, menjaga kebersihan udara, mengharmonikan kegiatan kehidupan dengan irama nafas, serta menghilangkan hal-hal yang menimbulkan ketegangan pada pikiran yang berarti menimbulkan kesesakan pada nafas kehidupan. Kemampuan mencerna dimaknai sebagai kemampuan untuk mencernakan berbagai pengalaman dalam kehidupan. Kemampuan berkoordinasi

³ Suwarsih Warnaen, et.al. 1987. Pandangan Hidup Orang Sunda. Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi) Depdikbud, hal. 1.

⁴ Edi S. Ekadjati, Op. Cit., hal. 8.

dan berorganisasi dimaknai sebagai kemampuan berinteraksi secara sosial. Kemampuan beradaptasi dimaknai sebagai kemampuan kesadaran untuk secara kreatif mengatasi tantangan keadaan, tantangan zaman, dan tantangan berbagai ragam pergaulan. Kemampuan mobilitas dimaknai sebagai kemampuan untuk dengan kreatif menciptakan mobilitas sosial, politik, dan ekonomi, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal. Kemampuan tumbuh dan berkembang diartikan sebagai kemampuan kesadaran untuk selalu maju, selalu bertambah luas dan dalam wawasannya selalu menawarkan paradigma-paradigma yang segar dan baru. Kemampuan regenerasi dimaknai sebagai kemampuan untuk mendorong munculnya generasi baru yang kreatif dan produktif.⁵

Di samping daya hidup, unsur lain lagi yang juga penting dalam suatu kebudayaan adalah mutu hidup. Mutu hidup bukanlah merupakan kesempurnaan tetapi lebih dimaknai sebagai kewajaran. Adapun kewajaran dalam hidup manusia merupakan harmoni tiga mustika, yakni, tanggung jawab kepada kewajiban, idealisme, dan spontanitas. Tanggung jawab kepada kewajiban dimaknai sebagai sebuah kesadaran untuk selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban secara penuh sesuai dengan tanggung jawab sosialnya. Idealisme dimaknai sebagai rumusan sikap hidup seseorang di dalam menempuh padang dan hutan belantara kehidupan. Idealisme sekaligus merupakan sumber kepuasan batin seseorang. Spontanitas dimaknai sebagai ungkapan naluri dan intuisi manusia. Tanpa spontanitas akan menyebabkan hidup menjadi kering dan hambar.

Mencermati Kebudayaan Sunda

Kebudayaan Sunda termasuk salah satu kebudayaan suku bangsa di Indonesia yang berusia tua. Bahkan dibandingkan dengan kebudayaan Jawa sekalipun, kebudayaan Sunda sebenarnya termasuk kebudayaan yang berusia relatif lebih tua, setidaknya dalam hal proses pengenalan terhadap budaya tulisan. “Kegemilangan” Kebudayaan Sunda di masa lalu, khususnya semasa Kerajaan Tarumanegara⁶ dan Kerajaan Sunda,⁷ dalam perkembangannya kemudian seringkali dijadikan acuan dalam

⁵ W.S. Rendra. 1991. “Renungan Dasar tentang Kebudayaan”. Makalah disampaikan dalam Kongres Kebudayaan IV, Jakarta, 29 Oktober – 3 November 1991, hal. 2-4.

⁶ Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad ke-5. Keberadaan Tarumanegara sebagai salah satu kerajaan tertua di Indonesia setidaknya dibuktikan oleh tujuh buah prasasti batu; Prasasti Tugu, Prasasti Ciaruteun, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Jambu (Pasir Koleangkak), Prasasti Pasir Awi, Prasasti Pasir Muara, dan Prasasti Cidanghiang. Ayatrohaedi. 1975. “Tarumanegara” dalam Atja (ed.), Sejarah Jawa Barat. Bandung: Proyek Penunjang Kebudayaan Nasional, hal. 27. Tujuh buah prasasti yang menjadi pertanda Kerajaan Tarumanegara merupakan fakta tak terbantahkan tentang telah tuanya pengenalan urang Sunda dengan budaya tulisan, sekaligus pula tentang telah tuanya pengenalan urang Sunda dengan roh kekuasaan. Reiza D. Dienaputra. 2003. “Pergumulan Kekuasaan Urang Sunda dalam Perspektif Demokrasi”. Makalah disampaikan dalam

memetakan apa yang dinamakan Kebudayaan Sunda. Kebudayaan Sunda yang ideal pun kemudian sering dikaitkan sebagai kebudayaan raja-raja Sunda di masa lalu. Dalam kaitan ini, jadilah sosok kontroversial Prabu Siliwangi dijadikan sebagai tokoh panutan masyarakat Sunda karena dipandang sebagai raja Sunda yang berhasil, sekaligus mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya.

Dalam perkembangannya yang paling kontemporer, Kebudayaan Sunda kini banyak mendapat gugatan kembali. Pertanyaan seputar eksistensi Kebudayaan Sunda pun sering kali mencuat ke permukaan. Apakah Kebudayaan Sunda masih ada? Kalau masih ada, siapakah pemiliknya? Pertanyaan seputar eksistensi Kebudayaan Sunda yang tampaknya provokatif tersebut, bila dikaji dengan tenang sebenarnya merupakan pertanyaan yang wajar-wajar saja. Mengapa demikian? Jawabannya sederhana, karena Kebudayaan Sunda dalam kenyataannya saat ini memang seperti kehilangan rohnya atau setidaknya tidak jelas arah dan tujuannya. Mau dibawa kemana Kebudayaan Sunda tersebut?

Kalaulah kemudian tujuh daya hidup kreasi Rendra digunakan untuk mengelaborasi Kebudayaan Sunda kontemporer maka setidaknya ada empat daya hidup yang perlu dicermati dalam Kebudayaan Sunda, yaitu, kemampuan beradaptasi, kemampuan mobilitas, kemampuan tumbuh dan berkembang, serta kemampuan regenerasi. Kemampuan beradaptasi Kebudayaan Sunda, terutama dalam merespon berbagai tantangan yang muncul, baik dari dalam maupun dari

dalam Seminar Sehari Fordimasi dengan tema, “Sunda dan Budaya Kekuasaan”, yang diselenggarakan Forum Dialog Mahasiswa Sejarah Islam se-Indonesia dan Himpunan Mahasiswa Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab KBM IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung 7 April 2003.

⁷ Kerajaan Sunda didirikan pada tahun 670 M, dengan rajanya yang pertama, Tarusbawa. Kerajaan Sunda atau Kerajaan Sunda Pajajaran sekaligus pula merupakan kerajaan Hindu-Budha di Indonesia yang usianya paling panjang. Selama 909 tahun eksistensinya, di Kerajaan Sunda Pajajaran telah terjadi 39 kali suksesi kepemimpinan atau rotasi kekuasaan. Dalam 39 kali suksesi kepemimpinan tersebut setidaknya ada lima model suksesi kepemimpinan yang terjadi. Pertama, dari raja kepada anak kandung laki-laki (25 kali). Kedua, dari raja kepada menantu (8 kali). Ketiga, dari raja kepada adik kandung (2 kali). Keempat, dari raja kepada saudara ipar (3 kali). Kelima, dari raja kepada keponakan (1 kali). Sementara itu dari 38 kali rotasi kekuasaan yang diketahui faktor penyebabnya, sebagian besar atau sebanyak 26 kali diakibatkan oleh faktor usia. Di luar itu, masih terdapat empat faktor penyebab terjadinya rotasi kekuasaan, yaitu, rotasi kekuasaan yang diakibatkan oleh terjadinya pelanggaran terhadap kaidah moral (3 kali), rotasi kekuasaan yang diakibatkan oleh adanya kudeta (5 kali), rotasi kekuasaan yang diakibatkan oleh pindahnya raja ke kerajaan lain (1 kali), serta rotasi kekuasaan yang diakibatkan oleh terbunuhnya raja yang tengah memerintah (3 kali). Reiza D. Dienaputra. 1991. “Suksesi Kepemimpinan di Kerajaan Sunda Pajajaran (670 – 1579 M)”. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Sejarah dan Sastra Pakuan Pajajaran di Universitas Pakuan, Bogor, 11 – 13 November 1991; Uraian yang lebih lengkap, lihat, Reiza D. Dienaputra. 1993. *Kerajaan Sunda Pajajaran: Studi tentang Suksesi Kepemimpinan di Kerajaan Sunda Pajajaran*. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, hal. 19-38.

luar, dapat dikatakan memperlihatkan tampilan yang kurang begitu menggembirakan. Bahkan Kebudayaan Sunda seperti tidak memiliki daya hidup manakala berhadapan dengan tantangan dari luar. Akibatnya, tidaklah mengherankan bila semakin lama semakin banyak unsur Kebudayaan Sunda yang tergilas oleh kebudayaan asing. Sebagai contoh paling jelas, bahasa Sunda yang merupakan bahasa komunitas *urang* Sunda tampak secara eksplisit semakin jarang digunakan oleh pemiliknya sendiri, khususnya para generasi muda Sunda. Lebih parah lagi, menggunakan bahasa Sunda dalam komunikasi sehari-hari kini sering diidentikan dengan “keterbelakangan”, untuk tidak mengatakan primitif. Akibatnya, timbul rasa gengsi pada *urang* Sunda untuk menggunakan bahasa Sunda dalam pergaulannya sehari-hari.

Apabila kemampuan beradaptasi Kebudayaan Sunda memperlihatkan tampilan yang kurang begitu menggembirakan maka hal itu sejalan pula dengan kemampuan mobilitasnya. Kemampuan Kebudayaan Sunda untuk melakukan mobilitas, baik vertikal maupun horisontal, dapat dikatakan sangat lemah. Oleh karenanya, jangankan di luar komunitas Sunda, di dalam komunitas Sunda sendiri, Kebudayaan Sunda seringkali menjadi tampak asing. Meskipun ada unsur Kebudayaan Sunda yang memperlihatkan kemampuan untuk bermobilitas, baik secara horisontal maupun vertikal, tetapi secara umum kemampuan Kebudayaan Sunda untuk bermobilitas dapat dikatakan masih rendah sehingga Kebudayaan Sunda tidak saja tampak jalan di tempat tetapi juga berjalan mundur.

Berkaitan erat dengan dua kemampuan terdahulu, kemampuan tumbuh dan berkembang Kebudayaan Sunda juga dapat dikatakan memperlihatkan tampilan yang kurang begitu menggembirakan. Jangankan berbicara paradigma-paradigma baru, itikad untuk melestarikan apa yang telah dimiliki saja dapat dikatakan sangat lemah. Menjadi sebuah pertanyaan besar, komunitas Sunda yang sebenarnya kaya dengan folklor,⁸ seberapa jauh telah berupaya untuk tetap melestarikan folklor tersebut agar tetap “membumi” dengan masyarakat Sunda. Kalaulah upaya untuk “membumikan” harta pusaka saja tidak ada bisa dipastikan paradigma baru untuk membuat folklor tersebut agar sanggup berkompetisi dengan kebudayaan luar pun bisa jadi hampir tidak ada atau bahkan mungkin, belum

⁸ Folklor, yang merupakan hasil pengindonesiaan dari kata Inggris *Folklore*, dapat diartikan sebagai sebagian kebudayaan suatu kolektif, yang tersebar dan diwariskan turun-temurun, di antara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat (*mnemonic device*). James Danandjaja. 1997. *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lain-lain*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hal. 2. Folklor dapat dibedakan dalam tiga bentuk, folklor lisan (bahasa rakyat, ungkapan tradisional, pertanyaan tradisional, sajak dan puisi rakyat, ceritera prosa rakyat; mite, legenda, dan, dongeng, serta nyanyian rakyat), folklor sebagian lisan (kepercayaan rakyat dan permainan rakyat), dan folklor bukan lisan (makanan rakyat).

pernah terpikirkan sama sekali. Biarlah folklor tersebut menjadi kenangan masa lalu *urang* Sunda dan biarkanlah folklor tersebut ikut terkubur selamanya bersama para pendukungnya, begitulah barangkali ucap *urang* Sunda yang tidak berdaya dalam merawat dan memberdayakan warisan leluhurnya.

Lemahnya daya hidup kebudayaan Sunda untuk tumbuh dan berkembang juga tampak di bidang politik. Perkembangan paling mutakhir memperlihatkan bahwa upaya untuk membuat budaya politik *urang* Sunda lebih berkualitas secara demokratis ternyata mendapat hambatan yang cukup berarti, terutama dari para elit penguasa yang sudah diuntungkan dengan sistem politik yang ada. Era otonomi yang memberi kekuasaan besar pada daerah untuk berbuat yang terbaik bagi kepentingan daerah, ternyata masih sulit dikembangkan di lapangan politik. Hal ini misalnya terlihat dalam proses pemilihan gubernur Jawa Barat yang baru saja bergulir. Ide untuk menunda pemilihan gubernur sampai lahirnya produk perundang-undangan yang memungkinkan proses pemilihan gubernur secara langsung oleh rakyat, tampaknya diantisipasi setengah hati oleh para elit politik. Dengan demikian, pelibatan *urang* Sunda untuk memilih gubernurnya secara langsung di Jawa Barat masih belum dapat terlaksana. Padahal, bila hal itu terlaksana bisa jadi *urang* Sunda akan menjadi contoh bagi daerah lainnya. Budaya politik *urang* Sunda pun secara otomatis akan segera dicatat dengan tinta emas sebagai budaya politik yang selalu memperlihatkan perkembangan kehidupan demokratis yang semakin berkualitas dari waktu ke waktu. Para leluhur Sunda pun tentunya akan bangga bahwa kini anak cucunya tidak hanya sekedar bisa memilih kepala desanya secara langsung tetapi juga bisa memilih gubernurnya secara langsung. Suatu pengalaman demokrasi yang sama sekali belum pernah dialami para leluhur *urang* Sunda.

Berkenaan dengan kemampuan regenerasi, Kebudayaan Sunda pun tampaknya kurang membuka ruang bagi terjadinya proses tersebut, untuk tidak mengatakan anti regenerasi. Budaya “kumaha akang”, “mangga tipayun”, yang demikian kental melingkupi kehidupan sehari-hari *urang* Sunda menjadi salah satu penyebab rentannya budaya Sunda dalam proses regenerasi. Akibatnya, jadilah budaya Sunda gagap dengan regenerasi. Generasi-generasi baru *urang* Sunda seperti tidak diberi ruang terbuka untuk berkompetisi dengan sehat, hanya dikarenakan kentalnya senioritas serta “terlalu majunya” pemikiran para generasi baru, yang seringkali bertentangan dengan pakem-pakem yang dimiliki generasi sebelumnya.⁹ Akibat dari semua itu, tidaklah mengherankan bila suksesi

⁹ Perlawanan terhadap budaya Sunda yang gagap regenerasi ini, seiring dengan zeitgeist reformasi, kini semakin sering disuarakan. Tuntutan agar generasi muda diberi ruang yang lebih luas untuk berkiper juga semakin nyaring disuarakan. Satu di antaranya yang sempat hangat berkaitan dengan penunjukkan anggota delegasi Jawa Barat untuk mengikuti Kongres

kepemimpinan dalam berbagai bidang pun berjalan dengan tersendat-sendat.

Bila pengamatan terhadap daya hidup Kebudayaan Sunda melahirkan temuan-temuan yang cukup memprihatinkan, maka hal yang sama juga terjadi manakala tiga mustika mutu hidup kreasi Rendra digunakan untuk menjelajahi Kebudayaan Sunda, baik itu mustika tanggung jawab terhadap kewajiban, mustika idealisme maupun mustika spontanitas. Lemahnya tanggung jawab terhadap kewajiban tidak saja diakibatkan oleh minimnya ruang-ruang serta kebebasan untuk melaksanakan kewajiban secara total dan bertanggung jawab tetapi juga oleh lemahnya kapasitas dalam melaksanakan suatu kewajiban. Hedonisme yang kini melanda Kebudayaan Sunda telah mampu menggeser parameter dalam melaksanakan suatu kewajiban. Untuk melaksanakan suatu kewajiban tidak lagi didasarkan atas tanggungjawab yang dimilikinya tetapi lebih didasarkan atas seberapa besar materi yang akan diperolehnya apabila suatu kewajiban dilaksanakan. Bila ukuran kewajiban saja sudah bergeser pada hal-hal yang bersifat materi, janganlah berharap bahwa di dalamnya masih ada apa yang disebut mustika idealisme. Para hedonis dengan kekuatan materi yang dimilikinya, sengaja atau tidak sengaja, semakin memupuskan idealisme dalam Kebudayaan Sunda. Akibatnya, jadilah betapa sulitnya komunitas Sunda menemukan sosok-sosok yang bekerja dengan penuh idealisme dalam memajukan Kebudayaan Sunda.

Berpijak pada kondisi lemahnya daya hidup dan mutu hidup kebudayaan Sunda, timbul pertanyaan besar, apa yang salah dengan Kebudayaan Sunda? Untuk menjawab ini banyak argumen bisa dikedepankan. Tapi dua di antaranya yang tampaknya bisa diangkat ke permukaan sebagai faktor berpengaruh paling besar adalah karena ketiadaan strategi dalam mengembangkan kebudayaan Sunda serta lemahnya tradisi, baca, tulis, dan lisan (baca, berbeda pendapat) di kalangan komunitas Sunda. Ketiadaan strategi kebudayaan yang benar dan tahan uji dalam mengembangkan kebudayaan Sunda tampak dari tidak adanya “pegangan bersama” yang lahir dari suatu proses yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan tentang upaya melestarikan dan mengembangkan secara lebih berkualitas Kebudayaan Sunda. Kebudayaan Sunda tampaknya dibiarkan berkembang secara liar, tanpa ada upaya sungguh-sungguh untuk memandunya agar selalu berada di “jalan yang

Kebudayaan V di Bukittinggi, 20-23 Oktober 2003. Sistem penunjukan anggota delegasi yang tidak transparan, kewenangan “organisasi” Kalang Budaya Jawa Barat untuk menentukan anggota delegasi, serta masih digunakannya senioritas dalam pemilihan anggota delegasi menjadi salah satu masalah yang digugat oleh para budayawan di Jawa Barat. Pada perkembangan paling akhir, Gubernur Jawa Barat akhirnya tetap menyetujui anggota delegasi yang masih kontroversial tersebut untuk diberangkatkan ke Bukittinggi, yakni, Saini KM, Tony Djubiantono, Heyi Ma'mun, Wahyu Wibisana, Nina H. Lubis, Enoch Atmadibrata, Acil Darmawan, Aam Amalia, dan Yayat Hendayana. *Pikiran Rakyat*, 18 Oktober 2003, hal. 2.

lurus”, khususnya manakala harus berhadapan dengan kebudayaan-kebudayaan asing yang galibnya terorganisir dengan rapi serta memiliki kemasan menarik. Berbagai unsur Kebudayaan Sunda yang sebenarnya sangat potensial untuk dikembangkan, bahkan untuk dijadikan model kebudayaan nasional dan kebudayaan dunia tampak tidak mendapat sentuhan yang memadai. Ambil contoh, berbagai makanan tradisional yang dimiliki *urang* Sunda, mulai dari lotek, karedok, bajigur, bandrek, surabi, colenak, wajit, borondong, kolontong, ranginang, opak, hingga yang lagi naik daun, ubi Cilembu, apakah ada strategi besar dari pemerintah daerah untuk mengemasnya dengan lebih bertanggung jawab agar bisa diterima komunitas yang lebih luas. Kalau Kolonel Sanders mampu mengemas ayam menjadi demikian mendunia, mengapa *urang* Sunda tidak mampu melahirkan Mang Ujang, Kang Duyeh, ataupun Bi Eha dengan kemasan-kemasan makanan tradisional Sunda yang juga mendunia. Oleh karenanya, bila strategi kebudayaan benar-nenar telah dimiliki oleh Kebudayaan Sunda bisa jadi *urang* Sunda akan dengan bangga menemukan tempat-tempat makanan “enggal sayagi”, seperti Lotek Cilentah, Karedok Singaparna, Wajit Cililin, Borondong Majalaya, Bandrek Pangalengan, Bajigur Bogor, atau Opak Majalengka.

Lemahnya budaya baca, tulis, dan lisan ditenggarai juga menjadi penyebab lemahnya daya hidup dan mutu hidup Kebudayaan Sunda. Lemahnya budaya baca telah menyebabkan lemahnya budaya tulis. Lemahnya budaya tulis pada komunitas Sunda secara tidak langsung merupakan representasi pula dari lemahnya budaya tulis dari bangsa Indonesia. Fakta paling menonjol dari semua ini adalah minimnya karya-karya tulis tentang Kebudayaan Sunda ataupun karya tulis yang ditulis oleh *urang* Sunda. Dalam kaitan ini, upaya Yayasan Rancage untuk memberikan penghargaan dalam tradisi tulis perlu mendapat dukungan dari berbagai elemen *urang* Sunda. Sayangnya, hingga saat ini pertumbuhan tradisi tulis pada *urang* Sunda masih tetap terbelang rendah. Menurut A. Chaedar Alwasilah dalam pidato pengukuhan yang disebutnya sebagai Pidato Provokatif Intelektual, setidaknya ada sebelas ayat sesat yang telah menyebabkan lemahnya budaya tulis. Pertama, anggapan bahwa literasi adalah kemampuan membaca. Kedua, anggapan bahwa mahasiswa tidak perlu diajari cara menulis. Ketiga, anggapan bahwa penguasaan teori menulis akan membuat siswa mampu menulis. Keempat, anggapan bahwa tidak mungkin mengajarkan menulis pada kelas-kelas besar. Kelima, anggapan bahwa menulis dapat diajarkan manakala siswa telah menguasai tata bahasa. Keenam, anggapan bahwa karangan yang sulit dipahami memperlihatkan kehebatan penulisnya. Ketujuh, anggapan bahwa menulis hanya dapat diajarkan manakala siswa sudah dewasa. Kedelapan, anggapan bahwa menulis karangan naratif dan ekspositoris harus lebih dahulu diajarkan daripada

genre-genre lainnya. Kesembilan, anggapan bahwa pengajaran bahasa adalah tanggung jawab guru bahasa. Kesepuluh, anggapan bahwa menulis mesti diajarkan lewat perkuliahan bahasa. Kesebelas, anggapan bahwa bacaan atau pengajaran sastra hanya relevan bagi (maha) siswa fakultas sastra.¹⁰

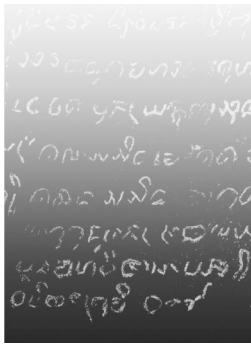
Budaya lisan dalam Kebudayaan Sunda sebenarnya merupakan budaya yang telah lama akrab dengan komunitas Sunda, bahkan usianya jauh lebih tua dibandingkan dengan budaya baca dan tulisan. Namun budaya lisan dalam pengertian kapasitas untuk mengemukakan pendapat serta berjiwa besar dalam menghadapi pendapat yang berbeda masih merupakan barang yang masih amat sangat langka dalam Kebudayaan Sunda. Tradisi lisan Sunda tampaknya baru mampu menghargai komunikasi model monolog dan bukannya dialog. Akibatnya kemampuan untuk menyampaikan pendapat dan menerima pendapat yang berbeda dalam Kebudayaan Sunda merupakan barang yang teramat mewah. Padahal, kapasitas untuk mengemukakan pendapat dan menerima pendapat yang berbeda ini menjadi salah satu dasar bagi munculnya daya hidup dan mutu hidup kebudayaan yang berkualitas. Kapasitas mengemukakan pendapat pada dasarnya merupakan representasi dari kemampuan bernafas dan mencerna, sementara kapasitas menerima dengan jiwa besar pendapat yang berbeda lebih merupakan representasi dari kemampuan berkoordinasi dan berorganisasi, kemampuan beradaptasi, kemampuan mobilitas, kemampuan tumbuh dan berkembang, serta kemampuan regenerasi.

DAFTAR SUMBER

- Alfian, T. Ibrahim. 1985. Sejarah dan Permasalahan Masa Kini, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada pada tanggal 12 Agustus 1985.
- Atja dan Saleh Danasasmitha. 1981. Sanghyang Siksakanda Ng Karesian: (Naskah Sunda Kuno Tahun 1518 M). Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jabar.

¹⁰ A. Chaedar Alwasilah. 2003. "Bangsa Yang Besar adalah Bangsa Yang Menulis". Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Indonesia, 17 Oktober 2003, hal. 3-12.

- Alwasilah, A. Chaedar. 2003. "Bangsa Yang Besar adalah Bangsa Yang Menulis". Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Indonesia, 17 Oktober 2003.
- Danandjaja, James. 1997. *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lain-lain*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Danasasmita, Saleh, et.al. 1983/1984. *Rintisan Penelusuran Masa Silam Sejarah Jawa Barat*. 4 Vols. Bandung: Proyek Penerbitan Sejarah Jawa Barat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- Dienaputra, Reiza D. 1993. *Kerajaan Sunda Pajajaran: Studi tentang Suksesi Kepemimpinan di Kerajaan Sunda Pajajaran*. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.
- . 2004. *Cianjur: Antara Priangan dan Buitenzorg (Sejarah Cikal Bakal Cianjur dan Perkembangannya Hingga 1942)*. Bandung: Prolitera.
- Ekadjati, Edi S. 1995a. *Kebudayaan Sunda (Suatu Pendekatan Sejarah)*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- . 1995b. *Sunda, Nusantara, dan Indonesia: Suatu Tinjauan Sejarah*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran pada Hari Sabtu, 16 Desember 1995.
- . 2004. *Kebangkitan Kembali Orang Sunda: Kasus Paguyuban Pasundan 1913-1918*. Bandung: Kiblat Buku Utama.
- J. Hageman Cz. 1867. "Geschiedenis der Soendalanden", *TBG*, XVI. Batavia.
- Kern, R.A. 1898. *Geschiedenis der Preanger-Regentschappen; Kort Overzigt*. Bandung: De Vries & Fabricius.
- Kunto, Haryoto. 1984. *Wajah Bandoeng Tempo Doeloe*. Bandung: Granesia.
- Lubis, Nina H., dkk. 2003. *Sejarah Tatar Sunda*. Jilid I dan II. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.
- Rosidi, Ajip. 1988. *Hurip Waras: Dua Panineungan*. Bandung: Pustaka Karsa Sunda.
- Warnaen, Suwarsih et.al. 1987. *Pandangan Hidup Orang Sunda*. Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi) Depdikbud.



Bahasa Sunda dalam Arus Globalisasi: Tinjauan Historis Prospektif*

Pengantar

Berbicara tentang tatar Sunda¹, *urang* Sunda² dan kebudayaan Sunda maka di dalamnya secara otomatis akan berbicara pula tentang salah satu unsur kebudayaannya, yakni bahasa Sunda. Bahasa Sunda menjadi bahasa yang hidup dan berkembang lama di sebuah wilayah geografis yang bernama tatar Sunda, serta digunakan sebagai media komunikasi oleh mereka yang menamakan dirinya sebagai *urang* Sunda. Bahasa Sunda pun menjadi pertanda masih hidup dan berkembangnya apa yang dinamakan kebudayaan Sunda.

Sebagaimana halnya bahasa-bahasa daerah lainnya, bahasa Sunda menarik untuk dibicarakan tidak hanya karena ia hidup di sebuah wilayah administratif yang jumlah penduduknya nomor dua terbesar di Indonesia tetapi juga karena munculnya kembali kekhawatiran bahwa bahasa Sunda, juga sebagaimana bahasa daerah lainnya, tengah memasuki perkembangan yang kurang begitu menggembirakan, untuk tidak mengatakan tengah menuju ambang kepunahan.

* Makalah disampaikan sebagai materi presentasi dalam Diskusi Publik tentang Bahasa Sunda dan Arus Globalisasi yang diselenggarakan oleh Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, Jatinangor, 1 September 2009.

¹ Tatar Sunda atau tanah Sunda mengacu pada bekas wilayah Kerajaan Sunda Pajajaran, yang kemudian berdiri sendiri, yakni Sumedang Larang, Banten, Cirebon, dan Galuh. Sumedang Larang dan Galuh kemudian menjadi satu wilayah kesatuan dengan nama Priangan. Dalam perkembangan berikutnya, Priangan sering dikatakan sebagai pusat Tanah Sunda. (Edi S. Ekadjati. 1995: 7-8)

² *Urang* Sunda yang dimaksud dalam pembahasan ini merujuk pada orang yang mengaku dirinya dan diakui oleh orang lain sebagai orang Sunda. Dalam pengertian tersebut setidaknya tercakup dua kriteria besar yang dapat dijadikan pegangan untuk menyebut seseorang sebagai *urang* Sunda atau bukan *urang* Sunda. Kriteria pertama didasarkan atas keturunan atau hubungan darah. Dengan demikian, seseorang dikatakan *urang* Sunda apabila orang tuanya, baik dari pihak ayah maupun ibu, atau keduanya adalah orang Sunda, terlepas dimana ia berada atau dibesarkan. Kriteria kedua didasarkan atas sosial budaya. Seseorang dikatakan *urang* Sunda apabila ia dibesarkan dalam lingkungan sosial budaya Sunda dan dalam hidupnya menghayati serta mempergunakan norma-norma dan nilai budaya Sunda. Dalam kriteria kedua ini, yang dianggap penting adalah tempat tinggal, kehidupan sosial budaya, dan sikap orangnya (Edi S. Ekadjati. 1995: 8; Suwarsih Warnaen, et.al. 1987: 1).

Kekhawatiran ini ditambah lagi dengan kencangnya arus globalisasi yang kini melanda seluruh kawasan di berbagai belahan dunia, tentunya termasuk di dalamnya tatar Sunda. Globalisasi pun sering disinyalir sebagai faktor yang akan mempercepat keterpurukan bahasa Sunda.

Kesemua kekhawatiran tersebut bisa jadi benar adanya demikian, atau bisa jadi pula terlalu berlebihan dan hanya sekedar representasi rasa kurang percaya diri *urang* Sunda. Tegasnya, kekhawatiran itu muncul hanya karena persepsi yang kurang proporsional dalam melihat realitas perkembangan kontemporer atau muncul karena kekurang pahaman terhadap realitas perkembangan bahasa Sunda dalam panggung sejarah. Bila itu yang terjadi, bisa jadi yang kini perlu dilakukan bukanlah melestarikan atau menyebarkan kekhawatiran tetapi bagaimana bertindak nyata untuk menjadikan bahasa Sunda lebih mampu bertahan dalam menghadapi gempuran beragam arus perubahan dan tantangan. Dengan cara itu, *urang* Sunda pun akan selalu didorong untuk berpikir besar dan menjadikan bahasa Sunda semakin besar.

Eksistensi Bahasa Sunda

Sebagaimana tatar Sunda dan *urang* Sunda, bahasa Sunda pun pada dasarnya bertransformasi dalam dimensi waktu yang diakronis. Belum bisa dipastikan secara tepat kapan bahasa Sunda ini mulai dikenal di tatar Sunda. Namun, bila berpijak pada bukti-bukti tertulis, bahasa Sunda setidaknya telah mulai dikenal di tatar Sunda sejak masa kerajaan Sunda Pajajaran (VII – XVI). Hal ini sebagaimana terlihat dari digunakannya bahasa dan huruf Sunda kuno dalam Prasasti Kawali (Abad XIV-XV), yang terdapat di Astana Gede, Kawali, Ciamis, serta beberapa prasasti lain peninggalan kerajaan Sunda, seperti, Prasasti Rumatak, yang ditemukan di punggung Gunung Geger Hanjuang, Desa Rawagirang, Singaparna, Tasikmalaya, Prasasti Batutulis (1455 Saka/1533 Masehi), Prasasti Kebantenan (1533 M), Prasasti Cikajang, serta Prasasti Ulubelu yang ditemukan di Ulubelu, Desa Rebangkubung, Lampung. Di luar prasasti, bahasa Sunda juga tampak digunakan dalam beberapa naskah Sunda kuno, seperti Sewaka Darma (Abad XVI), Sanghyang Siksakandang Karesian (1518 M), serta Carita Parahyangan (1570 M). (Hasan Mu'arif Ambary, dkk., 1993: 79, 197-215) Bila bukti-bukti tertulis tersebut dijadikan fakta tentang awal kehadiran bahasa Sunda maka jelaslah bahwa bahasa Sunda setidaknya telah mulai dikenal di tatar Sunda sejak abad XIV. Selanjutnya, berpijak pada kenyataan bahwa perkembangan peradaban menuju tulisan pasti memerlukan waktu yang cukup panjang maka penggunaan bahasa Sunda sebagai bahasa komunikasi bisa dipastikan telah digunakan jauh sebelum abad XIV.

Perkembangan bahasa Sunda sebagai media komunikasi, dalam perkembangannya kemudian, banyak mendapat tantangan saat berinteraksi dengan

kebudayaan-kebudayaan besar yang masuk ke tatar Sunda. Disamping Hindu Budha (bahasa Sanskerta), bahasa Sunda berinteraksi pula dengan bahasa yang dibawa kebudayaan-kebudayaan Islam (bahasa Arab), Jawa (bahasa Jawa), dan Eropa (bahasa Belanda). Dalam masa-masa interaksi tersebut, bahasa Sunda dapat dikatakan mampu menjaga eksistensinya secara baik. Berbagai kosakata dari bahasa-bahasa asing tersebut tentunya masuk dan mempengaruhi bahasa Sunda. Bahkan, berbeda dengan bahasa Arab dan bahasa Belanda, pengaruh bahasa Jawa juga lebih meluas karena kemudian menjadikan bahasa Sunda menjadi bahasa yang tidak lagi egaliter. Sejak berinteraksi dengan kebudayaan Jawa, khususnya ketika Mataram berkuasa di tatar Sunda selama kurang lebih 57 tahun (1620-1677 M), bahasa Sunda kemudian mengenal *undak usuk basa*. Perlu kiranya diteliti, seberapa jauh pula kosakata bahasa Sunda diserap oleh bahasa-bahasa asing tersebut.

Derasnya pengaruh yang dialami bahasa Sunda saat berinteraksi dengan bahasa-bahasa asing, terbukti tidak menjadikan bahasa Sunda menjadi terpinggirkan di tatar Sunda atau di dalam komunitas *urang* Sunda. Bahasa Sunda tetap eksis dan digunakan *urang* Sunda. Termasuk ketika tantangan baru muncul sejak awal abad XX, saat mana para pemuda Indonesia berikrar pada tanggal 28 Oktober 1928 untuk sama-sama menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kesepakatan nasional yang sekaligus menjadi pertanda semakin menguatnya model perlawanan baru menghadapi kolonial ini, menjadikan *urang* Sunda untuk, mau tidak mau, lebih mengutamakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dibandingkan bahasa Sunda. Namun, setelah kesepakatan nasional dalam berbahasa ini berlangsung hampir 81 tahu, terbukti pula bahasa Sunda tetap mampu mempertahankan eksistensinya dengan baik dalam menghadapi tantangan superberat tersebut. Jumlah penutur bahasa Sunda tetap eksis. Bahkan kini, para penutur bahasa Sunda tersebut secara geografis tidak hanya berada di tatar Sunda tetapi di luar tatar Sunda. Tidak hanya di Jawa dan di luar Jawa, tetapi juga di luar negeri. Mereka-mereka yang menggunakan bahasa Sunda tersebut tidak saja komunitas yang bernama *urang* Sunda tetapi juga mereka-mereka yang semata-mata tertarik dengan bahasa Sunda. Satu di antaranya, ya yang ada dihadapan kita semua, Kang Mikihiro Moriyama.

Realitas Globalisasi

Globalisasi, yang secara sederhana memiliki pengertian sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia, kini seakan menjadi hantu yang menakutkan bagi sebuah nasionalitas ataupun etnisitas. Globalisasi dipandang akan menghapuskan nasionalitas dan juga etnisitas. Yang lebih memprihatinkan lagi, globalisasi pun seringkali dipandang sebagai fenomena baru yang terjadi di muka bumi ini. Orang lupa, bahwa globalisasi telah berlangsung lama, seiring dengan perkembangan

peradaban bangsa-bangsa di dunia. Ia bukanlah binatang baru di muka bumi ini. Termasuk bukanlah barang baru bagi tatar Sunda dan komunitas yang bernama *urang* Sunda. Sepanjang sejarah itu pula, terbukti globalisasi tidak pernah sanggup menghapus apa yang namanya nasionalitas dan etnisitas, tetapi sebaliknya justru melahirkan nasion-nasion baru sebagai perlawanan atas globalisasi.

Sebagai barang lama, dengan demikian, globalisasi perlu ditempatkan secara tepat. Ia hanyalah sebuah fenomena baru “hanya” dalam hal aktor penguasanya. Aktor penguasa globalisasi dalam gelombang ketiga ini, sebagaimana dikatakan Alvin Toffler, adalah teknologi informasi. Sebelumnya aktor-aktor globalisasi adalah tanah atau agrikultur (gelombang kesatu) dan kapital atau modal (gelombang kedua).

Tatar Sunda dan *urang* Sunda, serta lebih khusus lagi bahasa Sunda telah mengalami globalisasi sejak masa awal kelahirannya. Interaksi bahasa Sunda dengan kebudayaan Hindu-Budha, Islam, dan Barat merupakan bukti tak terbantahkan tentang pengalaman bahasa Sunda dalam menghadapi globalisasi atau yang dulu lebih dikenal dengan mondialisasi. Di tengah kesemua arus globalisasi tersebut, bahasa Sunda terbukti mampu memperlihatkan daya tahannya dengan baik. Jadi, dalam menghadapi globalisasi kali ini pun, sebagai bahasa yang telah teruji secara diakronis dalam berhadapan dengan globalisasi, bahasa Sunda bisa dipastikan akan terus mampu mempertahankan eksistensinya.

Reformulasi Penguatan Bahasa Sunda

Berangkat dari realitas-realitas serta pengertian sebagaimana terurai di atas, tampak merupakan sikap yang pesimis bila mengatakan bahwa bahasa Sunda akan terpunahkan oleh karena adanya globalisasi. Pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa jumlah pengguna bahasa Sunda semakin hari semakin berkurang perlu diuji lebih valid lagi. Bukankah kenyataan memperlihatkan bahwa pengguna bahasa Sunda kini tidak hanya *urang* Sunda genealogis tetapi juga *urang* Sunda sosial budaya. Bila pendekatan kuantitatif yang digunakan, seiring dengan terus meningkatnya populasi *urang* Sunda³ maka sedikit banyaknya akan meningkat pula jumlah pengguna atau penutur bahasa Sunda. Bahasa Sunda pun secara diakronis terbukti pula tidak mengalami apa yang oleh Jean Aitchison (1981: 209, 216) disebut sebagai *language suicide* (bunuh diri bahasa) ataupun *language murder* (pembunuhan bahasa).

Bila demikian adanya, tentu bukanlah pesimisme yang perlu dimunculkan tetapi justru optimismelah yang perlu dikedepankan. Oleh karena terbukti bahwa bahasa Sunda tidak pernah terkalahkan oleh yang namanya globalisasi atau mondialisasi, maka sudah saatnya kini *urang* Sunda berperilaku optimis dengan memformulasikan langkah-langkah strategis yang dapat semakin memperkuat

posisi bahasa Sunda di tengah arus globalisasi. Peribahasa *miindung ka waktu mibapa ka zaman*, perlu diejawantahkan secara cerdas oleh urang Sunda dalam menghadapi tantangan globalisasi. Globalisasi gelombang ketiga yang kini tengah dihadapi manusia sejagat perlu dihadapi secara taktis dan cerdas oleh urang Sunda demi terkibarkannya lebih kokoh lagi bendera bahasa Sunda.

Tentunya banyak hal yang bisa dilakukan untuk menjadikan bahasa Sunda tidak sekedar mampu bertahan di tengah globalisasi tetapi lebih dari itu mampu menaklukkan atau setidaknya memanfaatkan globalisasi bagi penguatan bahasa Sunda. Satu di antaranya yang paling penting adalah menjadikan bahasa Sunda ramah dengan berbagai perangkat globalisasi. Bila penguasa globalisasi gelombang ketiga adalah teknologi informasi maka bahasa Sunda harus mampu memanfaatkan perangkat tersebut secara optimal. Apa yang sudah dilakukan berbagai komunitas Sunda dengan membuka *website* di dunia maya, seperti, www.urang-sunda.net, www.sundanet.com, www.kasundaan.org, www.pasundan.org, www.simpay-wargiurang.com, merupakan langkah cerdas dan tepat untuk menghadapi arus globalisasi. Hal itu jelas-jelas pula merupakan representasi dari glocalisasi (*glocalization*) atau representasi dari “Think Globally, Act Locally”. Optimalisasi pemanfaatan internet sebagai media untuk memperkuat daya tahan dan meningkatkan daya sebar bahasa Sunda perlu terus ditingkatkan oleh semua urang Sunda, terlebih mereka-mereka yang bergelut dengan bahasa Sunda secara akademis; pelajar, mahasiswa, guru, dan dosen.

Di luar itu, penguatan daya tahan dan daya sebar bahasa Sunda juga perlu dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan keluarga sebagai tempat sosialisasi kebudayaan. Keluarga-keluarga urang Sunda perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya penggunaan bahasa Sunda sebagai media komunikasi keluarga. Bisa jadi model pemberian *reward* perlu dilakukan untuk mendorong keluarga-keluarga Sunda lebih tergairahkan untuk menggunakan bahasa Sunda. Pemilihan keluarga berbahasa Sunda terbaik atau terapis bisa kiranya dijadikan salah satu solusi penguat daya tahan dan daya sebar bahasa Sunda.

Pada tingkat pemerintahan, perlu ada pula penguatan-penguatan *political will* dalam meningkatkan kualitas daya tahan dan daya sebar bahasa Sunda.

³ Pada tahun 1930 atau kurang lebih lima tahun sesudah propinsi Jawa Barat terbentuk, penduduk Jawa Barat tercatat berjumlah 9.044.535 orang. Memasuki kemerdekaan atau kurang lebih 16 tahun sesudah propinsi Jawa Barat produk bangsa Indonesia terbentuk, jumlah penduduk propinsi Jawa Barat tercatat sebanyak 15.175.981 orang. Pertumbuhan selanjutnya penduduk propinsi Jawa Barat memperlihatkan perkembangan yang terus meningkat, yakni dari 18.587.530 orang pada tahun 1971 menjadi 23.434.003 pada tahun 1980, 29.414.375 orang pada tahun 1990, 35.723.473 orang pada tahun 2000, dan 39.140.812 orang pada tahun 2004. (Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat, Seri Kependudukan Jawa Barat Tahun 1920 – 2004:1-2)

Kehadiran perda No. 5 tahun 2003 perlu kiranya segera diikuti dengan langkah-langkah lain yang lebih implemantatif. Penggunaan wajib berbahasa Sunda pada hari-hari tertentu di berbagai instansi, baik pemerintahan maupun swasta, baik pendidikan maupun non kependidikan, tidak ada salahnya ditetapkan sebagai sebuah keputusan. Wajib berbahasa Sunda di seluruh tatar Sunda setidaknya perlu pula ditetapkan sebagai sebuah keputusan politik saat berlangsungnya hari bahasa Ibu internasional, setiap tanggal 21 Februari.

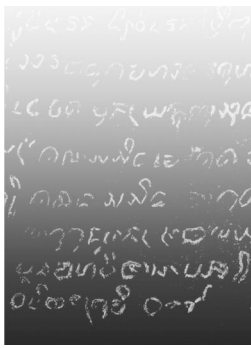
Mengingat salah satu representasi keberadaan bahasa adalah produk-produk budaya tulis maka penguatan daya tahan dan daya sebar bahasa Sunda perlu pula dilakukan dengan melakukan upaya yang tidak pernah henti untuk mendorong peningkatan jumlah buku-buku atau tulisan-tulisan berbahasa Sunda, termasuk mencari terobosan-terobosan baru dalam menciptakan produk tulis yang dapat memperkuat daya sebar bahasa Sunda. Seiring dengan era informasi pula, model-model baru penguatan daya tahan dan daya sebar bahasa Sunda perlu pula dipikirkan. Satu di antaranya adalah dengan memperbanyak karya-karya visual berbahasa Sunda, termasuk di dalamnya berupa kamus visual bahasa Sunda.

Pada akhirnya, hal penting lain yang perlu dilakukan untuk memperkuat daya tahan dan daya sebar bahasa Sunda adalah bagaimana menjadikan kebiasaan berbahasa sunda sebagai sikap atau perilaku yang membanggakan, bahkan sekaligus prestisius. Urang Sunda perlu dibuat semakin percaya diri saat menggunakan bahasa Sunda serta menjadikan bahasa Sunda sebagai bahasa yang egaliter tetapi sekaligus bermartabat. Aktor penting yang dapat melakukan hal ini di antaranya adalah para elit politik, terutama mereka-mereka yang menjadi decision maker di tingkat kota, kabupaten, dan propinsi. Aktor lainnya adalah para guru atau dosen, khususnya guru atau dosen yang terlibat langsung dengan studi bahasa Sunda. Tentu akan menjadi sebuah ironi besar bila ditemukan ada guru atau dosen yang memiliki latar pendidikan bahasa Sunda tetapi tidak pernah mau mengakui latar belakang pendidikan dirinya tetapi justru menutup-nutupinya atau bahkan menggantinya dengan identitas lain yang dianggap lebih bergengsi.

DAFTAR SUMBER

- Ambary, Hasan Mu'ariftra, dkk. 1993. Proceedings Seminar Nasional Sastra dan Sejarah Pakuan Pajajaran. Bogor: Universitas Pakuan Bogor dan Yayasan Pembangunan Jawa Barat.
- Atja dan Saleh Danasasmitha. 1981. Sanghyang Siksakanda Ng Karesian: (Naskah Sunda Kuno Tahun 1518 M). Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat.
- Ayatrohaedi. 1975. "Tarumanegara" dalam Atja (ed.), Sejarah Jawa Barat. Bandung: Proyek Penunjang Kebudayaan Nasional.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat. 2004. Seri Kependudukan Jawa Barat Tahun 1920 – 2004.
- Biro Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat. 1999. Jawa Barat Dalam Angka: Jawa Barat In Figures. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Biro Pusat Statistik. 2003. Jawa Barat Dalam Angka 2003. Bandung: Kantor Statistik Propinsi Jawa Barat.
- Danasasmitha, Saleh, et.al. 1983/1984. Rintisan Penelusuran Masa Silam Sejarah Jawa Barat. 4 Vols. Bandung: Proyek Penerbitan Sejarah Jawa Barat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- Dienaputra, Reiza D. 1993. Kerajaan Sunda Pajajaran: Studi tentang Suksesi Kepemimpinan di Kerajaan Sunda Pajajaran. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.
- . 2004. Cianjur: Antara Priangan dan Buitenzorg (Sejarah Cikal Bakal Cianjur dan Perkembangannya Hingga 1942). Bandung: Prolitera.
- Ekadjati, Edi S. 1995a. Kebudayaan Sunda (Suatu Pendekatan Sejarah). Jakarta: Pustaka Jaya.
- . 1995b. Sunda, Nusantara, dan Indonesia: Suatu Tinjauan Sejarah. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran pada Hari Sabtu, 16 Desember 1995.
- . 2004. Kebangkitan Kembali Orang Sunda: Kasus Paguyuban Pasundan 1913-1918. Bandung: Kiblat Buku Utama.
- J. Hageman Cz. 1867. "Geschiedenis der Soendalanden", TBC, XVI. Batavia.
- Kern, R.A. 1898. Geschiedenis der Preanger-Regentschappen; Kort Overzicht. Bandung: De Vries & Fabricius.

- Rosidi, Aji. 1988. Hurip Waras: Dua Panineungan. Bandung: Pustaka Karsa Sunda.
- Warnaen, Suwarsih et.al. 1987. Pandangan Hidup Orang Sunda. Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi) Depdikbud.



Profil Sejarah Kawasan Ekosistem Halimun: Sebuah Pengantar Diskusi*

Berbicara tentang Kawasan Halimun, Kawasan Gunung Halimun, Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) ataupun Kawasan Ekosistem Halimun (KEH) berarti berbicara tentang berbagai hal yang sangat kompleks. Tidak hanya berbicara tentang sumber daya alam tetapi juga berbicara tentang sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Kompleksitas permasalahan akan menjadi semakin meningkat manakala kemudian pembicaraan tentang kawasan tersebut hanya dilihat dari perspektif kepentingan masing-masing pihak dengan tanpa berupaya melihat permasalahan secara menyeluruh serta dengan tidak mengakomodasikan kepentingan pihak lainnya yang juga menjadi “penghuni” atau “pengelola” Kawasan Ekosistem Halimun. Padahal, sebagai sebuah kawasan ekosistem yang berusia “sangat tua”, sudah pada tempatnya apabila pembicaraan tentang Kawasan Ekosistem Halimun tersebut dilakukan dengan penuh kearifan, terlebih manakala bersentuhan dengan komunitas masyarakat yang bisa jadi telah hidup secara turun temurun di wilayah tersebut, jauh sebelum Kawasan Ekosistem Halimun tersebut terkenal seperti saat ini.

Penghargaan terhadap keberadaan komunitas yang telah lama mendiami wilayah tersebut, dengan segala adat istiadat yang dimilikinya, menjadi semakin penting manakala perjalanan sejarah membuktikan bahwa komunitas tersebut selama belum terkontaminasi oleh tangan-tangan kotor yang sangat eksploitatif, mampu menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan yang terjaga kelestariannya secara ekologis sehingga harmonisasi antara alam dan manusia dapat terpelihara dengan baik. Oleh karenanya, agar setiap upaya pemberdayaan Kawasan Ekosistem Halimun dapat berjalan dengan baik serta dapat merasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, maka hendaklah setiap upaya pemberdayaan tersebut senantiasa melibatkan masyarakat yang ada di dalamnya, khususnya komunitas masyarakat yang telah lama mendiami wilayah tersebut, yang kini

* Makalah ini merupakan materi presentasi dalam Seminar Sehari, dengan tema, “Kawasan Halimun: Nyoreang Alam Ka Tukang, Nyawang Anu Bakal Datang”, yang diselenggarakan RMI: The Indonesian Institute for Forest and Environment Bogor, 17 Februari 2004.

lebih dikenal dengan nama Masyarakat Adat Baduy dan Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul. Janganlah sampai terjadi, Kawasan Ekosistem Halimun terberdayakan tetapi masyarakat didalamnya terperdayakan.

Untuk memperoleh kearifan dalam mengelola dan memberdayakan Kawasan Ekosistem Halimun, maka pemahaman kawasan di kelampauan menjadi sangat penting. Dengan memahami Kawasan Ekosistem Halimun di masa lalu setidaknya akan diperoleh gambaran yang lebih baik tentang identitas kawasan, termasuk identitas komunitas yang mendiami kawasan tersebut. Pemahaman di kelampauan tersebut juga dapat memberikan gambaran tentang perkembangan pengelolaan kawasan sekitarnya yang pernah dilakukan kekuatan asing, khususnya Pemerintah Kolonial Belanda.

Profil Geografis dan Administratif

Berdasarkan Peta Kawasan Ekosistem Halimun versi masyarakat, Kawasan Ekosistem Halimun mencapai luas kurang lebih 208.728,86 ha,¹ sementara menurut Kusnaka Adimihardja (1992:1), Kawasan Gunung Halimun memiliki luas areal secara keseluruhan sebanyak 122.000 ha, yang terdiri dari hutan lindung (*forest conservation*) seluas 82.000 ha dan cagar alam (*natural preserve*) seluas 40.000 ha. Masih berkaitan dengan kawasan Halimun, SK Menteri Kehutanan No. 282/1992 menetapkan cagar alam Halimun seluas 40.000 ha sebagai Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH). Melalui SK Menteri Kehutanan No. 175/kpts-II/2003 luas kawasan TNGH diperluas menjadi 113.375 ha. Dari gambaran tersebut, jelas terdapat perbedaan luas kawasan manakala menyebut Halimun sebagai sebuah wilayah ekosistem, wilayah gunung atau Halimun sebagai sebuah taman nasional. Namun, apapun konsep yang digunakan untuk menyebut kawasan Halimun, semua konsep yang digunakan tersebut, kini sama-sama menegaskan bahwa “kawasan” tersebut berada di tiga wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Lebak, Sukabumi, dan Bogor.

Untuk itulah pendekatan historis dalam melihat Kawasan Ekosistem Halimun dilakukan dengan melihat tata letak dan perkembangan status administratif wilayah yang menaunginya. Kawasan Ekosistem Halimun pada awalnya merupakan bagian wilayah Kerajaan Sunda Pajajaran.² Keberadaan kawasan ini

¹ RMI. Potret Kehidupan Masyarakat Adat dan Lokal (Non Adat) Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Ekosistem Halimun. Bogor: tt, hal. 3. Dari luas tersebut, sebagian besar atau seluas 97.169,594 ha berada di wilayah Kabupaten Sukabumi. Sisanya, masing-masing sebanyak 71.501,986 ha dan 41.520,656 ha berada di wilayah Kabupaten Lebak dan Kabupaten Bogor.

² Keberadaan Kerajaan Sunda Pajajaran sebagai pemegang kedaulatan atas “wilayah” Sunda, yang di dalamnya terdapat Kawasan Ekosistem Halimun dibuktikan oleh adanya prasasti-prasasti, seperti, Prasasti Canggal (ditemukan di halaman percampian Gunung Wukir,

sebagai bagian wilayah Kerajaan Sunda Pajajaran berlangsung sejak abad ke-7 hingga abad ke-16. Selanjutnya, seiring dengan runtuhnya Kerajaan Sunda Pajajaran, Kawasan Ekosistem Halimun termasuk dalam wilayah geografis Kesultanan Banten³ dan Kesultanan Mataram (1620-1677). Sejalan pula dengan semakin menguatnya kekuasaan VOC, Kawasan Ekosistem Halimun juga menjadi bagian wilayah kekuasaan VOC (1677-1799). Semasa kekuasaan VOC, Kawasan Ekosistem Halimun termasuk wilayah politik *Bataviasche Ommelanden* (Tangerang dan Grending, Kampung Baru, Jampang, Cibalugung, Cikalong, Bandung, Karawang, Wanayasa, Adiarsa, Ciasem, Pamanukan, Pagaden,

Magelang, berangka tahun 654 Saka/732 M, mencantumkan nama raja Sanjaya dan Silsilahnya); Prasasti Rakryan Juru Pangambat (ditemukan di Bogor, berangka tahun 854 Saka/932 M, mencantumkan raja Sunda); Prasasti Cibadak/Sang Hyang Tapak (ditemukan di Cibadak, Sukabumi, menyebut Sri Jayabhupati sebagai Raja Sunda serta larangan menangkap ikan di daerah tertentu yang disebut Sunda Sembawa serta kutukan bagi yang melanggarnya); Prasasti-prasasti Kawali (ditemukan di Situs Astana Gede, Kawali, Ciamis, berasal dari abad ke-14 M, salah satu prasastinya menyebut nama gelar Prabu Wastu); Prasasti Batu Tulis (ditemukan di Batutulis Bogor, berangka tahun 1455 Saka/1533 M, mencantumkan tiga orang raja Sunda, yakni Prabu Guru Dewataprana alias Sri Baduga Maharaja atau Sri Ratu Dewata, Rahiyang Dewa Niskala, dan Rahiyang Niskala Wastukancana. Ketiganya memiliki tali ikatan anak, ayah, dan kakek); dan Prasasti-prasasti Kabantenan (berasal dari abad ke-16, kelima buah prasastinya berisi penetapan wilayah-wilayah tertentu sebagai daerah yang dibebaskan dari pajak atas dasar kesucian atau kepentingan keagamaan).

- ³ Tahun 1526, wilayah Banten yang semula dikuasai Kerajaan Sunda Pajajaran berhasil ditaklukan pasukan Islam di bawah pimpinan Fatahillah. Sejak saat itu Hasanuddin diangkat menjadi Adipati Banten. Kemudian pada tahun 1552 diangkat menjadi Sultan Banten pertama oleh Sunan Gunung Jati. Semenjak wafatnya Sunan Gunung Jati (1568) Hasanudin menjadi penguasa penuh Banten. Tahun 1570, sepeninggal Hassanuddin (kemudian diberi gelar Pngeran Seda Kingkin/rindu akan kebijaksanaan), berturut-turut naik Maulana Yusuf (1570-1580, setelah meninggal mendapat gelar Pangeran Pasarean), Pangeran Muhammad (1580-1596) [Masa ini ditandai oleh berlabuhnya kapal dagang Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman pada bulan Juni 1596], Sultan Abdulmufakhir Mahmud Abdulkadir (1596-1651), Pangeran Surya/Sultan Abulfath Abdulfattah/Sultan Ageng Tirtayasa (cucu sultan Abdulmufakhir) (1651-1684)] [Masa ini ditandai perang berkepanjangan antara Sultan Ageng dan anaknya Sultan Haji. Beberapa daerah yang sempat dijadikan daerah pertahanan dan gerilya Sultan Ageng dan pengikutnya adalah Lebak, daerah Sajira di perbatasan Bogor (bersama pangeran Kidul, Pangeran Kulon, dan Syekh Yusuf), Parijan/pedalaman Tangerang (Pangeran Purbaya), Jasinga/Bogor sampai Mandala/Sukapura (Syekh Yusuf), dan Gunung Galunggung (Pangeran Purbaya, Pangeran Kulon, dan Pangeran Sake). Tentang Syekh Yusuf, akibat jebakan kompeni (Van Happel) tertangkap 14 Desember 1683 yang pada akhirnya dibuang ke Tanjung Harapan (Afrika Selatan) pada tanggal 7 Juli 1693 hingga meninggal 23 Mei 1699], Sultan Haji (1684-1687), Pangeran Ratu/Sultan Abu'ifadhi Muhammad Yahya (1687-1690), Pangeran Adipati/Sultan Abu'l Mahasin Muhammad Zainul Abidin (1690-1733), Sultan Abulfathi Muhammad Shifa Zainul Arifin (1733-1750), Pangeran Syarif Abdullah/Sultan Syarifuddin Ratu Wakil (1750-1752), Pangeran Arya Adisantika/Sultan Abu'ma'ali Muhammad Wasi' Zainul Alimin (1752-1753), [Masa ini (sejak 1750) ditandai oleh adanya perlawanan rakyat Banten terhadap kompeni beserta kesultanan yg dipandang boneka kompeni di bawah pimpinan Ki Tapa dan Ratu Bagus Buang. Daerah-daerah yang sempat dijadikan basis

Timbanganten, Batulayang, dan Parakanmuncang)⁴. Pada akhir kekuasaan VOC, Kawasan Ekosistem Halimun tetap termasuk wilayah Batavia (Tangerang, Karawang, Buitenzorg, Sumedang, Bandung, dan Parakanmuncang).

Runtuhnya VOC pada akhir abad ke-18 yang diikuti dengan berkuasanya Pemerintah Kolonial Hindia Belanda (1808-1811, 1816-1942) dan Inggris (1811-1816) secara otomatis menyebabkan terjadinya pergeseran wilayah administratif yang menaungi Kawasan Ekosistem Halimun. Semasa Daendles (1808-1809), Kawasan Ekosistem Halimun menjadi bagian wilayah *Landdrostamt der Jacatrasche en Preanger Bovenlanden* (Tangerang, Karawang, Buitenzorg, Sumedang, Bandung, dan Parakanmuncang) serta *Landdrostamt Banten*. Sejak 1811 termasuk wilayah *Landdrostamt Banten* dan *de Ommelanden van Batavia*. Era Raffles, berdasarkan Resolusi tanggal 13 Februari 1813 yang pengumuman pembentukan dan peresmiannya dilakukan tanggal 10 Agustus 1815, kawasan ini termasuk wilayah Karesidenan Priangan, Banten, dan Buitenzorg.⁵

perlawanan adalah Pegunungan Munara di Ciampea Bogor, Banten Selatan, Jateng, Jatim. Ratu Bagus Buang hingga 1753 tetap mengadakan perlawanan dari daerah Banten], Pangeran Gusti/Sultan Abu'n Nasr Arifin Zainul Asiqin (1753-1773), Sultan Abu'l Mufakhir Muhammad Aliuddin (1773-1799), Pangeran Mukhidin/Sultan Abu'lfath Muhammad Muhidin Zainal Shalikhin (1799-1801) (ewas dibunuh oleh tubagus ali, seorang putra Aliuddin dari selir), Sultan Abu'nasr Muhammad Ishaq Zainul Muttaqin (1801-1803), Sultan Aqiluddin/Sultan Aliyuddin II (1803-1808), [Akibat perlawanan Sultan Aliyuddin terhadap permohonan kerja rodi rakyatnya untuk membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon, Daendles menggempur Banten. Sultan ditangkap dan dibuang ke Ambon. Selanjutnya, Banten dan Lampung dijadikan daerah Jajahan Belanda, sedangkan Tangerang, Jasinga, dan Sadang dimasukkan dalam wilayah Batavia], Sultan Wakil Pangeran Suramanggala (1808-1809) [Kebijakan Belanda untuk tetap melaksanakan kerja rodi bagi pembangunan pangkalan AL di Anyer (setelah Ujung Kulon dibatalkan) memancing kemarahan rakyat. Sultan dituduh sebagai dalang. Akibatnya ditangkap dan ditahan di Batavia. Benteng dan istananya dihancurkan dan dibakar. Untuk melemahkan perlawanan rakyat, Banten dibagi menjadi tiga daerah yang statusnya setingkat kabupaten; Banten Hulu, Banten Hilir, dan Anyer. Ketiga daerah tersebut berada dibawah pengawasan Landros (semacam residen) yang berkedudukan di Serang. Untuk Banten Hulu diangkat Sultan Muhammad Syafiyuddin (1811-1813)]. Era Rafles hingga era Komisaris Jenderal (1819) dibagi atas empat kabupaten; Banten Lor (Utara) diperintah Bupati Pangeran Suramenggala, Banten Kulon (Barat) diperintah Bupati Tubagus Hayudin, Banten Tengah diperintah Bupati Tubagus Ramlan, Banten Kidul (Selatan), diperintah Bupati Tumenggung Suradilaga. Era Van der Capellen (1819) dibagi atas Kabupaten Utara (Ibukota Serang), Barat (Caringin), dan Selatan (Lebak). Sejak keluarnya RR 1854, Banten kembali dibagi empat kabupaten; Utara (Serang), Barat (Caringin), Tengah (Pandeglang), dan Selatan (Lebak)]

⁴ Otto van Rees. 1880. *Overzigt van de Geschiedenis der Preanger-Regentschappen*. Batavia; R.A. Kern. 1898. *Geschiedenis der Preanger-Regentschappen: Kort Overzigt*. Bandung: De Vries & Fabricius.

⁵ L. Pronk. 1929. *De Bestuursorganisatie-Mullemeister op Java en Madoera en haar betekenissen voor het heden*. Leiden: M. Dubbeldeman. Otto van Rees. 1880. *Overzigt van de Geschiedenis der Preanger-Regentschappen*. Batavia; R.A. Kern. 1898. *Geschiedenis der Preanger-Regentschappen: Kort Overzigt*. Bandung: De Vries & Fabricius. Dengan kata lain, tahun 1815

Sebagai bagian dari wilayah administratif Kabupaten Lebak, Sukabumi, dan Bogor, boleh dikatakan baru berlangsung sejak dasawarsa ketiga abad ke-20. Sebelumnya, wilayah ini merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bogor, Lebak, dan Cianjur. Seiring dengan berubahnya status Afdeling Sukabumi menjadi Kabupaten Sukabumi sejak 1 Juni 1921⁶ maka wilayah geografis Kawasan Ekosistem Halimun pun beralih menjadi bagian wilayah Kabupaten Sukabumi. Seiring dengan dibentuknya **Provincie West Java** pada tanggal 1 Januari 1926 (diundangkan dalam Staatsblad tahun 1925 No. 378 tanggal 14 Agustus 1925),⁷ kawasan ini termasuk ke dalam wilayah Karesidenan Banten (Kabupaten Lebak) dan Karesidenan Buitenzorg (Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor). Keberadaan kawasan ini sebagai bagian wilayah kedua karesidenan berlangsung hingga akhir kekuasaan kolonial Belanda.

Pemberdayaan Kawasan Ekosistem Halimun

Berdasarkan letak geografis serta latar belakang sejarah wilayah-wilayah yang melingkupinya, pemberdayaan Kawasan Ekosistem Halimun besar kemungkinan telah dilakukan sejak era VOC. Pemanfaatan wilayah untuk tanaman-tanaman komersial (commercial crops) yang dapat dijual di pasaran Eropa dimulai oleh VOC dengan menanam wilayah Banten, Sukabumi, dan Bogor dengan tiga jenis tanaman paksa, yakni tarum, kapas, dan kopi sejak dasawarsa ketiga abad ke-18. Di antara ketiganya, kopi yang menjadi tanaman komersial utama. Untuk kopi, khusus untuk Kawasan Ekosistem Halimun yang masuk wilayah Banten, pertimbangan penanamannya diakibatkan oleh menurunnya harga pasaran cengkeh di Eropah setelah Inggris berhasil membudidayakan cengkeh di India. Di samping kopi, tanaman komersial lain yang ditanam di wilayah Banten adalah tebu serta rempah-rempah. Kebijakan penanaman paksa kopi, selanjutnya diteruskan pula oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19 dan 20. Khusus untuk Sukabumi, memasuki tahun 1864, dari 7 distrik yang dimiliki Sukabumi, semuanya ditumbuhi tanaman paksa kopi. Di antara 7 distrik yang ditanami kopi, Distrik Gunung Parang merupakan distrik yang memiliki pohon kopi paling banyak,

merupakan tahun pertama dikenalnya wilayah administratif bernama karesidenan. Di samping Priangan, Buitenzorg, dan Banten, 13 karesidenan lain yang dibentuk tahun 1815 adalah Karesidenan Cirebon, Tegal Pekalongan, Kedu, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Jepara, Juwana, Rembang, Gresik, Surabaya, Pasuruan, serta Probolinggo dengan Besuki dan Panarukan.

⁶ Staatsblad van Nederlandsch Indie over het Jaar 1921, No. 256.

⁷ Saat Provincie West Java dibentuk, ibukota propinsi berada di Jakarta. Provincie West Java terdiri dari 5 Karesidenan, 18 Kabupaten, dan 6 stadsgementen, yaitu Karesidenan Banten (dengan tiga kabupaten, yaitu, Serang, Pandeglang, dan Lebak); Karesidenan Batavia (Batavia, Meester Cornelis, dan Karawang); Karesidenan Buitenzorg (Bogor, Sukabumi, dan Cianjur); Karesidenan Priangan (Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis); dan Karesidenan Cirebon (Cirebon, Kuningan, Indramayu, Majalengka). Adapun 6 Stadsgemeente (Kotapraja) adalah Batavia, Meester Cornelis, Buitenzorg, Bandung, Cirebon, dan Sukabumi.

yakni sebanyak 2.301.898 batang. Distrik-distrik lainnya di luar Gunung Parang yang memiliki tanaman kopi relatif banyak adalah Distrik Cimahi dan Distrik Cicurug. Distrik Cimahi memiliki tanaman kopi sebanyak 975.808 batang, sedangkan Distrik Cicurug memiliki tanaman kopi sebanyak 817.820 batang.

Berjangkitnya serangan hama *wedang* dan penyakit daun pada akhir dasawarsa kedelapan abad ke-19 telah mengakibatkan hancurnya sebagian besar tanaman kopi dari jenis arabika. Hancurnya tanaman kopi jenis arabika ini segera diikuti oleh munculnya jenis tanaman kopi baru, yakni kopi jenis liberia (*Coffea liberica Bull*) dan kopi jenis robusta (*Coffea robusta Linden*). Spesies kopi liberia yang menjadi pilihan awal menggantikan kopi arabika ini memiliki daya tahan tinggi terhadap serangan hama kopi. Keunggulan lainnya, kopi jenis liberia ini memiliki toleransi terhadap kekeringan, kemampuan tumbuh di tanah gersang, sosok pohonnya kuat, serta relatif tidak memerlukan penanganan hortikultura yang intensif. Penggantian jenis tanaman kopi dari arabika ke liberia dan kemudian robusta sudah tentu memerlukan waktu yang relatif lama. Sebagai akibatnya terjadilah penurunan yang cukup drastis terhadap jumlah tanaman kopi yang dikelola menurut peraturan pemerintah. Pada tahun 1890, jumlah tanaman paksa kopi yang dimiliki Sukabumi hanya sebanyak 2.947.724 batang, yang tersebar di tujuh distrik. Dari tujuh distrik yang ditumbuhi tanaman paksa kopi, konsentrasi penanaman terbesar terdapat di Distrik Jampang Tengah. Memasuki abad ke-20, keberadaan tanaman paksa kopi di Sukabumi bisa dikatakan memperlihatkan perkembangan yang terus menurun. Pada tahun 1904, jumlah tanaman paksa kopi yang dimiliki Sukabumi hanya sebanyak 910.270 batang.

Era Pemerintah Kolonial Belanda, di samping ditandai oleh tetap diajadikannya kopi sebagai tanaman paksa, juga ditandai dengan berdirinya perkebunan-perkebunan swasta pada pertengahan abad ke-19. Perkebunan-perkebunan swasta ini menanami wilayah Banten, Sukabumi dan Bogor, termasuk Kawasan Ekosistem Halimun dengan tanaman-tanaman komersial, seperti kopi, teh, kina, dan karet.

Perkebunan kopi swasta pertama yang dibuka di Sukabumi terdapat di Distrik Pelabuhan. Perkebunan swasta yang persil tanahnya terletak di daerah Cibungur ini dibangun dengan cara sewa selama 20 tahun. Pelaksanaan sewa lahan perkebunan dilakukan sejak tanggal 19 Agustus 1865. Luas keseluruhan tanah perkebunan yang dimiliki oleh C.F.P. Bauer dan C. Dormitser ini adalah sebesar 173 bau.⁸

Setelah perkebunan kopi swasta di Distrik Pelabuhan beroperasi dengan baik, beberapa waktu kemudian muncul perkebunan-perkebunan swasta lain dalam jumlah yang relatif banyak. Banyaknya perkebunan swasta yang muncul di wilayah

⁸ Koloniaal Verslag van 1880.

Sukabumi, Bogor, dan Banten ini tampaknya tidak dapat dilepaskan dari politik pintu terbuka yang dijalankan pemerintah kolonial serta munculnya Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet*) 1870. Berdasarkan Undang-Undang Agraria yang ditetapkan sejak tanggal 9 April 1870, berkenaan dengan tataguna tanah, antara lain ditetapkan, pertama, bahwa tanah milik rakyat tidak dapat diperjual belikan kepada penduduk nonpribumi. Kedua, tanah domain pemerintah sampai seluas 10 bau dapat dibeli oleh penduduk nonpribumi untuk keperluan bangunan perusahaan. Ketiga, untuk tanah domain yang lebih luas, diberikan kesempatan bagi penduduk nonpribumi untuk memiliki hak guna, yang di antaranya dapat diperoleh melalui *erfpacht* (hak sewa turun temurun) untuk jangka waktu 75 tahun. Tanah-tanah yang dapat dimiliki hak gunanya ini ditetapkan berupa tanah-tanah liar atau tanah yang tidak dipakai oleh rakyat (*woeste gronden*). Luas tanah yang bisa dimiliki hak gunanya bagi kepentingan usaha pertanian besar maksimal seluas 500 bau. Untuk usaha pertanian kecil, maksimal seluas 50 bau.⁹

Perkebunan-perkebunan kopi swasta yang terdapat di Sukabumi tersebar di empat distrik. Dari 6401 bau lahan perkebunan yang terdapat di Sukabumi, lahan perkebunan yang terbilang paling besar terdapat di Distrik Pelabuhan, yakni seluas 2885 bau. Tanah perkebunan seluas 2885 bau ini tersebar di enam persil, yakni, Cislak, Cibungur, Ongkrak, Ardenburg, Malingut, dan Sukamaju. Di persil Cibungur, yang merupakan persil perkebunan paling tua setelah mengalami perluasan sejak tanggal 26 Maret 1875, jumlah luas lahannya menjadi 500 bau. Pada akhir tahun 1879, luas lahan perkebunan yang telah berhasil ditanami kopi telah mencapai 375 bau. Persil perkebunan yang terdapat di Cibungur ini sekaligus pula merupakan satu-satunya persil perkebunan yang disewa selama 20 tahun. Di persil Ongkrak, yang dimiliki oleh *ondernemer* J.F. den Dekker dengan cara *erfpacht* sejak tanggal 27 Juli 1875 dan 18 Desember 1877, luas lahan perkebunan yang digunakan untuk membudidayakan kopi berjumlah 322 bau. Di persil Ardenburg, yang dimiliki *ondernemer* P. Zeper Jhz. dan Cramerus & Co., melalui cara *erfpacht* sejak tanggal 12 Mei 1877 dan 2 November 1878, total luas lahan yang digunakan untuk perkebunan kopi sebesar 389 bau. Di persil Malingut, yang disewa secara *erfpacht* sejak 7 Januari 1878, luas lahan perkebunan yang digunakan untuk membudidayakan kopi berjumlah 385 bau. Di persil Sukamaju, yang disewa secara *erfpacht* sejak tanggal 29 Maret 1878, luas lahan perkebunan swasta mencapai 264 bau. Di persil Cislak, luas tanah perkebunan yang disewa perkebunan swasta hingga akhir tahun 1879 berjumlah 1025 bau, namun yang berhasil ditanami kopi baru mencapai 130 bau. Persil tanah perkebunan yang

⁹ Mubyarto, dkk. 1992. Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan; Kajian Sosial Ekonomi. Yogyakarta: Aditya Media.; Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo. 1994. Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi. Yogyakarta: Aditya Media.

terdapat di Cicalak ini sekaligus merupakan persil tanah perkebunan terluas yang dikuasai perkebunan swasta. Persil Cicalak ini dimiliki oleh ondernemer B.B.J. Crone dan F.C. Philippeau dengan cara erfpacht sejak tanggal 23 Maret 1876.

Tanah perkebunan terluas kedua di Sukabumi terdapat di Distrik Jampang Tengah. Di distrik ini, tanah-tanah perkebunan tersebar di enam persil, yakni persil Cicalobak, Sindangsari, Caringin, Panumbangan, Gunung Sari, dan Gunung Malang. Pada umumnya, persil-persil tanah perkebunan yang terdapat di Distrik Jampang Tengah disewa melalui erfpacht. Satu-satunya persil di Distrik Jampang Tengah yang tidak disewa secara erfpacht tetapi hanya disewa untuk kurun waktu 20 tahun adalah persil Panumbangan, yang mulai disewa sejak tanggal 17 Agustus 1877. Di Distrik Cicurug, luas lahan yang disewa perkebunan-perkebunan swasta dengan cara erfpacht hingga akhir 1879 mencapai luas 1033 bau. Tanah-tanah milik perkebunan swasta ini terdapat di dua persil, yaitu Cilorama dan Cibaregbeg. Dari kedua persil tersebut, persil yang memiliki luas lahan perkebunan terbesar adalah persil Cilorama, yang disewa secara erfpacht selama 75 tahun sejak tanggal 31 Mei 1875 dan tanggal 15 Januari 1878.

Di Distrik Cimahi, dari 701 bau tanah perkebunan swasta, sebanyak 433 bau terdapat di persil Panglesiran. Sisanya, seluas 268 bau terdapat di persil Argalingga. Kedua persil yang masing-masing dimiliki L. J. van Beusichem serta G.F. van Polanen Petel dan E.C.C. Boutmij ini, ada yang disewa secara erfpacht dan ada pula yang disewa hanya untuk jangka waktu 20 tahun. Persil yang disewa secara erfpacht terdapat di Panglesiran dan erfpacht dimulai sejak tanggal 8 Mei 1876 dan tanggal 8 Februari 1878. Persil yang disewa selama 20 tahun terletak di Argalingga. Sewa persil selama 20 tahun ini dimulai sejak tanggal 15 Juli 1872.

Memasuki dasawarsa kesembilan abad ke-19, sebagaimana halnya perkebunan kopi swasta, perkebunan lain yang membudidayakan tanaman komersial di luar kopi, khususnya kina dan teh, juga terlihat mengalami peningkatan. Untuk perkebunan kina, di Sukabumi terdapat lima perkebunan, yang tersebar di Distrik Cicurug, Jampang Tengah, dan Gunung Parang. Untuk perkebunan teh swasta, Sukabumi memiliki 13 perkebunan. yang tersebar di lima distrik, yaitu Distrik Cimahi, Ciheulang, Cicurug, Pelabuhan, dan Distrik Jampang Tengah.

Memasuki akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, jumlah perkebunan swasta yang ada di Sukabumi memperlihatkan peningkatan yang cukup berarti. Bahkan, pada akhir dasawarsa kedua abad ke-20, jumlah perkebunan swasta yang ada di Sukabumi mencapai 474 perkebunan.¹⁰ Peningkatan jumlah perkebunan swasta ini kemudian diikuti pula oleh munculnya tanaman komersial baru yang

¹⁰ Arsip Nasional Republik Indonesia. 1976. Memori Serah Terima Jabatan 1921-1930 (Jawa Barat), Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No. 8. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

dibudidayakan oleh perkebunan-perkebunan swasta di Sukabumi, yakni karet. Seiring dengan terjadinya penambahan jumlah perkebunan swasta, bertambah pula jumlah pemasukan yang diterima pemerintah dari hasil menyewakan tanah. Pada tahun 1916, jumlah pemasukan yang diterima pemerintah dari hasil menyewakan tanah terhadap perkebunan-perkebunan swasta mencapai f. 145.359.¹⁴ Memasuki tahun 1920, jumlah pemasukan yang diperoleh pemerintah meningkat menjadi f. f. 165.486.²⁴

Upaya Pemerintah Kolonial dalam memberdayakan wilayah sekitar Kawasan Ekosistem Halimun juga ditandai dengan dibukanya jalur jalan kereta api dari Batavia (Jakarta) hingga Bandung, yang melalui daerah-daerah perkebunan. Menyusul dibukanya jalur Batavia-Buitenzorg pada tanggal 31 Januari 1873, selanjutnya dibuka jalur Buitenzorg-Cicurug sepanjang 27 kilometer pada tanggal 5 Oktober 1881, jalur Cicurug-Sukabumi sepanjang 30 kilometer pada tanggal 21 Maret 1882, Jalur Sukabumi-Cianjur sepanjang 39 kilometer pada tanggal 10 Mei 1883, Jalur Cianjur-Bandung sepanjang 59 kilometer 17 Mei 1884.¹¹ Dengan pembangunan ini, Cianjur-Buitenzorg yang semula memerlukan waktu 8 jam dengan kereta kuda dapat ditempuh hanya dalam waktu 2,5 jam dan Cianjur-Bandung yang semula 5,5 jam menjadi 2 jam. Untuk mengoptimalkan jalur, pada jalur Buitenzorg-Cianjur dibangun dua stasion dan 11 halte. Dua stasion dibangun di Sukabumi dan Cianjur. Sebelas halte dibangun di Cicurug, Parung Kuda, Cibadak, Karang Tengah, Cisaat, Gandasoli, Cirengas, Lampegan, Cibeber, dan Cilaku.

Seiring dengan pembangunan jalur kereta api di wilayah lainnya, sejak tahun 1894, jalur yang melintasi Bogor dan Sukabumi tersambung dengan jalur yang terdapat di Jawa bagian Tengah, yakni jalur Cilacap-Yogyakarta. Tersambungunya jalur Bogor-Sukabumi dengan jalur Cilacap-Yogya juga diikuti dengan tersambungunya lijn Barat (*westerlijnen*) yakni trayek Batavia-Yogyakarta dengan lijn Timur (*Oosterlijnen*) yaitu trayek Surabaya-Yogyakarta. Jalur Cilacap-Yogya mulai operasional 20 Juli 1887. Perkembangan yang relatif pesat dalam sarana transportasi ini secara otomatis memperlancar proses pemasaran berbagai komoditi perkebunan dari daerah-daerah di seputar Kawasan Ekosistem Halimun ke luar negeri, baik melalui pelabuhan yang ada di Batavia maupun pelabuhan yang ada di Cilacap.

Asal Usul Komunitas Kasepuhan

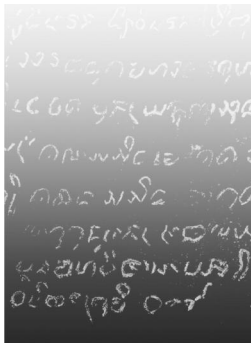
Kasepuhan yang berarti adat kebiasaan tua atau adat kebiasaan nenek moyang. Setidaknya ada dua komunitas kasepuhan yang mendiami Kawasan Ekosistem Halimun. Pertama, Masyarakat Adat Baduy. Kedua, Masyarakat Adat Kasepuhan

¹¹ S.A. Reitsma. 1912. *De Wegen in de Preanger*. Bandung: G. Kolff & Co.; S.A. Reitsma. 1928. *Korte Geschiedenis der Nederlandsch-Indische Spoor en Tramwegen*. Weltevreden: G. Kolff & Co.

Banten Kidul. Komunitas ini tampak dalam tata cara kehidupan yang masih secara ketat menjalankan apa yang disebut tatalaksana karuhun. Komunitas masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul yang hidup di Kawasan Ekosistem Halimun dapat ditemukan di beberapa perkampungan, baik yang ada di Banten, Bogor, maupun Sukabumi. Di Banten, komunitas Kasepuhan, antara lain terkonsentrasi di Kecamatan Bayah (seperti Tegallumbu, Cicarucub, Cisungsang, Cicemet, dan Sirnagalih) dan Kecamatan Jasinga (seperti Gajrug, Sajira, dan Guradog). Di Bogor, antara lain terkonsentrasi di Kecamatan Cigudeg (seperti Urug, Pabuaran, dan Cipatat Kolot). Di Sukabumi, antara lain terkonsentrasi di daerah pedalaman Kecamatan Ciselok dan sepanjang Sungai Cibareno Girang.¹²

Berbeda dengan asal usul masyarakat adat Baduy, dengan berpijak pada agama dan kepercayaan yang masih berkembang di antara warga, untuk masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul setidaknya ada tiga kemungkinan tentang asal usul komunitas yang dapat dikedepankan. Pertama, komunitas ini berasal dari masyarakat Kerajaan Sunda Pajajaran yang “mengungsi” ke pedalaman atau wilayah pinggir setelah pusat Kerajaan Hindu-Budha terakhir di Jawa Barat tersebut dihancurkan pasukan gabungan dari Kerajaan Banten dan Cirebon pada tahun 1579. Kedua, komunitas kasepuhan ini berasal dari mantan anggota pasukan dan masyarakat yang setia dengan Sultan Ageng Tirtayasa yang menjadikan wilayah di seputar Kawasan Gunung Halimun (yang termasuk wilayah Lebak dan Bogor) sebagai daerah gerilya saat berlangsung perang berkepanjangan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya, Sultan Haji, pada abad ke-17. Ketiga, komunitas kasepuhan bisa juga berasal dari para mantan anggota Pasukan Ki Tapa dan Ratu Bagus Buang, yang sewaktu mengadakan perang dengan VOC pada abad ke-18, menjadikan wilayah Kawasan Gunung Halimun sebagai daerah basis perlawanan.

¹² Kusnaka Adimihardja. 1992. *Kasepuhan Yang Tumbuh Di Atas Yang Luruh: Pengelolaan Lingkungan Secara Tradisional di Kawasan Gunung Halimun Jawa Barat*. Bandung: Tarsito.



Kebudayaan Daerah di Jawa Barat: Suatu Tinjauan Historis Prospektif*

Pengantar

Kebudayaan secara sederhana dapat dipahami sebagai hasil karya, karsa, dan cipta manusia. Dengan demikian, kebudayaan akan selalu berhubungan dengan manusia, baik sebagai arsitek pembuat dan penciptanya. Kebudayaan ada selama ada pendukungnya, yakni manusia itu sendiri. Dalam konteks keindonesiaan, kebudayaan pada dasarnya bisa dibagi atas kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah. Berkaitan dengan kebudayaan ini, Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945, menyebutkan, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Selanjutnya Pasal 32 ayat 2 UUD 1945 menyatakan, “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”.

Pada bagian penjelasan, secara eksplisit dinyatakan bahwa “kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi daya rakyat Indonesia seluruhnya”. Sementara itu, “kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia”.

Dari uraian tersebut, secara implisit dinyatakan bahwa kebudayaan nasional pada dasarnya berakar dari kebudayaan daerah. Adapun kebudayaan daerah dapat dipahami sebagai kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki, didukung, dan dikembangkan oleh setiap suku bangsa di seluruh wilayah Indonesia. Dalam kaitannya dengan kebudayaan daerah di Jawa Barat maka hal itu dapat dipahami sebagai kebudayaan suku bangsa yang ada di Jawa Barat. Secara lebih spesifik

* Makalah disampaikan sebagai materi presentasi dalam kegiatan Pembinaan dan Orientasi Budaya Untuk Media Massa Jawa Barat, yang diadakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Barat, bertempat di Hotel Baltika, Bandung, 28 – 29 Juni 2006.

lagi, Jawa Barat disini tidak ditempatkan sebagai sebuah wilayah geografis Jawa dibagian Barat tetapi dipahami sebagai sebuah wilayah administratif yang bernama Propinsi Jawa Barat. Dengan demikian, kebudayaan daerah di Jawa Barat dipahami sebagai kebudayaan daerah yang ada di propinsi Jawa Barat.

Eksistensi Propinsi Jawa Barat

Jawa Barat sebagai nama sebuah wilayah administratif tidak pelak lagi baru dikenal pada abad ke-20. Hal ini terjadi ketika Pemerintah Kolonial Belanda melalui *Bestuurs hervormingswet* atau Undang Undang Perubahan Pemerintahan yang dikeluarkan pada tahun 1922 (*Staatsblad* 1922/216) melakukan penataan administrasi pemerintahan di awal abad ke-20, dengan membentuk *gewest* (wilayah administratif) gaya baru yang disebut *provincie*. Secara hirarkis, wilayah administrasi setingkat *provincie* ini menempati posisi paling tinggi sesudah pemerintah pusat. *Provincie* terbagi lagi atas wilayah karesidenan (kemudian *afdeling*) serta daerah-daerah otonom *regentschap* (kabupaten) serta *stadsgemeente* (kotapraja).

Keberadaan Jawa Barat sebagai sebuah propinsi secara resmi dibentuk pada tanggal 1 Januari 1926 dan tertuang dalam *Staatsblad* tahun 1925 Nomor 378 tanggal 14 Agustus. Sebagai ibukota propinsi ditetapkan Batavia. Saat dibentuk tahun 1926, Jawa Barat terbagi atas 5 karesidenan, 18 kabupaten, dan 6 kotapraja.

Usia propinsi Jawa Barat produk pemerintah kolonial Belanda ini dapat dikatakan berakhir pada tahun 1942 setelah Jepang menghapus wilayah administrasi pemerintahan setingkat propinsi. Sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 27 Tahun 1942 yang mulai berlaku tanggal 8 Agustus 1942, pemerintah pendudukan Jepang hanya mengadopsi Syu (karesidenan) sebagai pemerintah daerah tertinggi di Jawa, termasuk di dalamnya Jawa Barat. Namun demikian, pimpinan Syu (*syucokan*) di era Jepang ini kedudukannya jauh lebih luas dibanding pimpinan karesidenan (*residen*) di era pemerintah kolonial Belanda. Sebagai pimpinan daerah tertinggi yang bersifat otonom, *syucokan* tidak hanya memegang kekuasaan eksekutif tetapi juga legislatif. Di era Jepang ini, wilayah Jawa Barat terbagi atas lima syu, yaitu Banten Syu, Jakarta Syu, Bogor Syu, Priangan Syu, dan Cirebon Syu.¹

Kelahiran kembali Jawa Barat sebagai sebuah propinsi terjadi pada tanggal 19 Agustus 1945 dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Di samping Jawa Barat, terdapat 7 propinsi lain yang dibentuk dalam waktu bersamaan, yakni, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.

¹ Edi S. Ekadjati, et.al., *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jawa Barat*. (Bandung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1980/1981), hal. 15.

Dalam perkembangannya semasa kemerdekaan, secara administratif kewilayahan, Propinsi Jawa Barat mengalami perubahan-perubahan yang sangat dinamis. Perubahan tidak hanya ditandai oleh adanya penambahan kabupaten dan kota baru tetapi juga oleh berkurangnya luas wilayah administratif propinsi Jawa Barat. Pengurangan wilayah administratif propinsi Jawa Barat terjadi pada tahun 2000 atau tepatnya sejak 4 Oktober 2000, yang ditandai oleh berpisahnya Banten sebagai bagian propinsi Jawa Barat sebagaimana diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR² dan tampil menjadi propinsi tersendiri berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2000 tertanggal 17 Oktober 2000. Lahirnya propinsi Banten secara otomatis membuat propinsi Jawa Barat harus rela melepas beberapa wilayah administratif di bawahnya, yakni, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon. Setelah terjadi berbagai perubahan selama kurang lebih 60 tahun kemerdekaan, propinsi Jawa Barat kini memiliki 16 kabupaten dan 9 kota, yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.

Memetakan Sejarah Kebudayaan Daerah

Berpijak pada perkembangan wilayah sebagaimana terurai di atas maka kebudayaan daerah yang perlu dipetakan adalah kebudayaan daerah yang ada di Propinsi Jawa Barat sebagaimana perkembangannya yang paling kontemporer. Untuk memetakan itu semua tentu bukanlah merupakan hal yang mudah. Permasalahan pertama yang akan muncul apakah pemahaman tentang kebudayaan daerah yang ada di Propinsi Jawa Barat tersebut identik dengan kebudayaan Sunda? Mengingat mayoritas etnis yang mendiami wilayah tersebut adalah etnis Sunda. Lantas, kalau kebudayaan daerah yang ada di Propinsi Jawa Barat tersebut tidak bisa direpresentasikan sebagai hanya menunjuk kepada kebudayaan Sunda, menunjuk kemanakah kebudayaan daerah dimaksud? Agar tidak terjebak dalam polemik berkepanjangan, untuk mudahnya kebudayaan daerah tersebut disamping merujuk pada Kebudayaan Sunda juga merujuk pada kebudayaan lain yang ada di Propinsi Jawa Barat, yakni “kebudayaan Cirebon”.

² Nina H. Lubis, *Banten Dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara*. (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2003), hal. 234.

Permasalahan selanjutnya yang tidak kalah rumit adalah, bagaimanakah sebenarnya peta kebudayaan daerah (Sunda dan Cirebon) yang ada di Jawa Barat? Bila pertanyaan sudah sampai kepada hal ini, maka jawabannya amat sangat tidak sederhana, untuk tidak mengatakan, belum ada jawaban tegas yang bisa disampaikan. Sebaliknya, jawaban akan menjadi lain manakala kebudayaan hanya dimaknai dalam perspektif yang sangat sempit, yakni sebagai kesenian atau hanya dalam bentuk wujud fisik. Padahal, dilihat dari wujudnya, kebudayaan mencakup tiga wujud, yakni, wujud fisik (sistem materi), wujud tingkah laku (sistem sosial), dan wujud ide (sistem budaya). Sementara dilihat dari unsumnya, setidaknya ada tujuh unsur kebudayaan yang bersifat universal, yakni sistem dan organisasi kemasyarakatan; sistem mata pencaharian; sistem pengetahuan; sistem kepercayaan dan upacara-upacara keagamaan; sistem teknologi, peralatan, dan perlengkapan hidup; sistem bahasa; dan sistem kesenian.

Secara umum dapat dikatakan sejarah kebudayaan daerah di Jawa Barat atau sejarah kebudayaan Sunda (dan Cirebon) atau sejarah kebudayaannya *urang Sunda*³ dan Cirebon mencakup kurun waktu yang sangat panjang, yakni dari masa prasejarah hingga masa sejarah. Masa prasejarah dalam sejarah Kebudayaan Sunda (dan Cirebon) berakhir manakala ditemukan bukti-bukti tertulis berupa prasasti dari kerajaan Tarumanegara. Bukti-bukti peninggalan kebudayaan Sunda (dan Cirebon) di era prasejarah, antara lain ditemukan di Cianjur (Gunung Padang, Pasir Pogor, Bukit Tongtu, Bukit Kasur, Gunung Putri, Lembah Duhur, Pasir Manggu, dan Pasir Gada), Sukabumi (Pangguyangan, Tugu Gede, Ciarca, Salak Datar, dan Batu Jolang), Bandung, Garut (Cimareme), Kuningan (Cipari, Cigadung, Cangkung, Cibuntu, Hululingga, Darmaloka, Batu Tilu, Panyusupan, Cibubur, Balongkagungan, dan Nagog), dan Ciamis (Karangkamulyan).⁴

³ Urang Sunda secara sederhana dapat diartikan sebagai orang yang mengaku dirinya dan diakui oleh orang lain sebagai orang Sunda. Dalam pengertian tersebut setidaknya tercakup dua kriteria besar yang dapat dijadikan pegangan untuk menyebut seseorang sebagai urang Sunda atau bukan urang Sunda. Kriteria pertama didasarkan atas keturunan atau hubungan darah. Dengan demikian, seseorang dikatakan urang Sunda apabila orang tuanya, baik dari pihak ayah maupun ibu, atau keduanya adalah orang Sunda, terlepas dimana ia berada atau dibesarkan. Kriteria kedua didasarkan atas sosial budaya. Seseorang dikatakan urang Sunda apabila ia dibesarkan dalam lingkungan sosial budaya Sunda dan dalam hidupnya menghayati serta mempergunakan norma-norma dan nilai budaya Sunda. Dalam kriteria kedua ini, yang dianggap penting adalah tempat tinggal, kehidupan sosial budaya, dan sikap orangnya. Edi S. Ekadjati, *Kebudayaan Sunda (Suatu Pendekatan Sejarah)*. (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hal.7-8; Suwarsih Warnaen, et.al., *Pandangan Hidup Orang Sunda*. (Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi) Depdikbud, 1987), hal. 1.

⁴ Nina H. Lubis, dkk. *Sejarah Tatar Sunda*. Jilid I. (Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, 2003), hal. 30-31.

Era sejarah dalam sejarah Kebudayaan Sunda (dan Cirebon) yang dimulai sejak abad ke-5 atau sejak ditemukannya prasasti kerajaan Tarumanegara telah berlangsung hingga lebih dari 15 abad. Mengingat rentang waktu yang panjang tersebut tentu bukanlah merupakan hal yang mudah untuk bisa mengenal dengan baik sejarah kebudayaan Sunda (dan Cirebon). Terlebih lagi realitas memperlihatkan bahwa pada beberapa babakan, perjalanan sejarah kebudayaan Sunda (dan Cirebon) hanya menyisakan sumber-sumber sejarah yang amat sangat terbatas atau bahkan tidak menyisakan sumber sama sekali. Namun demikian, untuk memudahkan pengenalan, secara umum sejarah kebudayaan Sunda (dan Cirebon) dapat didekati dengan membaginya dalam dua periodisasi besar, yakni masa sebelum kemerdekaan dan masa sesudah kemerdekaan.

Masa sebelum kemerdekaan dalam sejarah kebudayaan Sunda (dan Cirebon) meliputi masa Hindu-Budha, masa Islam, masa penetrasi Barat, dan masa penetrasi Jepang. Masa Hindu Budha antara lain ditandai oleh munculnya dua kerajaan besar, yakni kerajaan Tarumanegara (Abad V – VII)⁵ dan kerajaan Sunda (VII – XVI).⁶ Masa Islam antara lain ditandai oleh munculnya kesultanan Cirebon. Masa

⁵ Setidaknya ada tujuh prasasti yang berhasil diketemukan berkaitan dengan keberadaan Kerajaan Tarumanegara. Pertama, Prasasti Tugu. Ditemukan di desa Tugu dekat Cilincing, Jaktim, kini tersimpan di Museum Nasional. Kedua, Prasasti Giaruteun. Ditemukan dipinggir sungai Ciaruteun, Kampung Muara, Kabupaten Bogor, kini berada di lokasi yang tidak jauh dari tempat penemuan. Ketiga, Prasasti Kebon Kopi. Ditemukan tidak jauh dari tempat ditemukannya Prasasti Ciaruteun. Keempat, Prasasti Jambu (Pasir Koleangkak). Ditemukan di sebuah bukit yang bernama Koleangkak di daerah perkebunan Jambu, Desa Parakanmuncang, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Kelima, Prasasti Pasir Awi. Ditemukan di Kabupaten Bogor, tidak jauh dari lokasi penemuan prasasti lainnya. Keenam, Prasasti Pasirmuara. Ditemukan di Kabupaten Bogor, tidak jauh dari lokasi penemuan prasasti lainnya. Ketujuh, Prasasti Cidanghiang. Ditemukan di Kampung Lebak, di Pinggir Sungai Cidanghiang, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten.

⁶ Sebagaimana halnya kerajaan Tarumanegara, keberadaan kerajaan Sunda di Tatar Sunda dibuktikan oleh temuan beberapa prasasti, seperti, pertama, Prasasti Canggal. Ditemukan di halaman permandian Gunung Wukir, Magelang, berangka tahun 654 Saka/732 M, mencantumkan nama raja Sanjaya dan Silsilahnya). Kedua, Prasasti Rakryan Juru Pangambat. Ditemukan di Bogor, berangka tahun 854 Saka/932 M, mencantumkan raja Sunda. Ketiga, Prasasti Cibadak/Sang Hyang Tapak. Ditemukan di Cibadak, Sukabumi, menyebut Sri Jayabhupati sebagai Raja Sunda serta larangan menangkap ikan di daerah tertentu yang disebut Sunda Sembawa serta kutukan bagi yang melanggarnya. Keempat, Prasasti-prasasti Kawali. Ditemukan di Situs Astana Gede, Kawali, Ciamis, berasal dari abad ke-14 M, salah satu prasastinya menyebut nama gelar Prabu Wastu. Kelima, Prasasti Batu Tulis. Ditemukan di Batutulis Bogor, berangka tahun 1455 Saka/1533 M, di dalamnya mencantumkan tiga orang raja Sunda, yakni Prabu Guru Dewataprana alias Sri Baduga Maharaja atau Sri Ratu Dewata, Rahiyang Dewa Niskala, dan Rahiyang Niskala Wastukencana. Ketiganya memiliki tali ikatan anak, ayah, dan kakek. Keenam, Prasasti-prasasti Kabantenan. Berasal dari abad ke-16, kelima buah prasastinya berisi penetapan wilayah-wilayah tertentu sebagai daerah yang dibebaskan dari pajak atas dasar kesucian atau kepentingan keagamaan. Di luar prasasti-prasasti di atas, berbeda dengan kerajaan Tarumanegara, keberadaan kerajaan Sunda juga dibuktikan oleh beberapa sumber tertulis lainnya, seperti, Naskah Carita Parahyangan (berasal

penetrasi Barat di Jawa Barat ditandai oleh munculnya rezim penguasa Barat, mulai dari VOC, Inggris, hingga pemerintah kolonial Belanda. Masa penetrasi Jepang ditandai oleh berkuasanya pemerintah pendudukan Jepang di Jawa Barat.

Mencermati Postur Kebudayaan Daerah

Dari deskripsi singkat perjalanan sejarah kebudayaan Sunda (dan Cirebon) ada beberapa peristiwa yang bisa diangkat sebagai tonggak penting dalam perkembangan perjalanan sejarah kebudayaan Sunda (dan Cirebon). Beberapa di antara peristiwa penting tersebut adalah kelahiran Kerajaan Tarumanegara. Kelahiran kerajaan pertama di Jawa ini memiliki makna penting karena menjadi pertanda tentang tingginya peradaban *urang* Sunda (dan Cirebon). Keunggulan peradaban *urang* Sunda (dan Cirebon) ini dibuktikan dengan adanya realitas yang tak terbantahkan bahwa *urang* Sunda (dan Cirebon) merupakan kelompok etnis pertama di Nusantara yang bersentuhan dengan tulisan. Tujuh prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara membuktikan semua itu. Dengan demikian dari realitas sejarah tersebut secara eksplisit terlihat bahwa *etnis Sunda (dan Cirebon) merupakan etnis generasi pertama yang melek huruf*. Betapa bermaknanya kapasitas *urang* Sunda (dan Cirebon) dalam bersentuhan dengan tulisan telah membawa bangsa ini ke dalam sebuah babakan peradaban baru yang disebut babakan sejarah. Tegasnya, bukti persentuhan *urang* Sunda (dan Cirebon) dengan tulisan ini kemudian dijadikan titik tolak era sejarah dalam sejarah kebudayaan Indonesia.

Bila Tarumanegara mampu memberi eksplanasi tentang tingginya peradaban *urang* Sunda (dan Cirebon) dalam budaya tulis maka *kerajaan Sunda dengan segala keterbatasan sumber yang dimilikinya memperlihatkan fenomena tentang eksistensi sebuah kerajaan Hindu-Budha yang paling panjang usianya di Indonesia, yakni selama 909 tahun atau sejak 670 M hingga 1579 M*. Selama lebih dari sembilan abad eksistensinya, kerajaan Sunda mampu mewariskan ideologi Sunda, yakni berupa nilai luhur kerohanian dan tipe ideal budaya yang dianut oleh *urang* Sunda. Ideologi Sunda produk kerajaan Sunda tersebut antara lain berwujud aksara, bahasa, etika, adat istiadat (hukum), lembaga kemasyarakatan dan sistem kepercayaan.⁷ Pedoman hidup yang digunakan *urang* Sunda semasa kerajaan Sunda tampak bukan sekedar wacana tetapi benar-benar dijadikan sebagai sebuah pegangan untuk berpikir dan bertindak. Hal ini setidaknya terlihat dalam proses peralihan kekuasaan di kerajaan

dari Abad ke-16), Naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian (berangka tahun 1440 Saka/1518 M, berisi ajaran kesusilaan, yang di dalamnya memuat norma-norma kehidupan yang mengatur pola tingkah laku manusia pada masa kerajaan Sunda, khususnya pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja), Catatan Tomi Pires, dan Catatan Joao de Barros.

⁷ Edi S. Ekadjati, *Kebangkitan Kembali Orang Sunda: Kasus Paguyuban Pasundan 1913-1918*, (Bandung: Kiblat Buku Utama, 2004), hal. 22.

Sunda. Dari 39 kali suksesi kepemimpinan di kerajaan Sunda, tiga suksesi di antaranya terjadi sebagai akibat adanya pelanggaran raja yang berkuasa terhadap kaidah moral yang berlaku.⁸ Satu di antaranya karena menikahi *estri larangan*, yakni wanita yang telah bertunangan atau telah menerima lamaran untuk diperistri.⁹

Setelah keruntuhan kerajaan Sunda, perjalanan sejarah kebudayaan Sunda (dan Cirebon) selanjutnya secara eksplisit memberikan gambaran tentang terjadinya mondialisasi atau globalisasi di Jawa Barat. Ada dua kekuatan besar yang telah mengakibatkan *urang* Sunda (dan Cirebon) mau tidak mau larut dalam mondialisasi, yakni Islam dan Barat. Di tengah mondialisasi tersebut, *urang* Sunda (dan Cirebon) pun dihadapkan oleh datangnya pengaruh dari Jawa (Mataram).

Kehadiran Islam di Jawa Barat, yang benih-benihnya sudah muncul sejak sebelum abad ke-15 dan memperlihatkan bentuknya yang tegas pada abad ke-16 secara perlahan tapi pasti membawa pengaruh pada ideologi Sunda. Satu di antaranya yang paling fenomenal adalah tertanggalkannya sistem kepercayaan lama¹⁰ dan tampilnya Islam sebagai agama *urang* Sunda (dan Cirebon). Uniknnya, berbeda dengan Hindu-Budha, Islam di Jawa Barat melebarkan sayapnya dari kalangan bawah terlebih dahulu baru kelompok elit. Semasa Islam menyebarkan tembok-tembok kerajaan, Islam pun tidak dipandang sebagai ancaman.¹¹ Kondisi

⁸ Berkaitan dengan suksesi kepemimpinan tersebut setidaknya ada lima model suksesi kepemimpinan yang terjadi. Pertama, dari raja kepada anak kandung laki-laki (25 kali). Kedua, dari raja kepada menantu (8 kali). Ketiga, dari raja kepada adik kandung (2 kali). Keempat, dari raja kepada saudara ipar (3 kali). Kelima, dari raja kepada keponakan (1 kali). Sementara itu dari 38 kali rotasi kekuasaan yang diketahui faktor penyebabnya, di luar tiga kali suksesi yang diakibatkan oleh pelanggaran terhadap kaidah moral, sebagian besar atau sebanyak 26 kali diakibatkan oleh faktor usia. Di luar itu, masih terdapat tiga faktor penyebab terjadinya rotasi kekuasaan, yaitu, rotasi kekuasaan yang diakibatkan oleh adanya kudeta (5 kali), rotasi kekuasaan yang diakibatkan oleh pindahnya raja ke kerajaan lain (1 kali), serta rotasi kekuasaan yang diakibatkan oleh terbunuhnya raja yang tengah memerintah (3 kali). Untuk uraian yang lebih lengkap, lihat, Reiza D. Dienaputra, Kerajaan SundaPajajaran: Studi tentang Suksesi Kepemimpinan di Kerajaan Sunda Pajajaran, (Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, 1993), hal. 19-38.

⁹ Setelah terjadinya perang Bubat, wanita yang berasal dari lingkungan Kerajaan Majapahit juga dimasukkan dalam wanita *larangan*, sehingga tabu untuk dinikahi. Atja dan Saleh Danasasmita, Sanghyang Siksakanda Ng Karesian: (Naskah Sunda Kuno Tahun 1518 M). (Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, 1981), hal. 54-55.

¹⁰ Sebelum dan selama era Hindu-Budha, sistem kepercayaan yang juga berkembang di tatar Sunda adalah animisme. Masuknya Islam, secara perlahan tapi pasti menggeser sistem kepercayaan yang dianut *urang* Sunda sebelumnya. Namun demikian, bagi *urang* Sunda yang tidak mau menerima Islam, menjelang masa-masa akhir keruntuhan Kerajaan Sunda memisahkan diri dari komunitas Sunda kebanyakan dan mengalienasikan diri ke wilayah pedalaman. Kini, komunitas tersebut dapat ditemukan di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Adapun agama dan kepercayaan yang dianut mereka adalah Sunda Wiwitan (Wiwitan= mula pertama, asal, pokok, jati) atau agama Sunda Asli. Dalam Carita Parahyangan dikenal dengan nama agama Jatisunda. Edi S. Ekadati, op. cit., hal. 54-55, 72-73.

ini bisa jadi memperlihatkan sebuah realitas bahwa *urang* Sunda (dan Cirebon) merupakan komunitas yang cukup rasional dalam menyikapi kehadiran ajaran baru atau juga bisa dimaknai bahwa Hindu-Budha yang saat itu menjadi “kepercayaan” kerajaan hanya mengakar di lapis penguasa saja dan belum menyentuh lapis bawah atau rakyat kebanyakan sehingga manakala Islam disebarkan secara intensif oleh para tokohnya, *urang* Sunda (dan Cirebon) sangat terbuka menerimanya. Terlebih Islam mengembangkan prinsip-prinsip ajaran yang bersifat egaliter dan tidak membeda-bedakan manusia ke dalam kelas-kelas tertentu.

Di tengah derasnya pengaruh Islam di Jawa Barat dalam waktu yang relatif bersamaan, datang pula pengaruh dari budaya Jawa. Budaya Jawa masuk ke Jawa Barat melalui dua cara. Pertama, melalui kegiatan perdagangan, pertanian, dan migrasi di daerah pesisir utara. Kedua, melalui prajurit dan priyayi Mataram semasa terjadinya ekspansi Mataram di Jawa Barat. Kebudayaan Jawa yang dibawa prajurit dan priyayi Mataram merupakan kebudayaan Jawa pedalaman yang sarat dengan nilai-nilai feodal. Dampak dari infiltrasi budaya Jawa di Jawa Barat adalah kentalnya pengaruh budaya feodal Jawa di Jawa Barat, seperti misal sistem *unggah-ungguh basa* dalam bahasa Jawa keraton muncul dalam bahasa Sunda berupa *undak-unduk basa* yang mulanya berkembang di pendopo-pendopo kabupaten.

Bahkan, lebih dari itu, penggunaan bahasa Sunda sebagai bahasa tulisan sempat tergeser sekian lama oleh bahasa Jawa dan baru bisa bangkit kembali sebagai bahasa tulisan menjelang akhir abad ke-19. Itupun berkat prakarsa K.F. Holle (1829-1896), orang Belanda yang memiliki perhatian besar terhadap perkembangan kebudayaan Sunda. Nasib lebih tragis dialami aksara Sunda. Setelah sempat teralienasikan ke daerah pegunungan yang terpencil (Kabuyutan Gunung Larang Srimanganti di Lereng Gunung Cikuray, Garut Selatan), aksara Sunda harus mengakhiri hidupnya pada abad ke-18. Selanjutnya, peranannya digantikan oleh aksara Cacarakan yang dipinjam dari aksara Jawa (aksara Carakan), aksara Pegon yang dipinjam dari aksara Arab, dan aksara latin yang dipinjam dari budaya Eropa.¹² Di luar sistem bahasa, pengaruh budaya Jawa antara lain tampak

¹¹ Berdasarkan folklor dan sejarah Sunda dikenal adanya beberapa orang tokoh penyebar Islam di tatar Sunda dari generasi paling awal. Hingga kini keberadaan para tokoh tersebut masih dihormati oleh *urang* Sunda. Mereka adalah Syekh Quro di Karawang, Syekh Datuk Kahpi, Syekh Nurjati, dan Sunan Gunung Jati di Cirebon, serta Hasanudin di Banten. Di luar itu dikenal pula istilah Haji Purwa, yang memiliki makna sebagai orang yang menunaikan ibadah haji pertama kali. Ia adalah anggota keluarga keraton Kawali yang masuk Islam ketika sedang berniaga ke India dan kemudian menetap di Cirebon Girang. Edi S. Ekadjati, *Kebangkitan Kembali Orang Sunda: Kasus Paguyuban Pasundan 1913-1918*, (Bandung: Kiblat Buku Utama, 2004), hal. 23; J. Hageman Cz. “Geschiedenis der Soendalanden”, TBC, XVI (Batavia, 1867); Saleh Danasasmita, et.al., *Rintisan Penelusuran Masa Silam Sejarah Jawa Barat*. 4 Vols. (Bandung: Proyek Penerbitan Sejarah Jawa Barat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, 1983/1984).

¹² Edi S. Ekadjati, 2004, op. cit., hal. 26.

pula dalam sistem kemasyarakatan (tata krama) dan sistem mata pencaharian (dari berladang atau berhuma menjadi bersawah).¹³

Ketidakberdayaan *urang* Sunda (dan Cirebon) dalam menghadapi infiltrasi budaya Jawa bisa jadi diakibatkan oleh dua kondisi. Pertama, tidak membuminya ideologi Sunda produk kerajaan Sunda di kalangan *urang* Sunda kebanyakan atau dengan kata lain ideologi Sunda tersebut besar kemungkinan hanya tersebar secara *apik* di kalangan elit kerajaan sehingga belum menjadi identitas kebanyakan *urang* Sunda. Kedua, kuatnya hegemoni Mataram dalam berbagai bidang di Jawa Barat. Terlepas dari apapun faktor ketidakberdayaan tersebut, yang jelas sejak masuknya pengaruh Jawa, sejarah kebudayaan Sunda (dan Cirebon) memberikan eksplanasi tentang semakin beragamnya budaya asing yang mempengaruhi kehidupan *urang* Sunda (dan Cirebon). Lebih dari itu, sejak masuknya budaya Jawa dapat dikatakan sejak itu pula budaya kehidupan yang sarat dengan nilai-nilai feodal berkembang dengan subur di Jawa Barat.

Mondialisasi di era penetrasi Barat telah membawa perubahan besar bagi kehidupan *urang* Sunda (dan Cirebon). Salah satu implikasi dari mondialisasi adalah perubahan pada sistem pemerintahan. Secara bertahap diperkenalkan wilayah-wilayah administratif pemerintahan baru, seperti *residency*, *district*, *afdeling*, *gemeente*, *stadsgemeente*, *gemeenteraad*, *regentschapsraad*, dan kemudian *provincie*. Seiring dengan itu diperkenalkan pula jabatan-jabatan baru, seperti residen, asisten residen, *hoofddistrict*, dan *burgermeester*. Perubahan besar lainnya adalah masuknya Jawa Barat dalam pasar global dengan berdirinya perkebunan-perkebunan besar milik swasta, seperti perkebunan kopi, teh, karet, dan kina.

Mengiringi kemunculan perkebunan-perkebunan besar swasta, terjadi pula perubahan revolusioner dalam sistem transportasi, dengan diperkenalkannya transportasi kereta api. Pembangunan jalan kereta api di Jawa Barat dilakukan secara bertahap atau dimulai setelah jalur Batavia-Buitenzorg mulai operasional pada tanggal 31 Januari 1873. Tahap pertama pembangunan jalan kereta api memasuki pedalaman Jawa Barat dimulai dari Buitenzorg menuju Cicurug. Lintasan Buitenzorg-Cicurug sepanjang 27 kilometer ini berhasil diselesaikan pada tanggal 5 Oktober 1881. Lintasan kereta api selanjutnya yang dibangun adalah lintasan Cicurug-Sukabumi. Lintasan sepanjang 30 kilometer ini berhasil diselesaikan pada tanggal 21 Maret 1882. Pembangunan jalan kereta api tahap ketiga dilakukan untuk menghubungkan Sukabumi dengan Cianjur. Pembangunan jalur jalan kereta api Sukabumi-Cianjur sepanjang 39 kilometer berhasil diselesaikan tanggal 10 Mei 1883. Tahap pembangunan jalan kereta api selanjutnya dilakukan untuk

¹³ Ibid.

menghubungkan wilayah Cianjur dengan ibukota Karesidenan Priangan, Bandung. Jalur jalan kereta api Cianjur-Bandung sepanjang 59 kilometer, secara resmi mulai dioperasikan sejak tanggal 17 Mei 1884.¹⁴

Dengan selesainya seluruh jalur lintasan kereta api yang menghubungkan Buitenzorg-Cianjur serta Cianjur-Bandung, secara otomatis sejak tahun 1884 perjalanan dari satu daerah ke daerah lain di Jawa Barat waktunya bisa lebih dipersingkat. Sebagai contoh, untuk perjalanan Cianjur-Buitenzorg, yang semula memerlukan waktu tempuh 8 jam dengan menggunakan kereta kuda, sejak dibangunnya jalan kereta api, hanya memerlukan waktu selama 2,5 jam. Untuk perjalanan Cianjur-Bandung, yang semula memerlukan waktu 5,5 jam dengan menggunakan kereta kuda, dengan adanya sarana kereta api bisa dipersingkat menjadi sekitar 2 jam.¹⁵

Pengaruh keberadaan kereta api dalam kehidupan *urang* Sunda (dan Cirebon) terus berlangsung hingga abad ke-20. Terlebih manakala pemerintah kolonial tetap melakukan berbagai pembangunan prasarana dan sarana transportasi kereta api. Sebagai misal, perjalanan kereta api dari Bandung menuju Batavia dan sebaliknya dibuat jalur baru melalui Purwakarta dan Cikampek. Jalur ini mulai dioperasikan sejak 1 November 1934. Melalui jalur baru ini, perjalanan Bandung-Batavia waktu tempuhnya dapat dipersingkat menjadi hanya 2 $\frac{3}{4}$ jam.¹⁶ Untuk menampung besarnya minat penumpang yang menggunakan transportasi kereta api jalur Batavia-Bandung ini, perusahaan kereta api negara (*Staats Spoorwegen*), yang memiliki motto 4S (*Staats Spoor Steeds Sneller*),¹⁷ mengoperasikan sekaligus empat rangkaian kereta api dalam sehari. Pelayanan kereta api Batavia-Bandung ini kemudian dikenal dengan nama *vlugge vier* (empat cepat).

Tantangan Ke Depan

Dalam perkembangannya yang paling kontemporer, Kebudayaan Sunda (dan Cirebon) kini banyak mendapat gugatan kembali. Pertanyaan seputar eksistensi kebudayaan Sunda (dan Cirebon) pun sering kali mencuat ke permukaan. Apakah kebudayaan Sunda (dan Cirebon) masih ada? Kalau masih ada, siapakah pemiliknya? Pertanyaan seputar eksistensi kebudayaan Sunda (dan Cirebon) yang tampaknya provokatif tersebut, bila dikaji dengan tenang sebenarnya merupakan

¹⁴ S.A. Reitsma, *De Wegen in de Preanger*, (Bandung: G. Kolff & Co., 1912), hal. 16-17; S.A. Reitsma, *Korte Geschiedenis der Nederlandsch-Indische Spoor en Tramwegen*, (Weltevreden: G. Kolff & Co., 1928), hal. 24 dan 37.

¹⁵ *Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1864*, No. 54; *Tourist Guide to Buitenzorg, the Preanger and Central Java*, (Weltevreden: Official Tourist Bureau, 1913) hal. 27, 34, dan 42.

¹⁶ Haryoto Kunto, *Wajah Bandoeng Tempo Doeloe*, (Bandung: Granesia, 1984), hal. 101.

¹⁷ Gottfried Roelcke dan Gary Crabb, *All Around Bandung: Exploring the West Java Highlands*, (Bandung: Bandung Society for Heritage Conservation, 1994), hal. 25.

pertanyaan yang wajar-wajar saja. Mengapa demikian? Jawabannya sederhana, karena kebudayaan Sunda (dan Cirebon) dalam kenyataannya saat ini memang seperti kehilangan rohnya atau setidaknya tidak jelas arah dan tujuannya. Mau dibawa kemana Kebudayaan Sunda (dan Cirebon) tersebut?

Budayawan W. S. Rendra sewaktu berlangsungnya Kongres Kebudayaan IV di Jakarta, 29 Oktober – 3 November 1991, mengemukakan bahwa setidaknya ada tujuh daya hidup yang harus dimiliki oleh sebuah kebudayaan. Pertama, kemampuan bernafas. Kedua, kemampuan mencerna. Ketiga, kemampuan berkoordinasi dan berorganisasi. Keempat, kemampuan beradaptasi. Kelima, kemampuan mobilitas. Keenam, kemampuan tumbuh dan berkembang. Ketujuh, kemampuan regenerasi. Kemampuan bernafas dalam kebudayaan dimaknai sebagai kemampuan untuk mengolah hawa menjadi prana, menjaga kebersihan udara, mengharmonikan kegiatan kehidupan dengan irama nafas, serta menghilangkan hal-hal yang menimbulkan ketegangan pada pikiran yang berarti menimbulkan kesesakan pada nafas kehidupan. Kemampuan mencerna dimaknai sebagai kemampuan untuk mencernakan berbagai pengalaman dalam kehidupan. Kemampuan berkoordinasi dan berorganisasi dimaknai sebagai kemampuan berinteraksi secara sosial. Kemampuan beradaptasi dimaknai sebagai kemampuan kesadaran untuk secara kreatif mengatasi tantangan keadaan, tantangan zaman, dan tantangan berbagai ragam pergaulan. Kemampuan mobilitas dimaknai sebagai kemampuan untuk dengan kreatif menciptakan mobilitas sosial, politik, dan ekonomi, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal. Kemampuan tumbuh dan berkembang diartikan sebagai kemampuan kesadaran untuk selalu maju, selalu bertambah luas dan dalam wawasannya selalu menawarkan paradigma-paradigma yang segar dan baru. Kemampuan regenerasi dimaknai sebagai kemampuan untuk mendorong munculnya generasi baru yang kreatif dan produktif.¹⁸

Di samping daya hidup, unsur lain lagi yang juga penting dalam suatu kebudayaan adalah mutu hidup. Mutu hidup bukanlah merupakan kesempurnaan tetapi lebih dimaknai sebagai kewajiban. Adapun kewajiban dalam hidup manusia merupakan harmoni tiga mustika, yakni, tanggung jawab kepada kewajiban, idealisme, dan spontanitas. Tanggung jawab kepada kewajiban dimaknai sebagai sebuah kesadaran untuk selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban secara penuh sesuai dengan tanggung jawab sosialnya. Idealisme dimaknai sebagai rumusan sikap hidup seseorang di dalam menempuh padang dan hutan belantara kehidupan. Idealisme sekaligus merupakan sumber kepuasan batin seseorang. Spontanitas dimaknai sebagai ungkapan naluri dan intuisi manusia. Tanpa

¹⁸ W.S. Rendra. 1991. *“Renungan Dasar tentang Kebudayaan”*. Makalah disampaikan dalam Kongres Kebudayaan IV, Jakarta, 29 Oktober – 3 November 1991, hal. 2-4.

spontanitas akan menyebabkan hidup menjadi kering dan hambar.

Kalaulah kemudian tujuh daya hidup kreasi Rendra digunakan untuk mengelaborasi kebudayaan Sunda (dan Cirebon) kontemporer maka setidaknya ada empat daya hidup yang perlu dicermati dalam kebudayaan Sunda (dan Cirebon), yaitu, kemampuan beradaptasi, kemampuan mobilitas, kemampuan tumbuh dan berkembang, serta kemampuan regenerasi. Kemampuan beradaptasi kebudayaan Sunda (dan Cirebon), terutama dalam merespon berbagai tantangan yang muncul, baik dari dalam maupun dari luar, dapat dikatakan memperlihatkan tampilan yang kurang begitu menggembirakan.

Dari fakta sejarah terlihat bahwa persentuhan *urang* Sunda (dan Cirebon) dengan berbagai budaya asing memperlihatkan dengan jelas tentang terjadinya mondialisasi di Jawa Barat. Dengan demikian, mondialisasi atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah globalisasi bukanlah merupakan pengalaman baru. Banyak hal positif yang diperoleh *urang* Sunda (dan Cirebon) selama era mondialisasi. Namun dibalik dampak positif, mondialisasi di Jawa Barat menggambarkan pula tentang rentannya kebudayaan Sunda (dan Cirebon) dalam menghadapi realitas yang terjadi.

Rentannya daya hidup kebudayaan Sunda (dan Cirebon) dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman, diakui atau tidak, juga terjadi saat *urang* Sunda (dan Cirebon) memasuki era globalisasi dewasa ini. Di era globalisasi dewasa ini, kebudayaan Sunda (dan Cirebon) tampak mengalami tantangan yang serius. Namun, untuk menjawab tantangan tersebut, kebudayaan Sunda (dan Cirebon) seperti kehilangan energi dan daya hidupnya. Realitas tersebut, sebagaimana realitas yang terjadi semasa mondialisasi di era penetrasi Barat bisa jadi diakibatkan karena tidak jelasnya postur dan profil tentang kebudayaan Sunda (dan Cirebon) serta secara otomatis belum membuminya kebudayaan Sunda (dan Cirebon) di kalangan *urang* Sunda kebanyakan. Jadinya, *urang* Sunda (dan Cirebon) seperti teralienasikan dari kebudayaannya sendiri. Keteralienasian ini bahkan sering pula diikuti oleh keengganan *urang* Sunda (dan Cirebon) untuk mengakui dirinya sebagai bagian dari kebudayaan Sunda (dan Cirebon) atau merepresentasikan diri sebagai *urang* Sunda (dan Cirebon).

Apabila kemampuan beradaptasi Kebudayaan Sunda (dan Cirebon) memperlihatkan tampilan yang kurang begitu menggembirakan maka hal itu sejalan pula dengan kemampuan mobilitasnya. Kemampuan Kebudayaan Sunda (dan Cirebon) untuk melakukan mobilitas, baik vertikal maupun horisontal, dapat dikatakan sangat lemah. Oleh karenanya, jangankan di luar komunitas Sunda (dan Cirebon), di dalam komunitas Sunda (dan Cirebon) sendiri, kebudayaan Sunda (dan Cirebon) seringkali menjadi tampak asing. Meskipun ada unsur

Kebudayaan Sunda (dan Cirebon) yang memperlihatkan kemampuan untuk bermobilitas, baik secara horisontal maupun vertikal, tetapi secara umum kemampuan Kebudayaan Sunda (dan Cirebon) untuk bermobilitas dapat dikatakan masih rendah sehingga kebudayaan Sunda (dan Cirebon) tidak saja tampak jalan di tempat tetapi juga berjalan mundur.

Berkaitan erat dengan dua kemampuan terdahulu, kemampuan tumbuh dan berkembang Kebudayaan Sunda (dan Cirebon) juga dapat dikatakan memperlihatkan tampilan yang kurang begitu menggembirakan. Jangankan berbicara paradigma-paradigma baru, itikad untuk melestarikan apa yang telah dimiliki saja dapat dikatakan sangat lemah. Sebagai contoh, menjadi sebuah pertanyaan besar, komunitas Sunda (dan Cirebon) yang sebenarnya kaya dengan folklor,¹⁹ seberapa jauh telah berupaya untuk tetap melestarikan folklor tersebut agar tetap “membumi” dengan masyarakat Sunda (dan Cirebon). Kalaulah upaya untuk “membumikan” harta pusaka saja tidak ada bisa dipastikan paradigma baru untuk membuat folklor tersebut agar sanggup berkompetisi dengan kebudayaan luar pun bisa jadi hampir tidak ada atau bahkan mungkin, belum pernah terpikirkan sama sekali. Biarlah folklor tersebut menjadi kenangan masa lalu *urang* Sunda (dan Cirebon) dan biarkanlah folklor tersebut ikut terkubur selamanya bersama para pendukungnya, begitulah barangkali ucap *urang* Sunda (dan Cirebon) yang tidak berdaya dalam merawat dan memberdayakan warisan leluhurnya.

Berkenaan dengan kemampuan regenerasi, Kebudayaan Sunda (dan Cirebon) pun tampaknya kurang membuka ruang bagi terjadinya proses tersebut, untuk tidak mengatakan anti regenerasi. Budaya “kumaha akang”, “mangga tipayun”, yang demikian kental melingkupi kehidupan sehari-hari *urang* Sunda menjadi salah satu penyebab rentannya budaya Sunda dalam proses regenerasi. Akibatnya, jadilah budaya Sunda gagap dengan regenerasi. Generasi-generasi baru *urang* Sunda seperti tidak diberi ruang terbuka untuk berkompetisi dengan sehat, hanya dikarenakan kentalnya senioritas serta “terlalu majunya” pemikiran para generasi baru, yang seringkali bertentangan dengan pakem-pakem yang dimiliki generasi sebelumnya.

¹⁹ Folklor, yang merupakan hasil pengindonesiaan dari kata Inggris *Folklore*, dapat diartikan sebagai sebagian kebudayaan suatu kolektif, yang tersebar dan diwariskan turun-temurun, di antara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat (*mnemonic device*). James Danandjaja. 1997. *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lain-lain*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hal. 2. Folklor dapat dibedakan dalam tiga bentuk, folklor lisan (bahasa rakyat, ungkapan tradisional, pertanyaan tradisional, sajak dan puisi rakyat, ceritera prosa rakyat; mite, legenda, dan, dongeng, serta nyanyian rakyat), folklor sebagian lisan (kepercayaan rakyat dan permainan rakyat), dan folklor bukan lisan (makanan rakyat).

Bila pengamatan terhadap daya hidup Kebudayaan Sunda (dan Cirebon) melahirkan temuan-temuan yang cukup memprihatinkan, maka hal yang sama juga terjadi manakala tiga mustika mutu hidup kreasi Rendra digunakan untuk menjelajahi Kebudayaan Sunda (dan Cirebon), baik itu mustika tanggung jawab terhadap kewajiban, mustika idealisme maupun mustika spontanitas. Lemahnya tanggung jawab terhadap kewajiban tidak saja diakibatkan oleh minimnya ruang-ruang serta kebebasan untuk melaksanakan kewajiban secara total dan bertanggung jawab tetapi juga oleh lemahnya kapasitas dalam melaksanakan suatu kewajiban. Hedonisme yang kini melanda kebudayaan Sunda (dan Cirebon) telah mampu menggeser parameter dalam melaksanakan suatu kewajiban. Untuk melaksanakan suatu kewajiban tidak lagi didasarkan atas tanggungjawab yang dimilikinya tetapi lebih didasarkan atas seberapa besar materi yang akan diperolehnya apabila suatu kewajiban dilaksanakan. Bila ukuran kewajiban saja sudah bergeser pada hal-hal yang bersifat materi, janganlah berharap bahwa di dalamnya masih ada apa yang disebut mustika idealisme. Para hedonis dengan kekuatan materi yang dimilikinya, sengaja atau tidak sengaja, semakin memupuskan idealisme dalam kebudayaan Sunda (dan Cirebon). Akibatnya, jadilah betapa sulitnya komunitas Sunda (dan Cirebon) menemukan sosok-sosok yang bekerja dengan penuh idealisme dalam memajukan kebudayaan Sunda (dan Cirebon).

Berpijak pada kondisi lemahnya daya hidup dan mutu hidup kebudayaan Sunda (dan Cirebon), timbul pertanyaan besar, apakah permasalahan yang sebenarnya tengah dihadapi kebudayaan Sunda (dan Cirebon)? Untuk menjawab ini banyak argumen bisa dikedepankan. Tapi beberapa di antaranya yang tampaknya bisa diangkat ke permukaan sebagai faktor berpengaruh paling besar adalah karena ketiadaan strategi dalam mengembangkan kebudayaan Sunda (dan Cirebon); lemahnya tradisi, baca, tulis, dan lisan (baca, berbeda pendapat) di kalangan komunitas Sunda (dan Cirebon); serta belum adanya formulasi yang jelas tentang kebudayaan Sunda (dan Cirebon).

Ketiadaan strategi kebudayaan yang benar dan tahan uji dalam mengembangkan kebudayaan Sunda (dan Cirebon) tampak dari tidak adanya “pegangan bersama” yang lahir dari suatu proses yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan tentang upaya melestarikan dan mengembangkan secara lebih berkualitas Kebudayaan Sunda (dan Cirebon). Kebudayaan Sunda (dan Cirebon) tampaknya dibiarkan berkembang secara liar, tanpa ada upaya sungguh-sungguh untuk memandunya agar selalu berada di “jalan yang lurus”, khususnya manakala harus berhadapan dengan kebudayaan-kebudayaan asing yang galibnya terorganisir dengan rapi serta memiliki kemasan menarik.

Berbagai unsur Kebudayaan Sunda (dan Cirebon) yang sebenarnya sangat potensial untuk dikembangkan, bahkan untuk dijadikan model kebudayaan nasional dan kebudayaan dunia tampak tidak mendapat sentuhan yang memadai. Ambil contoh, berbagai makanan tradisional yang dimiliki *urang* Sunda (dan Cirebon), mulai dari lotek, karedok, tahu gejrot, bajigur, bandrek, surabi, colenak, wajit, borondong, kolontong, ranginang, opak, hingga yang lagi naik daun, ubi Cilembu, apakah ada strategi besar dari pemerintah daerah untuk mengemasnya dengan lebih bertanggung jawab agar bisa diterima komunitas yang lebih luas. Kalau Kolonel Sanders mampu mengemas ayam menjadi demikian mendunia, mengapa *urang* Sunda tidak mampu melahirkan Mang Ujang, Kang Duyeh, ataupun Bi Eha dengan kemasan-kemasan makanan tradisional Sunda yang juga mendunia. Oleh karenanya, bila strategi kebudayaan benar-benar telah dimiliki oleh Kebudayaan Sunda (dan Cirebon) bisa jadi *urang* Sunda akan dengan bangga menemukan tempat-tempat makanan “enggal sayagi”, seperti Lotek Cilentah, Karedok Singaparna, Wajit Cililin, Borondong Majalaya, Bandrek Pangalengan, Bajigur Bogor, atau Opak Majalengka.

Lemahnya budaya baca, tulis, dan lisan ditenggarai juga menjadi penyebab lemahnya daya hidup dan mutu hidup Kebudayaan Sunda (dan Cirebon). Lemahnya budaya baca telah menyebabkan lemahnya budaya tulis. Lemahnya budaya tulis pada komunitas Sunda (dan Cirebon) secara tidak langsung merupakan representasi pula dari lemahnya budaya tulis dari bangsa Indonesia. Fakta paling menonjol dari semua ini adalah minimnya karya-karya tulis tentang Kebudayaan Sunda (dan Cirebon) ataupun karya tulis yang ditulis oleh *urang* Sunda dan Cirebon. Dalam kaitan ini, upaya Yayasan Rancage untuk memberikan penghargaan dalam tradisi tulis perlu mendapat dukungan dari berbagai elemen *urang* Sunda (dan Cirebon). Sayangnya, hingga saat ini pertumbuhan tradisi tulis pada *urang* Sunda (dan Cirebon) masih tetap terbilang rendah.

Budaya lisan dalam Kebudayaan Sunda (dan Cirebon) sebenarnya merupakan budaya yang telah lama akrab dengan komunitas Sunda (dan Cirebon), bahkan usianya jauh lebih tua dibandingkan dengan budaya baca dan tulisan. Namun budaya lisan dalam pengertian kapasitas untuk mengemukakan pendapat serta berjiwa besar dalam menghadapi pendapat yang berbeda masih merupakan barang yang masih amat sangat langka dalam Kebudayaan Sunda (dan Cirebon). Tradisi lisan Sunda (dan Cirebon) tampaknya baru mampu menghargai komunikasi model monolog dan bukannya dialog. Akibatnya kemampuan untuk menyampaikan pendapat dan menerima pendapat yang berbeda dalam Kebudayaan Sunda (dan Cirebon) merupakan barang yang teramat mewah. Padahal, kapasitas untuk

mengemukakan pendapat dan menerima pendapat yang berbeda ini menjadi salah satu dasar bagi munculnya daya hidup dan mutu hidup kebudayaan yang berkualitas. Kapasitas mengemukakan pendapat pada dasarnya merupakan representasi dari kemampuan bernafas dan mencerna, sementara kapasitas menerima dengan jiwa besar pendapat yang berbeda lebih merupakan representasi dari kemampuan berkoordinasi dan berorganisasi, kemampuan beradaptasi, kemampuan mobilitas, kemampuan tumbuh dan berkembang, serta kemampuan regenerasi.

Ketidakjelasan formulasi kebudayaan Sunda (dan Cirebon) menyebabkan kaburnya profil dan postur kebudayaan Sunda (dan Cirebon). Untuk itu, jelas diperlukan upaya yang serius untuk memformulasikan tentang kebudayaan Sunda (dan Cirebon). Formulasi kebudayaan Sunda (dan Cirebon) dimaksud tentu tidak hanya sekedar mencakup bahasa dan kesenian, tetapi juga meliputi sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem mata pencaharian hidup, sistem pengetahuan, sistem religi, serta sistem teknologi, peralatan, dan perlengkapan hidup. Selanjutnya, formulasi kebudayaan Sunda (dan Cirebon) harus diikuti pula dengan langkah-langkah strategis untuk membumikannya di kalangan *urang* Sunda (dan Cirebon). Janganlah sampai formulasi kebudayaan Sunda (dan Cirebon) yang dihasilkan nanti hanya sebatas menjadi wacana di atas kertas atau hanya menjadi milik eksklusif golongan atau kelompok tertentu.

Formulasi kebudayaan Sunda (dan Cirebon) akan semakin terasa urgensinya bila mengingat bahwa tantangan yang dihadapi oleh *urang* Sunda (dan Cirebon) kini menjadi bertambah berat dengan semakin terbukanya Jawa Barat oleh prasarana transportasi, baik darat (tol Cipularang) maupun udara (penerbangan langsung dari Bandung ke berbagai kota di luar negeri). Melalui formulasi dan pembumian kebudayaan Sunda (dan Cirebon) diharapkan *urang* Sunda (dan Cirebon) akan kembali tersadarkan tentang kebudayaan yang dimilikinya sehingga memiliki *filter* yang kuat dalam menyikapi deras pengaruh yang dihadapinya. Bahkan, lebih dari itu akan melahirkan *sense of belonging* dan *sense of pride* terhadap kebudayaan Sunda (dan Cirebon) serta tentang jati dirinya sebagai *urang* Sunda (dan Cirebon).

Bagi ranah politik, khususnya pemerintah propinsi, formulasi kebudayaan Sunda (dan Cirebon) diharapkan pula akan mampu menampung kebutuhan akan jawaban (*response*) bagi sebuah tantangan (*challenge*) di depan berupa kecenderungan kembalinya pembagian wilayah administrasi pemerintahan warisan abad ke-19, sehubungan dengan kuatnya hembusan angin otonomi daerah. Pembagian wilayah Jawa bagian Barat atas empat wilayah karesidenan sebagaimana diumumkan Raffles tanggal 10 Agustus 1915, yakni Banten,

Buitenzorg (Bogor), Cirebon, dan Priangan,²⁰ sadar atau tidak sadar, sepertinya akan berulang kembali (setelah dimulai oleh Banten dan kini riak-riaknya sudah muncul di Cirebon dan Bogor), meskipun kemasannya bukan lagi karesidenan tetapi propinsi. Manakala realitas tersebut benar-benar muncul ke permukaan, tanpaantisipasi yang matang, bisa jadi banyak kemungkinan yang akan muncul tentang perkembangan kebudayaan Sunda (dan Cirebon). Akan semakin menguat atau justru akan semakin memudar. Dengan adanya formulasi kebudayaan Sunda (dan Cirebon) diharapkan perkembangan yang tidak menggembirakan dapat dihindari.

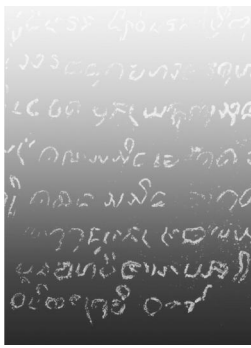
DAFTAR SUMBER

- Alfian, T. Ibrahim. 1985. Sejarah dan Permasalahan Masa Kini, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Sastra UGM pada 12 Agustus 1985.
- Atja dan Saleh Danasasmitha. 1981. Sanghyang Siksakanda Ng Karesian: (Naskah Sunda Kuno Tahun 1518 M). Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jabar.
- Danasasmitha, Saleh, et.al. 1983/1984. Rintisan Penelusuran Masa Silam Sejarah Jawa Barat. 4 Vols. Bandung: Proyek Penerbitan Sejarah Jawa Barat.
- Dienaputra, Reiza D. 1993. Kerajaan Sunda Pajajaran: Studi tentang Suksesi Kepemimpinan di Kerajaan Sunda Pajajaran. Bandung: Lemlit UNPAD
- . 2004. Cianjur: Antara Priangan dan Buitenzorg (Sejarah Cikal Bakal Cianjur dan Perkembangannya Hingga 1942). Bandung: Prolitera.
- Ekadjadi, Edi S. 1995a. Kebudayaan Sunda. Jakarta: Pustaka Jaya.
- . 1995b. Sunda, Nusantara, dan Indonesia: Suatu Tinjauan Sejarah. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran pada Hari Sabtu, 16 Desember 1995.
- . 2004. Kebangkitan Kembali Orang Sunda: Kasus Paguyuban Pasundan 1913-1918. Bandung: Kiblat Buku Utama.

²⁰ L. Pronk, De bestuursreorganisatie-Mullemeister op Java en Madoera en haar beteekenis voor het heden, (Leiden: M. Dubbeldeman, 1929), hal. 4-5.; Otto van Rees, Overzicht van de Geschiedenis der Preanger-Regentschappen, (Batavia, 1880), hal. 129; R.A. Kern, Geschiedenis der Preanger-Regentschappen; Kort Overzicht (Bandung: De Vries & Fabricius, 1898), hal. 41-42.

- J. Hageman Cz. 1867. "Geschiedenis der Soendalanden", TBG, XVI. Batavia.
- Kern, R.A. 1898. Geschiedenis der Preanger-Regentschappen; Kort Overzicht. Bandung: De Vries & Fabricius.
- Kunto, Haryoto. 1984. Wajah Bandoeng Tempo Doeloe. Bandung: Granesia.
- Lubis, Nina H., dkk. 2003. Sejarah Tatar Sunda. Jilid I dan II. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.
- L. Pronk. 1929. De bestuursreorganisatie-Mullemeister op Java en Madoera en haar beteekenis voor het heden. Leiden: M. Dubbeldeman.
- Otto van Rees, Otto van. 1880. Overzicht van de Geschiedenis der Preanger-Regentschappen. Batavia.
- Reitsma, S. A. 1912. De Wegen in de Preanger. Bandung: G. Kolff & Co.
- . 1928. Korte Geschiedenis der Nederlandsch-Indische Spoor en Tramwegen. Weltevreden: G. Kolff & Co.
- Roelcke, Gottfried dan Gary Crabb. 1994. All Around Bandung: Exploring the West Java Highlands. Bandung: Bandung Society for Heritage Conservation.
- Rosidi, Ajip. 1988. Hurip Waras: Dua Panineungan. Bandung: Pustaka Karsa Sunda.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1864, No. 54.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1916, No. 65.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1920, No. 150.
- Tourist Guide to Buitenzorg, the Preanger and Central Java. 1913. Weltevreden: Official Tourist Bureau.
- Verslag der Staatsspoor-en Tramwegen in Nederlandsch-Indie Jrg. 1925.
- Warnaen, Suwarsih et.al. 1987. Pandangan Hidup Orang Sunda. Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi) Depdikbud.





Pergumulan Kekuasaan Urang Sunda dalam Perspektif Demokrasi*

Berbicara tentang Budaya Kekuasaan Sunda dalam Perspektif Demokrasi bisa jadi tidak semudah dan sesederhana yang dibayangkan. Luasnya cakupan materi memberi kemungkinan banyaknya masalah yang bisa dibahas di dalamnya. Dalam kondisi demikian, jelas tidak mungkin semua masalah bisa diangkat ke permukaan dalam waktu bersamaan. Oleh karenanya, diperlukan adanya pemilihan materi bahasan yang dapat merepresentasikan payung besar tersebut. Adapun satu di antara masalah yang tampaknya menarik untuk dikemukakan adalah berkaitan dengan perkembangan “roh” demokrasi dalam pergumulan kekuasaan yang dilakukan *urang Sunda*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pergumulan berarti perihal bergumul atau pergulatan. Pergulatan sendiri memiliki arti sebagai perjuangan atau usaha yang keras.¹ Dengan demikian, pergumulan kekuasaan *urang Sunda* dapat diartikan pula sebagai perjuangan kekuasaan atau perjuangan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan (yang dilakukan) *urang Sunda* di Tanah Sunda.²

Urang Sunda secara sederhana dapat diartikan sebagai orang yang mengaku dirinya dan diakui oleh orang lain sebagai orang Sunda.³ Dalam pengertian tersebut setidaknya tercakup dua kriteria besar yang dapat dijadikan pegangan untuk menyebut seseorang sebagai *urang Sunda* atau bukan *urang Sunda*. Kriteria

* Makalah ini merupakan materi presentasi dalam Seminar Sehari Fordimasi dengan tema, “Sunda dan Budaya Kekuasaan”, yang diselenggarakan Forum Dialog Mahasiswa Sejarah Islam se-Indonesia dan Himpunan Mahasiswa Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab KBM IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung 7 April 2003.

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, hal. 327-328.

² Tanah Sunda merujuk pada bekas wilayah Kerajaan Sunda Pajajaran, yang kemudian berdiri sendiri, yakni Sumedang Larang, Banten, Cirebon, dan Galuh. Sumedang Larang dan Galuh kemudian menjadi satu wilayah kesatuan dengan nama Priangan. Dalam perkembangan berikutnya, Priangan sering dikatakan sebagai pusat Tanah Sunda. Edi S. Ekadjati. 1995. Kebudayaan Sunda (Suatu Pendekatan Sejarah). Jakarta: Pustaka Jaya, hal. 7-8.

³ Suwarsih Warnaen, et.al. 1987. Pandangan Hidup Orang Sunda. Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi) Depdikbud, hal. 1.

pertama didasarkan atas keturunan atau hubungan darah. Dengan demikian, seseorang dikatakan *urang* Sunda apabila orang tuanya, baik dari pihak ayah maupun ibu, atau keduanya adalah orang Sunda, terlepas dimana ia berada atau dibesarkan. Kriteria kedua didasarkan atas sosial budaya. Seseorang dikatakan *urang* Sunda apabila ia dibesarkan dalam lingkungan sosial budaya Sunda dan dalam hidupnya menghayati serta mempergunakan norma-norma dan nilai budaya Sunda. Dalam kriteria kedua ini, yang dianggap penting adalah tempat tinggal, kehidupan sosial budaya, dan sikap orangnya.⁴

Pergumulan Kekuasaan di Tanah Sunda

Pergumulan kekuasaan *urang* Sunda di Tanah Sunda sepanjang sejarah dapat dikatakan memperlihatkan hal-hal yang menarik untuk diangkat ke permukaan sekaligus untuk dijadikan bahan pengetahuan bagi kepentingan proses pembelajaran, khususnya pembelajaran demokrasi. Kesadaran *urang* Sunda akan pentingnya kekuasaan dapat dikatakan telah berlangsung lama, sama tuanya dengan perjalanan sejarah bangsa ini. Fakta paling kongkrit tentang munculnya kesadaran akan kekuasaan dari *urang* Sunda terjadi ketika berdirinya Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5. Keberadaan tujuh buah prasasti batu; Prasasti Tugu, Prasasti Ciaruteun, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Jambu (Pasir Koleangkak), Prasasti Pasir Awi, Prasasti Pasir Muara, dan Prasasti Cidanghiang,⁵ merupakan fakta tak terbantahkan tentang telah tuanya pengenalan *urang* Sunda dengan roh kekuasaan. Masa pergumulan kekuasaan *urang* Sunda dalam Kerajaan Tarumanegara berlangsung kurang lebih selama dua abad. Runtuhnya salah satu Kerajaan Hindu tertua di negeri ini kemudian segera diikuti oleh lahirnya sebuah pusat kekuasaan baru di tanah Sunda, yakni Kerajaan Sunda Pajajaran. Kerajaan ini kemudian tercatat dalam sejarah sebagai kerajaan Hindu yang memiliki rentang usia paling panjang, yakni selama 909 tahun atau sejak tahun 670 M hingga tahun 1579 M. Pergumulan kekuasaan *urang* Sunda di kerajaan yang terkenal dengan ceritera Prabu Siliwangi ini ditandai oleh kayanya pengalaman *urang* Sunda dalam mengenal model-model suksesi kepemimpinan raja-raja Sunda.

Runtuhnya Kerajaan Sunda Pajajaran tidak berarti memperlihatkan runtuhnya pergumulan kekuasaan *urang* Sunda. Dua buah pusat pergumulan kekuasaan baru berhasil didirikan *urang* Sunda, yakni Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Bila Kesultanan Cirebon, hingga kini masih menyisakan tempat pergumulan kekuasaan *urang* Sunda, melalui Kesultanan Kasepuhan dan

⁴ Edi S. Ekadjati, Op. Cit., hal. 8.

⁵ Ayatrohaedi. 1975. "Tarumanegara" dalam Atja (ed.), Sejarah Jawa Barat. Bandung: Proyek Penunjang Kebudayaan Nasional, hal. 27.

Kanoman, maka pergumulan kekuasaan *urang* Sunda di Kesultanan Banten harus berakhir pada awal abad ke-19 akibat terlalu dalamnya campur tangan pemerintah kolonial serta terlalu dalamnya konflik internal di dalam tubuh kerabat kerajaan.

Era kompeni (VOC) dan juga Pemerintah Kolonial Belanda melahirkan pusat pergumulan kekuasaan yang baru bagi *urang* Sunda, berupa kabupaten-kabupaten. Dalam hal ini, ada kabupaten yang merupakan produk kolonial dan ada pula kabupaten yang merupakan produk Kerajaan Mataram. Keberadaan kabupaten-kabupaten di tanah Sunda ini suka atau tidak suka, dapat dikatakan telah menyebabkan terjadinya perluasan tempat-tempat pergumulan kekuasaan bagi *urang* Sunda. Kekuasaan kini tidak hanya menjadi milik segelintir elit kerajaan tetapi telah menyebar pada masyarakat di luar tembok kerajaan. Jabatan-jabatan publik di bawah bupati pun banyak bermunculan. Kenyataan ini mendorong terjadinya peningkatan jumlah *urang* Sunda yang terlibat dalam pergumulan kekuasaan.

Berbeda dengan masa-masa sebelumnya, memasuki abad ke-20, sejalan dengan *zeitgeist*, *urang* Sunda berhasil menciptakan tempat-tempat pergumulan kekuasaan baru yang menunjukkan jati diri *urang* Sunda yang selalu responsif terhadap setiap perubahan yang terjadi. Satu di antara tempat pergumulan kekuasaan *urang* Sunda yang lahir di era pergerakan nasional tersebut adalah organisasi pergerakan Paguyuban Pasundan (1914). Di luar itu, tempat pergumulan kekuasaan *urang* Sunda juga bertambah dengan kehadiran dewan-dewan yang dibentuk Pemerintah Kolonial Belanda, baik itu dewan rakyat (*volksraad*) maupun dewan kabupaten (*regentschapraad*) dan dewan kota (*gemeenteraad*).

Dalam era kemerdekaan, tempat-tempat pergumulan kekuasaan *urang* Sunda pun menjadi semakin lengkap lagi. Tempat pergumulan tersebut tidak hanya berada pada tataran suprastruktur politik tetapi juga yang berada pada tataran infrastruktur politik. Tempat pergumulan kekuasaan pada tataran suprastruktur politik tidak hanya berupa lembaga eksekutif, tetapi juga berupa lembaga yudikatif dan lembaga legislatif. Tempat pergumulan kekuasaan pada tataran infrastruktur politik, tidak hanya berupa partai-partai politik tetapi juga berupa organisasi-organisasi kemasyarakatan. Dilihat dari pendekatan geografis, tempat pergumulan kekuasaan tersebut juga tidak hanya berada dalam tataran politik lokal tetapi juga berada dalam tataran politik nasional.

Perjalanan *Urang* Sunda dalam Membangun Kehidupan Demokrasi

Di samping kekuasaan, istilah lain yang relatif paling sering dibicarakan dalam dunia politik adalah demokrasi. Demokrasi bagi kebanyakan masyarakat di dunia seakan telah dipandang sebagai satu-satunya jembatan yang akan membawa kemaslahatan bagi banyak orang. Istilah demokrasi pun selanjutnya sering

dilawankan dengan istilah-istilah lain yang sangat tidak populer di mata rakyat kebanyakan, yakni otoritarianisme, totalitarianisme, dan tirani. Inti dari demokrasi adalah adanya pemberian penghargaan yang tinggi terhadap peran *demos* atau *populus* dalam proses politik, baik input, konversi, maupun output atau setidaknya dalam tahapan memilih masalah apa yang hendak dibahas dan diputuskan dalam sebuah proses demokrasi.⁶ Dengan demikian, *password* bagi demokrasi adalah adalah pemberdayaan peran rakyat.

Untuk membedah sampai sejauh mana roh demokrasi mewarnai pergumulan kekuasaan *urang* Sunda bukanlah merupakan permasalahan mudah, untuk tidak mengatakan sebagai permasalahan yang sangat kompleks. Oleh karenanya, untuk memudahkan pengukuran tentang perjalanan kehidupan berdemokrasi *urang* Sunda dalam pergumulan kekuasaannya perlu pula kiranya digunakan parameter-parameter tertentu. Pemahaman tentang demokrasi itu sendiri tentunya harus dilihat dari dua dimensi, yakni dimensi normatif dan dimensi empirik. Dimensi normatif merujuk pada aturan main, *rule of game*, atau apa yang seharusnya secara idil dari demokrasi. Dimensi empirik atau juga sering disebut sebagai *procedural democracy* merujuk pada realita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau bagaimana perjalanan tampilan roh kekuasaan sepanjang waktu.

Setidaknya ada lima indikator yang dapat digunakan untuk mengukur apakah pergumulan kekuasaan *urang* Sunda berjalan demokrasi atau tidak. Pertama, akuntabilitas. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Kedua, rotasi kekuasaan. Hal ini ditandai oleh terbukanya peluang bagi terjadinya rotasi kekuasaan bagi setiap orang yang dilakukan secara teratur dan damai. Ketiga, rekrutmen politik yang terbuka. Rekrutmen politik bagi pengisian jabatan-jabatan publik harus berlaku sama bagi setiap orang, sepanjang memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditentukan. Keempat, pemilihan umum. Kelima, menikmati hak-hak dasar. Hak-hak dasar yang harus diberikan bagi suatu kehidupan yang demokratis, antara lain adalah hak untuk menyatakan pendapat (*freedom of expression*), hak untuk berkumpul dan berserikat (*freedom of assembly*), dan hak untuk menikmati pers yang bebas (*freedom of press*).⁷

Berpijak pada parameter-parameter di atas, terasa akan sangat sulit untuk mengukur secara tepat seluruh perjalanan pergumulan kekuasaan *urang* Sunda dari kacamata demokrasi, terlebih demokrasi yang modern. Hal itu disamping

⁶ Robert A. Dahl. 1989. *Democracy and Its Critics*. New Haven, Connecticut: Yale University Press, hal. 113.

⁷ Afan Gaffar. 1999. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 7-9.

diakibatkan oleh tidak jelasnya dimensi normatif yang berlaku pada sebuah era juga dikarenakan beberapa parameter tersebut merupakan parameter untuk sebuah kehidupan demokrasi yang modern. Oleh karena itu, di dalam membedakan perjalanan “roh” kehidupan demokrasi dalam pergumulan kekuasaan *urang* Sunda, jumlah parameter yang digunakan untuk setiap era bisa jadi berbeda.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pergumulan kekuasaan *urang* Sunda sejak masa Kerajaan Tarumanegara hingga masa-masa pemerintahan para bupati pada abad XIX masih jauh untuk dikatakan berada pada kehidupan yang demokratis. Dalam kurun waktu ini, meskipun salah satu parameter demokrasi, yakni rotasi kekuasaan terjadi secara teratur, baik pada masa kerajaan maupun kabupaten tetapi rotasi kekuasaan tersebut sangat bersifat tertutup atau hanya berada dalam lingkaran dalam kekuasaan, untuk tidak mengatakan bahwa pergumulan kekuasaan hanya terjadi pada kerabat raja dan para bupati. Namun demikian, untuk sebuah sistem politik tradisional, adanya rotasi kekuasaan yang berkesinambungan semacam itu sudah dapat dikatakan sebagai benih-benih awal bagi tumbuhnya pergumulan kekuasaan yang demokratis.

Bila rotasi kekuasaan di Kerajaan Sunda Pajajaran dijadikan sebagai sebuah contoh kasus, akan terlihat beberapa fenomena yang cukup menarik tentang pergumulan kekuasaan *urang* Sunda di era kerajaan. Selama 909 tahun eksistensinya, di Kerajaan Sunda Pajajaran telah terjadi 39 kali suksesi kepemimpinan atau rotasi kekuasaan. Dalam 39 kali suksesi kepemimpinan tersebut setidaknya ada lima model suksesi kepemimpinan yang terjadi. Pertama, dari raja kepada anak kandung laki-laki (25 kali). Kedua, dari raja kepada menantu (8 kali). Ketiga, dari raja kepada adik kandung (2 kali). Keempat, dari raja kepada saudara ipar (3 kali). Kelima, dari raja kepada keponakan (1 kali). Sementara itu dari 38 kali rotasi kekuasaan yang diketahui faktor penyebabnya, sebagian besar atau sebanyak 26 kali diakibatkan oleh faktor usia. Di luar itu, masih terdapat empat faktor penyebab terjadinya rotasi kekuasaan, yaitu, rotasi kekuasaan yang diakibatkan oleh terjadinya pelanggaran terhadap kaidah moral (3 kali), rotasi kekuasaan yang diakibatkan oleh adanya kudeta (5 kali), rotasi kekuasaan yang diakibatkan oleh pindahnya raja ke kerajaan lain (1 kali), serta rotasi kekuasaan yang diakibatkan oleh terbunuhnya raja yang tengah memerintah (3 kali).⁸

Beberapa fenomena yang menarik dari rotasi kekuasaan di Kerajaan Sunda Pajajaran adalah bahwa pergumulan kekuasaan *urang* Sunda pada era kerajaan tidak sekedar mengenal suksesi kekuasaan damai yang diakibatkan oleh wafatnya

⁸ Untuk uraian yang lebih lengkap, lihat, Reiza D. Dienaputra. 1993. Kerajaan Sunda Pajajaran: Studi tentang Suksesi Kepemimpinan di Kerajaan Sunda Pajajaran. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, hal. 19-38.

raja yang tengah berkuasa tetapi juga mengenal suksesi kekuasaan yang diakibatkan oleh kudeta. Dengan demikian, budaya kekerasan dalam pergumulan kekuasaan bukan hanya menjadi milik kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Fenomena menarik lainnya adalah adanya raja yang digantikan karena melanggar kaidah moral. Salah satu raja yang diturunkan karena melanggar kaidah moral ini adalah raja ke 38 Ratu Sakti Sang Mangabatan. Ia dipandang melanggar kaidah moral setelah menikahi wanita larangan.⁹ Kenyataan ini jelas menjadi menarik karena di tengah budaya kekuasaan yang masih tertutup masalah moral bagi penguasa telah memperoleh perhatian yang penting.

Pada masa kekuasaan para bupati, baik sewaktu di bawah kekuasaan VOC maupun pemerintah kolonial, rotasi kekuasaan juga berlangsung secara tertutup atau hanya berada pada lingkaran dalam kerabat kabupaten. Contoh yang dapat dikemukakan untuk ini adalah apa yang terjadi di Cianjur. Dari 13 bupati yang berkuasa di Cianjur selama era VOC dan pemerintah Kolonial Belanda (1677-1942), sebagian besar merupakan anggota Trah Wira Tanu Datar. Trah ini secara konsisten memegang jabatan bupati di Cianjur melalui rotasi kekuasaan yang bersifat turun temurun setidaknya sejak tahun 1677 hingga tahun 1862. Setelah R.A.A. Prawiradireja II (1863-1910), kekuasaan bupati di Cianjur tidak diserahkan kepada putera lelakinya tetapi kepada menantunya R.A.A. Wiranatakusumah (1912-1920). Setelah R.A.A. Wiranatakusumah barulah Cianjur mengenal bupati yang bukan merupakan kerabat dekat bupati sebelumnya atau bahkan bukan merupakan anggota Trah Wira Tanu Datar. Bupati tersebut adalah R.A.A. Suriadiningrat (1920-1935). Sementara bupati terakhir di era kolonial, R.A.A. Suria Nata Atmaja (1935-1943), meskipun tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan bupati yang digantikannya, tetapi ia merupakan anggota Trah Wira Tanu Datar. Suria Nata Atmaja merupakan buyut dari Raden Adipati Wira Tanu Datar VI.¹⁰

Meskipun pergumulan kekuasaan *urang* Sunda di kerajaan dan kabupaten-kabupaten belum memperlihatkan kehidupan yang demokratis tetapi pada level yang lebih rendah, suasana kehidupan yang demokratis justru telah tampak. Berbeda dengan pergumulan kekuasaan yang terjadi di lingkungan kerajaan dan kabupaten, pergumulan kekuasaan *urang* Sunda yang terjadi di desa-desa justru

⁹ Wanita yang dikategorikan wanita larangan atau estri larangan adalah wanita yang telah bertunangan atau telah menerima lamaran untuk diperistri. Setelah terjadinya perang Bubab, wanita yang berasal dari lingkungan Kerajaan Majapahit juga dimasukkan dalam wanita larangan, sehingga tabu untuk dinikahi. Atja dan Saleh Danasasmita. 1981. *Sanghyang Siksakanda Ng Karesian: (Naskah Sunda Kuno Tahun 1518 M)*. Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, hal. 54-55.

¹⁰ Reiza D. Dienaputra. 1997. *Perubahan Sosial di Cianjur (1816-1942)*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, hal 214-218.

telah memperlihatkan kehidupan demokratis yang sangat maju. Dari lima parameter demokrasi, pengumpulan kekuasaan *urang* Sunda di desa-desa dapat dikatakan telah memenuhi hampir semua parameter yang ditetapkan, meskipun untuk satu atau dua parameter diantaranya masih dilakukan dengan kualitas yang masih sederhana. Rotasi kekuasaan yang tertaur dan damai dilakukan melalui sistem pemilihan yang terbuka yang melibatkan seluruh masyarakat desa yang memenuhi persyaratan untuk memilih. Dalam kondisi demikian, rekrutmen politik pun secara otomatis telah berjalan dengan baik. Demikian pula halnya, hak dasar untuk menyatakan pendapat telah dijalankan dengan baik yang di antaranya ditandai oleh dibukanya kesempatan pada masyarakat untuk memilih secara langsung pemimpinnya.

Pengumpulan kekuasaan *urang* Sunda di desa yang memperlihatkan kehidupan politik yang demokratis telah berjalan relatif lama. Untuk Kesultanan Banten (abad ke-17 dan abad ke-18) para kepala desa biasanya diangkat oleh Sultan Banten.¹¹ Mengingat jauhnya tingkat hirarkis kekuasaan antara Sultan dengan kepala desa, sebuah asumsi dapat dikedepankan bahwa sebelum diangkat Sultan, para kepala desa di wilayah kekuasaan Kesultanan Banten besar kemungkinan sebelumnya telah melalui proses pemilihan oleh rakyatnya.¹² Tradisi pemilihan kepala desa yang telah berjalan lama ini kemudian mendapat legalitas Pemerintah Kolonial melalui Staatsblad tahun 1819 No. 13.¹³

Memasuki abad ke-20, seiring dengan terjadinya perubahan politik yang mendasar, pengumpulan kekuasaan *urang* Sunda semakin banyak diwarnai oleh kehidupan politik yang demokratis. Kehadiran organisasi-organisasi pergerakan serta berbagai pranata pendukungnya, seperti pers, dewan rakyat, dewan-dewan kabupaten dan kota, telah mendorong tumbuhnya pengumpulan kekuasaan yang demokratis pada *urang* Sunda. Meskipun dilihat dari parameter demokrasi, pengumpulan kekuasaan *urang* Sunda yang terjadi di era organisasi-organisasi pergerakan ini belum memperlihatkan adanya perkembangan kehidupan demokrasi yang cukup berarti tetapi kehadiran organisasi pergerakan dan lembaga-lembaga perwakilan bentukan pemerintah kolonial telah memberi kesempatan bagi *urang* Sunda “perkotaan” untuk melaksanakan sebagian hak dasarnya, yakni hak untuk berkumpul dan berserikat serta hak untuk menyatakan pendapat.

Salah satu peristiwa pengumpulan kekuasaan *urang* Sunda yang terjadi dalam era ini adalah berupa tuntutan Paguyuban Pasundan terhadap Pemerintah Kolonial berkaitan dengan pembentukan Provincie West Java. Organisasi yang berorientasi sosial budaya Sunda ini menuntut pemerintah kolonial agar Provincie West Java

¹¹ L.W.C. van Berg. 1901. “Het Inlandsche Gemeentewezen op Java en Madoera”. BKL, 52: 35.

¹² Edi S. Ekadjati. Op. Cit., hal. 167.

¹³ R. Soetardjo Kartohadikoesoemo. 1965. Desa. Bandung: Sumur Bandung, hal. 20, 27.

yang akan dibentuk pada dasawarsa ketiga abad ke-20 diberi nama Propinsi Pasundan. Tuntutan Paguyuban Pasundan ini kemudian disetujui oleh pemerintah kolonial sehingga dalam ketetapan tentang pembentukan propinsi ini sebagaimana tercantum dalam Staatsblad tahun 1925 No. 285 dan 378, antara lain tertulis, “ ... West Java, in inheemsche talen aan te duiden als Pasoendan ...” (... Jawa Barat, dalam bahasa orang pribumi (bahasa Sunda) menunjuk sebagai Pasundan ...).¹⁴

Dalam alam kemerdekaan, pergumulan kekuasaan *urang* Sunda secara perlahan tapi pasti memperlihatkan suasana kehidupan yang semakin demokratis. Kehadiran berbagai suprastruktur dan infrastruktur politik, telah membuka kesempatan bagi kebanyakan *urang* Sunda untuk turut dalam pergumulan kekuasaan. Bahkan manakala *urang* Sunda merasa terancam identitas dirinya, *urang* Sunda pun mampu bersuara lantang. Hal ini di antaranya dibuktikan melalui Kongres Pemuda Sunda pada tanggal 4-7 November 1956. Salah satu hal menarik yang dihasilkan kongres adalah adanya proklamasi dari Seksi Kebudayaan yang menyatakan bahwa istilah Jawa Barat diganti dengan Sunda. Sebagai konsekuensinya istilah Jawa Tengah diganti dengan Jawa Barat dan nama pulau Jawa diganti dengan Nusa Selatan, sesuai contoh dari pemerintah sendiri yang mengganti istilah Sunda Kecil dengan Nusa Tenggara.¹⁵ Adapun alasan pemilihan istilah Sunda atau Tanah Sunda, bukan Jawa Barat atau Pasundan, karena istilah Jawa Barat merupakan terjemahan istilah West Java yang dipakai pemerintah kolonial sedangkan istilah Pasundan sering diidentikan dengan Priangan tanpa Banten dan Cirebon serta tercemar oleh kasus Partai Rakyat Pasundan pimpinan Musa Suriakartalegawa.¹⁶

Kini, seiring dengan perubahan politik di tanah air, pergumulan kekuasaan *urang* Sunda terasa jauh lebih demokratis dibanding masa sebelumnya. Namun demikian melihat realitas yang terjadi saat ini, khususnya yang berkaitan dengan peran *urang* Sunda di pentas politik nasional, jelas perlu dilakukan upaya-upaya yang sistematis agar pergumulan kekuasaan *urang* Sunda hari ini dan esok dapat lebih berkualitas secara demokratis serta mampu memberi kontribusi bagi lahirnya sistem politik yang lebih demokratis di negeri ini, termasuk mampu melahirkan kembali *urang* Sunda di pentas politik nasional. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk membangun kehidupan demokrasi yang lebih berkualitas, seperti membangun tradisi akuntabilitas bagi para pejabat publik, membangun sistem rotasi kekuasaan yang benar-benar terbuka dengan melibatkan seluruh *urang*

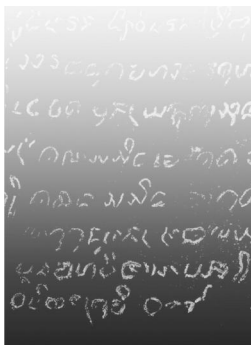
¹⁴ Edi S. Ekadjati. 1995. Sunda, Nusantara, dan Indonesia: Suatu Tinjauan Sejarah. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran pada Hari Sabtu, 16 Desember 1995. Bandung: Universitas Padjadjaran, hal. 4.

¹⁵ Ibid., hal. 19.

¹⁶ Ajip Rosidi. 1988. Hurip Waras: Dua Panineungan. Bandung: Pustaka Karsa Sunda, hal. 20.

Sunda yang memiliki hak memilih dan dipilih untuk berbagai jabatan publik, khususnya di tingkat I dan II, membangun sistem rekrutmen politik yang terbuka, serta meningkatkan pelaksanaan hak-hak dasar, harus dilakukan secara sungguh-sungguh oleh seluruh urang Sunda, khususnya mereka yang kini berada pada jajaran elit penguasa.

Perkembangan mutakhir saat ini memperlihatkan bahwa upaya untuk membuat pergumulan kekuasaan urang Sunda lebih berkualitas secara demokratis ternyata mendapat hambatan yang cukup berarti, terutama dari para elit penguasa yang sudah diuntungkan dengan sistem politik yang ada. Era otonomi yang memberi kekuasaan besar pada daerah untuk berbuat yang terbaik bagi kepentingan daerah, ternyata masih sulit dikembangkan di lapangan politik. Hal ini misalnya terlihat dalam proses pemilihan gubernur Jawa Barat yang kini tengah bergulir. Ide untuk menunda pemilihan gubernur sampai lahirnya produk perundang-undangan yang memungkinkan proses pemilihan gubernur secara langsung oleh rakyat, tampaknya diantisipasi setengah hati oleh para elit politik. Dengan demikian, pelibatan urang Sunda untuk memilih gubernurnya secara langsung di Jawa Barat masih belum dapat terlaksana. Padahal, bila hal itu terlaksana bisa jadi urang Sunda akan menjadi contoh bagi daerah lainnya. Pergumulan politik urang Sunda pun secara otomatis akan segera dicatat dengan tinta emas sebagai pergumulan politik yang selalu memperlihatkan perkembangan kehidupan demokratis yang semakin berkualitas dari waktu ke waktu. Para leluhur Sunda pun akan bangga bahwa kini anak cucunya tidak hanya sekedar bisa memilih kepala desanya secara langsung tetapi juga bisa memilih gubernurnya secara langsung. Suatu pengalaman demokrasi yang sama sekali belum pernah dialami mereka, para leluhur urang Sunda.



Tatar Sunda dalam Panggung Politik: Sebuah Ikhtisar Sejarah*

Perjalanan politik *urang* Sunda di tatar Sunda dalam panggung sejarah mencakup dimensi waktu yang sangat panjang dan luas. Oleh karenanya, untuk membahasnya secara total bisa jadi tidak semudah dan sesederhana yang dibayangkan. Panjangnya rentang waktu perjalanan memberi kemungkinan banyaknya masalah yang bisa diungkap di dalamnya. Demikian pula halnya, dengan kemulti-ragaman peristiwa yang dimilikinya. Dalam kondisi demikian, jelas tidak mungkin semua kisah perjalanan politik *urang* Sunda bisa diangkat sekaligus dalam waktu bersamaan. Oleh karenanya, suka atau tidak suka, diperlukan adanya seleksi kisah, dengan tetap memperhatikan adanya kesinambungan kisah sebagai sebuah untai perjalanan dalam pentas sejarah.

Sebelumnya, secara konseptual perlu pula kiranya dikemukakan bahwa *urang* Sunda yang dimaksud dalam pembahasan ini merujuk pada orang yang mengaku dirinya dan diakui oleh orang lain sebagai orang Sunda.¹ Dalam pengertian tersebut setidaknya tercakup dua kriteria besar yang dapat dijadikan pegangan untuk menyebut seseorang sebagai *urang* Sunda atau bukan *urang* Sunda. Kriteria pertama didasarkan atas keturunan atau hubungan darah. Dengan demikian, seseorang dikatakan *urang* Sunda apabila orang tuanya, baik dari pihak ayah maupun ibu, atau keduanya adalah orang Sunda, terlepas dimana ia berada atau dibesarkan. Kriteria kedua didasarkan atas sosial budaya. Seseorang dikatakan *urang* Sunda apabila ia dibesarkan dalam lingkungan sosial budaya Sunda dan dalam hidupnya menghayati serta mempergunakan norma-norma dan nilai budaya Sunda. Dalam kriteria kedua ini, yang dianggap penting adalah tempat tinggal, kehidupan sosial budaya, dan sikap orangnya.²

* Makalah ini merupakan materi presentasi dalam Kursus Sejarah Sunda, yang diselenggarakan atas kerjasama Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PPKK) Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran dengan Majalah Mangle, Bandung, 24 Februari 2007.

¹ Suwarsih Warnaen, et.al. 1987. *Pandangan Hidup Orang Sunda*. Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi) Depdikbud, hal. 1.

² Edi S. Ekadjati. 1995. *Kebudayaan Sunda (Suatu Pendekatan Sejarah)*. Jakarta: Pustaka Jaya, hal. 8.

Sementara itu yang dimaksud tatar Sunda atau tanah Sunda mengacu pada bekas wilayah Kerajaan Sunda Pajajaran, yang kemudian berdiri sendiri, yakni Sumedang Larang, Banten, Cirebon, dan Galuh. Sumedang Larang dan Galuh kemudian menjadi satu wilayah kesatuan dengan nama Priangan. Dalam perkembangan berikutnya, Priangan sering dikatakan sebagai pusat Tanah Sundamerujuk pada bekas wilayah Kerajaan Sunda Pajajaran, yang kemudian berdiri sendiri, yakni Sumedang Larang, Banten, Cirebon, dan Galuh. Sumedang Larang dan Galuh kemudian menjadi satu wilayah kesatuan dengan nama Priangan. Dalam perkembangan berikutnya, Priangan sering dikatakan sebagai pusat Tanah Sunda.³

Sekilas Panggung Politik Tatar Sunda

Perjalanan politik *urang* Sunda di Tanah Sunda sepanjang sejarah dapat dikatakan menyajikan hal-hal yang menarik untuk dijadikan bahan pengetahuan bagi kepentingan proses pembelajaran. Persentuhan *urang* Sunda dengan politik dapat dikatakan telah berlangsung lama, sama tuanya dengan perjalanan sejarah bangsa ini. Fakta paling awal tentang persentuhan *urang* Sunda dengan panggung politik dapat dikatakan terjadi ketika Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad ke-5. Keberadaan tujuh buah prasasti batu; Prasasti Tugu, Prasasti Ciaruteun, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Jambu (Pasir Koleangkak), Prasasti Pasir Awi, Prasasti Pasir Muara, dan Prasasti Cidanghiang,⁴ merupakan fakta tak terbantahkan tentang telah tuanya pengenalan *urang* Sunda dengan kekuasaan sebagai esensi politik. Masa percaturan politik *urang* Sunda dalam Kerajaan Tarumanegara berlangsung kurang lebih selama dua abad. Runtuhnya salah satu Kerajaan Hindu tertua di negeri ini kemudian segera diikuti oleh lahirnya sebuah pusat kekuasaan baru di tanah Sunda, yakni Kerajaan Sunda Pajajaran. Kerajaan ini kemudian tercatat dalam sejarah sebagai kerajaan Hindu yang memiliki rentang usia paling panjang, yakni selama 909 tahun atau sejak tahun 670 M hingga tahun 1579 M. Tampilan politik *urang* Sunda di kerajaan yang terkenal dengan ceritera Prabu Siliwangi ini ditandai oleh kayanya pengalaman *urang* Sunda dalam mengenal model-model suksesi kepemimpinan raja-raja Sunda.

Runtuhnya Kerajaan Sunda Pajajaran tidak berarti memperlihatkan runtuhnya panggung politik *urang* Sunda. Dua buah pentas politik baru berhasil didirikan *urang* Sunda, yakni Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Bila Kesultanan Cirebon, hingga kini masih menyisakan panggung bagi terpentaskannya politik *urang* Sunda, melalui Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman, maka panggung politik *urang* Sunda di Kesultanan Banten harus berakhir pada awal abad ke-19 akibat terlalu dalamnya campur tangan pemerintah kolonial serta terlalu dalamnya

³ Ibid., hal. 7-8.

⁴ Ayatrohaedi. 1975. "Tarumanegara" dalam Atja (ed.), Sejarah Jawa Barat. Bandung: Proyek Penunjang Kebudayaan Nasional, hal. 27.

konflik internal di dalam tubuh kerabat kerajaan.

Era kompeni (VOC) dan juga Pemerintah Kolonial Belanda melahirkan pentas-pentas baru bagi kiprah politik *urang* Sunda, berupa kabupaten-kabupaten. Dalam hal ini, ada kabupaten yang merupakan produk kolonial dan ada pula kabupaten yang merupakan produk Kerajaan Mataram. Keberadaan kabupaten-kabupaten di tatar Sunda ini suka atau tidak suka, dapat dikatakan telah menyebabkan terjadinya perluasan tempat-tempat pergumulan kekuasaan bagi *urang* Sunda. Kekuasaan kini tidak hanya menjadi milik segelintir elit kerajaan tetapi telah menyebar pada masyarakat di luar tembok kerajaan. Jabatan-jabatan publik di bawah bupati pun banyak bermunculan. Kenyataan ini mendorong terjadinya peningkatan jumlah *urang* Sunda yang terlibat dalam panggung politik.

Berbeda dengan masa-masa sebelumnya, memasuki abad ke-20, sejalan dengan *zeitgeist*, *urang* Sunda berhasil menciptakan panggung-panggung politik baru yang menunjukkan jati diri *urang* Sunda yang selalu responsif terhadap setiap perubahan yang terjadi. Satu di antara panggung politik *urang* Sunda yang lahir di era pergerakan nasional tersebut adalah organisasi pergerakan Paguyuban Pasundan (1914). Di luar itu, panggung politik *urang* Sunda juga bertambah dengan kehadiran dewan-dewan yang dibentuk Pemerintah Kolonial Belanda, baik itu dewan rakyat (*volksraad*) maupun dewan kabupaten (*regentschapraad*) dan dewan kota (*gemeenteraad*).

Dalam era kemerdekaan, panggung-panggung politik *urang* Sunda pun menjadi semakin lengkap lagi. Panggung politik tersebut tidak hanya berada pada tataran suprastruktur politik tetapi juga yang berada pada tataran infrastruktur politik. Panggung politik pada tataran suprastruktur politik tidak hanya berupa lembaga eksekutif, tetapi juga berupa lembaga yudikatif dan lembaga legislatif. Panggung politik pada tataran infrastruktur politik, tidak hanya berupa partai-partai politik tetapi juga berupa organisasi-organisasi kemasyarakatan. Dilihat dari pendekatan geografis, tempat pergumulan kekuasaan tersebut juga tidak hanya berada dalam tataran politik lokal tetapi juga berada dalam tataran politik nasional.

Urang Sunda Membangun Demokrasi

Di samping kekuasaan, kosa kata lain yang sering dibicarakan dalam dunia politik adalah demokrasi. Demokrasi bagi kebanyakan masyarakat di dunia seakan telah dipandang sebagai satu-satunya jembatan yang akan membawa kemaslahatan bagi banyak orang. Istilah demokrasi pun selanjutnya sering dilawankan dengan istilah-istilah lain yang sangat tidak populer di mata rakyat kebanyakan, yakni otoritarianisme, totalitarianisme, dan tirani. Inti dari demokrasi

adalah adanya pemberian penghargaan yang tinggi terhadap peran *demos* atau *populus* dalam proses politik, baik input, konversi, maupun output atau setidaknya dalam tahapan memilih masalah apa yang hendak dibahas dan diputuskan dalam sebuah proses demokrasi.⁵ Dengan demikian, *password* bagi demokrasi adalah adalah pemberdayaan peran rakyat.

Untuk membedah sampai sejauh mana roh demokrasi mewarnai perjalanan politik *urang* Sunda bukanlah merupakan permasalahan mudah, untuk tidak mengatakan sebagai permasalahan yang sangat kompleks. Oleh karenanya, untuk memudahkan pengukuran tentang perjalanan kehidupan berdemokrasi *urang* Sunda dalam perjalanan politiknya perlu pula kiranya digunakan parameter-parameter. Pemahaman tentang demokrasi itu sendiri tentunya harus dilihat dari dua dimensi, yakni dimensi normatif dan dimensi empirik. Dimensi normatif merujuk pada aturan main, *rule of game*, atau apa yang seharusnya secara idil dari demokrasi. Dimensi empirik atau juga sering disebut sebagai *procedural democracy* merujuk pada realita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Setidaknya ada lima indikator yang dapat digunakan untuk mengukur perjalanan politik *urang* Sunda dalam membangun demokrasi. Pertama, akuntabilitas. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Kedua, rotasi kekuasaan. Hal ini ditandai oleh terbukanya peluang bagi terjadinya rotasi kekuasaan bagi setiap orang yang dilakukan secara teratur dan damai. Ketiga, rekrutmen politik yang terbuka. Rekrutmen politik bagi pengisian jabatan-jabatan publik harus berlaku sama bagi setiap orang, sepanjang memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditentukan. Keempat, pemilihan umum. Kelima, menikmati hak-hak dasar. Hak-hak dasar yang harus diberikan bagi suatu kehidupan yang demokratis, antara lain adalah hak untuk menyatakan pendapat (*freedom of expression*), hak untuk berkumpul dan berserikat (*freedom of assembly*), dan hak untuk menikmati pers yang bebas (*freedom of press*).⁶

Berpijak pada parameter-parameter di atas, terasa akan sangat sulit untuk mengukur secara tepat seluruh perjalanan politik *urang* Sunda dari kacamata demokrasi, terlebih demokrasi yang modern, bila kelima parameter tersebut digunakan semuanya. Hal itu disamping diakibatkan oleh tidak jelasnya dimensi normatif yang berlaku pada sebuah era juga dikarenakan beberapa parameter tersebut merupakan parameter untuk sebuah kehidupan demokrasi yang modern.

⁵ Robert A. Dahl. 1989. *Democracy and Its Critics*. New Haven, Connecticut: Yale University Press, hal. 113.

⁶ Afan Gaffar. 1999. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 7-9.

Oleh karena itu, di dalam membedah perjalanan “roh” kehidupan demokrasi dalam perjalanan politik *urang* Sunda, jumlah parameter yang digunakan untuk setiap era bisa jadi akan berbeda, disesuaikan dengan perkembangan zamannya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa perjalanan politik *urang* Sunda sejak masa Kerajaan Tarumanegara hingga masa-masa pemerintahan para bupati pada abad XIX masih jauh untuk dikatakan berada pada kehidupan yang demokratis. Dalam kurun waktu ini, meskipun salah satu parameter demokrasi, yakni rotasi kekuasaan terjadi secara teratur, baik pada masa kerajaan maupun kabupaten tetapi rotasi kekuasaan tersebut sangat bersifat tertutup atau hanya berada dalam lingkaran dalam kekuasaan, untuk tidak mengatakan bahwa pertarungan kekuasaan hanya terjadi pada kerabat raja dan para bupati. Namun demikian, untuk sebuah sistem politik tradisional, adanya rotasi kekuasaan yang berkesinambungan semacam itu sudah dapat dikatakan sebagai benih-benih awal bagi tumbuhnya kehidupan politik yang demokratis.

Bila rotasi kekuasaan di Kerajaan Sunda Pajajaran dijadikan sebagai sebuah contoh kasus, akan terlihat beberapa fenomena yang cukup menarik tentang perjalanan politik *urang* Sunda di era kerajaan Sunda. Selama 909 tahun eksistensinya, di Kerajaan Sunda Pajajaran telah terjadi 39 kali suksesi kepemimpinan atau rotasi kekuasaan. Dalam 39 kali suksesi kepemimpinan tersebut setidaknya ada lima model suksesi kepemimpinan yang terjadi. Pertama, dari raja kepada anak kandung laki-laki (25 kali). Kedua, dari raja kepada menantu (8 kali). Ketiga, dari raja kepada adik kandung (2 kali). Keempat, dari raja kepada saudara ipar (3 kali). Kelima, dari raja kepada keponakan (1 kali). Sementara itu dari 38 kali rotasi kekuasaan yang diketahui faktor penyebabnya, sebagian besar atau sebanyak 26 kali diakibatkan oleh faktor usia. Di luar itu, masih terdapat empat faktor penyebab terjadinya rotasi kekuasaan, yaitu, rotasi kekuasaan yang diakibatkan oleh terjadinya pelanggaran terhadap kaidah moral (3 kali), rotasi kekuasaan yang diakibatkan oleh adanya kudeta (5 kali), rotasi kekuasaan yang diakibatkan oleh pindahnya raja ke kerajaan lain (1 kali), serta rotasi kekuasaan yang diakibatkan oleh terbunuhnya raja yang tengah memerintah (3 kali).⁷

Beberapa fenomena yang menarik dari rotasi kekuasaan di Kerajaan Sunda Pajajaran adalah bahwa percaturan politik *urang* Sunda pada era kerajaan tidak sekedar mengenal suksesi kekuasaan damai yang diakibatkan oleh wafatnya raja yang tengah berkuasa tetapi juga mengenal suksesi kekuasaan yang diakibatkan oleh kudeta. Dengan demikian, budaya kekerasan dalam percaturan politik bukan

⁷ Untuk uraian yang lebih lengkap, lihat, Reiza D. Dienaputra. 1993. Kerajaan Sunda Pajajaran: Studi tentang Suksesi Kepemimpinan di Kerajaan Sunda Pajajaran. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, hal. 19-38.

hanya menjadi milik kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Fenomena menarik lainnya adalah adanya raja yang digantikan karena melanggar kaidah moral. Salah satu raja yang diturunkan karena melanggar kaidah moral ini adalah raja ke 38 Ratu Sakti Sang Mangabatan. Ia dipandang melanggar kaidah moral setelah menikahi wanita larangan.⁸ Kenyataan ini jelas menjadi menarik karena di tengah budaya politik yang masih parokial masalah moral bagi penguasa telah memperoleh tempat yang sangat penting.

Pada masa kekuasaan para bupati, baik sewaktu di bawah kekuasaan VOC maupun pemerintah kolonial, rotasi kekuasaan juga berlangsung secara tertutup atau hanya berada pada lingkaran dalam kerabat kabupaten. Contoh yang dapat dikemukakan untuk ini adalah apa yang terjadi di Cianjur. Dari 13 bupati yang berkuasa di Cianjur selama era VOC dan pemerintah Kolonial Belanda (1677-1942), sebagian besar merupakan anggota Trah Wira Tanu Datar. Trah ini secara konsisten memegang jabatan bupati di Cianjur melalui rotasi kekuasaan yang bersifat turun temurun setidaknya sejak tahun 1677 hingga tahun 1862. Setelah R.A.A. Prawiradireja II (1863-1910), kekuasaan bupati di Cianjur tidak diserahkan kepada putera lelakinya tetapi kepada menantunya R.A.A. Wiranatakusumah (1912-1920). Setelah R.A.A. Wiranatakusumah barulah Cianjur mengenal bupati yang bukan merupakan kerabat dekat bupati sebelumnya atau bahkan bukan merupakan anggota Trah Wira Tanu Datar. Bupati tersebut adalah R.A.A. Suriadiningrat (1920-1935). Sementara bupati terakhir di era kolonial, R.A.A. Suria Nata Atmaja (1935-1943), meskipun tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan bupati yang digantikannya, tetapi ia merupakan anggota Trah Wira Tanu Datar. Suria Nata Atmaja merupakan buyut dari Raden Adipati Wira Tanu Datar VI.

Meskipun percaturan politik *urang* Sunda di kerajaan dan kabupaten-kabupaten belum memperlihatkan kehidupan yang demokratis tetapi pada level yang lebih rendah, suasana kehidupan yang demokratis justru telah tampak. Berbeda dengan percaturan politik yang terjadi di lingkungan kerajaan dan kabupaten, pertarungan politik *urang* Sunda yang terjadi di desa-desa justru telah memperlihatkan kehidupan demokrasi yang sangat maju. Dari lima parameter demokrasi, percaturan politik *urang* Sunda di desa-desa dapat dikatakan telah memenuhi hampir semua parameter yang ditetapkan, meskipun untuk satu atau dua parameter di antaranya masih dilakukan dengan kualitas yang masih sederhana. Rotasi kekuasaan yang

⁸ Wanita yang dikategorikan wanita larangan atau estri larangan adalah wanita yang telah bertunangan atau telah menerima lamaran untuk diperistri. Setelah terjadinya perang Bubab, wanita yang berasal dari lingkungan Kerajaan Majapahit juga dimasukkan dalam wanita larangan, sehingga tabu untuk dinikahi. Atja dan Saleh Danasasmita. 1981. Sanghyang Siksakanda Ng Karesian: (Naskah Sunda Kuno Tahun 1518 M). Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, hal. 54-55.

teratur dan damai dilakukan melalui sistem pemilihan yang terbuka yang melibatkan seluruh masyarakat desa yang memenuhi persyaratan untuk memilih. Dalam kondisi demikian, rekrutmen politik pun secara otomatis telah berjalan dengan baik. Demikian pula halnya, hak dasar untuk menyatakan pendapat telah dijalankan dengan baik yang di antaranya ditandai oleh dibukanya kesempatan pada masyarakat untuk memilih secara langsung pemimpinnya.

Percaturan politik *urang* Sunda di desa yang memperlihatkan kehidupan politik yang demokratis telah berjalan relatif lama. Untuk Kesultanan Banten (abad ke-17 dan abad ke-18) para kepala desa biasanya diangkat oleh Sultan Banten.⁹ Mengingat jauhnya tingkat hirarkis kekuasaan antara Sultan dengan kepala desa, sebuah asumsi dapat dikedepankan bahwa sebelum diangkat Sultan, para kepala desa di wilayah kekuasaan Kesultanan Banten besar kemungkinan sebelumnya telah melalui proses pemilihan oleh rakyatnya.¹⁰ Tradisi pemilihan kepala desa yang telah berjalan lama ini kemudian mendapat legalitas Pemerintah Kolonial melalui Staatsblad tahun 1819 No. 13.¹¹

Memasuki abad ke-20, seiring dengan terjadinya perubahan politik yang mendasar, percaturan politik *urang* Sunda semakin banyak diwarnai oleh kehidupan politik yang demokratis. Kehadiran organisasi-organisasi pergerakan serta berbagai pranata pendukungnya, seperti pers, dewan rakyat, dewan-dewan kabupaten dan kota, telah mendorong tumbuhnya budaya politik yang partisipatif pada *urang* Sunda. Meskipun dilihat dari parameter demokrasi, percaturan politik *urang* Sunda yang terjadi di era organisasi-organisasi pergerakan ini belum memperlihatkan adanya perkembangan kehidupan demokrasi yang cukup berarti tetapi kehadiran organisasi pergerakan dan lembaga-lembaga perwakilan bentukan pemerintah kolonial telah memberi kesempatan bagi *urang* Sunda “perkotaan” untuk melaksanakan sebagian hak dasarnya, yakni hak untuk berkumpul dan berserikat serta hak untuk menyatakan pendapat.

Salah satu episode politik *urang* Sunda yang terjadi dalam era ini adalah berupa tuntutan Paguyuban Pasundan¹² terhadap Pemerintah Kolonial berkaitan dengan pembentukan Provincie West Java. Organisasi yang berorientasi sosial budaya

⁹ L.W.C. van Berg. 1901. “Het Inlandsche Gemeentewezen op Java en Madoera”. BKL, 52: 35.

¹⁰ Edi S. Ekadjati. op. cit., hal. 167.

¹¹ R. Soetardjo Kartohadikoesoemo. 1965. Desa. Bandung: Sumur Bandung, hal. 20, 27.

¹² Paguyuban Pasundan didirikan pada tanggal 20 Juli 1913. Adapun susunan pengurus Paguyuban Pasundan yang pertama kali terdiri dari D.K. Ardiwinata (Adviseur), Mas Dayat Hidayat (President), R Junjunan (Sekretaris), R Kusuma Sujana (Penningmeester), serta M Iskandar, Kartadi Wiria, Sastrahudaya, dan Abubakar (Komisaris). Melalui Surat Keputusan tanggal 9 Desember 1914, No. 46, pemerintah kolonial mengakui organisasi ini sebagai sebuah badan hukum yang berkantor di Jalan Kajiweg 17 Jakarta. Edi S. Ekadjati. 2004. Kebangkitan

Sunda ini menuntut pemerintah kolonial agar Provincie West Java yang akan dibentuk pada dasawarsa ketiga abad ke-20 diberi nama Propinsi Pasundan. Tuntutan Paguyuban Pasundan ini kemudian disetujui oleh pemerintah kolonial sehingga dalam ketetapan tentang pembentukan propinsi ini sebagaimana tercantum dalam Staatsblad tahun 1925 No. 285 dan 378, antara lain tertulis, “... West Java, in inheemsche talen aan te duiden als Pasoendan ...” (... Jawa Barat, dalam bahasa orang pribumi (bahasa Sunda) menunjuk sebagai Pasundan ...).¹³

Percaturan politik *urang* Sunda dalam merespon perkembangan yang tengah terjadi tidak terbatas dilakukan oleh kaum pria tetapi juga dilakukan oleh kaum wanita. Hal ini tersirat dari perjuangan para tokoh wanita di *tatar* Sunda, seperti Dewi Sartika, Siti Jenab, Emma Puradiredja, dan Neno Ratnawinadi (putri D.K. Ardiwinata). Dengan demikian, para wanita Sunda sejak lama telah memainkan peran penting dalam perjalanan politik *urang* Sunda. Para wanita Sunda tampak tidak hanya sekedar bergerak di dapur tetapi juga telah jauh keluar dari lingkungan tersebut. Bahkan, melalui organisasi yang bernama Pasundan Istri (PASI) para wanita Sunda juga mampu menampilkan dirinya sebagai kekuatan moral. Dalam kongres yang berlangsung di Bandung pada tanggal 18 hingga 19 April 1935, PASI mengangkat masalah *prostitutie* (pelacuran) sebagai salah satu agenda pembicaraan penting. Menurut PASI, pelacuran tidak sekedar harus dicegah tetapi yang lebih penting lagi, perlu dikeluarkan usulan agar diberikan hukuman yang berat kepada para pemilik tempat yang menyewakan tempatnya bagi praktek pelacuran serta para calo pelacuran.¹⁴

Dalam alam kemerdekaan, percaturan politik *urang* Sunda secara perlahan tapi pasti memperlihatkan suasana kehidupan yang semakin demokratis. Kehadiran berbagai suprastruktur dan infrastruktur politik, telah membuka kesempatan bagi kebanyakan *urang* Sunda untuk turut dalam percaturan politik. Wacana federalis yang mengemuka pada masa-masa awal kemerdekaan sebagai model baru *divide et impera* Belanda di Indonesia tampak disikapi begitu dinamis oleh para elit politik Sunda, seperti terlihat dari proses pembentukan Negara Pasundan. Manakala *urang* Sunda merasa terancam identitas dirinya, *urang* Sunda pun mampu bersuara lantang. Hal ini di antaranya dibuktikan melalui Kongres Pemuda Sunda pada tanggal 4-7

Kembali Orang Sunda: Kasus Paguyuban Pasundan 1913-1918. Bandung: Kiblat Buku Utama, hal. 38; Memed Erawan. 1991. Paguyuban Pasundan di Tengah-tengah Kancah Perjuangan Bangsa. Bandung: Mandalawangi, hlm. 5; Papaes-Nonoman, Orgaan Pagoejoeban Pasoendan, No. 1, Tahun 2, 31 Januari 1915, hlm. 1-3; juga Sjarif-Amin. 1984. Perjuangan Paguyuban Pasundan 1914-1942. Bandung: Sumur Bandung, hlm. 17.

¹³ Edi S. Ekadjati. 1995. Sunda, Nusantara, dan Indonesia: Suatu Tinjauan Sejarah. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran pada Hari Sabtu, 16 Desember 1995. Bandung: Universitas Padjadjaran, hal. 4.

¹⁴ Reiza D. Dienaputra. 2004. *Cianjur: Antara Priangan dan Buitenzorg (Sejarah Cikal Bakal Cianjur dan Perkembangannya Hingga 1942)*. Bandung: Prolitera, hal. 145-146.

November 1956. Salah satu hal menarik yang dihasilkan kongres adalah adanya proklamasi dari Seksi Kebudayaan yang menyatakan bahwa istilah Jawa Barat diganti dengan Sunda. Sebagai konsekuensinya istilah Jawa Tengah diganti dengan Jawa Barat dan nama pulau Jawa diganti dengan Nusa Selatan, sesuai contoh dari pemerintah sendiri yang mengganti istilah Sunda Kecil dengan Nusa Tenggara.¹⁵ Adapun alasan pemilihan istilah Sunda atau Tanah Sunda, bukan Jawa Barat atau Pasundan, karena istilah Jawa Barat merupakan terjemahan istilah West Java yang dipakai pemerintah kolonial sedangkan istilah Pasundan sering diidentikan dengan Priangan tanpa Banten dan Cirebon serta tercemar oleh kasus Partai Rakyat Pasundan pimpinan Musa Suriakartalegawa.¹⁶

Kini, seiring dengan perubahan politik di tanah air, percaturan politik *urang* Sunda terasa jauh lebih demokratis dibanding masa sebelumnya. Namun demikian melihat realitas yang terjadi saat ini, khususnya yang berkaitan dengan peran *urang* Sunda di pentas politik nasional, jelas perlu dilakukan upaya-upaya yang sistematis agar peran politik *urang* Sunda hari ini dan esok dapat lebih berkualitas secara demokratis serta mampu memberi kontribusi bagi lahirnya sistem politik yang lebih demokratis di negeri ini, termasuk mampu melahirkan kembali *urang* Sunda di pentas politik nasional. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk membangun kehidupan demokrasi yang lebih berkualitas, seperti membangun tradisi akuntabilitas bagi para pejabat publik, membangun sistem rotasi kekuasaan yang benar-benar terbuka dengan melibatkan seluruh *urang* Sunda yang memiliki hak memilih dan dipilih untuk berbagai jabatan publik, khususnya di tingkat I dan II, membangun sistem rekrutmen politik yang terbuka, serta meningkatkan pelaksanaan hak-hak dasar, harus dilakukan secara sungguh-sungguh oleh seluruh *urang* Sunda, khususnya mereka yang kini berada pada jajaran elit penguasa.

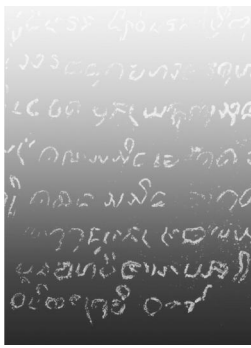
DAFTAR SUMBER

- Alfian, T. Ibrahim. 1985. Sejarah dan Permasalahan Masa Kini, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada pada tanggal 12 Agustus 1985.
- Atja dan Saleh Danasasmitha. 1981. Sanghyang Siksakanda Ng Karesian: (Naskah Sunda Kuno Tahun 1518 M). Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat.
- Ayatrohaedi. 1975. "Tarumanegara" dalam Atja (ed.), Sejarah Jawa Barat. Bandung: Proyek Penunjang Kebudayaan Nasional.

¹⁵ Edi S. Ekadjati, op. cit., hal. 19.

¹⁶ Ajip Rosidi. 1988. Hurip Waras: Dua Panineungan. Bandung: Pustaka Karsa Sunda, hal. 20.

- Dahl, Robert A. 1989. Democracy and Its Critics. New Haven, Connecticut: Yale University Press.
- Danasasmita, Saleh, et.al. 1983/1984. Rintisan Penelusuran Masa Silam Sejarah Jawa Barat. 4 Vols. Bandung: Proyek Penerbitan Sejarah Jawa Barat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- Dienaputra, Reiza D. 1993. Kerajaan Sunda Pajajaran: Studi tentang Suksesi Kepemimpinan di Kerajaan Sunda Pajajaran. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.
- . 2004. Cianjur: Antara Priangan dan Buitenzorg (Sejarah Cikal Bakal Cianjur dan Perkembangannya Hingga 1942). Bandung: Prolitera.
- Ekadjati, Edi S. 1995a. Kebudayaan Sunda (Suatu Pendekatan Sejarah). Jakarta: Pustaka Jaya.
- . 1995b. Sunda, Nusantara, dan Indonesia: Suatu Tinjauan Sejarah. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran pada Hari Sabtu, 16 Desember 1995.
- . 2004. Kebangkitan Kembali Orang Sunda: Kasus Paguyuban Pasundan 1913-1918. Bandung: Kiblat Buku Utama.
- Erawan, Memed. 1991. Paguyuban Pasundan di Tengah-tengah Kancah Perjuangan Bangsa. Bandung: Mandalawangi.
- Gaffar, Afan. 1999. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- J. Hageman Cz. 1867. “Geschiedenis der Soendalanden”, TBG, XVI. Batavia.
- Kern, R.A. 1898. Geschiedenis der Preanger-Regentschappen; Kort Overzicht. Bandung: De Vries & Fabricius.
- Kunto, Haryoto. 1984. Wajah Bandoeng Tempo Doeloe. Bandung: Granesia.
- Lubis, Nina H., dkk. 2003. Sejarah Tatar Sunda. Jilid I dan II. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.
- L. Pronk. 1929. De bestuursreorganisatie-Mullemeister op Java en Madoera en haar beteekenis voor het heden. Leiden: M. Dubbeldeman.
- Otto van Rees, Otto van. 1880. Overzicht van de Geschiedenis der Preanger-Regentschappen. Batavia.
- Papaes-Nonoman, Orgaan Pagoejoeban Pasoendan, No. 1, Tahun 2, 31 Januari 1915.
- Rosidi, Ajip. 1988. Hurip Waras: Dua Panineungan. Bandung: Pustaka Karsa Sunda.
- Sjarif-Amin. 1984. Perjoangan Paguyuban Pasundan 1914-1942. Bandung: Sumur Bandung.
- Van Berg, L.W.C. 1901. “Het Inlandsche Gemeentewezen op Java en Madoera”. BKI.
- Warnaen, Suwarsih et.al. 1987. Pandangan Hidup Orang Sunda. Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi) Depdikbud.



Transformasi Sistem Politik di Cianjur: Dari Tradisional ke Modern

Pengantar

Dalam masa-masa akhir kekuasaan Mataram di Priangan atau setidaknya pada tahun yang bersamaan dengan proses penyerahan pertama sebagian wilayah Priangan (Priangan Barat) dari Mataram kepada VOC,¹ di bagian wilayah yang diserahkan Mataram ini lahirlah sebuah wilayah politik baru yang bernama Padaleman Cianjur, dengan pusat pemerintahan berada di Cikundul. Sepeninggal dalem pertama, Aria Wira Tanu, atau semasa Aria Wira Tanu II memerintah, Cianjur kemudian menjadi sebuah kabupaten. Perkembangan Cianjur menjadi sebuah kabupaten ditandai oleh adanya pengakuan VOC terhadap keberadaan Aria Wira Tanu II sebagai regent (bupati) Cianjur pada tahun 1691. Aria Wira Tanu II menjabat bupati Cianjur hingga tahun 1707. Ia sekaligus bisa dikatakan sebagai bupati pertama Cianjur yang mendapat pengakuan dari VOC. Dengan demikian, kelahiran Cianjur sebagai sebuah kabupaten jelas memiliki keunikan tersendiri, setidaknya bila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain yang dibentuk oleh Mataram.

Perubahan politik yang dialami Cianjur semasa VOC bukanlah perubahan politik besar satu-satunya yang terjadi di Cianjur. Berbagai perubahan politik kembali dialami Cianjur seiring dengan terjadinya perubahan politik di tingkat “pusat”. Dinamika perubahan politik yang terjadi di Cianjur tersebut jelas menjadi sesuatu yang menarik untuk diamati lebih lanjut. Selanjutnya, mengingat begitu banyaknya komponen-komponen yang dapat diamati dalam hal perubahan politik di Cianjur ini, jelaslah perlu dilakukan pembatasan-pembatasan. Untuk itu, tulisan

¹ Penyerahan wilayah yang pertama dari Mataram kepada VOC dilakukan pada tahun 1677 atau kurang lebih 57 tahun setelah Mataram menguasai wilayah Priangan. Serah terima selanjutnya dari Mataram kepada VOC terjadi tahun 1705. Berdasarkan perjanjian yang dibuat tanggal 5 Oktober 1705, Mataram menyerahkan wilayah Priangan Timur dan Cirebon. F. de Haan, Priangan; De Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur Tot 1811, Tweede Deel (Batavia: G. Kolff & Co., 1911), hal. 261.

ini lebih memfokuskan bahasan komponen struktur politik dalam membedah transformasi sitem politik di Cianjur. Komponen struture politik ini di dalamnya memiliki dua unsur besar, yakni suprastruktur politik dan infrastruktur politik.

Sistem Politik di Cianjur Sebelum Masuknya Penetrasi Asing

Saat pertama kali wilayah politik yang bernama padaleman mulai dikenal di Cianjur, wilayah Cianjur dapat dikatakan terdiri dari beberapa padaleman. Tiap-tiap padaleman yang ada di Cianjur saat itu dipimpin oleh seorang kepala padaleman yang disebut dalem. Wilayah kekuasaan para dalem tersebut meliputi beberapa nagri, kampung, dan lembur. Adapun Jayasasana, yang pada awalnya menjadi kepala cacah dari kesatuan masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Cikundul, seiring dengan terbentuknya wilayah politik yang bernama Padaleman Cikundul, kemudian diangkat menjadi dalem Cikundul. Segera setelah memangku jabatan dalem Cikundul, Jayasasana memakai gelar Aria Wira Tanu. Kapan pastinya Jayasasana mulai memangku jabatan dalem Cikundul ataupun memakai gelar Aria Wira Tanu, belum diperoleh keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Di samping Padaleman Cikundul, di Cianjur saat itu juga dikenal beberapa padaleman lain, seperti Cipamingkis, Cimapag, Cikalong, Cibalagung, dan Cihea. Sebagaimana halnya Padaleman Cikundul, padaleman-padaleman lain yang ada saat itu juga memiliki pemimpin-pemimpin sendiri, terpisah dari kekuasaan dalem Cikundul. Barulah setelah terjadi pertemuan di antara para kepala padaleman, seperti, Aria Wira Tanu (dalem Cikundul), Nalamerta (dalem Cipamingkis), Nyilih Nagara (dalem Cimapag), Wangsa Kusumah (dalem Cikalong), Natamanggala (dalem Cibalagung), dan Wastu Nagara (dalem Cihea), tercapailah kesepakatan untuk menyatukan wilayah politiknya masing-masing dalam sebuah wilayah politik baru, yang bernama, Padaleman Cianjur.² Sebagai orang yang dipandang paling tua di antara para dalem, Aria Wira Tanu mendapat kepercayaan untuk menjadi dalem pertama Cianjur. Sejak menjadi dalem Cianjur, kekuasaan Aria Wira Tanu berkembang jauh lebih luas, meliputi seluruh Padaleman Cianjur, termasuk wilayah-wilayah baru yang sebelumnya merupakan padaleman-padaleman tersendiri.

Berbeda dengan saat terbentuknya Padaleman Cikundul atau naiknya Jayasasana sebagai dalem Cikundul, terbentuknya Padaleman Cianjur atau naiknya Aria Wira Tanu sebagai dalem Cianjur, waktunya bisa diperkirakan. Bila digunakan pendapat Otto van Rees, terbentuknya Padaleman Cianjur ini kemungkinan besar terjadi sesudah tahun 1619. Hal ini didasarkan atas pernyataan Otto van Rees

² Bayu Surianingrat, *Sajarah Cianjur sareng Raden Aria Wira Tanu Dalem Cikundul Cianjur* (Jakarta: Rukun Warga Cianjur, 1982), hal. 49.

yang mengatakan bahwa hingga tahun 1619, belum dikenal adanya suatu wilayah yang bernama Cianjur.³ Sementara itu, menurut catatan Cikundul-bond, terbentuknya Padaleman Cianjur ini terjadi sekitar tahun 1677.⁴ Bila pendapat yang terakhir ini bisa diterima, maka dengan demikian baru sejak tahun 1677 Cianjur memiliki sistem politik yang terpusat.

Transformasi Sistem Politik di Era VOC

Sebagaimana wilayah politik lain yang baru dikuasai VOC, tidak berapa lama setelah Mataram menyerahkan Priangan Barat kepada VOC, VOC segera mengadakan penjajagan-penjajagan ke wilayah Cianjur. Penjajagan pertama yang dilakukan VOC ke Cianjur diperkirakan terjadi pada tahun 1680. Kurang lebih sepuluh tahun kemudian atau tepatnya tahun 1691, VOC kembali mengirimkan utusannya ke Cianjur. Kedatangan utusan VOC, Kapten Winckler, segera diikuti oleh adanya pengakuan VOC terhadap Dalem Cianjur Aria Wira Tanu II sebagai regent (bupati) Cianjur.⁵ Pengakuan VOC terhadap dalem Cianjur sebagai bupati sekaligus merupakan pertanda konkrit masuknya Cianjur dalam jaringan sistem politik VOC. Sebuah perubahan mendasar pun secara otomatis telah terjadi, yakni digantikannya secara formal istilah dalem sebagai jabatan tradisional tertinggi yang mandiri dengan istilah regent atau bupati yang terintegrasi ke dalam sistem politik VOC.

Aria Wira Tanu II, yang naik sebagai dalem menggantikan ayahnya, Aria Wira Tanu I, memiliki nama asli Raden Aria Wiramanggala. Aria Wira Tanu II yang juga dikenal dengan sebutan dalem Tarikolot merupakan putra pertama dari sebelas orang putra-putri Aria Wira Tanu I. Sebelum naik menjadi bupati Cianjur, Raden Aria Wiramanggala sempat memegang jabatan sebagai umbul Cilaku.⁶ Sepeninggal Raden Aria Wira Tanu II pada tahun 1707, naiklah Raden Astramanggala sebagai bupati. Raden Astramanggala yang kemudian bergelar Aria Wira Tanu III adalah putra pertama dari 14 orang putra-putri Aria Wira Tanu II.⁷ Dengan naiknya Raden Astramanggala sebagai bupati Cianjur berarti ia melanjutkan tradisi penggantian bupati sebelumnya. Pada era pemerintahan Aria Wira Tanu III ini, ibukota Kabupaten Cianjur dipindahkan dari Pamoyanan ke Kampung Cianjur.

Di samping ditandai oleh adanya perpindahan ibukota kabupaten, masa pemerintahan Aria Wira Tanu III juga ditandai oleh upaya besar Aria Wira Tanu III untuk memperluas wilayah Cianjur serta mempertegas batas-batas wilayahnya.

³ Otto van Rees, *Overzicht van de Geschiedenis der Preanger-Regentschappen*, (Batavia, 1880), hal. 26.

⁴ Bayu Surianingrat, op. cit., hal. 49.

⁵ Ibid., hal. 53 dan 92.

⁶ Ibid., hal. 71 dan 85.

⁷ Ibid., hal. 153-154.

Hal lain yang juga dilakukan Aria Wira Tanu III adalah berkaitan dengan gelar bupati Cianjur. Pada tahun 1720, Aria Wira Tanu III mengajukan permohonan kepada VOC agar dirinya diberi gelar Pangeran Aria Dipati Amangkurat Di Datar. Namun, permohonan perubahan gelar ini tidak sepenuhnya dikabulkan VOC. VOC hanya mengabulkan penambahan kata Datar sebagai tambahan nama Aria Wira Tanu III. Dengan demikian, sejak Aria Wira Tanu III, kata Datar mulai dipakai sebagai nama tambahan resmi bupati Cianjur.

Seperti para pendahulunya, setelah Aria Wira Tanu III meninggal, yang naik sebagai penggantinya adalah putera tertuanya, Raden Sabirudin. Tidak seperti para pendahulunya, ketika naik sebagai bupati Cianjur, Raden Sabirudin menggunakan gelar Raden Adipati Wira Tanu Datar IV. Dengan demikian, di samping menambah kata Datar, ia juga mengganti gelar Aria dengan Adipati. Perubahan gelar dari Aria menjadi Adipati secara tidak langsung memperlihatkan naiknya status bupati Cianjur di mata VOC. Perubahan gelar ini pun kelak dirasakan manfaatnya oleh bupati Cianjur lainnya yang memerintah pasca hengkangnya VOC. Sebagai contoh, pada era Daendels dan juga komisaris jenderal, gelar yang dimiliki seorang bupati sangat menentukan besarnya jumlah abdi yang boleh dimiliki. Semasa Daendels berkuasa, untuk seorang bupati yang bergelar Adipati, seperti halnya bupati Cianjur, maka ia berhak untuk memiliki abdi hingga 140 orang. Bila gelarnya Tumenggung, bupati tersebut berhak memiliki 140 orang abdi, dan bila gelarnya Angabehi jumlah abdinya ditetapkan hanya sebanyak 70 orang. Semasa komisaris jenderal memerintah, jumlah abdi yang boleh dimiliki bupati dikurangi secara drastis. Untuk bupati yang bergelar Adipati, hanya boleh memiliki abdi 60 orang. Untuk bupati yang bergelar Tumenggung, hanya boleh mempunyai abdi 50 orang.⁸

Setelah berkuasa selama kurang lebih 34 tahun, kedudukan Raden Adipati Wira Tanu Datar IV sebagai bupati Cianjur digantikan oleh putera tertuanya, Raden Muhyidin. Gelar yang dipakai Raden Muhyidin adalah Raden Adipati Wira Tanu Datar V. Berbeda dengan Raden Adipati Wira Tanu Datar IV yang dikenal taat dalam menjalankan ibadah agama, Raden Adipati Wira Tanu Datar V, lebih dikenal sebagai bupati yang memiliki perhatian besar terhadap perkembangan seni budaya, khususnya seni penca silat.

Sepeninggal Raden Adipati Wira Tanu Datar V, putera tertuanya, Raden Noh alias Wiranagara naik menggantikan sebagai bupati Cianjur. Sebagaimana orang tuanya, Raden Noh juga memakai gelar Raden Adipati Wira Tanu Datar atau lengkapnya Raden Adipati Wira Tanu Datar VI. Hingga berakhirnya kekuasaan VOC, Raden Adipati Wira Tanu Datar VI masih menyanggah jabatan sebagai bupati

⁸ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium*, Jilid I, (Jakarta: Gramedia, 1987), hal. 299.

Cianjur. Ia memerintah hingga tahun 1813. Dengan demikian, Raden Adipati Wira Tanu Datar VI merupakan satu-satunya bupati Cianjur yang mengalami masa-masa transisi dari VOC kepada pemerintah kolonial Belanda.

Melihat jalannya prosesi peralihan dari bupati pertama hingga bupati kelima, secara eksplisit terlihat bahwa pola peralihan jabatan bupati Cianjur tersebut berlangsung secara turun temurun. Berbeda dengan peralihan dari Aria Wira Tanu I kepada Aria Wira Tanu II, yang relatif bebas dari pengaruh VOC, peralihan kekuasaan bupati-bupati Cianjur selanjutnya sedikit banyaknya turut ditentukan oleh kebijakan yang ditetapkan oleh VOC. Betapapun tradisi pewarisan jabatan bupati ini telah dimulai sejak sebelum mantapnya kehadiran VOC di Cianjur namun apabila sistem politik yang dibangun VOC tidak mendukungnya bisa jadi pola pewarisan jabatan bupati ini akan terhenti di tengah jalan atau setidaknya tidak akan berlangsung mulus hingga Raden Adipati Wira Tanu Datar VI. Dengan demikian, setidaknya untuk kasus Cianjur, sangatlah tepat pendapat yang dikemukakan Sartono Kartodirdjo bahwa dalam hal proses penggantian bupati, secara umum VOC menganut kebijakan untuk menunjuk putera tertua sebagai bupati. Di luar pengangkatan secara turun temurun, setidaknya masih ada dua model pengangkatan yang dijalankan VOC. Pertama, dalam kondisi putera tertua belum dewasa saat ayahnya meninggal maka saudara lelakinya diangkat untuk sementara waktu atau tetap. Kedua, pola pengangkatan yang didasarkan atas loyalitas dan kesetiaan seseorang. Model ini di antaranya pernah ditempuh VOC ketika mengangkat Raden Wiranata dari Cianjur sebagai bupati Kampung Baru pada tahun 1749. Pengangkatan Raden Wiranata sebagai bupati Kampung Baru dilakukan sebagai penghargaan atas jasa Raden Wiranata dalam berperang melawan Banten.⁹

Sebagai salah satu bagian dari wilayah politik yang bernama Priangan, struktur pemerintahan yang berlaku di Cianjur pada era VOC pun pada dasarnya bisa dikatakan mengikuti struktur politik umum yang berlaku di Priangan. Selama berkuasa di Priangan, VOC bisa dikatakan melaksanakan sistem pemerintahan tidak langsung (*indirect rule*). Dengan demikian, kekuasaan pemerintahan di daerah diserahkan kepada para bupati yang memang telah turun temurun menjalankan pemerintahan di wilayahnya. VOC tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam wilayah para bupati, kecuali yang berkaitan dengan perdagangan, seperti penyerahan kopi. Di luar sistem wajib tanam kopi, campur tangan VOC dalam batas-batas tertentu hanya terlihat dalam bidang pengadilan dan pengangkatan pejabat. Sejak tahun 1706, pengangkatan patih dilakukan oleh gubernur jenderal dan sejak tahun 1790 pengangkatan kepala distrik perlu mendapat persetujuan komisaris.¹⁰

⁹ Ibid., hal. 247.

¹⁰ Ibid., hal. 243-249.

Dalam hal struktur politik tradisional, VOC juga bisa dikatakan tidak banyak melakukan perubahan terhadap struktur yang telah ada. Bahkan, sejalan dengan kepentingan eksploitasi ekonominya, VOC cenderung semakin memperkuat struktur yang telah ada, khususnya dalam hal kedudukan bupati. Kalau pun ada pengaruh VOC dalam hal jabatan bupati, pengaruh itu antara lain hanya tampak dalam masalah sebutan bupati dan bupati alit. Sebutan bupati diberikan oleh VOC kepada kepala pemerintahan yang memiliki cacah antara 800 hingga 1300 orang. Bila jumlah cacah yang dimiliki kurang dari 800 orang disebut bupati alit. Sepanjang VOC berkuasa di Cianjur, Cianjur bisa dikatakan tidak pernah mengenal adanya jabatan bupati alit. Dengan demikian, sewaktu adanya pengakuan VOC terhadap Dalem Cianjur Aria Wira Tanu II, penduduk Cianjur setidaknya telah berjumlah antara 800 hingga 1300 orang.

Secara hirarkis, di samping bupati sebagai penguasa tradisional tertinggi, terdapat pula penguasa-penguasa lain di bawahnya, seperti patih, kepala cutak atau umbul, dan camat. Patih pada dasarnya memiliki tugas-tugas yang tidak jauh berbeda dengan tugas-tugas yang dijalankan bupati. Kepala cutak atau umbul pada dasarnya hanya berfungsi sebagai pelaksana perintah bupati untuk bagian-bagian tertentu dari kabupaten. Oleh karenanya, kepala cutak atau umbul lebih sering tinggal di ibukota kabupaten. Dalam tahun 1790, karena adanya perintah dari VOC, kepala cutak Cianjur setidaknya pernah mengadakan tiga kali perjalanan ke distrik-distrik yang dikuasainya. Perjalanan pertama diadakan ke perkebunan kopi. Perjalanan kedua diadakan ketika berlangsung proses pemetikan kopi. Perjalanan ketiga dilakukan ketika ia mengantarkan tugas pengawas kopi (*koffieopziener*). Untuk kelancaran tugas-tugasnya, kepala cutak menempatkan seorang camat di tiap-tiap ibukota distrik. Dengan demikian, seorang kepala cutak tidak hanya membawahi seorang camat tetapi membawahi beberapa orang camat. Camat sendiri pada dasarnya memiliki fungsi sebagai pemimpin perantara yang dibebani tugas tertentu oleh kepala cutak. Sejalan dengan fungsi yang diembannya, para camat lebih banyak tinggal di ibukota distrik. Hak untuk mengangkat camat berada di tangan bupati.¹¹

Relatif strategisnya fungsi dan tugas yang diemban oleh kepala cutak dalam abad ke-18, tidaklah mengherankan bila jabatan tersebut, seperti halnya jabatan patih, biasanya dipegang oleh orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan bupati. Sebagai contoh, Raden Wiranata, yang merupakan saudara bupati Cianjur, Raden Adipati Wira Tanu Datar IV, sebelum menjabat patih Cianjur dan kemudian bupati Kampung Baru, sempat menjabat umbul Jampang. Bahkan salah seorang

¹¹ Jacob Wouter de Klein, *Het Preangerstelsel (1677-1871) en Zijn Nawerking*, Proefschrift, (Leiden: 's-Gravenhage, 1931), hal. 14-16.

putera bupati Cianjur pertama, Raden Wiramanggala, sempat memegang jabatan umbu Cilaku pada tahun 1685 sebelum menjadi bupati Cianjur.¹²

Kedudukan bupati Cianjur semasa VOC, seperti halnya para bupati lain di Priangan, adalah sebagai ministerialis. Ia juga memperoleh surat pengangkatan (aanstellings acte).¹³ Mengingat pemberian surat pengangkatan baru dimulai sejak Desember 1704, maka bupati Cianjur pertama yang memperoleh surat pengangkatan adalah Raden Aria Wira Tanu III. Kewajiban utama bupati adalah memungut verplichte leveranties, yaitu hasil-hasil tanaman wajib tertentu yang diproduksi oleh rakyat dan menyerahkannya kepada VOC. Dengan demikian, sebagaimana halnya bupati-bupati Priangan lainnya, hubungan utama antara bupati Cianjur dengan VOC bersifat hubungan dagang. Dalam pola hubungan seperti ini, bupati berperan sebagai perantara atau leveransir, sekaligus pegawai dan bawahan VOC. Bupati di era VOC tidak menerima gaji dan hanya menerima uang imbalan dari penyerahan kopi, yang besarnya 6 ringgit per pikul, pendapatan dari pungutan pajak, dan dari hasil panen yang besarnya 1/10 atau 1/20.¹⁴ Khusus untuk bupati Cianjur, di samping memperoleh imbalan sebagaimana disebutkan di atas, masih memiliki beberapa sumber penghasilan lain, seperti, pemberian cap untuk kerbau, penyeberangan di atas sungai Citarum, izin pindah rumah, dan sewa tempat tinggal di ibukota ketika ada kunjungan resmi dari para pejabat yang lebih rendah.¹⁵

Meskipun VOC menjalankan sistem pemerintahan tidak langsung, tidaklah berarti VOC mempercayakan sepenuhnya pengawasan pemerintahan di wilayah-wilayah yang dikuasainya pada para pemimpin pribumi. Sebagaimana wilayah lainnya di Priangan, untuk Cianjur pun VOC menunjuk orang-orangnya sebagai pengawas pemerintah. Di samping *opzieners*, khususnya *koffieopzieners*, VOC juga mengangkat seorang pejabat yang berkedudukan sebagai *De Gecommitteerde tot en over de Zaken der Inlanders* (pegawai untuk urusan pribumi) sejak dasawarsa ketiga abad ke-18. Biasanya pejabat yang memegang jabatan ini dikenal dengan sebutan *landscommissaris*. Bahkan, di kalangan pribumi lebih dikenal dengan sebutan komisariss atau kumetir.¹⁶

¹² Bayu Surianingrat, op. cit., hal. 87.

¹³ Secara sederhana ministerialis bisa diartikan sebagai pengabdipengabdip yang memiliki pangkat tinggi. Berbeda dengan para bupati di Priangan, para bupati Pantai Utara Pulau Jawa atau Pantai Timur Laut Jawa, ketika naik sebagai bupati oleh VOC diharuskan menandatangani Surat Perjanjian Ikatan (*acte van verband*). Perbedaan ini kemudian dihapuskan sejak era Daendels. B.J.O. Schrieke, *Penguasa-penguasa Priumbi*, (Jakarta: Bhratara, 1974), hal. 59-62; juga R.A.L. Soerina Nata Atmadja, *De Regenten-Positie*, (Bandoeng: Uitgave A.C. Nix & Co., 1940), hal. 7.

¹⁴ Ibid., hal. 49; juga Sartono Kartodirdjo, op. cit., hal. 247-248.

¹⁵ Jacob Wouter de Klein, op. cit., hal. 46-47.

¹⁶ Bayu Surianingrat, op. cit., hal. 104; juga Jacob Wouter de Klein, op. cit., hal. 21-28.

Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, komisaris VOC memiliki pengaruh besar atas bupati. Wewenang yang dimiliki komisaris untuk memberikan penilaian terhadap bupati menjadi faktor penyebab utama besarnya pengaruh komisaris tersebut. Kedudukan strategis yang dimiliki komisaris tampaknya disadari betul oleh komisaris itu sendiri. Hal ini terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan komisaris VOC dalam memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri. Salah satu cara yang sering ditempuh oleh komisaris adalah dengan cara meminjamkan uang kepada para pejabat pribumi. Dengan cara itu, meskipun sejak tahun 1766, komisaris tidak memperoleh gaji, ia dapat tetap hidup senang dari bunga uang yang dipinjamkannya. Dalam hal perhatian terhadap rakyat, perhatian yang diberikan komisaris bisa dikatakan sangat kurang. Terlebih karena dalam kesehariannya, komisaris lebih sering tinggal di Batavia.¹⁷

Transformasi Politik di Era Pemerintah Kolonial

Pasca VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad ke-18 hingga menjelang datangnya pemerintah kolonial Belanda, bisa dikatakan tidak ada perubahan politik cukup mendasar yang terjadi di Cianjur. Masa transisi yang berlangsung hampir satu dasawarsa baru berakhir setelah datangnya Gubernur Jenderal Daendels. Dinamika penataan wilayah yang dialami Cianjur pada era Daendels maupun Raffles tidaklah secara otomatis membawa pengaruh besar terhadap keberadaan struktur politik di Cianjur. Selama masa penataan wilayah itu, bisa dikatakan tidak ada perubahan yang cukup berarti pada struktur politik di tingkat kabupaten. Bupati tetap merupakan pemegang kekuasaan tradisional tertinggi di Cianjur serta tetap pula menjadi jabatan politik tertinggi di Cianjur. Namun demikian, dilihat dari hak dan kewenangan bupati, baik pada masa Daendels maupun Raffles, terjadi perubahan yang sangat mendasar yang mengarah pada terjadinya degradasi kedudukan bupati. Bupati tidak saja diturunkan kedudukannya menjadi pegawai pemerintah semata, tetapi juga mengalami modifikasi prinsip pewarisan jabatan yang memaksanya untuk tunduk kepada pengangkatan (era Daendels) serta kehilangan hak untuk memungut pajak (era Raffles).

Perubahan lain yang cukup mendasar terjadi pada struktur politik di bawah kabupaten. Sejak Daendels berkuasa, mulailah diperkenalkan struktur yang lebih tegas pada pemerintahan di tingkat desa. Dengan demikian, Cianjur pun mulai mengenal adanya struktur politik pada tingkat desa. Unit teritorial yang mencakup lebih dari sepuluh keluarga dipimpin oleh seorang kuwu atau mantri dan petinggi atau lurah. Unit teritorial yang berpenduduk kurang dari sepuluh keluarga dikepalai oleh lurah. Satu-satunya tugas yang diberikan Daendels kepada kepala

¹⁷ Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hal. 245-249.

desa adalah memelihara keamanan dalam wilayahnya.¹⁸

Memasuki dasawarsa kedua abad ke-19, sejalan dengan perkembangan yang berhasil dicapainya, sebuah fungsi baru diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda kepada Cianjur, yakni fungsi sebagai pusat kekuasaan kolonial. Keberadaan Cianjur sebagai pusat kekuasaan kolonial ini ditandai oleh dijadikannya Cianjur sebagai ibukota Karesidenan Priangan. Dengan adanya fungsi baru tersebut, maka kedudukan Cianjur di mata pemerintah kolonial Belanda secara otomatis mengalami peningkatan. Pasca Cianjur menjadi pusat pemerintah kolonial di Karesidenan Priangan, secara politis status Cianjur setidaknya berada setingkat lebih tinggi dibanding kabupaten-kabupaten lain yang ada di Priangan.

Dalam hal transformasi sistem politik, perubahan-perubahan politik yang terjadi di Cianjur sejak dasawarsa kedua abad ke-19 ini secara umum dapat dibagi dalam dua bagian besar, yakni perubahan dalam struktur politik kolonial dan perubahan dalam struktur politik tradisional. Perubahan dalam struktur politik kolonial secara jelas terlihat saat Cianjur menjadi ibukota Karesidenan Priangan dan saat Cianjur tidak lagi menjadi ibukota Karesidenan Priangan. Pada saat Cianjur menjadi ibukota Karesidenan Priangan, pejabat kolonial tertinggi yang berkedudukan di Cianjur adalah residen. Pada masa-masa awal berlangsungnya pemerintahan karesidenan di Cianjur, struktur politik kolonial ini bisa dikatakan masih sangat sederhana. Di samping residen, hanya ada seorang pejabat kolonial lain yang menyertai residen, yakni inspektur penanaman kopi. Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya struktur politik kolonial ini dilengkapi pula dengan seorang sekretaris, seorang *kommies* kelas satu, seorang *kommies* kelas dua, seorang *kommies* kelas tiga, dan tiga orang asisten untuk membantu tugas-tugas inspektur penanaman kopi. Menjelang terjadinya perpindahan ibukota karesidenan, struktur politik politik kolonial di Cianjur, terdiri dari, C. van der Moore (residen), W.J. Pahud (sekretaris residen), W.F. Betz (*2e kommiezen*), dan J.H. Scipio (*3e kommiezen*).¹⁹ Di luar Residen C. Van Moore (1858-1864), selama Cianjur menjadi ibukota Karesidenan Priangan setidaknya masih ada 10 orang residen yang pernah bertugas di Cianjur. Kesepuluh residen tersebut adalah P.W.L. van Motman (1816-1820), R.L.J. Baron van der Capellen (1820-1825), P. Le Clercq (1825-1828 dan 1837-1839), O.C. Holmberg de Beckfeld (1828-1837), Jhr. J.F. Hora Siccama (1839-1841), J.B. Cleerens (1841-1846), P.J. Overhand (1846-1850), C.P.C. Steinmetz (1851-1855), dan Jhr. Mr. H.C. van der Wijck (1855-1858).

¹⁸ J.W. de Klein, op. cit., hal. 49-51; juga Sartono Kartodirdjo, op. cit., hal. 248.

¹⁹ Almanak en Naamregister van Nederlandsch Indie voor 1864, (Batavia: Ter Lands Drukkerij), hal. 85-86.

Pasca Cianjur tidak lagi menjadi ibukota Karesidenan Priangan, sebuah perubahan mendasar terjadi pada struktur politik kolonial di Cianjur. Sejak ibukota Karesidenan Priangan pindah dari Cianjur ke Bandung, pejabat kolonial tertinggi yang ditempatkan di Cianjur tidak lagi seorang residen melainkan seorang asisten residen. Ia merupakan wakil residen untuk Kabupaten Cianjur. Asisten residen sendiri pada dasarnya memiliki fungsi utama untuk mengawasi tugas-tugas yang dilaksanakan bupati. Berdasarkan penataan wilayah yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1871,²⁰ jumlah asisten residen yang ditempatkan di Kabupaten Cianjur ditambah satu orang hingga menjadi dua orang. Para asisten residen kelas dua, yang memiliki penghasilan f 12.180 per tahun masing-masing ditempatkan di Afdeling Cianjur dan Afdeling Sukabumi.²¹ Jumlah asisten residen sebanyak dua orang ini terus berlangsung hingga tahun 1921. Setelah itu, sejalan dengan terjadinya perubahan status administratif Afdeling Sukabumi menjadi Kabupaten Sukabumi, di Kabupaten Cianjur hanya ditempatkan seorang asisten residen. Dari kenyataan ini secara implisit terlihat bahwa secara politis sejak tahun 1871 sebenarnya wilayah Kabupaten Cianjur ini telah terbagi menjadi dua. Penempatan dua orang asisten residen di dua afdeling yang ada di bawah Kabupaten Cianjur merupakan pertanda konkret terpisahnya Afdeling Sukabumi dari Kabupaten Cianjur. Keberadaan Cianjur sebagai sebuah kabupaten yang membawahi Afdeling Sukabumi dan Afdeling Cianjur, dengan demikian terlihat benar-benar hanya sekedar proforma belaka.

Untuk membantu tugas-tugas asisten residen, struktur politik kolonial pada awalnya hanya dilengkapi dengan kommies kelas tiga, yang memiliki penghasilan sebesar f. 150 setiap bulan atau f. 1800 setiap tahun. Seiring dengan terjadinya perluasan tugas asisten residen, terjadi pula perubahan pada pejabat-pejabat kolonial yang mendampingi asisten residen. Perubahan ini di antaranya ditandai oleh munculnya jabatan-jabatan baru, seperti controleur, politieopziener 1e klasse (pengawas polisi kelas satu), dan luitenant der chineezzen.²² Menjelang berakhirnya kekuasaan kolonial di Cianjur, struktur politik kolonial di Cianjur, antara lain, terdiri dari, J.E. Ijsebaert (asisten residen), K. Huizenga (adspirant-controleur), Raden Supriyo (commies-redacteur), J. Fabriek (veldpolitie Cianjur, inspecteur van politie).²³

²⁰ Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1870, No. 124. Penataan wilayah ini, dengan demikian, dilakukan setelah dihapuskannya sistem tanam paksa tahun 1870 dan sistem Priangan tahun 1871. Khusus untuk sistem Priangan, penghapusannya hanya berlaku untuk komoditi di luar kopi. Penanaman wajib kopi di Priangan baru berakhir tahun 1917. Jacob Wouter de Klein, op. cit., hal. 119-125.

²¹ Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1870. No. 124.

²² Berdasarkan bersluit 30 Juni 1883, pengangkatan luitenant der chineezzen di Kabupaten Cianjur baru dilakukan sejak tahun 1883. *Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1883*, No. 169.

²³ Regeerings Almanak van Nederlandsch Indie, Tweede Gedeelte. Kalender en Personalie. (Weltevreden: Landsdrukkerij, 1940), hal. 310-321.

Berbeda dengan perubahan yang terjadi pada struktur politik kolonial, yang hanya tampak terjadi pada suprastruktur politik saja, perubahan yang terjadi pada struktur politik tradisional bisa dikatakan jauh lebih mendasar dan lebih dinamis. Perbedaan ini sejalan pula dengan beragamnya penataan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, dari mulai perubahan wilayah administratif hingga peraturan-peraturan yang secara khusus ditujukan bagi para pejabat pribumi yang ada dalam struktur politik tradisional.

Semasa Cianjur menjadi ibukota karesidenan, kedudukan bupati bisa dikatakan mengalami perubahan yang cukup berarti. Bila pada era komisaris jenderal kedudukan bupati Cianjur bisa dikatakan tidak jauh berbeda dengan era Daendels dan Raffles, maka tidak demikian halnya pada era sistem tanam paksa yang diintroduksi Van den Bosch pada tahun 1830. Dalam era sistem tanam paksa ini, kedudukan bupati Cianjur bisa dikatakan mengalami peningkatan kembali setelah pemerintah kolonial Belanda mengembalikan kedudukan bupati seperti pada era VOC dengan kekuasaan penuh dan hak mewariskan jabatan.²⁴

Pasca terjadinya perpindahan ibukota karesidenan, keberadaan bupati Cianjur sebagai penguasa tradisional tertinggi kembali mengalami perubahan-perubahan yang cukup mendasar, khususnya bila dilihat dari pasang surut kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional. Berbeda dengan perubahan semasa menjadi ibukota karesidenan, perubahan kedudukan bupati yang terjadi pasca Cianjur tidak lagi menjadi ibukota karesidenan justru berlangsung sebaliknya, dalam arti dari kedudukan tradisional yang semula kuat menjadi lemah. Lebih dari itu, penataan wilayah administratif yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda terhadap wilayah Cianjur pasca terjadinya perpindahan ibukota Karesidenan Priangan, secara perlahan tapi pasti juga telah mengakibatkan berkurangnya kekuasaan politik bupati Cianjur. Perubahan kekuasaan politik yang terbilang paling besar, dialami bupati Cianjur ketika pemerintah Belanda membagi wilayah Kabupaten Cianjur ke dalam dua buah afdeling, yakni Afdeling Cianjur dan Afdeling Sukabumi, sejak tahun 1871.

Berkaitan dengan pembagian wilayah Kabupaten Cianjur atas Afdeling Cianjur dan Afdeling Sukabumi, sebenarnya bila dilihat secara sepintas tampak tidak ada pengaruh yang cukup berarti terhadap kedudukan bupati Cianjur karena wilayah kekuasaannya seperti tidak mengalami perubahan berarti. Namun, bila diamati lebih seksama, penataan wilayah ini telah mengurangi wilayah kekuasaan bupati Cianjur mengingat wilayah pecahan Kabupaten Cianjur, yakni Afdeling Sukabumi, sejak terbentuk tahun 1871, secara administratif sudah tidak lagi berada di tangan

²⁴ B.J.O. Schrieke, *Penguasa-penguasa Pribumi*, (Jakarta: Bhartara, 1974), hal. 35.

bupati Cianjur tetapi telah berada di tangan patih afdeling.²⁵ Dengan demikian, perubahan Afdeling Sukabumi menjadi Kabupaten Sukabumi pada tahun 1921, pada dasarnya hanya sekedar penegasan formal dari terjadinya pengurangan kekuasaan politik bupati Cianjur.

Sebelum itu, sejak ditempatkannya asisten residen di Cianjur pada tahun 1864, bupati Cianjur pun pada dasarnya telah mengalami pengurangan kekuasaan di bidang pemerintahan. Pengurangan kekuasaan di bidang pemerintahan ini diikuti pula oleh penghapusan hak bupati untuk memungut pajak dari rakyat dalam bentuk uang, hasil bumi, dan tenaga kerja.²⁶ Sebagai gantinya, bupati Cianjur kembali menerima surat pengangkatan dari gubernur jenderal sebagai pegawai pemerintah, berdasarkan besluit gubernur jenderal tanggal 5 Mei dan 20 Juni 1871. Adapun gaji tetap untuk bupati Cianjur ditetapkan sebesar f 20.000 ditambah tunjangan sebesar f 24.000 sehingga jumlah total gaji bupati Cianjur adalah f 44.000. Di samping penghasilan tersebut, bupati Cianjur juga masih memperoleh pemasukan tambahan dari prosentase hasil penyerahan kopi kepada pemerintah. Besarnya prosentase adalah f. 1 untuk setiap pikul. Maksimum prosentase dari penyerahan kopi yang ditetapkan untuk bupati Cianjur adalah f. 30.000. Prosentase maksimum yang ditetapkan untuk bupati Cianjur ini jauh di bawah prosentase maksimum yang ditetapkan untuk bupati Bandung, yakni sebesar f. 82.000. Di luar kedua bupati tersebut, prosentase maksimum dari penyerahan kopi yang ditetapkan untuk tiga bupati lainnya adalah f. 30.000 untuk bupati Sumedang, f. 10.000 untuk bupati Limbangan, dan f. 6000 untuk bupati Sukapura.²⁷ Akhirnya, sejak tahun 1913, sebagaimana bupati-bupati lain di Priangan, bupati Cianjur juga kehilangan hak tradisional untuk mewariskan jabatan.²⁸

Pada struktur politik di bawah bupati, perubahan yang terjadi bisa dikatakan tidak hanya berupa perubahan yang sifatnya kuantitatif tetapi juga berupa

²⁵ Hingga akhir abad XIX, untuk seluruh Jawa dan Madura, setidaknya ada 11 afdeling yang memiliki patih afdeling. Di samping Sukabumi, 10 afdeling lainnya yang memiliki patih afdeling adalah Afdeling Anyer, Cicalengka, Tasikmalaya, Jombang, Sukapura Kolot, Salatiga, Kraksaan, Lumajang, Bawean, dan Jember. Penempatan patih afdeling di sebuah afdeling tidak selalu disebabkan karena adanya pembagian wilayah kabupaten menjadi lebih dari satu afdeling (seperti kasus Kabupaten Cianjur), tetapi ada juga yang disebabkan karena terjadinya penggabungan dua buah kabupaten. Hal ini misalnya terjadi pada tahun 1895 ketika Kabupaten Salatiga digabungkan dengan Kabupaten Semarang. Pasca penggabungan, Kabupaten Salatiga berubah menjadi Afdeling Salatiga. Di afdeling hasil bentukan baru ini kemudian ditempatkan seorang patih afdeling. L. Pronk, *De bestuursreorganisatie-Mullemeister op Java en Madoera en haar beteekenis voor het heden*, (Leiden: M. Dubbeldeman, 1929) *De bestuursreorganisatie-Mullemeister op Java en Madoera en haar beteekenis voor het heden*, (Leiden: M. Dubbeldeman, 1929), hal. 10.

²⁶ Jacob Wouter de Klein, op. cit., hal. 124.

²⁷ *Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1870*, No. 124.

²⁸ *Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1913*, No. 459.

perubahan yang sifatnya berupa perluasan birokrasi pemerintahan tradisional. Pada masa-masa awal Cianjur menjadi ibukota Karesidenan Priangan, struktur politik tradisional yang berkembang di Cianjur tampak belum terlalu rumit. Di samping bupati, pejabat tradisional lain yang ada di Cianjur adalah hoofd-jaksa dan jaksa. Untuk mengelola wilayah Cianjur yang demikian luas, bupati Cianjur dibantu pula oleh kepala distrik, kepala onderdistrik, kepala desa, dan kepala kampung. Di luar kepala-kepala wilayah itu, terdapat pejabat-pejabat tradisional lain yang sebagian besar di antaranya merupakan bawahan langsung kepala distrik, yaitu pangarang, ingabehi, lengser, patingggi, mandor kebon kopi, dan juru tulis. Pada tahun 1832, di luar bupati, penduduk pribumi yang menduduki struktur politik tradisional, terdiri dari, 6 orang hoofd-jaksa, 46 orang jaksa, 22 orang kepala distrik (kapala cutak), 32 orang kepala onderdistrik (camat), 601 orang kepala desa (lurah), 1751 orang kepala kampung, 48 orang pangarang, 31 orang ingabehi, 186 orang lengser, 119 orang patinggi, 444 orang mandor kopi, dan 51 orang juru tulis.

Memasuki tahun 1864, seiring dengan berlangsungnya penataan-penataan wilayah administratif, terjadi pula perubahan pada struktur politik tradisional di bawah bupati. Kepala distrik yang pada tahun 1832 berjumlah 22 orang, pada tahun 1864 tinggal 17 orang. Sebutannya pun sejak tahun 1849 telah berubah, dari kapala cutak menjadi wedana. Camat, yang pada tahun 1832 berjumlah 32, pada tahun 1864 bertambah satu, menjadi 33 orang. Lurah, yang pada tahun 1832 ada 601 orang, pada tahun 1864 berkurang lebih dari setengahnya, hingga tinggal 270 orang. Jabatan baru pada lapis atas struktur politik tradisional yang muncul pasca tahun 1832 adalah jabatan patih. Pada lapis bawah, setelah tahun 1832, struktur politik tradisional dilengkapi pula dengan jabatan-jabatan lain yang relatif baru, seperti, pancalang, mantri ulu-ulu, mantri gudang kopi, jagasatru, gebaijan, dan santana. Hingga akhir tahun 1864, di Cianjur setidaknya ada 17 orang jagasatru, 17 orang gebaijan, 145 orang mandor kebon kopi, 12 orang mantri gudang kopi, 17 orang mantri ulu-ulu, 348 orang pancalang, dan 135 orang santana.²⁹

Untuk tugas-tugas di bidang keagamaan, struktur politik tradisional di Cianjur mengenal pula pejabat-pejabat tradisional, seperti penghulu dan kleine penghulu (penghulu kecil). Para penghulu ini dalam tugasnya juga dibantu oleh ketibs (khatib) dan modins (muadzin). Jumlah pejabat tradisional yang bertugas di bidang keagamaan ini pada tahun 1832 tercatat sebanyak 705 orang, yang terdiri dari, 31 orang penghulu, 474 kleine penghulu, 65 orang ketibs, dan 135 orang modins.³⁰ Dalam perkembangan selanjutnya, di samping penghulu, ketibs, dan

²⁹ ANRI, Koleksi Arsip Priangan, Politiek Verslag 1864, Bundel No. 1/10.

³⁰ ANRI, Koleksi Arsip Priangan, Algemeen Verslag nopens den Staat der Preanger Regentschappen loopende over den jare 1830 den jare 1831 en meer specialijk over den jare 1832, Bundel No. 2/3.

modins, muncul pula jabatan-jabatan lain di bidang keagamaan, yakni chalifah, amil, dan marbot.³¹ Di luar para pemimpin agama yang berada dalam suprastruktur ada pula para pemimpin agama yang berada dalam infrastruktur, yakni para haji. Dari perkembangan ini, pada tahun 1856 di Cianjur setidaknya tercatat ada 893 orang pemimpin agama, yang terdiri dari, 1 orang hoofdpenghulu, 26 orang penghulu, 32 orang chalifah, 79 orang ketibs (khatib), 131 orang modins, 422 orang amil, 32 orang marbot, dan 170 orang haji.³²

Pasca Cianjur tidak lagi menjadi ibukota Karesidenan Priangan, struktur politik tradisional di Cianjur pada dasarnya tetap memperlihatkan perkembangan yang menarik. Perkembangan ini tidak hanya ditandai oleh terjadinya peningkatan jumlah pegawai pada pos-pos pekerjaan yang lama tetapi juga kembali ditandai oleh munculnya pos-pos jabatan baru bagi penduduk pribumi, meskipun peningkatannya tidak sebanyak peningkatan yang terjadi sebelum tahun 1864. Pos-pos jabatan baru yang muncul di Cianjur sesudah tahun 1864 di antaranya adalah mantri kabupaten, ondercollecteur, opas, dan mantri voor waterleidingen.³³ Sejak 1 Januari 1871, jabatan-jabatan dalam struktur politik tradisional di Cianjur yang diakui oleh pemerintah kolonial, di luar bupati dan patih, terdiri dari, mantri kabupaten, jaksa, wakil jaksa, penghulu kepala (hoofdpanghulu), kepala distrik, kepala onderdistrik, ondercollecteur, mantri voor waterleidingen, juru tulis, dan opas. Bersamaan dengan keluarnya ketentuan ini, pemerintah kolonial juga memutuskan untuk menghapus semua jabatan lain dalam struktur politik tradisional yang pernah dikenal sebelumnya, kecuali jabatan-jabatan dalam pemerintahan desa.³⁴

Untuk pemimpin keagamaan, perkembangan paling menarik terjadi pada tokoh agama yang berada dalam infrastruktur. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Cianjur yang berangkat ke tanah suci relatif terus bertambah. Hal ini juga terus berlangsung pasca terjadinya perpindahan ibukota Priangan.

³¹ Penghulu memiliki arti sebagai seorang ahli dalam agama Islam yang diakui dan diangkat oleh pemerintah. Penghulu memiliki tugas-tugas, antara lain, mengadili soal-soal agama menurut hukum Islam, memberi penerangan tentang hukum agama, memimpin masjid, mengawasi pendidikan agama, dan mengurus serta mencatat pernikahan, perceraian, dan rujuk menurut hukum Islam. Ketibs (khatib) adalah orang yang bertugas menyampaikan khutbah pada hari Jumat dan hari-hari besar Islam. Modins (muadzin) adalah orang yang bertugas mengumandangkan adzan. Chalifah atau adjunct-penghulu adalah orang yang bertugas untuk mewakili penghulu. Amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan zakat, infaq, dan shadaqah. Marbot adalah orang yang memiliki tugas untuk menjaga kebersihan masjid. G.F. Pijper, Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950, (Jakarta: UI-Press, 1984), hal. 67-100.

³² ANRI, Koleksi Arsip Priangan, Politiek Verslag 1856, Bundel 1/2.

³³ ANRI, Koleksi Arsip Priangan, Politiek Verslag 1872, Bundel No. 1/18; juga Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1870, No. 124.

³⁴ Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1870, No. 124.

Peningkatan jumlah penduduk Cianjur yang berangkat ke tanah suci pada akhirnya jelas berpengaruh terhadap jumlah haji di Cianjur. Pada tahun 1873, jumlah haji yang dimiliki Cianjur mencapai 907 orang. Bila dibandingkan dengan tahun 1856, jumlah haji pada tahun 1873 ini memperlihatkan adanya penambahan haji sebanyak 737 orang.³⁵ Tidak seperti halnya haji, para pemimpin agama yang berada dalam suprastruktur, baik penghulu maupun pegawai yang bertugas membantu penghulu, terlihat mengalami penurunan. Penghulu yang pada tahun 1856 berjumlah 27 orang, memasuki tahun 1873 jumlahnya tinggal 21 orang, yang terdiri dari seorang hoofd penghulu (ditempatkan di Afdeling Cianjur), seorang penghulu (ditempatkan di Afdeling Sukabumi), dan 19 penghulu distrik (12 di Cianjur, 7 di Sukabumi). Chalifah, yang pada tahun 1856 berjumlah 32 orang, tahun 1873 jumlahnya berkurang hingga tinggal 30 orang. Ketibs, yang pada tahun 1856 berjumlah 79 orang, pada tahun 1873 jumlahnya menurun hampir setengahnya hingga tinggal 40 orang. Modins, yang pada tahun 1856 berjumlah 131 orang, pada tahun 1873 jumlahnya juga menurun secara drastis hingga tinggal 59 orang. Amil, yang pada tahun 1856 berjumlah 422 orang, pada tahun 1873 menurun hingga tinggal 288 orang. Merbot, yang pada tahun 1856 berjumlah 32 orang, pada tahun 1873 juga terlihat mengalami pengurangan hingga tinggal 30 orang. Belum diperoleh keterangan tentang faktor penyebab berkurangnya jumlah pemimpin agama yang berada dalam suprastruktur ini.

Sejalan dengan terjadinya penataan wilayah administratif pada tingkat distrik, terjadi pula perubahan-perubahan yang sifatnya kuantitatif pada jabatan-jabatan setingkat kepala distrik, kepala onderdistrik, dan kepala desa. Pasca reorganisasi pemerintahan yang berlangsung pada tahun 1882, di Kabupaten Cianjur terdapat 16 orang kepala distrik (wedana) dan 39 orang kepala onderdistrik (asisten wedana). Dari 16 orang wedana yang memerintah di Kabupaten Cianjur, 9 orang berada di Afdeling Cianjur, dan 7 orang berada di Afdeling Sukabumi. Dari 39 orang asisten wedana yang bertugas di Kabupaten Cianjur, 21 orang bertugas di Afdeling Cianjur, dan 18 orang bertugas di Afdeling Sukabumi.³⁶ Bila diamati lebih lanjut, jumlah kepala onderdistrik yang ada di Kabupaten Cianjur tampak tidak sebanding dengan jumlah onderdistrik. Perbedaan jumlah kepala onderdistrik dan jumlah onderdistrik ini terjadi dikarenakan tidak semua onderdistrik memiliki kepala onderdistrik setingkat asisten wedana. Di luar onderdistrik yang diperintah oleh asisten wedana, ada beberapa onderdistrik, khususnya onderdistrik yang menjadi tempat kedudukan ibukota distrik, yang diperintah langsung oleh wedana sehingga tidak memiliki asisten wedana.

³⁵ ANRI, Koleksi Arsip Priangan, Politiek Verslag 1873, Bundel No. 1/19.

³⁶ Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1882, No. 252.

Keberadaan asisten wedana sebagai kepala onderdistrik sekaligus pula semakin menegaskan adanya perubahan sebutan pejabat pemerintah yang mengepalai onderdistrik, yang telah dimulai sejak tahun 1874. Sebagai kepala onderdistrik, seorang asisten wedana masih membawahi lagi kurang lebih 15 desa.³⁷ Dalam kedudukannya sebagai pegawai pemerintah, para kepala distrik dan onderdistrik mendapat gaji tetap dari pemerintah. Untuk wedana, diberikan gaji sebesar f. 2400 setiap tahun. Untuk asisten wedana kelas satu, diberikan gaji sebesar f. 1200 setiap tahun. Untuk asisten wedana kelas dua, diberikan gaji f. 780 setiap tahun.³⁸

Menyertai berbagai penataan pada tingkat distrik dan onderdistrik, terjadi pula perubahan-perubahan pada tingkat desa. Sebagaimana halnya perubahan pada tingkat distrik dan onderdistrik, perubahan jumlah desa secara otomatis akan membawa perubahan pula terhadap jumlah kepala desa. Pengurangan jumlah desa dari 270 desa di tahun 1864 menjadi 157 desa pada dasawarsa terakhir abad ke-19, secara otomatis menyebabkan berkurangnya jumlah kepala desa di Cianjur dari 270 menjadi 157 kepala desa. Demikian pula halnya ketika jumlah desa yang ada di Cianjur berkurang menjadi 133 desa pada tahun 1926. Pada dasawarsa ketiga abad ke-20 tersebut, jumlah seluruh pamong desa yang ada di Cianjur ada 1318 orang. Diluar kepala desa yang berjumlah 133 orang, pamong desa yang bertugas di Cianjur terdiri dari 27 orang wakil kepala desa, 684 orang kepala kampung, 133 orang juru tulis, 55 orang pegawai pengairan, 216 orang pegawai polisi, dan 203 orang modin.³⁹ Dari 133 kepala desa yang ada di Cianjur, sebanyak 45 orang kepala desa memiliki penghasilan antara f. 1200 hingga f. 1800, 28 orang kepala desa memiliki penghasilan antara f. 900 hingga f. 1200, 27 orang kepala desa memiliki penghasilan antara f. 1800 hingga f. 2400, 20 orang kepala desa memiliki penghasilan antara f. 600 hingga f. 900, 11 orang kepala desa memiliki penghasilan di atas f. 2400, dan 2 orang kepala desa memiliki penghasilan di bawah f. 600.⁴⁰ Memasuki dasawarsa terakhir abad ke-19, jumlah pamong desa di Kabupaten Cianjur meningkat menjadi 1549 orang, termasuk di dalamnya 132 orang juru tulis. Berbeda dengan para kepala desa lainnya yang ada di Priangan, para kepala desa yang ada di Cianjur ini tidak memperoleh tanah bengkok. Oleh karena itu, sumber penghasilan para kepala desa di Cianjur, antara lain berasal dari upah memungut pajak, iuran tidak tetap, dan uang jasa dari bank dan lumbung desa.⁴¹

³⁷ Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*, Terjemahan oleh Sunarto, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hal. 53.

³⁸ *Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1882*, No. 253.

³⁹ Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, (Jogjakarta, 1953), hal. 380-381, dan 386.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 386.

⁴¹ Edi S. Ekadjati, *Kebudayaan Sunda (Suatu Pendekatan Sejarah)*. (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hal. 179 dan 185; juga Soetardjo Kartohadikoesoemo, *op. cit.*, hal. 387.

Memasuki awal abad ke-20, sebagai dampak penataan wilayah administratif di Kabupaten Cianjur, struktur politik tradisional di Kabupaten Cianjur, secara umum terbagi atas dua struktur besar. Pertama, struktur politik tradisional yang ada di Afdeling Cianjur. Kedua, struktur politik tradisional yang ada di Afdeling Sukabumi. Di samping bupati, pada lapis atas struktur politik tradisional yang ada di Afdeling Cianjur terdapat pula pejabat tradisional lain, yakni patih. Untuk jabatan patih, dipegang oleh Raden Demang Natakusumah. Ia menjadi Patih Cianjur sejak tanggal 3 Juli 1894. Di bawah patih terdapat pula jabatan ondercollecteur dan wedana. Jabatan ondercollecteur dipegang oleh Mas Rangga Wira Di Sastra. Untuk jabatan wedana, pada awal abad ke-20 ada 8 orang wedana yang memerintah di Cianjur.⁴²

Sedikit berbeda dengan Afdeling Cianjur, untuk Afdeling Sukabumi, struktur politik tradisionalnya tidak memiliki pejabat tradisional setingkat bupati. Sebagai gantinya, di Afdeling Sukabumi ditempatkan seorang patih afdeling. Dengan demikian, kekuasaan tertinggi pada struktur politik tradisional di Afdeling Sukabumi berada di tangan patih afdeling. Patih Afdeling Sukabumi membawahi tujuh orang kepala distrik. Pada awal abad ke-20, jabatan patih Afdeling Sukabumi dipegang oleh Raden Suria Nata Pamekas. Ia memegang jabatan patih Afdeling Sukabumi sejak tanggal 8 Oktober 1895.⁴³

Memasuki dua dasawarsa terakhir kekuasaan kolonial, struktur politik tradisional di Cianjur kembali ditandai adanya berbagai perubahan. Di luar jabatan bupati dan patih, dikenal pula jabatan lain yang relatif baru, yakni regentschapssecretaris 1e klasse (sekretaris kelas 1 kabupaten), dan adjunct-regentschapssecretaris (wakil sekretaris kabupaten). Untuk jabatan patih, dipegang oleh Raden Sumawirya. Sumawirya, yang merupakan patih terakhir Cianjur di era kolonial, diangkat menjadi patih sejak tanggal 30 Juni 1936. Untuk jabatan sekretaris kelas 1 kabupaten dan wakil sekretaris kabupaten, masing-masing dipegang oleh Mas Abdurachman dan Entol Junaedi Satiawiharja. Mas Abdurachman memegang jabatan sekretaris kelas 1 kabupaten sejak tanggal 9 Desember 1832. Entol memegang jabatan wakil sekretaris sejak tanggal 23 April 1938.⁴⁴

Untuk tingkat distrik, di samping wedana, terdapat pula jabatan asisten wedana dan mantri polisi.⁴⁵ Pada akhir kekuasaan kolonial hanya ada lima orang wedana

⁴² Regeerings Almanak van Nederlandsch Indie, Tweede Gedeelte: Kalender en Personalia, (Batavia: Landsdrukkerij, 1906), hal. 165.

⁴³ Regeerings Almanak van Nederlandsch Indie, Tweede Gedeelte: Kalender en Personalia, (Batavia: Landsdrukkerij, 1906), hal. 166.

⁴⁴ Regeerings Almanak van Nederlandsch Indie, Tweede Gedeelte: Kalender en Personalia, (Batavia: Landsdrukkerij, 1940), hal. 316.

⁴⁵ ANRI, Koleksi Mikrofilm MvO Seri 2e, Memorie van Overgave der Residentie Buitenzorg van den Aftredenden Residen van Buitenzorg, Mr. P.M. Letterie, 8 Juni 1933, hal. 69-70.

yang memerintah di Kabupaten Cianjur. Kelima wedana tersebut masing-masing mengepalai sebuah distrik. Untuk Distrik Cianjur, jabatan wedana sejak tanggal 23 Desember 1938 dipegang oleh Raden Abas Wilagasumantri. Untuk Distrik Pacet, jabatan wedana dipegang oleh Raden Danu Sumawilaga sejak tanggal 8 Oktober 1937. Untuk Distrik Ciranjang, dipegang oleh Raden Adikusumah sejak tanggal 4 April 1939. Untuk Distrik Sukanagara, sejak tanggal 10 Januari 1938 dipegang oleh Raden Kahpi Sutadikusumah. Untuk Distrik Sindangbarang, dipegang oleh Raden Sueb Suriaatmaja, sejak tanggal 2 Agustus 1939.⁴⁶

Di luar perubahan-perubahan di atas, keberadaan struktur politik di Cianjur diwarnai pula oleh sebuah perubahan yang sangat mendasar, yakni berdirinya dewan kabupaten (regentschapsraad). Berdasarkan artikel 2 dan artikel 3, jumlah anggota Dewan Kabupaten Cianjur ditetapkan sebanyak 25 orang, yang terdiri dari 4 orang Belanda, 19 pribumi, dan 2 orang nonpribumi yang bukan Belanda. Dari 19 anggota pribumi, 13 orang merupakan anggota dewan hasil pemilihan, dengan rincian, hasil pemilihan dari Distrik Cianjur 2 orang, Distrik Ciranjang 1 orang, Distrik Cikalong Kulon 1 orang, Distrik Pacet 2 orang, Distrik Cibeber 2 orang, Distrik Sukanagara 2 orang, dan hasil pemilihan dari Distrik Sindangbarang 2 orang.⁴⁷ Dengan demikian, bila dilihat dari proses menjadi anggota dewan, dari 25 anggota dewan kabupaten di Cianjur, 13 orang merupakan hasil pemilihan dan 12 orang merupakan hasil pengangkatan. Dari 25 orang anggota dewan kabupaten yang ditetapkan tanggal 2 Oktober 1929, hingga akhir Mei 1933 hanya tinggal 21 orang yang masih aktif menjalankan tugasnya. Empat orang anggota dewan yang tidak lagi aktif menjalankan tugas, tiga orang merupakan anggota dewan hasil pemilihan dan seorang merupakan anggota dewan hasil pengangkatan. Dilihat dari latar belakang pekerjaan, di samping pejabat pemerintah, seperti asisten residen, wedana, dan asisten wedana, ada pula anggota dewan yang berasal dari kalangan nonpemerintahan, seperti, guru, pedagang, dan pengusaha perkebunan. Adapun daftar lengkap anggota dewan kabupaten Cianjur, dapat dilihat dalam tabel.

Perubahan politik lain di Cianjur, yang tidak kalah menarik untuk diamati, adalah perubahan yang menyangkut keberadaan trah (kelompok keturunan) Wira Tanu Datar. Walaupun trah Wira Tanu Datar masih tampak mendominasi struktur politik Kabupaten Cianjur, baik saat Cianjur menjadi ibukota Karesidenan Priangan maupun sesudah Cianjur tidak lagi menjadi ibukota Karesidenan Priangan, akan tetapi tampak terjadi pergeseran dalam pola penggantian jabatan bupati.⁴⁸ Pada masa

⁴⁶ Regeerings Almanak van Nederlandsch Indie, Tweede Gedeelte: Kalender en Personalie, (Batavia: Landsdrukkerij, 1940), hal. 316.

⁴⁷ Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1925, No. 387.

⁴⁸ Bayu Surianingrat, Sajakah Cianjur sareng Raden Aria Wira Tanu Dalem Cikundul Cianjur, (Jakarta: Rukun Warga Cianjur, 1982).

**Daftar Nama Anggota Dewan Kabupaten Cianjur
(Keadaan hingga Akhir Mei 1933)**

Nama	Pekerjaan	Pemilihan atau Pengangkatan
1. M. Soerapradja	guru	pemilihan
2. R.H. Mubarak	swasta	pengangkatan
3. M. Kartamihardja	kepala desa	pemilihan
4. M. Soekartaatmadja	asisten wedana	pemilihan
5. R. Martadisastra	guru	pemilihan
6. Liauw Han Liang	pedagang	pengangkatan
7. M. Djajadikarta	asisten wedana	pemilihan
8. Oeij Liang Tiam	pedagang	pengangkatan
9. H. Kartawidjaja	asisten wedana	pemilihan
10. L.E. van Hecking Colenbrander	asisten residen	pengangkatan
11. F.J.L. Claassen	planter	pengangkatan
12. M. Soedarga	adspirant boscharchitect	pengangkatan
13. M. Alka	adjunct landbouw consulent	pengangkatan
14. D. Platt	administrateur landbowhouve	pengangkatan
15. R. Rg. Wangsaatmadja	wedana	pemilihan
16. R. Marijoen	hoofdopzichter prov. irigatie	pengangkatan
17. M. Wirasendjaja	guru	pemilihan
18. R.D. Soemawilaga	asisten wedana	pemilihan
19. R.H. Abdoeladjiz	swasta	pemilihan
20. M. Th. Laupman	planter	pengangkatan
21. R.H. Mh. Saleh	hoofdpenghulu	pengangkatan

Sumber: ANRI, Koleksi Mikrofilm MvO Seri 2e, Memorie van Overgave der Residentie Buitenzorg van den Aftredenden Residen van Buitenzorg, Mr. P.M. Letterie, 8 Juni 1933, hal. 43-44.

VOC, jabatan sebagai bupati bisa dikatakan seluruhnya diturunkan kepada putera lelaki tertua bupati yang tengah berkuasa. Memasuki abad ke-19 dan abad ke-20, ternyata pola penggantian bupati dari orang tua kepada putera lelaki tertua ini tampak tidak pernah terjadi lagi. Namun demikian, tidak dikenalnya pola penggantian jabatan bupati dari orang tua kepada putera lelaki tertua ini, tidak berarti menandakan bahwa pola peralihan jabatan bupati yang diturunkan oleh orang tua kepada anak, sudah tidak dikenal sama sekali. Dari tujuh orang bupati yang berkuasa di Cianjur dalam kurun waktu 1816 hingga 1942, setidaknya ada dua orang bupati yang masih menurunkan kekuasaannya kepada putera lelakinya, yakni, R.A.A. Prawiradiredja I (1813-1833) dan R.A.A. Kusumahningrat (1834-1862).

R.A.A. Prawiradireja I digantikan oleh putera lelakinya nomor lima, Raden Hasan atau R.A.A. Kusumahningrat (1834-1862). Sebenarnya, sebelum Raden Hasan naik sebagai bupati Cianjur, R.A.A. Prawiradireja I, dengan persetujuan Residen Priangan O.C. Holmberg de Beckfeld, sempat memberi kesempatan kepada putera lelakinya yang nomor empat, Raden Wiranagara, untuk menjabat bupati Cianjur. Namun, dalam masa percobaan selama dua tahun yang diberikan pemerintah kolonial, Raden Wiranagara ternyata gagal memperlihatkan kemampuannya kepada pemerintah kolonial untuk memimpin Kabupaten Cianjur. Atas dasar itu, maka diangkatlah adik lain ibu Raden Wiranagara, yakni Raden Hasan, sebagai bupati Cianjur. Peralihan kekuasaan bupati dari R.A.A. Prawiradireja I kepada Raden Hasan di samping merupakan pergantian bupati pertama yang terjadi dalam kurun waktu 1816-1942, sekaligus memperlihatkan tetap bertahannya trah Wira Tanu Datar sebagai pemegang puncak kekuasaan di Kabupaten Cianjur. R.A.A. Kusumahningrat, digantikan oleh putera lelaki nomor tiga, yakni, Raden Alibasah atau R.A.A. Prawiradireja II. Peralihan kekuasaan bupati dari R.A.A. Kusumahningrat kepada R.A.A. Prawiradireja II ini sekaligus pula merupakan peralihan kekuasaan bupati terakhir di Cianjur yang memiliki pola peralihan dari orang tua kepada putera lelakinya.

Di luar R.A.A. Prawiradireja I dan R.A.A. Kusumahningrat, pola peralihan kekuasaan yang dilakukan tiga bupati lainnya tampak berbeda-beda. R.A.A. Prawiradireja II, meskipun memiliki putera lelaki, tetapi tidak menurunkan kekuasaannya kepada putera lelakinya. Penggantinya adalah menantunya, Raden Muharam Wiranatakusumah, bekas camat Cibeureum, Kabupaten Bandung. Naiknya Raden Muharam Wiranatakusumah atau Raden Aria Adipati Wiranatakusumah sebagai bupati Cianjur (1912-1920), bisa dikatakan telah menjadikannya sebagai bupati Cianjur pertama yang bukan berasal dari trah Wira Tanu Datar. Ketika R.A.A. Wiranatakusumah dialihkan tugasnya sebagai bupati Bandung, jabatan bupati Cianjur dialihkan kepada Suriadiningrat atau Raden Aria

Adipati Suriadiningrat (1920-1935).⁴⁹ Suriadiningrat bisa dikatakan tidak memiliki hubungan darah sama sekali dengan R.A.A. Wiranatakusumah. Dengan demikian, R.A.A. Suriadiningrat bisa dikatakan merupakan bupati kedua di Cianjur yang bukan berasal dari trah Wira Tanu Datar.

Sama halnya dengan R.A.A. Wiranatakusumah, R.A.A. Suriadiningrat pun ketika turun dari jabatannya sebagai bupati Cianjur, tidak menurunkan kekuasaannya kepada putera lelakinya, tetapi menyerahkannya kepada Raden Abas atau R.A.A. Suria Nata Atmaja.⁵⁰

Meskipun bupati yang menggantikannya tidak memiliki hubungan darah dengan bupati yang digantikan, tetapi bupati yang berkuasa hingga akhir kekuasaan kolonial Belanda ini masih merupakan keturunan trah Wira Tanu Datar. Bahkan, ia merupakan keponakan dari R.A.A. Wira Tanu Datar VIII dan buyut dari R.A.A. Wira Tanu Datar VI. Dengan naiknya R.A.A. Suria Nata Atmaja sebagai bupati Cianjur berarti pula menunjukan kembalinya trah Wira Tanu Datar sebagai pemegang puncak kekuasaan Kabupaten Cianjur setelah kurang lebih selama 22 tahun sempat dijabat oleh orang di luar trah Wira Tanu Datar.

Di samping mendominasi kedudukan bupati Cianjur, trah Wira Tanu Datar juga terlihat mendominasi beberapa jabatan penting di dalam struktur politik Kabupaten Cianjur. Jabatan-jabatan patih, wedana, asisten wedana, dan penghulu, merupakan jabatan-jabatan penting yang sebagian besar dikuasai trah Wira Tanu Datar. Jabatan penting lain yang juga sering diduduki trah Wira Tanu Datar adalah kumetir penanaman kopi. Trah Wira Tanu Datar yang pernah memegang jabatan sebagai kumetir penanaman kopi, antara lain, adalah Raden Wiranagara. Trah Wira Tanu Datar yang pernah memegang jabatan wedana, yakni Wedana Pesser, adalah Raden Anhar Surianingrat. Trah Wira Tanu Datar yang pernah menjabat patih umumnya adalah mereka-mereka yang kemudian menjabat sebagai bupati Cianjur.

Di luar Kabupaten Cianjur, trah Wira Tanu Datar juga pernah memainkan peran cukup penting di tiga kabupaten lain yang ada di Priangan, yakni Sumedang, Garut, dan Sukapura. Di tiga kabupaten tersebut, tidak hanya jabatan setingkat camat dan wedana yang diduduki trah Wira Tanu Datar tetapi juga jabatan bupati. Mobilisasi lateral trah Wira Tanu Datar di Kabupaten Sumedang dimulai ketika terjadi perkawinan antara Raden Suranagara, cucu Bupati Sumedang Dalem Adipati Surianagara (1761-1765), dengan Lenggang Kusumah, cucu Bupati Cianjur

⁴⁹ ANRI, Koleksi Mikrofilm MvO Seri 2e, *Memorie van Overgave der Residentie Buitenzorg van den Aftredenden Resident van Buitenzorg*, Mr. P.M. Letterie, 8 Juni 1933, hal. 69.

⁵⁰ R.A.A. Suria Nata Atmaja naik menjadi bupati Cianjur sejak tanggal 13 Juni 1935. *Regeerings Almanak van Nederlandsch Indie, Tweede Gedeelte: Kalender en Personalie*, (Batavia: Landsdrukkerij, 1940), hal. 293.

R.A.A. Wira Tanu Datar IV (1727-1761), ketika Raden Suranagara mengasingkan diri ke Cianjur. Atas peran besar yang dimainkan R.A.A. Wira Tanu Datar VI, beberapa waktu kemudian Adipati Suranagara berhasil memangku jabatan bupati Sumedang, dengan gelar Pangeran Kusumah Dinata atau lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Kornel. Setelah Pangeran Kusumah Dinata turun dari jabatannya sebagai bupati Sumedang (1791-1828), salah seorang puteranya dari hasil perkawinannya dengan trah Wira Tanu Datar (Lenggang Kusumah), yakni Raden Ewok, naik menggantikan kedudukannya. Setelah menjadi bupati, anggota trah Wira Tanu Datar ini menggunakan gelar Adipati Kusumah Yuda. Adipati Kusumah Yuda menjadi bupati Sumedang hingga tahun 1833. Ia kemudian digantikan oleh keponakannya, Tumenggung Kusumah Ningrat alias Adipati Kusumah Dinata, bekas bupati Limbangan.

Bila di Kabupaten Sumedang, trah Wira Tanu Datar yang menjadi bupati hanya satu orang maka tidak demikian halnya dengan di Kabupaten Garut. Trah pertama Wira Tanu Datar yang menjadi bupati Garut adalah Raden Abas, yang semasa kecil diasuh oleh Bupati Sumedang Pangeran Kusumah Dinata. Sebelum menjadi bupati Garut, dengan gelar Adipati Suria Natakusumah (1837-1871), putra bungsu R.A.A. Wira Tanu Datar VI ini sempat memangku jabatan patih Limbangan dan bupati Limbangan. Raden Abas beristrikan Nyi Raden Purnama, puteri Bupati Limbangan Tumenggung Kusumah Ningrat, dan buyut Pangeran Kusumah Dinata alias Pangeran Kornel. Sepeninggal Adipati Surianata Kusumah, kedudukan bupati Garut dipegang oleh putera lelakinya, Raden Jenon. Berbeda dengan orang tuanya, sewaktu naik menjadi bupati Garut, Raden Jenon menggunakan gelar Raden Adipati Wira Tanu Datar VIII. Hal ini tampaknya dilakukan oleh Raden Jenon untuk menegaskan keberadaannya sebagai salah seorang keturunan trah Wira Tanu Datar. Kekuasaan Raden Adipati Wira Tanu Datar VIII sebagai bupati Garut dipegang hingga tahun 1916.

Kesimpulan

Wilayah politik Cianjur terbentuk ketika terjadi peralihan kekuasaan dari Mataram kepada VOC. Dalam perkembangan selanjutnya, wilayah politik yang didirikan pada tahun 1677 ini, tidak hanya mengalami penetrasi dari VOC tetapi juga mengalami penetrasi dari pemerintah kolonial Inggris dan Belanda. Tanpa bisa dihindari, selama berlangsungnya penetrasi kekuatan-kekuatan asing tersebut, banyak perubahan yang terjadi di Cianjur. Salah satu perubahan cukup fundamental yang terjadi dalam kurun waktu tersebut adalah perubahan dalam sistem politik, khususnya suprastruktur politik dan infrastruktur politik.

Transformasi sistem politik yang terjadi di Cianjur secara umum dapat dikatakan berlangsung dalam tiga periode besar; masa VOC, masa pemerintah kolonial Inggris, dan masa pemerintah kolonial Belanda. Khusus transformasi sistem politik yang

terjadi semasa pemerintah kolonial Belanda dapat dibagi lagi dalam dua bagian besar, yakni masa Cianjur sebagai ibukota Karesidenan Priangan dan masa ketika Cianjur tidak lagi menjadi ibukota Karesidenan Priangan.

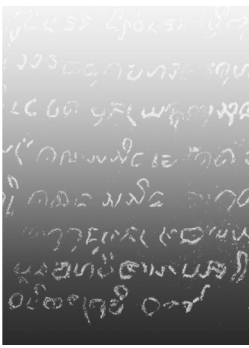
Transformasi politik yang terjadi di Cianjur selama berlangsungnya penetrasi ketiga kekuatan asing tersebut secara umum di antaranya ditandai oleh perubahan wilayah administratif dan perubahan struktur politik. Khusus perubahan wilayah administratif yang terjadi semasa Cianjur menjadi ibukota karesidenan, perubahan wilayah administratif tersebut bisa dikatakan hanya berupa penataan distrik-distrik yang ada di Kabupaten Cianjur. Pasca Cianjur tidak lagi menjadi ibukota karesidenan, di samping mengalami perubahan wilayah administratif pada tingkat distrik, Cianjur juga mengalami perubahan wilayah pada tingkat kabupaten. Selain kehilangan Afdeling Sukabumi pada tahun 1921, sejak dasawarsa keempat abad ke-20, Cianjur juga tidak lagi dimasukkan dalam wilayah Priangan tetapi dimasukkan ke dalam wilayah Buitenzorg.

Dalam abad ke-20, perubahan sistem politik di Cianjur juga ditandai oleh adanya perubahan yang cukup signifikan, yakni berdirinya sebuah suprastruktur politik baru yang bernama regentschapraad. Dewan kabupaten yang dibentuk berdasarkan staatsblad 1925 no. 387 ini, memiliki 25 anggota, yang terdiri dari 12 anggota hasil pengangkatan dan 13 anggota hasil pemilihan. Hingga Mei 1933, dari 25 anggota dewan kabupaten yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1929, tinggal 21 orang yang masih aktif menjalankan tugas. Dilihat dari latar belakang pekerjaannya, para anggota dewan yang masih aktif ini, tidak hanya berasal dari kalangan pemerintahan, seperti asisten residen, wedana, dan asisten wedana, tetapi ada pula yang berasal dari kalangan nonpemerintahan, seperti, pedagang, guru, dan pengusaha perkebunan.

Di luar perubahan-perubahan sebagaimana yang telah terungkap di atas, tidak tertutup kemungkinan masih banyak perubahan-perubahan lain yang belum terungkap. Untuk itu, jelas masih cukup terbuka peluang untuk melakukan pengamatan yang lebih mendalam terhadap komponen-komponen lainnya yang menjadi unsur sistem politik Cianjur. Melalui studi tentang transformasi sistem politik di Cianjur ini diharapkan pula dapat melahirkan studi-studi sejenis di wilayah lain atau dapat menjadi pembanding bagi studi-studi sejenis yang telah dilakukan sebelumnya sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih utuh tentang jalannya transformasi politik di berbagai wilayah di Indonesia. Sebuah perkiraan bisa kiranya dikedepankan bahwa dalam hal transformasi politik yang terjadi semasa berlangsungnya penetrasi asing, besar kemungkinan, betapapun kecilnya, setiap daerah akan memiliki keunikan-keunikan tersendiri yang akan membedakannya dengan daerah lainnya.

DAFTAR SUMBER

- ANRI, Koleksi Arsip Priangan, Algemeen Verslag nopens den Staat der Preanger Regentschappen loopende over den jare 1830 den jare 1831 en meer specialijk over den jare 1832, Bundel No. 2/3.
- ANRI, Koleksi Arsip Priangan, Politiek Verslag 1856, Bundel 1/2.
- ANRI, Koleksi Arsip Priangan, Politiek Verslag 1864, Bundel No. 1/10.
- ANRI, Koleksi Arsip Priangan, Politiek Verslag 1872, Bundel No. 1/18.
- ANRI, Koleksi Arsip Priangan, Politiek Verslag 1873, Bundel No. 1/19.
- ANRI, Koleksi Mikrofilm MvO Seri 2e, Memorie van Overgave der Residentie Buitenzorg van den Aftredenden Residen van Buitenzorg, Mr. P.M. Letterie, 8 Juni 1933.
- Almanak en Naamregister van Nederlandsch Indie voor 1864, Batavia: Ter Lands Drukkerij.
- Bayu Surianingrat, Sajarah Cianjur Sareng Raden Aria Wira Tanu Dalem Cikundul Cianjur, Jakarta: Rukun Warga Cianjur, 1982.
- de Haan, F., Priangan; De Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur Tot 1811, Tweede Deel, Batavia: G. Kolff & Co., 1911.
- Edi S. Ekadjati, Kebudayaan Sunda (Suatu Pendekatan Sejarah), Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
- Klein, Jacob Wouter de, Het Preangerstelsel (1677-1871) en Zijn Nawerking, Proefschrift, Leiden: 's-Gravenhage, 1931.
- Pijper, G.F., Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950, Jakarta: UI-Press, 1984.
- Pronk, L., De bestuursreorganisatie-Mullemeister op Java en Madoera en haar beteekenis voor het heden, Leiden: M. Dubbeldeman, 1929.
- R.A.A. Soeria Nata Atmadja, De Regenten-Positie, Bandoeng: Uitgave A.C. Nix & Co., 1940.
- Rees, Otto van, Overzicht van de Geschiedenis der Preanger-Regentschappen, Batavia, 1880.
- Regeerings Almanak van Nederlandsch Indie, Tweede Gedeelte: Kalender en Personalía, Batavia: Landsdrukkerij, 1906.
- Regeerings Almanak van Nederlandsch Indie, Tweede Gedeelte: Kalender en Personalía, Batavia: Landsdrukkerij, 1940.
- Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium, Jilid I, Jakarta: Gramedia, 1987.
- Schrieke, B.J.O., Penguasa-penguasa Pribumi, Jakarta: Bhratara, 1974.
- Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa, Jogjakarta, 1953.
- Sutherland, Heather, Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi, Terjemahan oleh Sunarto, Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1870, No. 124.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1882, No. 252.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1882, No. 253.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1883, No. 169.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1913, No. 459.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1925, No. 387.



Epilog

Sunda adalah sebuah lautan luas. Kedalaman lautan Sunda terjepi dari panjangnya rentang waktu sejarah yang melingkupi Sunda. Geliat Sunda dimulai sejak masa prasejarah. Berbagai tinggalan dari masa prasejarah di tatar Sunda menjadi bukti tak terbantahkan tentang dalamnya lautan Sunda. Sementara beragamnya peristiwa yang terjadi di tatar Sunda, seperti peristiwa politik, budaya, agama, ekonomi, sosial, dan seni, menjadi bukti luasnya lautan Sunda. Demikian beragamnya peristiwa yang terjadi di tatar Sunda menjadikan lautan Sunda hampir tanpa tepi.

Dalam dan luasnya lautan Sunda menjadikan lautan Sunda akan senantiasa mampu menyajikan bahan untuk dikaji dan direkonstruksi. Apa yang telah tersaji dalam tigabelas tulisan yang terdapat dalam buku ini barulah sebagian yang sangat kecil sekali yang terdapat dalam lautan Sunda. Masih banyak kekayaan lain dalam lautan Sunda yang belum terungkap dan meminta untuk diungkapkan sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi masa kini dan masa yang akan datang.

Lautan Sunda yang demikian luas berisi banyak sumber yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian, baik itu sumber tertulis, sumber benda, sumber lisan, maupun sumber visual. Dari keempat jenis sumber tersebut, sumber tertulis merupakan sumber utama yang digunakan ketigabelas tulisan dalam merekonstruksi Sunda. Kedudukan sumber tertulis sebagai sumber utama yang dijadikan media dalam merekonstruksi Sunda hampir ditemukan pada semua kajian atau tulisan tentang Sunda. Kondisi ini tentu bisa dipahami mengingat sumber tertulis menjadi salah satu kekayaan penting lautan Sunda. Masih banyak peristiwa dalam lautan Sunda yang masih tersimpan dalam berbagai sumber tertulis yang belum terungkap. Bahkan, beberapa di antaranya, seperti yang terdapat dalam berbagai prasasti dan naskah-naskah kuno hingga kini tidak sedikit yang belum dapat dibaca sama sekali sehingga secara otomatis belum dapat dijadikan bahan rekonstruksi Sunda.

Rekonstruksi Sunda yang terdapat dalam lautan Sunda yang demikian luas juga banyak diungkap melalui sumber benda. Berbagai situs prasejarah yang ditemukan di berbagai wilayah di tatar Sunda, seperti Cianjur (Gunung Padang, Pasir Pogor, Bukit

Tongtu, Bukit Kasur, Gunung Putri, Lembah Duhur, Pasir Manggu, dan Pasir Gada), Sukabumi (Panggyungan, Tugu Gede, Ciarca, Salak Datar, dan Batu Jolang), Bandung, Garut (Cimareme), Kuningan (Cipari, Cigadung, Cangkuang, Cibuntu, Hululingga, Darmaloka, Batu Tilu, Panyusupan, Cibubur, Balongkagungan, dan Nagog), dan Ciamis (Karangkamulyan), merupakan tinggalan-tinggalan sejarah berwujud benda yang masih tetap menantang untuk diungkap lebih lanjut. Demikian pula berbagai tinggalan sejarah berwujud benda lainnya, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Dari berbagai tinggalan sejarah berwujud benda tersebut dapat dipetakan tentang masa prasejarah Sunda ataupun berbagai peristiwa penting yang terjadi pada era sejarah. Sementara sumber lisan sebagai kekayaan lautan Sunda dapat dikatakan belum banyak digunakan. Masih banyak kekayaan sumber lisan yang dibiarkan begitu saja. Padahal, sumber lisan sebagai kekayaan lautan Sunda dapat membantu menyajikan berbagai peristiwa di tatar Sunda yang terjadi sesudah kemerdekaan, secara lebih mendalam dan membumi sehingga mampu mengungkap lapis bawah peristiwa (*history from below*) yang terekam dalam lautan Sunda. Keterlambatan mengelola sumber lisan sama artinya dengan menghilangkan sumber lisan itu sendiri. Bila belum terkelola dan masih tersimpan dalam memori pemiliknya, sumber lisan dibatasi oleh usia. Sumber lisan ada hanya sepanjang pemiliknya masih ada atau masih hidup.

Sumber visual yang menjadi kekayaan selanjutnya lautan Sunda, keadaannya jauh lebih memprihatinkan lagi. Hampir tidak ada orang yang menyentuh dan menggunakannya sebagai bahan rekonstruksi Sunda. Akibatnya, sumber visual yang menjadi kekayaan lautan Sunda banyak terdampar begitu saja di dasar lautan Sunda dan cenderung terlupakan serta dianggap tidak penting sebagai media rekonstruksi Sunda. Padahal banyak hal menarik yang dapat diungkap dari dalam lautan Sunda melalui penggunaan sumber visual.

Melihat realitas tersebut, sudah saatnya rekonstruksi Sunda dilakukan dengan memanfaatkan sumber visual sebagai bahan kajian. Melalui pemanfaatan sumber visual yang terdapat dalam lautan Sunda, hasil rekonstruksi Sunda akan menjadi semakin menarik dan semakin berwarna. Rekonstruksi tidak hanya berbasiskan interpretasi atas sumber tertulis tetapi akan diperkaya dengan interpretasi yang berbasiskan sumber visual. *Zeitgeist* yang terdapat dalam sumber visual bisa jadi akan lebih terekam dibandingkan *zeitgeist* yang terdapat dalam sumber tertulis.

Beberapa kemungkinan rekonstruksi Sunda melalui sumber visual misalnya dapat mengungkap tentang karya-karya visual, baik lukisan, foto, maupun film yang menyajikan Sunda sebagai objek visual. Para penggagas atau pembuat karya-karya visual seputar Sunda tentunya juga dapat diungkap melalui sumber visual. Proses pembuatan karya visual serta teknologi yang digunakan dapat juga digunakan untuk mengungkap Sunda. Tegasnya, pengungkapan Sunda melalui

sumber visual dapat membuka ruang yang semakin luas dalam mengungkap peristiwa yang masih banyak tersimpan dalam lautan Sunda.

Belum tersentuhnya sumber visual sebagai bahan rekonstruksi Sunda banyak faktor yang menyebabkannya. Di samping masih banyaknya sumber tertulis yang dapat dijadikan bahan rekonstruksi Sunda, keterpinggiran sumber visual juga disebabkan oleh masih minimnya pemahaman tentang sumber visual serta keterbatasan pengetahuan dalam mengelola sumber visual sebagai bahan rekonstruksi Sunda. Secara konseptual, sumber visual, tentunya termasuk yang terdapat dalam lautan Sunda, bisa didekati dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Dalam arti luas sumber visual mencakup semua sumber tertulis dan sumber benda. Namun dalam pengertian sempit, sumber visual hanya mencakup sumber-sumber berbentuk gambar, baik bergerak maupun tidak bergerak, seperti foto, lukisan, dan film. Dengan pengertian tersebut, lautan Sunda banyak mewariskan sumber visual, baik dari masa sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan, seperti, masjid, gereja, makam, rumah, kantor pemerintah, kantor pos, stasiun kereta api, lapangan terbang, penginapan, pasar, pertokoan, bangunan perkebunan, gedung pertemuan, hingga meja, kursi, dan peralatan perkantoran. Dalam pengertian sempit, lautan Sunda juga kaya dengan sumber visual berupa gambar, baik yang berasal dari masa sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan. Karya-karya visual, baik berupa foto, lukisan, maupun film, merupakan sebagian kekayaan lautan Sunda yang belum tersentuh sama sekali untuk dijadikan bahan rekonstruksi. Foto-foto Sunda dari era sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan akan banyak berceritera tentang Sunda bila diungkap sebagai sumber sejarah. Dari foto bisa dipetakan banyak hal, seperti realitas kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Sunda pada masa tersebut. Berbagai model, baik model pakaian, model sepatu, gaya rambut, model rumah, model kendaraan, hingga model mebelair dapat dipetakan lebih jelas dibanding bila menggunakan sumber tertulis. Dari foto-foto juga bisa dipetakan tentang perkembangan teknologi fotografi yang masuk ke tatar Sunda, persentuhan dan pergumulan orang Sunda dengan dunia fotografi, termasuk perkembangan penggunaan kertas sebagai media foto.

Lukisan juga bila diungkap dengan cermat berbicara banyak hal di dalamnya. Objek lukisan misalnya seringkali memperlihatkan *zeitgeist* yang tengah berkembang di tengah masyarakat atau trend seni lukis yang tengah berkembang. Lukisan juga seringkali menjadi representasi atau saksi dari sebuah peristiwa. Bahkan pada beberapa kasus, lukisan juga sering dijadikan media untuk memperkuat mitos tertentu. Lukisan tentang tokoh legendaris pantai Selatan, Nyi Loro Kidul, atau lukisan tentang Prabu Siliwangi, merupakan sebagian kecil contoh lukisan dalam lautan Sunda yang layak untuk diungkap. Bagaimana proses pembuatan lukisan? Atmosfir apa yang berkembang saat lukisan dibuat? Apa

motivasi yang mendasari sang pelukis membuat lukisan tersebut? Bagaimana respon masyarakat terhadap lukisan? Bagaimana posisi lukisan tersebut di tengah arus besar seni lukis Indonesia pada masa itu? Bagaimanakah perkembangan penggunaan warna yang dapat dilihat dari lukisan tersebut?, merupakan sebagian pertanyaan yang dapat diajukan manakala lukisan menjadi objek kajian dalam merekonstruksi Sunda.

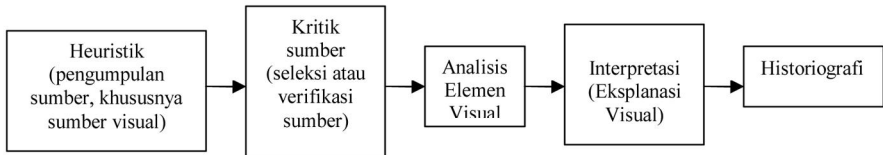
Jelekong sebagai sentra industri lukisan juga menarik untuk diungkap. Bagaimana proses perkembangan Jelekong menjadi sentra industri lukisan? Mengapa Jelekong yang terpilih oleh sejarah sebagai tempat sentra industri lukisan? Bagaimana latar belakang pelukis yang turut mewarnai industri lukisan jelekong? Bagaimanakah proses pembuatan lukisan di sentra industri lukisan Jelekong? Bagaimana perkembangan objek lukisan Jelekong? Mengapa objek lukisan di sentra industri lukisan Jelekong tidak mengalami perkembangan yang dinamis? Bagaimanakah perkembangan penggunaan warna pada lukisan-lukisan yang terdapat di sentra industri lukisan Jelekong? Bagaimanakah pemasaran lukisan di sentra industri lukisan Jelekong?, adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan untuk merekonstruksi sentra industri lukisan Jelekong sebagai kekayaan sumber visual yang terdapat di lautan Sunda.

Lambang-lambang yang terdapat di tatar Sunda juga menjadi kekayaan lautan Sunda yang sangat layak untuk diungkap. Lambang-lambang pemerintahan, baik propinsi, kota, maupun kabupaten, serta lambang perguruan tinggi yang ada di tatar Sunda, merupakan sebagian kecil saja dari sekian banyak lambang yang menjadi kekayaan lautan Sunda. Pertanyaan-pertanyaan seputar proses pembuatan lambang hingga perubahan lambang, makna lambang hingga elemen visual yang digunakan dalam lambang menjadi pertanyaan-pertanyaan menarik yang dapat diangkat ke permukaan manakala lambang dijadikan sebagai objek kajian rekonstruksi Sunda. Pertanyaan seputar para pembuat lambang juga menjadi pertanyaan yang tidak kalah menarik untuk diungkap karena dapat memetakan *zeitgeist* yang menyertai proses pembuatan lambang. Pertanyaan seputar lambang ITB yang menggunakan ganesha dan lambang Unpad yang menggunakan kujang, bila diungkap secara komparatif bisa dipastikan akan menghasilkan temuan-temuan menarik seputar atmosfer sosial, budaya, dan politik, yang menyertai kelahiran dan perkembangan kedua perguruan tinggi terdepan di tatar Sunda, yang juga menjadi kekayaan lautan Sunda.

Selanjutnya, berbeda dengan metode yang digunakan dalam mengungkap Sunda melalui sumber tertulis, benda, maupun lisan, pengungkapan Sunda secara diakronis melalui penggunaan sumber visual tentu perlu menggunakan metode tersendiri, yakni metode penelitian sejarah visual. Tahapan penelitian melalui

metode penelitian sejarah visual pada dasarnya secara umum sama dengan metode penelitian sejarah. Hanya dalam metode penelitian sejarah visual ditambahkan satu tahapan kerja baru, yakni tahapan analisis visual. Analisis visual ini di antaranya dapat dilakukan melalui metode analisis isi (*content analysis*).

Salah satu model penulisan yang dapat digunakan dalam mengungkap Sunda



Gambar 1:

Skema metode penelitian sejarah visual. Sumber: Dienaputra (2011), *Transformasi Visual Lambang Partai-partai Politik di Indonesia (1955-2004)*, Disertasi, Bandung, Institut Teknologi Bandung, 290.

melalui penggunaan sumber visual adalah karya disertasi yang mengungkap tentang *Transformasi Visual Lambang Partai-partai Politik (1955-2004)*. Kajian tentang partai-partai politik di Indonesia dapat dengan mudah diketemukan karena begitu banyaknya karya yang telah dihasilkan namun kajian tentang partai politik yang berbasiskan pada penggunaan sumber visual bisa jadi masih dapat dihitung dengan jari. Terlebih yang membahasnya melalui pendekatan diakronis. Oleh karenanya, kajian tentang partai politik yang berbasiskan pada lambang partai-partai politik tidak saja mampu mendobrak kebisan dalam memanfaatkan sumber visual tetapi yang lebih penting dari itu, mampu mengungkap hal baru tentang perjalanan partai politik di Indonesia. Melalui penggunaan sumber visual dalam kajian tersebut, misalnya dapat diungkap tentang bagaimana dasarnya pengaruh sistem politik dan sistem budaya terhadap partai-partai politik dalam mengekspresikan kebutuhan visualnya ke dalam sebuah lambang. Kajian tersebut pada akhirnya dapat mengungkap pula tentang persepsi visual seputar bintang. Bintang yang selama ini sering diidentikan dengan simbol Islam, dari fakta visual yang ada ternyata bintang bukanlah merupakan representasi partai politik berasaskan Islam atau kekuatan Islam. Bintang baru dapat dianggap sebagai representasi partai politik berasaskan Islam atau kekuatan Islam hanya manakala bintang digunakan secara bersama-sama dengan bulan. Dengan kata lain, secara visual, bintang tidak dapat dikatakan sebagai simbol kekuatan Islam. Simbol kekuatan Islam adalah bintang dan bulan atau bulan bintang.

Di samping menghasilkan fakta visual yang berbeda dengan persepsi visual yang selama ini berkembang di tengah masyarakat, kajian tentang transformasi visual lambang partai-partai politik juga menghasilkan fakta visual yang sama

dengan persepsi visual masyarakat. Warna hijau yang selama ini dipresepsikan sebagai identitas kekuatan Islam, berdasarkan fakta visual memperlihatkan sebuah kesesuaian. Partai-partai politik berasaskan Islam dapat dikatakan hampir seluruhnya menggunakan warna hijau sebagai warna dasar lambang. Warna hijau pun pada akhirnya selalu menjadi warna pilihan utama yang digunakan sebagai warna dasar lambang oleh partai-partai politik berasaskan Islam.

Temuan-temuan yang diperoleh saat mengungkap transformasi visual lambang partai-partai politik pada dasarnya juga dapat terjadi saat mengungkap Sunda melalui pemanfaatan sumber visual. Akan banyak temuan baru yang dapat terungkap. Temuan-temuan tersebut pada akhirnya akan memperkaya bangunan rekonstruksi tentang Sunda. Bila Sunda selama ini dikenal sebagai etnis terdepan yang mengenal tulisan atau mengalami *revolution of knowledge*, apakah Sunda juga menjadi etnis pertama yang mengenal karya visual atau bahkan memproduksi karya visual, khususnya karya visual dalam pengertian sempit?. Bila tidak, kapankah Sunda mulai mewariskan sumber visual berupa lukisan, foto, dan film? Bagaimanakah proses orang Sunda mengenal karya-karya visual? Melalui tangan-tangan asing atau hasil produksi sendiri? Bagaimana pula teknologi informasi mendekatkan orang Sunda dengan sumber visual atau karya visual? Bagaimana pula peran kolonial dalam menjadikan Sunda sebagai objek visual? Adakah upaya kolonial untuk menjadikan Sunda secara visual sebagai alat propaganda kolonial?

Daftar pertanyaan yang lebih panjang tentu dapat disusun untuk mengetahui kedekatan Sunda dengan sumber visual. Kesemuanya akan sangat tergantung pada sumber visual yang dijadikan sebagai objek kajian serta fokus kajian itu sendiri. Pertanyaan apapun yang kemudian diangkat ke permukaan kesemuanya akan bermuara pada satu kesimpulan, bahwa sumber visual yang menjadi kekayaan lautan Sunda banyak mengungkap hal baru yang tidak dapat diungkap oleh sumber tertulis. Kajian Sunda berbasiskan sumber visual pun tentunya akan dapat terekonstruksi secara konprehensif bila kemudian digunakan pendekatan ilmu-ilmu lain dalam proses rekonstruksi. Sesuai dengan jenis sumber, pendekatan ilmu seni rupa dan desain perlu ditempatkan pada posisi pertama sebagai media analisis sumber visual. Sementara untuk memperoleh eksplanasi seputar *zeitgeist* yang menyertai karya-karya visual, maka pendekatan kebudayaan, pendekatan sosial, pendekatan politik, dan pendekatan ekonomi dapat dijadikan alternatif pilihan pendekatan lainnya.

Selamat mengolah dan mengelola sumber visual sebagai bahan kajian rekonstruksi Sunda! Selamat menggunakan metode penelitian sejarah visual dalam merekonstruksi kekayaan sumber visual yang terdapat dalam lautan Sunda! Semoga!

